



Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

RPKD

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL



2024 - 2026

BAPPERIDA
2024



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Wilayah Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
9. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut TKPK kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Profil Kemiskinan Daerah

BAB IV : Prioritas Program

BAB V : Lokasi Prioritas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal.
- (2). Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan RPKD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal , 26 Juni 2024

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

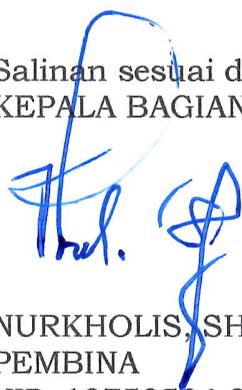
Diundangkan di Panyabungan
Pada tanggal , 26 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

ALAMULHAQ DAULAY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL 2024
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



NURKHOLIS, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19750504 200312 1 004



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas ridho-Nya, sehingga penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Dokumen RPKD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Permendagri Nomor 53 tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota/Kabupaten, yang memuat rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen RPKD Kabupaten Mandailing Natal ini, menjadi pedoman dalam kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal, yang berjalan dengan prinsip kolaborasi dan terpadu berdasarkan data dan informasi yang valid dan terus terbaharui. Dokumen menjadi peta jalan dasar pedoman perencanaan khusus penanggulangan kemiskinan bagi pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dokumen ini akan terus menerus di *update*/diperbaharui dan disesuaikan dengan perubahan regulasi yang berlaku serta ketersediaan data yang dinamis sebagai bentuk perwujudan kebijakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan RPKD ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam membangun masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana yang tertuang didalam visi, yaitu ***"Akselerasi Pembangunan Menuju Mandailing Natal yang Mandiri, Kompetitif, Berkeadilan dan Bermartabat"***.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Panyabungan, 26 Juni 2024

BUPATI MANDAILING NATAL,



H. MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Maksud Dan Tujuan	I - 2
1.2.1 Maksud	I - 2
1.2.2 Tujuan	I - 2
1.3 Dasar Hukum	I - 3
1.4 Sistematika Penulisan	I - 5
BAB II KONDISI UMUM DAERAH	
2.1 Aspek Geografi, Astronomis dan Demografi	II - 1
2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah	II - 1
2.1.2 Kondisi Topografi	II - 3
2.1.3 Kondisi Klimatologi	II - 4
2.1.4 Kondisi Geologi	II - 4
2.1.5 Kondisi Hidrologi	II - 5
2.1.6 Penggunaan Lahan	II - 6
2.1.7 Demografi	II - 8
2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah	II - 12
2.1.9 Wilayah Rawan Bencana	II - 15
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 18
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 18
2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	II - 18
2.2.1.2 Laju Inflasi	II - 21
2.2.1.3 Gini Ratio	II - 22
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II - 23
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia	II - 23
2.2.2.2 Persentase Penduduk Miskin	II - 25
2.2.2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	II - 26
2.2.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II - 27
2.2.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	II - 28
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II - 30
2.3.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar	II - 30
2.3.1.1 Urusan Pendidikan	II - 30
2.3.1.2 Urusan Kesehatan	II - 35
2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II - 49
2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II - 50
2.3.1.5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan	II - 51



	Masyarakat.		
2.3.1.6	Urusan Sosial	II -	54
2.3.2	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.	II -	58
2.3.2.1	Urusan Tenaga Kerja	II -	58
2.3.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II -	60
2.3.2.3	Urusan Pangan	II -	61
2.3.2.4	Urusan Lingkungan Hidup	II -	71
2.3.2.5	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II -	72
2.3.2.6	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II -	74
2.3.2.7	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II -	74
2.3.2.8	Urusan Perhubungan	II -	76
2.3.2.9	Urusan Komunikasi dan Informatika	II -	77
2.3.2.10	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	II -	78
2.3.2.11	Urusan Perpustakaan	II -	79
2.3.3	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan	II -	81
2.3.3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan	II -	81
2.3.3.2	Urusan Pariwisata	II -	83
2.3.3.3	Urusan Pertanian	II -	85
2.3.3.4	Urusan Perdagangan	II -	88
2.3.3.5	Urusan Perindustrian	II -	89
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II -	89
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II -	89
2.4.2	Fokus Wilayah/Infrastruktur	II -	92
2.4.3	Fokus Sumber Daya Manusia	II -	93
BAB III	PROFIL KEMISKINAN DAERAH		
3.1.	Analisis Profil Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal	III -	1
3.2	Kondisi Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal	III -	3
3.2.1.	Kondisi Kemiskinan Makro	III -	4
3.2.2	Kemiskinan Ekstrem	III -	7
3.4	Kondisi Masyarakat Rentan Miskin	III -	14
3.5	Analisis Karakteristik Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal	III -	18
3.5.1.	Analisis Karakteristik Kemiskinan Konsumsi	III -	18
3.5.1.1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	III -	18
3.5.1.2.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	III -	19
3.5.1.3.	Garis Kemiskinan (Rp)	III -	20
3.5.1.4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	III -	21
3.5.1.5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	III -	22
3.5.2.	Analisis Karakteristik Masalah Pendidikan	III -	23
3.5.2.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	III -	24
3.5.2.2.	Angka Partisipasi Murni (APM)	III -	25
3.5.2.3.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	III -	28
3.5.2.4.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	III -	29
3.5.3.	Analisis Karakteristik Masalah Kesehatan	III -	31
3.5.3.1.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	III -	32
3.5.3.2.	Angka Kematian Bayi	III -	33
3.5.3.3.	Angka Harapan Hidup (AHH)	III -	34
3.5.3.4.	Prevalensi Stunting	III -	36
3.5.4.	Ekonomi	III -	40



3.5.4.1.	Pertumbuhan Ekonomi	III	-	40
3.5.4.2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III	-	42
3.5.4.3.	Gini Ratio	III	-	43
3.5.5.	Ketenagakerjaan	III	-	44
3.5.5.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	III	-	45
3.5.5.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	III	-	46
3.5.6.	Infrastruktur Dasar	III	-	48
3.5.6.1.	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau	III	-	49
3.5.6.2.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak	III	-	49
3.5.6.3.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak	III	-	51
3.5.6.4.	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik	III	-	53
3.5.6.5	Isu Strategis Kemiskinan dalam Bidang Lainnya	III	-	56
BAB IV	PRIORITAS PROGRAM			
4.1	Penetapan Isu Strategis Kabupaten Mandailing Natal	IV	-	1
4.2	Analisis Akar Masalah (Determinan) Kemiskinan	IV	-	7
4.2.1	Pengembangan Logika Program (TOC)	IV	-	7
4.2.2	Logika Program untuk Intervensi Kemiskinan	IV	-	7
4.2.1.1	Bidang Pendidikan	IV	-	10
4.2.1.2	Bidang Kesehatan	IV	-	15
4.2.1.3	Bidang Infrastruktur Dasar	IV	-	19
4.2.1.4	Bidang Ketahanan Pangan	IV	-	24
4.2.1.5	Bidang Ketenagakerjaan	IV	-	27
4.2.1.6	Bidang Sosial	IV	-	32
4.2.2	Analisis Keterkaitan (Causal Of Attribution)	IV	-	35
4.2.2.1	Bidang Pendidikan	IV	-	35
4.2.2.2	Bidang Kesehatan	IV	-	35
4.2.2.3	Bidang Infrastruktur Dasar	IV	-	36
4.2.2.4	Bidang Ketahanan Pangan	IV	-	36
4.2.2.5	Bidang Ketenagakerjaan	IV	-	37
4.2.2.6	Bidang Sosial	IV	-	37
4.3	Analisis Kondisi Fiskal	IV	-	38
4.3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	IV	-	38
4.3.2	Kinerja Pelaksanaan APBD	IV	-	38
4.3.2.1	Pendapatan Daerah	IV	-	38
4.3.2.2	Belanja Daerah	IV	-	41
4.3.2.3	Pembiayaan Daerah	IV	-	42
4.3.3	Neraca Daerah	IV	-	43
4.3.4	Analisa Fiskal	IV	-	46
4.3.4.1	Pendapatan Daerah Per Kapita	IV	-	46
4.3.4.2	Kemandirian Keuangan Daerah	IV	-	46
4.3.4.3	Ruang Fiskal	IV	-	47
4.3.4.4	Analisis Pembiayaan	IV	-	47
4.3.5	Kerangka Pendanaan	IV	-	51
4.3.5.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	IV	-	52
4.3.5.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	IV	-	55
4.4	Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi	IV	-	56
4.4.1	Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah	IV	-	56



4.5	Strategi dan Arah Kebijakan Penurunan Kemiskinan Ekstrem	IV - 59
BAB V	LOKASI PRIORITAS	
5.1	Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	V - 1
5.1.1.	Kuadran wilayah prioritas persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dan persentase keluarga desil terhadap 40% P3KE	V - 1
5.1.2.	Kuadran wilayah prioritas jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah keluarga desil terhadap 40% P3KE	V - 3
5.1.3.	Kuadran wilayah prioritas jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan jumlah kepala keluarga perempuan 45 tahun ke atas	V - 4
5.1.4	Kuadran wilayah prioritas jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah penduduk lansia usia 70 tahun ke atas	V - 5
5.2.	Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Pendidikan	V - 6
5.2.1.	Kuadran wilayah prioritas jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah	V - 6
5.2.2.	Kuadran wilayah prioritas jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah	V - 7
5.3	Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Kesehatan	V - 8
5.3.1.	Wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan intervensi jumlah kasus kematian ibu melahirkan	V - 8
5.3.2.	Kuadran wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan intervensi jumlah kasus kematian bayi	V - 13
5.3.3.	Kuadran wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan intervensi jumlah kasus kematian balita	V - 15
5.3.4.	Kuadran wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan jumlah balita stunting	V - 18
5.3.5	Kuadran wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan cakupan rumah tangga ber-PBHS	V - 19
5.3.6	Kuadran wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan cakupan peserta KB aktif	V - 20
5.3.7.	Kuadran wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	V - 21
5.4.	Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Ketenagakerjaan	V - 22
5.4.1.	Kuadran wilayah prioritas persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan TPT menurut kecamatan	
5.4.2.	Kuadran wilayah prioritas persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut kecamatan	V - 23
5.4.3.	Kuadran wilayah prioritas persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan penduduk usia 15-59 tahun tidak bekerja	V - 24
5.4.4.	Kuadran wilayah prioritas persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan penduduk usia 60 tahun ke atas tidak bekerja	V - 25



5.5	Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Infrastruktur Dasar	V - 26
5.5.1.	Kuadran wilayah prioritas persentase keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE dan penduduk 40% P3KE berdasarkan kepemilikan rumah milik sendiri	V - 26
5.5.2.	Kuadran wilayah prioritas persentase keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah keluarga berdasarkan jamban bersama/umum	V - 27
5.5.3.	Kuadran wilayah prioritas persentase keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE dan 40% penduduk P3KE dengan sumber air minum tidak terlindungi	V - 28
5.5.4.	Kuadran wilayah prioritas keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE dan 40% penduduk P3KE sumber penerangan bukan listrik	V - 29
5.6.	Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Bidang Strategis Lainnya	V - 30
5.6.1.	Kuadran wilayah prioritas keluarga 40% P3KE dan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (KK)	V - 30
5.6.2.	Kuadran wilayah prioritas keluarga 40% P3KE dan jumlah kepala keluarga bekerja sebagai petani	V - 31
5.6.3.	Kuadran wilayah prioritas keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan jumlah kepala keluarga bekerja pekerja lepas	V - 32
5.6.4.	Kuadran wilayah prioritas keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan jumlah kepala keluarga bekerja pekerja swasta	V - 33
5.6.5.	Kuadran wilayah prioritas keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan jumlah kepala keluarga bekerja pedagang	V - 34



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Administrasi Kabupaten Mandailing Natal	II - 2
Tabel 2.2	Topografi Kabupaten Mandailing Natal	II - 3
Tabel 2.3	Kondisi Sungai Utama di Kabupaten Mandailing Natal	II - 6
Tabel 2.4	Luas Tutupan Lahan di Kabupaten Mandailing Natal Periode Tahun 2008- 2018	II - 7
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal	II - 10
Tabel 2.6	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, 2022	II - 11
Tabel 2.7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2019-2022	II - 20
Tabel 2.8	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2019-2022	II - 20
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2019-2022	II - 21
Tabel 2.10	IPM Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II - 24
Tabel 2.11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022	II - 28
Tabel 2.12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022	II - 29
Tabel 2.13	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, 2018-2021 di Kabupaten Mandailing Natal.	II - 31
Tabel 2.14	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2022	II - 31
Tabel 2.15	Jumlah Sekolah, Rasio Guru dan Murid 2022/2023 di Kabupaten Mandailing Natal.	II - 32
Tabel 2.16	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Mandailing Natal dan Sumatera Utara, 2018-2022	II - 33
Tabel 2.17	Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II - 35
Tabel 2.18	Prevalensi Stunting Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2022	II - 41
Tabel 2.19	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2022	II - 41
Tabel 2.20	Anggaran PBI Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024	II - 43
Tabel 2.21	Capaian SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020-2022	II - 44
Tabel 2.22	Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II - 45
Tabel 2.23	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II - 49
Tabel 2.24	Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II - 50
Tabel 2.25	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2022	II - 50
Tabel 2.26	Tabel 2. 26 Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II - 51
Tabel 2.27	Capaian SPM Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten	II - 52



	Mandailing Natal Tahun 2019-2022		
Tabel 2.28	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2022	II -	52
Tabel 2.29	Capaian SPM Bidang Urusan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II -	54
Tabel 2.30	Tabel Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2022	II -	55
Tabel 2.31	Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II -	57
Tabel 2.32	Hasil Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II -	58
Tabel 2.33	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II -	60
Tabel 2.34	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II -	61
Tabel 2.35	Jumlah Produksi, Kebutuhan dan Surplus Beras di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2022.	II -	63
Tabel 2.36	Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2022.	II -	64
Tabel 2.37	Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022.	II -	65
Tabel 2.38	Ketersediaan Pangan Sumber Pangan Nabati dan Hewani Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022.	II -	66
Tabel 2.39	Jumlah Konsumsi dan Angka Kecukupan Energi (AKE) Perkapita Per Hari Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022.	II -	67
Tabel 2.40	Desa Rawan Pangan Prioritas 1 di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022.	II -	70
Tabel 2.41	Desa Paling Tahan Pangan (DTP) Prioritas 6 Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022	II -	71
Tabel 2.42	Capaian Indikator Bidang Urusan Kinerja Lingkungan Hidup pada Tahun 2019-2022	II -	72
Tabel 2.43	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2022	II -	72
Tabel 2.44	Tabel Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II -	74
Tabel 2.45	Tabel Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II -	74
Tabel 2.46	Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022	II -	76
Tabel 2.47	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II -	77
Tabel 2.48	Capaian Indikator Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022	II -	79
Tabel 2.49	Capaian Indikator Bidang Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022	II -	79
Tabel 2.50	Capaian Indikator Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022	II -	81
Tabel 2.51	Capaian Indikator Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022	II -	83
Tabel 2.52	Capaian Indikator Bidang Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022	II -	85
Tabel 2.53	Capaian Indikator Bidang Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022	II -	98
Tabel 2.54	Capaian Indikator Bidang Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah	II -	89



	Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022		
Tabel 2.55	Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Kabupaten Mandailing Natal (rupiah/kapita/bulan) Tahun 2019-2022	II -	89
Tabel 2.56	Pembentukan Modal Tetap bruto (ADHK dan ADHB) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2022	II -	90
Tabel 2.57	Indeks Resiko Bencana Kabuapten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II -	91
Tabel 2.58	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2019-2022	II -	93
Tabel 2.59	Rasio Ketergantungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II -	94
Tabel 2.61	Rasio Ketergantungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II -	104
Tabel 3.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Mandailing Natal dan Nasional 2018-2022	III -	4
Tabel 3.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Desil 1 yang terdaftar di P3KE Tahun 2022	III -	5
Tabel 3.3	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Mandailing Natal dan Nasional 2018-2022	III -	6
Tabel 3.4	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2022	III -	8
Tabel 3.5	Persentase Penduduk yang berada di Persentil 1 dan 2 Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022	III -	9
Tabel 3.6	Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem, Miskin dan Rentan Miskin (Desil 1-3) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022	III -	15
Tabel 3.7	Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas Buang Air Besar berdasarkan data P3KE Tahun 2022	III -	50
Tabel 3.8	Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum layak berdasarkan data P3KE Tahun 2022	III -	52
Tabel 3.9	Jumlah rumah tangga non listrik berdasarkan data P3KE Tahun 2022	III -	54
Tabel 4.1	Sasaran Akhir Bidang Pendidikan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2026	IV -	11
Tabel 4.2	Sasaran Akhir Bidang Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2026	IV -	15
Tabel 4.3	Sasaran Akhir Bidang Infrastruktur Dasar Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2026	IV -	20
Tabel 4.4	Sasaran Akhir Bidang Ketahanan Pangan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2026	IV -	24
Tabel 4.5	Sasaran Akhir Bidang Ketenagakerjaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2026	IV -	28
Tabel 4.6	Sasaran Akhir Bidang Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2026	IV -	32
Tabel 4.7	Analisis Keterkaitan Bidang Pendidikan (Causal Of Attribution)	IV -	35
Tabel 4.8	Analisis Keterkaitan Bidang Kesehatan (Causal Of Attribution)	IV -	35
Tabel 4.9	Analisis Keterkaitan Bidang Infrastruktur Dasar (Causal Of Attribution)	IV -	36
Tabel 4.10	Analisis Keterkaitan Bidang Ketahanan Pangan (Causal Of Attribution)	IV -	36
Tabel 4.11	Analisis Keterkaitan Bidang Ketenagakerjaan (Causal Of Attribution)	IV -	37
Tabel 4.12	Analisis Keterkaitan Bidang Sosial (Causal Of Attribution)	IV -	37
Tabel 4.13	Realisasi Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2020	IV -	40
Tabel 4.14	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2020	IV -	42
Tabel 4.15	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2020	IV -	43
Tabel 4.16	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Mandailing Natal Tahun	IV -	44



	2016–2020		
Tabel 4.17	Pendapatan Daerah Per Kapita Tahun 2016-2020	IV -	46
Tabel 4.18	Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2020	IV -	47
Tabel 4.19	Ruang Fiskal Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2020	IV -	47
Tabel 4.20	Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 Kabupaten Mandailing Natal	IV -	49
Tabel 4.21	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mandailing Natal	IV -	49
Tabel 4.22	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mandailing Natal	IV -	51
Tabel 4.23	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mandailing Natal	IV -	53
Tabel 4.24	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV -	57
Tabel 4.25	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan & Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Mandailing Natal 2024-2026	IV -	60



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II - 9
Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2022	II - 18
Grafik 2.3 Laju Inflasi Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2022	II - 22
Grafik 2.4 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2022	II - 23
Grafik 2.5 IPM Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2022	II - 25
Grafik 2.6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2022	II - 26
Grafik 2.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2022	II - 27
Grafik 2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022	II - 28
Grafik 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022	II - 29
Grafik 2.10 Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, 2022	II - 34
Grafik 2.11 Tren penurunan dan peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 kelahiran hidup di kabupaten mandailing natal tahun 2018-2022	II - 36
Grafik 2.12 Jumlah Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018-2022	II - 37
Grafik 2.13 Trend Penurunan Dan Peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022	II - 38
Grafik 2.14 Usia Harapan Hidup Kabupaten Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Tahun 2017-2022	II - 40
Grafik 2.15 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2022	II - 91
Grafik 3.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2022	III - 7
Grafik 3.2 Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Miskin (%) Mandailing Natal Tahun 2022	III - 18
Grafik 3.3 Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin (%) Mandailing Natal Tahun 2022	III - 19
Grafik 3.4 Identifikasi Masalah Garis Kemiskinan (Rp) Mandailing Natal Tahun 2022	III - 20
Grafik 3.5 Identifikasi Masalah Kedalaman Kemiskinan(P1) Mandailing Natal Tahun 2022	III - 21
Grafik 3.6 Identifikasi Masalah Keparahan Kemiskinan (P2) Mandailing Natal Tahun 2022	III - 22
Grafik 3.7 Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Mandailing Natal Tahun 2022	III - 24



Grafik 3.8	Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	24
Grafik 3.9	Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	25
Grafik 3.10	Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	26
Grafik 3.11	Identifikasi Masalah Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	28
Grafik 3.12	Identifikasi Masalah Harapan Lama Sekolah (tahun) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	30
Grafik 3.13	Identifikasi Masalah Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	32
Grafik 3.14	Identifikasi Masalah Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	33
Grafik 3.15	Identifikasi Masalah Angka Harapan Hidup (AHH) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	34
Grafik 3.16	Identifikasi Masalah Prevalensi Stunting (%) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	36
Grafik 3.17	Identifikasi Masalah Pertumbuhan Ekonomi (%) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	41
Grafik 3.18	Identifikasi Masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	42
Grafik 3.19	Identifikasi Masalah Gini Ratio Mandailing Natal Tahun 2022	III -	43
Grafik 3.20	Identifikasi Masalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	45
Grafik 3.21	Identifikasi Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	46
Grafik 3.22	Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	49
Grafik 3.23	Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Mandailing Natal Tahun 2022	III -	51
Grafik 3.24	Jumlah Pelanggan Listrik menurut Rayon, 2018-2022	III -	54



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mandailing	II - 1
Gambar 2.2	Lapangan Usaha dengan Peranan Terbesar Tahun 2022 (Persen)	II - 19
Gambar 2.3	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Partisipasi Sekolah, Tahun 2022 di Kabupaten Mandailing Natal.	II - 34
Gambar 2.4	Progress Pencapaian UHC (Universal Health Coverage) Desember Tahun 2023 di Kabupaten Mandailing Natal	II - 42
Gambar 4.1	Theory of Change Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal	IV - 12
Gambar 4.2	Theory of Change Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal	IV - 16
Gambar 4.3	Theory of Change Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Mandailing Natal	IV - 21
Gambar 4.4	Theory of Change Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal	IV - 25
Gambar 4.5	Theory of Change Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal	IV - 29
Gambar 4.6	Theory of Change Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sosial Kabupaten Mandailing Natal	IV - 33
Gambar 4.7	Permasalahan Utama Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal	IV - 56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan di Indonesia telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, rasa aman, kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan yang terjangkau, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang layak, keadilan, partisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan kemiskinan, diperlukan penanganan yang komprehensif dan bersifat lintas sektor serta keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholders). Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Agar koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah kemiskinan menjadi lebih terarah, maka dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) secara berjenjang mulai tingkat daerah kabupaten/kota, tingkat daerah provinsi dan tingkat pusat.

Kolaborasi semua pihak dalam rangka pengentasan kemiskinan sangatlah perlu dimaksimalkan, bertujuan agar lebih banyak dukungan dan apresiasi khususnya dibidang penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelarasan Kerja, Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan



Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang mengamanatkan untuk dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal telah mengeluarkan surat Keputusan Bupati Nomor 050.13/0925/K/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Sesuai dengan Permendagri No. 53 Tahun 2020 TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi penyusunan RPKD dan rencana aksi Kabupaten/Kota.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud penyusunan RPKD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat, dunia usaha dan *stakeholder* lainnya) dalam penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Mandailing Natal.

1.2.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen RPKD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui gambaran kondisi kemiskinan di daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Memperoleh masukan dan bahan pertimbangan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- c. Mengetahui profil kemiskinan daerah;
- d. Mengetahui profil program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal;
- e. Menjadi bahan evaluasi kinerja Tim Kerja Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mandailing Natal.



1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024- 2026,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui



- Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
 11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Wilayah Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
 12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022



tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 6);

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Mandailing Natal di dasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang isu kemiskinan, maksud dan tujuan penanggulangan kemiskinan, dasar hukum penanggulangan kemiskinan, serta sistematika penulisan RPKD.

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Bab ini berisi hasil identifikasi kondisi : Perekonomian, Geografis, Demografis, Akses kepada pelayanan publik (pemerintah, pendidikan, kesehatan, akses permodalan dll), informasi sosial budaya yang berkaitan isu kemiskinan dan isu-isu terkait



lainnya. Hasil identifikasi perencanaan di atas berpengaruh dan membentuk isu kemiskinan / kesejahteraan di suatu daerah.

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Bab ini berisi tentang profil kemiskinan konsumsi meliputi : presentase penduduk miskin (P0), jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), garis kemiskinan (GK), profil kemiskinan non konsumsi meliputi : bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur dasar, bidang ketahanan pangan, bidang ekonomi, bidang fiskal daerah, bidang pendapatan daerah, bidang belanja daerah, bidang indikator daerah. Masing-masing indikator di analisis dengan satu paket analisis; posisi relatif, perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan relevansi perkembangan untuk dijadikan bahan dalam merumuskan masalah pada indikator tertentu pada masing-masing bidang.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

Bab ini berisi tentang prioritas intervensi : Berisi Theory of Change (ToC) Program semua bidang (sebagai cara untuk mencari akar masalah dari masalah yang sudah diidentifikasi), Analisis Keterkaitan semua bidang (sebagai cara untuk menguji ketepatan prioritas intervensi antara data capaian dengan harapan/rencana), analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan : Komposisi APBD berdasarkan pendapatan dan belanja, Sumber pendapatan daerah (belanja langsung dan tidak langsung), Perkembangan derajat otonomi fiskal dan ruang fiskal, Penjelasan relevansi dan efektivitas APBD terhadap kondisi kemiskinan daerah. Prioritas program penanggulangan kemiskinan merupakan program yang diarahkan untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, penguatan ekonomi,



pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. Informasi prioritas program terhadap kondisi kemiskinan daerah didahului dengan melakukan analisis logika program atau teori perubahan (Theory of Change) dan analisis keterkaitan serta rencana analisis anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.

BAB V LOKASI PRIORITAS

Bab ini berisi tentang Lokasi prioritas program berdasarkan Theory of Change (ToC), Matrik Tujuan Penanggulangan Kemiskinan, Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan (5 Tahunan). Lokasi prioritas adalah lokasi yang menjadi pilihan pelaksanaan program- program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan. Analisis wilayah prioritas ini menggunakan pendekatan analisis kuadran, dengan mempersandingkan antara dua indikator (indikator x dan indikator y) yang memiliki keterkaitan/hubungan melalui analisis kuadran ini dapat ditentukan 4 kategori prioritas wilayah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi, Astronomis dan Demografi

2.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Mandailing Natal dalam konstelasi regional berada di bagian selatan wilayah Provinsi Sumatera Utara yang secara astronomis terletak pada $0^{\circ}10' - 1^{\circ} 50'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}50' - 100^{\circ} 10'$ Bujur Timur dengan ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Kabupaten Mandailing Natal berada paling selatan dari wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Letak geografis wilayah Kabupaten Mandailing Natal di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas, sebelah Selatan berbatasan

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mandailing



Sumber : RTRW Kabupaten Mandailing Natal 2016-2036

dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia tergambar juga dalam peta Kabupaten Mandailing Natal.



Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah otonomi dari Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten dengan ibukota Panyabungan ini memiliki luas wilayah perencanaan □ 653.542 Ha (luas berdasarkan digitasi peta Rupa Bumi Indonesia 2014) atau setara dengan 9,24% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal terbagi menjadi 23 Kecamatan dan 377 desa dan 27 kelurahan.

Luas wilayah terluas di Kabupaten Mandailing Natal adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yaitu sebesar 21,67 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan Kecamatan Lembah Sorik Merapi memiliki luas wilayah terkecil, yaitu hanya sebesar 0,52 persen.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Administrasi Kabupaten Mandailing Natal

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah Perencanaan (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Siabu	Siabu	28.178	26	2
2.	Panyabungan	Panyabungan	22.968	30	9
3.	Kotanopan	Kotanopan	29.134	34	2
4.	Batang Natal	Muarasoma	78.268	30	1
5.	Muarasipongi	Pasar Muarasipongi	13.334	15	1
6.	Natal	Natal	79.402	28	2
7.	Batahan	Pasar Batahan	35.097	17	1
8.	Muara Batang Gadis	Singkuang	174.625	14	-
9.	Bukit Malintang	Malintang Jae	5. 865	11	-
10.	Panyabungan Utara	Mompang Jae	5. 655	11	1
11.	Panyabungan Timur	Gunung Baringin	35. 362	14	1
12.	Panyabungan Selatan	Tano Bato	7. 732	10	1
13.	Panyabungan Barat	Longat	7. 710	9	1
14.	Lembah Sorik Marapi	Pasar Maga	3. 111	8	1
15.	Tambangan	Laru Lombang	14. 269	19	1
16.	Ulu Pungkut	Huta Godang	26. 255	12	1
17.	Lingga Bayu	Simpang Gambir	23. 198	17	2
18.	Ranto Baik	Manisak	18. 541	18	-
19.	Sinunukan	Sinunukan III	14. 112	14	-
20.	Huta Bargot	Bangun Sejati	10. 266	14	-
21.	Pakantan	Pakantan	10. 761	8	-
22.	Puncak Sorik Marapi	Sibanggor Tonga	4. 917	11	-
23.	Naga Juang	Banua Simanosor	4. 783	7	-
Jumlah			653. 542	377	27

Sumber: RTRW Kabupaten Mandailing Natal 2016-2036



2.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari gugusan pegunungan dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Barisan di beberapa kecamatan, juga daerah pesisir/daerah pantai di Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis. Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Dataran rendah merupakan daerah pesisir, kemiringan 00-20 seluas 160.500 Ha (24,24%);
2. Daerah/dataran landai, kemiringan 20-150 seluas 35.879 Ha (5,49%);
3. Dataran Tinggi, kemiringan 150-400. Dataran tinggi terdiri 2 dari jenis, yaitu:
 - a. Daerah perbukitan, kemiringan 150-200 seluas 110.513 Ha (16,91%);
 - b. Daerah pegunungan, kemiringan 200-400 seluas 348.599 Ha (53,34%).

Kabupaten Mandailing Natal memiliki wilayah datar seluas 201.030 Ha (30,76%), landai seluas 35.357 Ha (5,41%), berbukit seluas 87.444 Ha (13,38), bergunung seluas 329.712 Ha (50,45%).

Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Mandailing Natal

NO	KECAMATAN	TOPOGRAFI
1.	Siabu	Bergelombang s/d Berbukit
2.	Panyabungan	Datar s/d Berbukit
3.	Kotanopan	Berbukit s/d Pegunungan
4.	Batang Natal	Bergelombang s/d Berbukit
5.	Muarasipongi	Berbukit s/d Pegunungan
6.	Natal	Datar s/d Bergelombang
7.	Batahan	Datar s/d Bergelombang
8.	Muara Batang Gadis	Datar s/d Bergelombang
9.	Bukit Malintang	Datar s/d Berbukit
10.	Panyabungan Utara	Datar s/d Berbukit
11.	Panyabungan Timur	Berbukit s/d Pegunungan
12.	Panyabungan Selatan	Berbukit s/d Pegunungan
13.	Panyabungan Barat	Datar s/d Berbukit
14.	Lembah Sorik Marapi	Berbukit s/d Pegunungan
15.	Tambangan	Berbukit s/d Pegunungan



NO	KECAMATAN	TOPOGRAFI
16.	Ulu Pungkut	Berbukit s/d Pegunungan
17.	Lingga Bayu	Bergelombang s/d Berbukit
18.	Ranto Baek	Bergelombang s/d Berbukit
19.	Sinunukan	Datar s/d Bergelombang
20.	Huta Bargot	Datar s/d Berbukit
21.	Pakantan	Berbukit s/d Pegunungan
22.	Puncak Sorik Marapi	Berbukit s/d Pegunungan
23.	Naga Juang	Datar s/d Berbukit

Sumber : BPS, Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka Tahun 2023

2.1.3 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Mandailing Natal beriklim hujan tropis. Kondisi iklim ditandai dengan adanya musim penghujan, kemarau dan pancaroba. Tinggi rendahnya suhu udara dipengaruhi oleh ketinggian daerah di atas permukaan laut. Daerah Mandailing Natal yang terletak pada ketinggian antara 0-1.315 meter di atas permukaan laut mengakibatkan suhu udara berkisar antara 23°C -32°C dan kelembaban udara antara 80–85 %.

2.1.4 Kondisi Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Mandailing Natal cukup kompleks, dengan jenis batuan yang berumur mulai dari Permokarbon sampai dengan Resen, terdiri dari berbagai jenis litologi mulai dari batuan beku, batuan metamorf dan batuan sedimen, memungkinkan Kabupaten Mandailing Natal ini memiliki berbagai jenis bahan galian, terutama non-logam, yang beberapa jenis diantaranya cukup prospek untuk dikembangkan, seperti bahan galian granit, lempung, batu gamping, sirtu, tras, batuapung, batusabak dan kuarsit.

Jenis batuan paling banyak terdapat pada Formasi Paleogen mayoritas terdapat di Kecamatan Muara Batang Gadis. Jenis batuan permokarbon mayoritas terdapat di Kecamatan Natal, Siabu, Panyabungan, sebagian terdapat di Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Muarasipongi. Jenis formasi Andesit Muda mayoritas terdapat di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Kotanopan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah jenis batuan diabas.



2.1.5 Kondisi Hidrologi

Potensi hidrologi cukup penting untuk menunjang pembangunan, baik untuk kepentingan irigasi, air minum, sanitasi, transportasi, maupun untuk kepentingan lainnya. Sumber air yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal bagi kebutuhan tersebut di atas berasal dari mata air dan sungai. Di wilayah Mandailing Natal terdapat beberapa DAS yang besar, diantaranya adalah:

- a. DAS Batang Gadis : 313.845,08 Ha (53,32%)
- b. DAS Batang Batahan : 103.540,32 Ha (17,59%)
- c. DAS Batang Natal : 76.091,90 Ha (12,93%)
- d. DAS Batang Tabuyung : 48.152,84 Ha (8,18%)
- e. DAS Batang Bintuas : 32.266,58 Ha (5,48%)
- f. DAS Batang Toru : 14.665,83 Ha (2,49%)

DAS yang terbesar adalah DAS Batang Gadis dengan luas 313.845,08 Ha atau sekitar 53,32 % dari luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Gugusan bukit barisan merupakan sumber mata air sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Mandailing Natal. Terdapat 6 (enam) sungai besar bermuara ke Samudera Hindia diantaranya adalah:

1. Sungai Batang Gadis mengalir mulai dari Kecamatan Kotanopan melalui Kecamatan Panyabungan hingga ke Kecamatan Siabu dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis;
2. Sungai Batang Batahan mengalir mulai dari Kecamatan Batang Natal dan bermuara di Kecamatan Batahan;
3. Sungai Batang Natal mengalir mulai dari Kecamatan Batang Natal dan bermuara di Kecamatan Batahan;
4. Sungai Batang Tabuyung mengalir dari Kecamatan Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis;
5. Sungai Batang Bintuas mengalir dan bermuara di Kecamatan Natal;
6. Sungai Batang Toru mengalir dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis.



Tabel 2.3 Kondisi Sungai Utama di Kabupaten Mandailing Natal

NO.	NAMA SUNGAI	KECAMATAN	PANJANG (Km)	LEBAR (m)	Isi Normal (m ³)
1.	Batang Gadis	Panyabungan	180,00	65,00	25.781,11
2.	Batang Natal	Batang Natal	70,50	42,00	6.996,00
3.	Batahan	Batahan	102,10	40,00	13.326,00
4.	Batang Bangko	Batahan	30,00	90,00	24.987,00
5.	Batang Sinunukan	Batahan	19,04	40,00	9.495,00
6.	Kun Kun	Natal	29,00	29,00	11.432,00
7.	Bintuas	Muara Batang Gadis	59,00	60,00	17.134,00
8.	Batang Tabuyung	Muara Batang Gadis	28,08	70,00	23.321,00
9.	Parlampungan	Muara Batang Gadis	25,00	45,00	5.354,00
10.	Sulang-Suling	Muara Batang Gadis	46,80	46,80	7.239,00
11.	Sikapas	Muara Batang Gadis	15,00	60,00	15.230,00

Sumber : BPS, Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka Tahun 2023

2.1.6 Penggunaan Lahan

Dalam pengembangan wilayah informasi tutupan lahan yang tepat sangat diperlukan, untuk mempermudah analisa perencanaan dan pengembangan wilayah yang dimaksud (Sihombing 2012). Perubahan tutupan lahan secara spasial merupakan salah satu cara mengidentifikasi perkembangan wilayah, karena perubahan tutupan lahan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan pertambahan ruang untuk melakukan aktivitasnya. Tutupan lahan berhubungan dengan vegetasi (alam atau ditanam) atau konstruksi oleh manusia yang menutupi permukaan tanah (Baja 2012).

Tabel 2.3 menyajikan informasi tutupan lahan di Kabupaten Mandailing Natal dalam periode 10 tahun. Di tahun 2008 kelas tutupan lahan yang paling luas adalah hutan yaitu 44,90% dari luasan total wilayah. Pada umumnya tutupan lahan hutan beralih fungsi ke sektor pertanian, yaitu perkebunan sawit dan perkebunan campuran. Di tahun 2018 luas tutupan lahan hutan berkurang menjadi 30,04%, jika terus menerus tidak ada pengawasan dan pengendalian, deforestasi akan terus berlanjut yang mengakibatkan penurunan daya dukung DAS. Sebagaimana dinyatakan Fadhil et al (2021), ketersediaan hutan dalam suatu DAS berhubungan erat dengan ketersediaan air dan banjir di bagian hilir DAS.



Tabel 2.4 Luas Tutupan Lahan di Kabupaten Mandailing Natal Periode Tahun 2008- 2018

Kelas Tutupan Lahan	Tahun 2008		Tahun 2011		Tahun 2014		Tahun 2018	
	ribu Ha	%	ribu Ha	%	ribu Ha	%	ribu Ha	%
Hutan	289,60	44,90	276,34	42,84	211,01	32,74	193,82	30,04
Perkebunan Campuran	251,10	38,93	258,40	40,06	251,26	38,90	252,57	39,15
Perkebunan Sawit	81,09	12,57	91,36	14,16	168,44	26,07	179,31	27,79
Permukiman	4,11	0,64	6,20	0,96	6,67	1,03	451,38	0,70
Sawah	15,93	2,47	10,80	1,68	6,20	0,96	14,00	2,17
tubuh air	3,15	0,49	1,97	0,31	1,89	0,29	0,92	0,14
Total	645,00	100,00	645,10	100,00	645,48	100,00	645,16	100,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026

Adanya kearifan lokal berupa harangan rarangan merupakan bentuk pengelolaan sumberdaya hutan dan air di wilayah ini. Desa-desa dengan penduduk yang masih menerapkan kearifan lokal ini, tetap menganggap hutan sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga. Hutan sebagai sumber mata air untuk pertanian, lahan untuk berkebun dan umumnya akan ada penolakan jika ada orang luar daerah yang akan merambah hutan.

Perkembangan wilayah diidentifikasi dari perubahan tutupan lahan secara spasial, pertumbuhan penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ruang untuk berbagai aktivitas. Lahan terbangun dapat mengidentifikasi perkembangan wilayah secara spasial. Seiring dengan bertambahnya waktu, jumlah penduduk akan bertambah sehingga terjadi juga penambahan luasan permukiman. Lokasi tersebut merupakan pusat aktivitas perdagangan, pendidikan, kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai wilayah pusat pelayanan, kebutuhan ruang untuk permukiman terus meningkat. Perkebunan campuran dan sawah bergeser peruntukannya menjadi permukiman. Karena dua tutupan lahan ini



ketersediaannya masih tinggi baik dari aspek ekonomi dan dianggap paling minim hambatannya jika dialihfungsikan menjadi permukiman.

Perubahan hutan menjadi perkebunan sawit merupakan suatu keputusan politis yang lebih mempertimbangkan daya tarik ekonomi dan sosial (Dijk dan Savenije 2011). Pada tahun 2008 di daerah pantai barat, umumnya persentase luasan perkebunan sawit > 50% dari luas total wilayah, dalam 10 tahun kemudian luasan perkebunan sawit semakin meningkat. Di wilayah-wilayah ini terdapat beberapa perkebunan sawit besar yang memiliki izin. Sebesar 50% dari total perusahaan perkebunan tersebut mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005 keatas. Hal ini berdampak pada pembukaan lahan sawit diluar lahan tersebut, baik oleh masyarakat setempat maupun masyarakat luar daerah. Sampai saat ini perkebunan sawit ini berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani sawit di desa ini baik petani plasma dan non plasma (Susiarti 2018). Peningkatan kesejahteraan dapat terwujud jika masyarakat setempat memiliki lahan dan ikut menjadi tenaga kerja di perkebunan sawit. Namun jika tidak, hanya mempengaruhi pembangunan ekonomi secara luas dalam skala regional ataupun negara (Dijk dan Savenije 2011).

Perubahan penggunaan lahan dipandang sebagai bagian dari pergeseran pergeseran dinamika alokasi dan distribusi sumberdaya menuju keseimbangan baru yang lebih produktif (Rustiadi et al. 2009). Perubahan tutupan lahan hutan menjadi perkebunan campuran sebagian besar terjadi di kecamatan Muara Batang Gadis (33.662,73 ha) dan Kecamatan Batang Natal (21.609,53 ha). Selain berubah menjadi perkebunan campuran, hutan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit seluas 33.179,19 ha terjadi di arah barat dan barat laut kabupaten.

2.1.7 Demografi

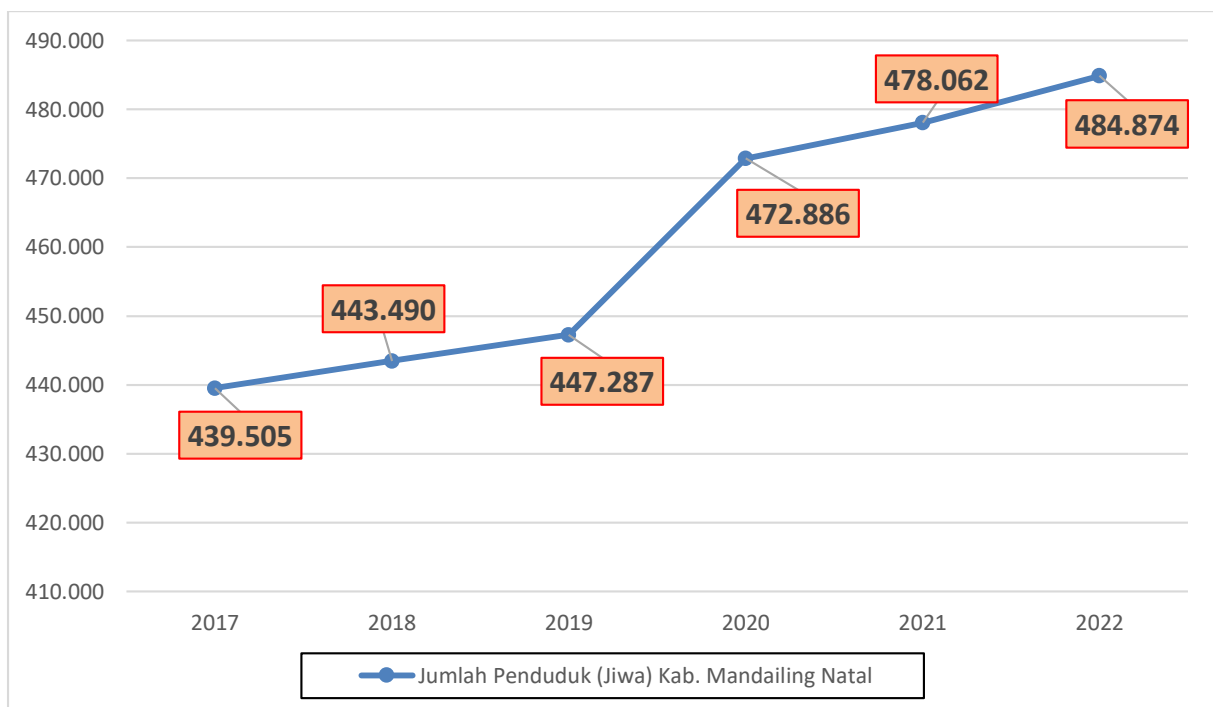
Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk



yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar).

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 439.505 ribu jiwa dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 478.062 ribu jiwa. Berdasarkan dari data jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020-2021 sebesar 1,46%.

Grafik 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2022



Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka

Dengan luas wilayah sebesar 662.070 km², jumlah penduduk Mandailing Natal pada tahun 2022, adalah sebanyak 484.874 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 73 jiwa per km². Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Panyabungan yaitu 91.929 jiwa sedangkan Kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pakantan yaitu 2.243 jiwa. Kecamatan Panyabungan Utara adalah kecamatan dengan penduduk terpadat, yaitu sebesar 360 jiwa per km², sedangkan kecamatan



Ulu Pungkut adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu 16 jiwa per km².

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mandailing Natal sebesar 1,51 persen per tahun, sedangkan laju pertumbuhan di tahun 2021-2022 sebesar 1,46 persen. Perkembangan Laju Penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal

NO.	KECAMATAN	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
		2010-2020	2021-2022
1.	Batahan	2,45	2,19
2.	Sinunukan	3,31	3,04
3.	Batang Natal	1,12	0,85
4.	Lingga Bayu	2,01	1,74
5.	Ranto Baek	2,19	1,92
6.	Kotanopan	0,70	0,44
7.	Ulu Pungkut	0,92	0,66
8.	Tambangan	1,09	0,82
9.	Lembah Sorik Marapi	1,10	0,83
10.	Puncak Sorik Marapi	1,18	0,91
11.	Muarasipongi	1,80	1,53
12.	Pakantan	0,90	0,63
13.	Panyabungan	1,47	1,20
14.	Panyabungan Selatan	0,90	0,64
15.	Panyabungan Barat	1,77	1,50
16.	Panyabungan Utara	1,18	0,92
17.	Panyabungan Timur	1,40	1,14
18.	Huta Bargout	2,21	1,95
19.	Natal	2,12	1,85
20.	Muara Batang Gadis	3,65	3,37
21.	Siabu	1,15	0,88
22.	Bukit Malintang	1,55	1,29
23.	Naga Juang	2,78	2,50
Mandailing Natal		1,51	1,46

Sumber: Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka Tahun 2023



**Tabel 2.6 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Mandailing Natal, 2022**

NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	Batahan	11 827	11 600	23 427	102,0
2.	Sinunukan	11 630	11 152	22 782	104,3
3.	Batang Natal	12 888	12 797	25 685	100,7
4.	Lingga Bayu	14 300	14 152	28 452	101,0
5.	Ranto Baik	7 425	7 160	14 585	103,7
6.	Kotanopan	13 747	14 277	28 024	96,3
7.	Ulu Pungkut	2 364	2 357	4 721	100,3
8.	Tambangan	5 307	5 751	11 058	92,3
9.	Lembah Sorik Marapi	5 457	5 659	11 116	96,4
10.	Puncak Sorik Marapi	4 552	4 558	9 110	99,9
11.	Muarasipongi	6 548	6 325	12 873	103,5
12.	Pakantan	1 144	1 099	2 243	104,1
13.	Panyabungan	45 564	46 365	91 929	98,3
14.	Panyabungan Selatan	5 052	5 369	10 421	94,1
15.	Panyabungan Barat	5 435	5 529	10 964	98,3
16.	Panyabungan Utara	11 423	11 492	22 915	99,4
17.	Panyabungan Timur	7 282	7 210	14 492	101,0
18.	Huta Bargot	4 436	4 626	9 062	95,9
19.	Natal	17 670	17 380	35 050	101,7
20.	Muara Batang Gadis	12 162	11 615	23 777	104,7
21.	Siabu	26 442	27 612	54 054	95,8
22.	Bukit Malintang	6 437	6 622	13 059	97,2
23.	Naga Juang	2 502	2 573	5 075	97,2
Jumlah		241 594	243 280	484 874	99,3

Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka Tahun 2023



Pada tahun 2022, penduduk laki-laki di Kabupaten Mandailing Natal lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Sex ratio sebesar 99,3 menandakan dari 100 orang perempuan, hanya ada sekitar 93 sampai 99 penduduk laki-laki.

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang bertujuan untuk pemerataan pembangunan diseluruh wilayah dan sekaligus menghindari terjadinya pemusatan kegiatan yang berlebihan agar terjamin keserasian demi tercapainya pemanfaatan ruang yang sesuai dan seimbang dengan pola pemanfaatan ruang seoptimal mungkin dengan penyebaran prasarana dan sarana sosial, dan kecenderungan yang berlaku dilapangan.

Pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 - Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala



internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan dengan kriteria:

1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Berdasarkan kriteria diatas di Kabupaten Mandailing Natal belum ada kawasan Pusat Kegiatan Nasional sebagaimana dimaksud.

- **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan dengan kriteria:

1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Berdasarkan kriteria diatas di Kabupaten Mandailing Natal belum ada kawasan Pusat Kegiatan Wilayah.

- **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria:



1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sesuai dengan kondisi eksisting dan hasil analisis, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan di Kabupaten Mandailing Natal adalah:
 - Kecamatan Siabu;
 - Kecamatan Panyabungan;
 - Kecamatan Kotanopan;
 - Kecamatan Natal.
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan kabupaten, kecamatan yang merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Mandailing Natal adalah:

 1. Malintang Jae di Kecamatan Bukit Malintang;
 2. Pasar Maga di Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
 3. Pasar Muarasipongi di Kecamatan Muarasipongi;
 4. Simpang Gambir di Kecamatan Linggga Bayu;
 5. Pasar Batahan di Kecamatan Batahan.
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan kabupaten, kecamatan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Mandailing Natal adalah:

 1. Mompang Jae di Kecamatan Panyabungan Utara;
 2. Banua Simanosor di Kecamatan Naga Juang;
 3. Bangun Sejati di Kecamatan Huta Bargot;



4. Gunung Baringin di Kecamatan Panyabungan Timur;
5. Longat di Kecamatan Panyabungan Barat;
6. Tano Bato di Kecamatan Panyabungan Selatan;
7. Laru Lombang di Kecamatan Tambangan;
8. Sibanggor di Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
9. Huta Godang di Kecamatan Ulu Pungkut;
10. Pakantan di Kecamatan Pakantan;
11. Muara Soma di Kecamatan Batang Natal;
12. Manisak di Kecamatan Ranto Baek;
13. Sinunukan III di Kecamatan Sinunukan
14. Singkuang di Kecamatan Muara Batang Gadis.

2.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana alam di Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari: gunung api, gempa, tsunami, gerakan tanah (longsor) dan banjir.

a. Bencana Alam Gunung Api

Potensi bahaya gunung berapi di Kabupaten Mandailing Natal cukup besar. Daerah-daerah rawan terhadap bencana gunung berapi meliputi: Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Lembah Sorik Marapi, Batang Natal, Panyabungan Selatan dan Batang Natal, dimana keberadaan wilayah tersebut berada pada lereng Gunung Sorik Marapi. Gempa yang terjadi sepanjang patahan aktif dengan jalur melalui gunung api akan memicu terjadinya peningkatan aktivitas gunung api. Letusan yang terjadi sebelumnya telah mengeluarkan lahar andesit yang cukup luas di wilayah tersebut. Saat ini masih terjadi erupsi fumarol maupun solfatar yang terlihat oleh adanya manifestasi geotermal di sekitarnya.

b. Bencana Alam Gempa

Pada daerah jalur patahan aktif, struktur yang dijumpai berupa strukturstruktur patahan aktif yang secara umum berarah sejajar dengan arah memanjangnya Sumatera atau berarah barat laut – tenggara. Lempeng Samudera Hindia yang terus menunjam di bawah Lempeng Benua Asia di barat Sumatera dengan kecepatan



rata-rata 6 cm/thn dapat mengakibatkan terjadinya pelepasan energi baik di jalur penunjaman maupun di jalur patahan aktif dan menimbulkan goncangan atau gempa bumi. Wilayah yang sangat rawan akan melalui Kecamatan Ulu Pungkut, Kotanopan, Panyabungan Barat, Panyabungan Utara dan Bukit Malintang. Jalur tersebut merupakan jalur utama patahan aktif Sumatera. Kecamatan lain yang kena imbas jika terjadi pergeseran pada jalur patahan aktif adalah Kecamatan Muarasipongi, Panyabungan Timur, Panyabungan dan Siabu.

c. Bencana Alam Tsunami

Secara umum struktur yang dijumpai di daerah berpotensi tsunami dan gempa berupa struktur patahan yang berarah barat laut – tenggara, patahan naik, lipatan sinklin maupun antiklin yang masih aktif yang berarah sama dengan arah patahan aktif. Seluruh pantai barat Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan batas penunjaman Lempeng Samudera Hindia di bawah lempang benua Asia, sangat berpotensi akan bencana tsunami selain bencana gempa bumi. Kecamatan–kecamatan yang berpotensi kena gempa bumi dan tsunami meliputi Kecamatan Muara Batang Gadis, Natal dan Batahan. Berdasarkan gempa bumi yang terjadi di Simelue pada tanggal 26 Desember 2004 dan di Pulau Banyak pada tanggal 28 Maret 2005 selain menyebabkan gempa bumi juga menyebabkan terjadinya gelombang tsunami. Beberapa wilayah yang terkena gempa bumi dan gelombang tsunami adalah :

- Kecamatan Muara Batang Gadis, meliputi Desa Tabuyung dan Singkuang;
- Kecamatan Natal meliputi Desa Bintuas dan Kunkun;
- Kecamatan Batahan: air laut naik di muara Sungai Batahan.

Dari kejadian tersebut di atas, wilayah yang mempunyai potensi tinggi terkena gelombang tsunami berada pada garis sempadan pantai (< 200 m) sampai dengan 500 m dari garis pantai. Bencana tsunami dapat pula terjadi di bagian muara sungai menerus ke



hulu sampai energi gelombang berhenti. Oleh karena itu daerah yang berpotensi sedang berada pada muara dan sepanjang sempadan sungai.

d. Gerakan Tanah (Longsor)

Gerakan tanah/longsoran yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal umumnya disebabkan karena proses pelapukan pada lereng terjal serta daerah lemah akibat pergeseran patahan/sesar. Dari observasi lapangan terlihat bahwa daerah yang banyak mengalami gerakan tanah/longsoran dijumpai di wilayah Kecamatan Muarasipongi, Pakantan dan Batang Natal. Gerakan tersebut umumnya terjadi di daerah lereng, punggung bukit terjal dimana terdapat endapan hasil lapukan yang gembur. Curah hujan yang tinggi akan memacu lebih cepat terjadinya gerakan tanah. Kondisi tersebut diperparah dengan kedudukan wilayah tersebut yang sangat rentan/lemah karena berada pada Zona Patahan. Beberapa daerah yang berpotensi mengalami bencana gerakan tanah :

- Wilayah berelevasi lebih dari 1.000 m pada wilayah Muarasipongi, Pagargunung, Tanobato, Banjarsipan memiliki potensi bencana gerakan tanah tinggi;
- Wilayah berelevasi lebih dari 500-1.000 m yang tersebar mulai dari bagian barat-barat daya dengan sebaran memanjang berarah barat laut-tenggara. Sebaran yang lain terdapat di bagian tengah utara sebelah selatan Panyabungan. Wilayah ini memiliki potensi bencana gerakan tanah sedang-tinggi;
- Wilayah berelevasi lebih dari 500 m dengan penyebaran setempat pada bagian barat Mandailing Natal serta pada perbukitan bagian timur Panyabungan. Wilayah ini memiliki potensi bencana gerakan tanah sedang-kecil;
- Wilayah berelevasi 100-500 m dan lebih dari 1.000 m dengan penyebaran di sekitar Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Wilayah ini memiliki potensi bencana gerakan tanah kecil;



- o Wilayah berelevasi kurang dari 100 m dengan penyebaran terdapat pada muara sungai hingga tepi pantai. Lokasi lain terdapat pula dataran antar perbukitan sampai dengan elevasi 100 m. Wilayah ini memiliki potensi bencana gerakan tanah sangat kecil.

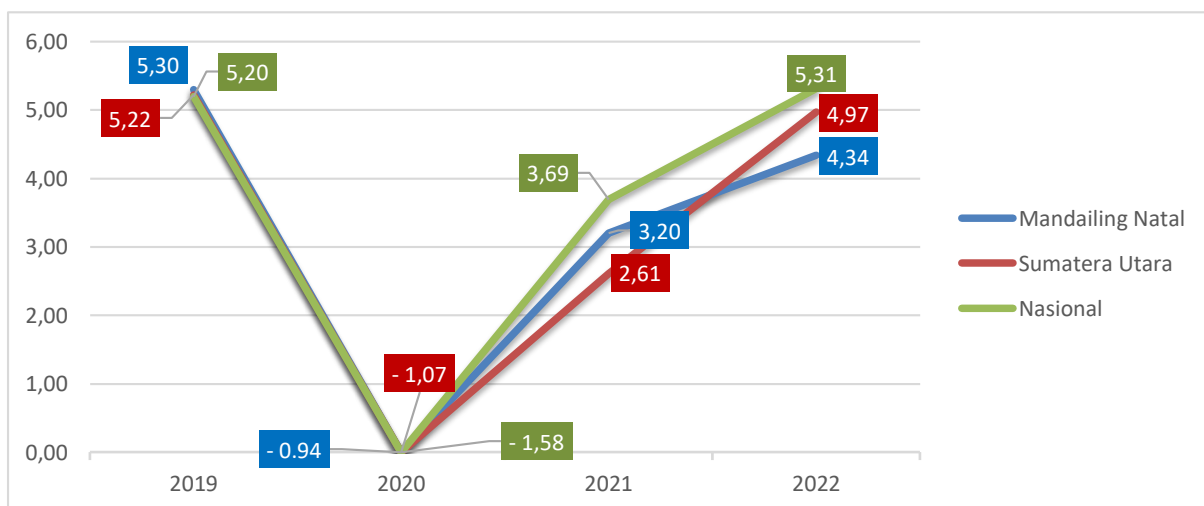
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya, guna mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi/ PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka

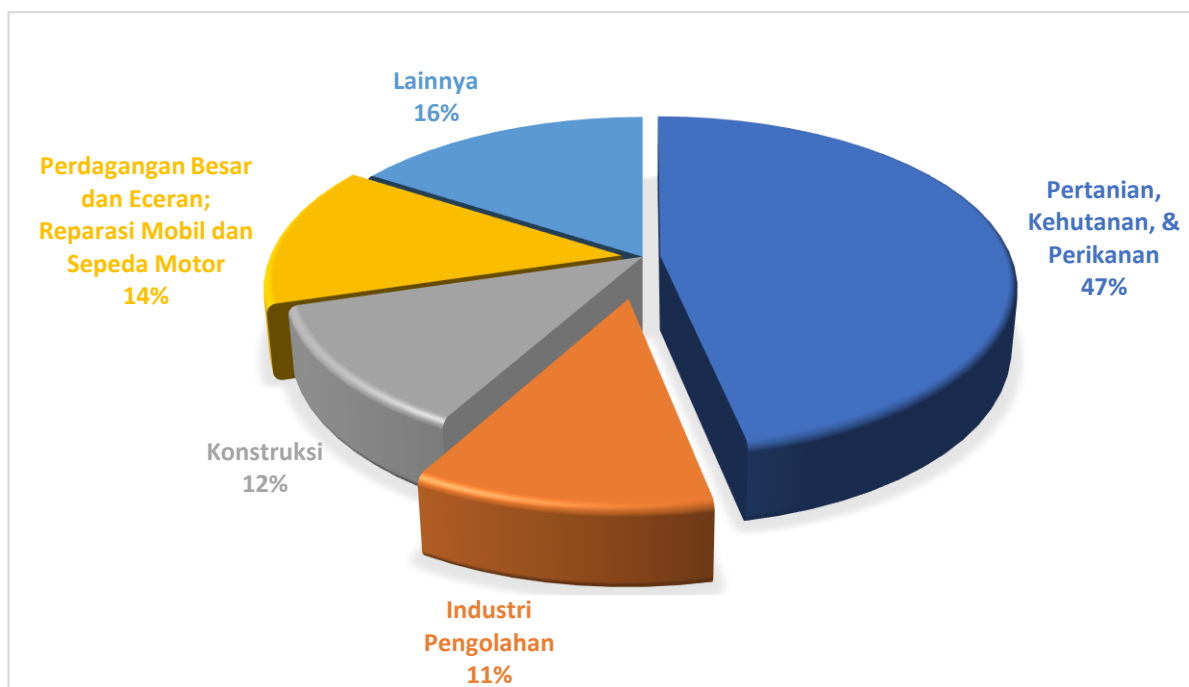
Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 dampak dari Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional terus bergerak naik. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal mampu tumbuh menjadi 4,34 persen pada tahun 2022 meningkat 1,14 persen dibandingkan dengan capaian tahun



2021 sebesar 3,20 persen. Pertumbuhan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional yang berada pada angka 4,97% dan 5,31%.

Lapangan usaha pertanian masih menjadi lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022. Lapangan usaha ini memberi kontribusi sebesar 46,72 persen terhadap PDRB ADHB. Sedangkan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang menjadi penyumbang terkecil PDRB dengan kontribusi sebesar 0,02 persen.

Gambar 2. 2 Lapangan Usaha dengan Peranan Terbesar Tahun 2022 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2023

Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2022 adalah sebesar 16.403,53 miliar rupiah. Sedangkan angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah sebesar 10.001,97 miliar rupiah. Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada periode 2019 sampai dengan 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2019-2022

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	5819,71	6028,32	6678,96	7663,71
B	Pertambangan dan Penggalian	83,43	84,12	89,55	96,10
C	Industri Pengolahan	1550,42	1582,25	1719,67	1876,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,51	9,91	10,20	10,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,79	2,79	2,98	3,11
F	Konstruksi	1839,81	1799,72	1890,99	1993,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1968,61	2002,54	2105,99	2270,52
H	Transportasi dan Pergudangan	260,40	254,93	263,38	299,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,86	94,78	94,95	103,81
J	Informasi dan Komunikasi	89,12	92,46	100,12	108,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	180,66	180,81	192,45	208,02
L	Real Estat	351,53	370,23	381,62	401,62
M,N	Jasa Perusahaan	13,51	13,65	13,99	15,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1001,95	1035,58	1037,06	1040,97
P	Jasa Pendidikan	160,91	171,48	178,81	187,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,04	114,95	115,10	119,32
R,S, T,U	Jasa Lainnya	4,48	4,48	4,61	5,01
	PDRB	13544,74	13843,00	14880,42	16403,53

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2023

Sedangkan angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada periode 2019 sampai dengan 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2019-2022

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	4.528,61	4.556,75	4.760,43	5.031,60
B	Pertambangan dan Penggalian	70,03	69,13	72,67	75,66
C	Industri Pengolahan	986,39	956,62	975,98	1.010,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,36	8,65	8,84	9,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,83	1,82	1,91	1,98
F	Konstruksi	1.142,11	1.079,65	1.107,97	1.123,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.152,79	1.130,61	1.158,40	1.206,42
H	Transportasi dan Pergudangan	174,99	164,20	164,49	176,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,14	69,10	69,06	73,67
J	Informasi dan Komunikasi	78,13	80,20	84,88	90,36



No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	143,36	144,34	147,66	155,12
L	Real Estat	193,30	200,62	201,43	208,80
M,N	Jasa Perusahaan	9,61	9,34	9,39	9,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	619,36	616,42	617,75	617,20
P	Jasa Pendidikan	111,70	116,52	121,10	125,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78,59	81,58	80,75	82,50
R,S, T,U	Jasa Lainnya	3,16	3,10	3,17	3,38
	PDRB	9.376,46	9.288,65	9.585,90	10.001,97

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2023

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB tahun 2022 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 64,02 persen. sedangkan komponen pengeluaran konsumsi LNPRT menjadi penyumbang terkecil PDRB pengeluaran dengan kontribusi sebesar 1,47 persen. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mandailing Natal periode 2019 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2019–2022

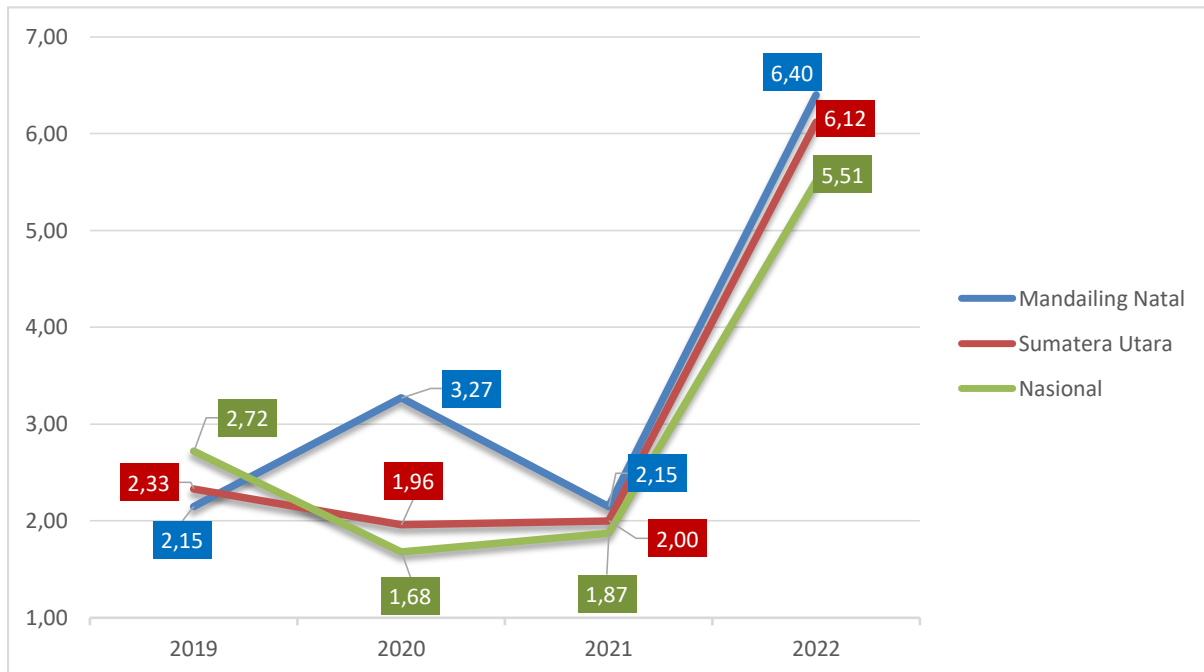
JENIS PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	8771,99	8990,28	9 472,81	10 501,96
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	217,26	216,92	218,37	240,39
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2225,94	2161,04	2 266,79	2 284,51
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3104,81	3066,03	3 234,11	3 436,53
Perubahan Inventori	375,86	462,17	489,11	559,73
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1151,13	-1053,44	- 800,77	-619,59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13544,74	13843,00	14 880,42	16 403,53

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2023

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Grafik 2.3 Laju Inflasi Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka

Laju Inflasi Kabupaten Mandailing Natal mengacu pada Kota Padangsidimpuan dengan laju inflasi pada tahun 2022 sebesar 6,40%. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional berada pada 6,12% dan 5,51%. Inflasi Kabupaten Mandailing Natal kedepan diharapkan dapat lebih baik dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh Tim Pengendali Inflasi (TPID) Kabupaten Mandailing Natal.

2.2.1.3 Gini Ratio

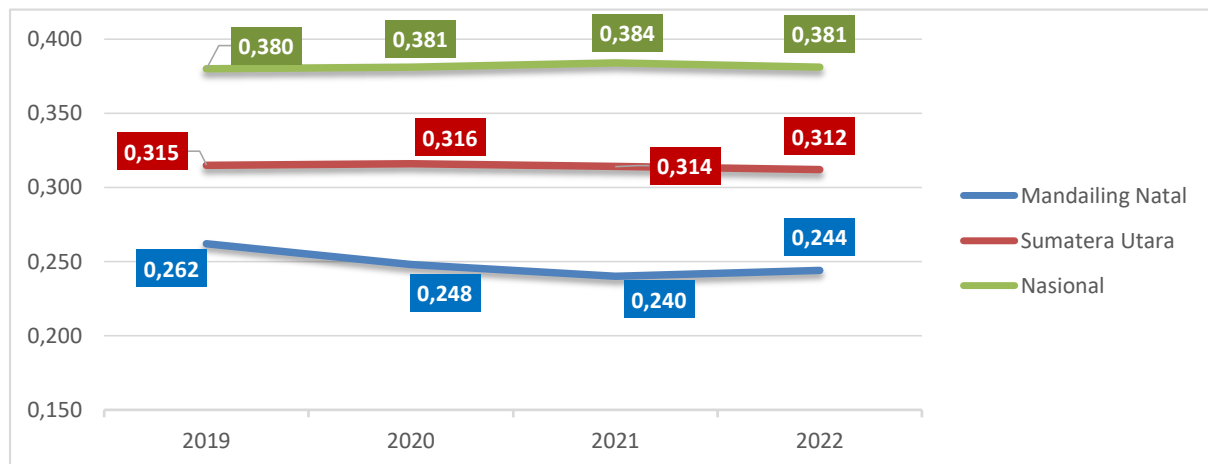
Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai



dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang dan nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah.

Grafik 2.4 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka

Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa gini rasio Kabupaten Mandailing Natal menjadi 0,244 poin pada tahun 2022 naik 0,004 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,240 poin. Gini rasio Kabupaten Mandailing Natal masih lebih baik daripada provinsi Sumatera Utara dan nasional memiliki kategori ketimpangan sedang dengan nilai 0,312 dan 0,381.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Isu pembangunan manusia selalu menjadi tolak ukur utama dalam melihat proses pembangunan sosial ekonomi baik di level nasional maupun regional. Secara umum pembangunan manusia di suatu daerah dapat ditunjukkan melalui perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Luasnya dimensi pembangunan manusia dapat dirangkum oleh angka IPM melalui bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Semakin



tinggi nilai IPM menunjukkan semakin baik pula pembangunan manusia di daerah tersebut.

Tabel 2.10 IPM Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

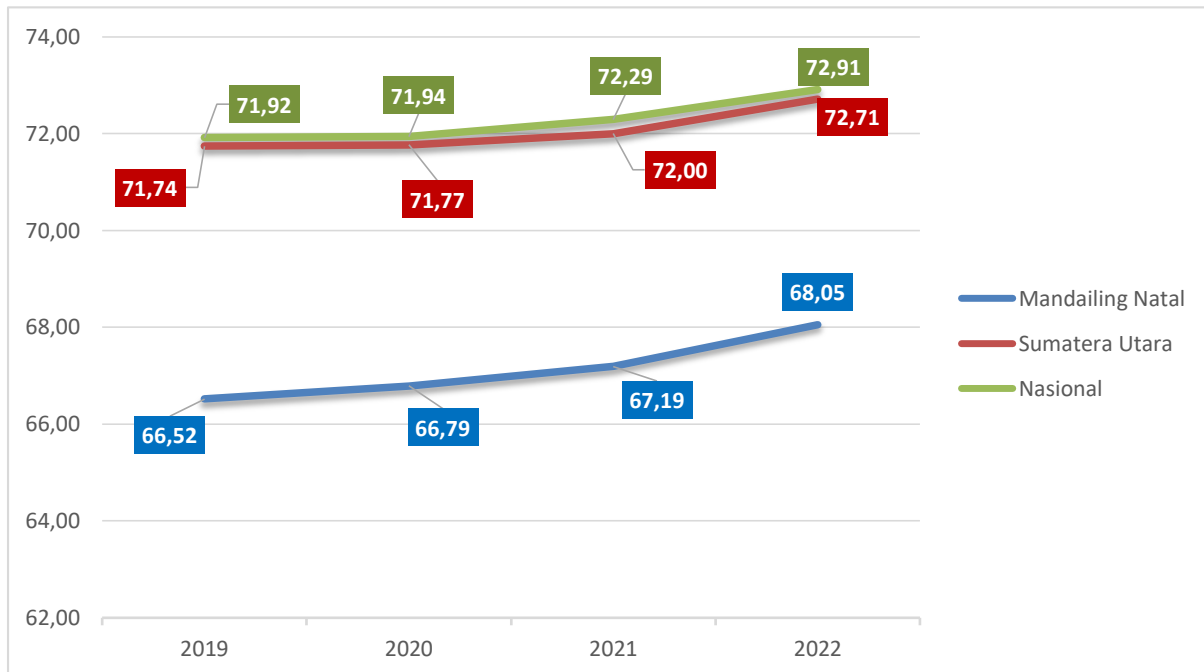
No	Indikator Makro Ekonomi	Satuan	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	IPM		66,52	66,79	67,19	68,05
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	62,51	62,6	62,65	63,05
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,17	13,32	13,61	13,85
4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,36	8,62	8,63	8,76
5	Pengeluaran perkapita	Rp. (000)	9.900	9.684	9.771	10.061

Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka

Dalam empat tahun terakhir ini pembangunan manusia di Mandailing Natal terus mengalami kemajuan. IPM Mandailing Natal meningkat dari 66,52 pada tahun 2019 menjadi 68,05 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Mandailing Natal rata-rata tumbuh sebesar 0,76% persen per tahun dan berada pada level “sedang” sejak 2019. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pencapaian pembangunan manusia Mandailing Natal pada tahun 2020. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 66,79 atau hanya tumbuh 0,41 persen. Pertumbuhan IPM tahun 2020 melambat jika dibandingkan pertumbuhan IPM tahun 2019 sebesar 66,52. Namun demikian, IPM mulai mengalami percepatan di tahun 2021 hingga tahun 2022. IPM Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 adalah sebesar 68,05 atau tumbuh 1,28 persen (meningkat 0,86 poin) dibandingkan capaian IPM 2021.



**Grafik 2.5 IPM Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019-2022**



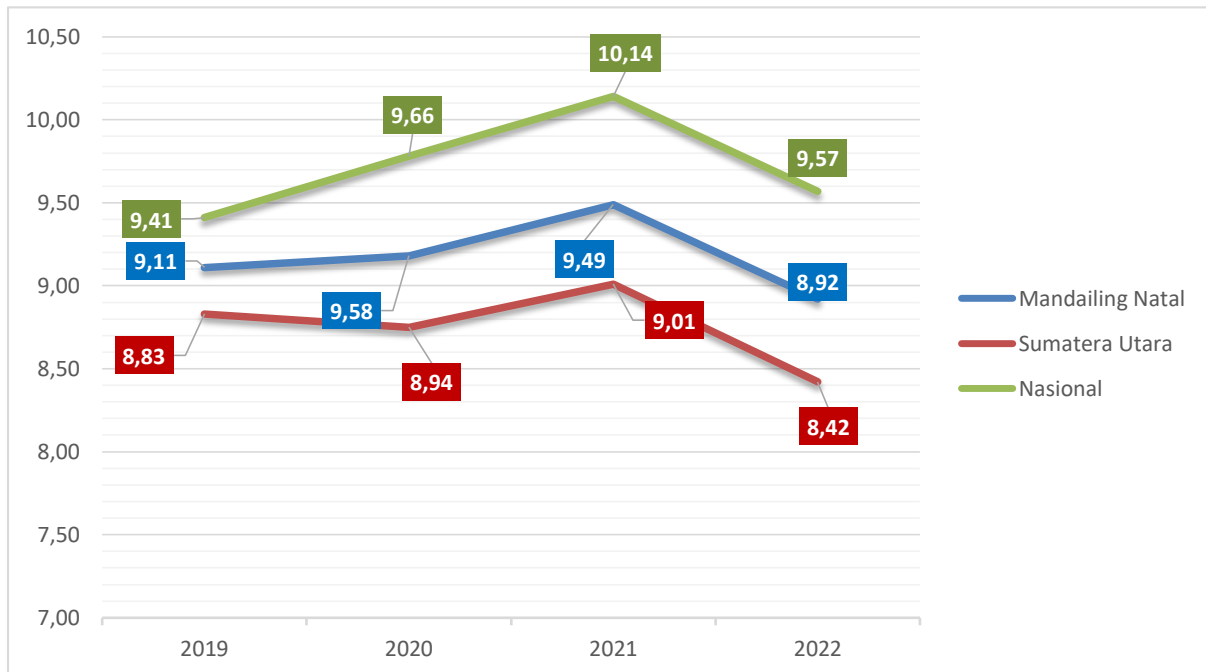
Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka

2.2.2.2. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Persentase masyarakat miskin di Kabupaten Mandailing Natal cenderung fluktuatif.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal pada periode tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2020 dan tahun 2021 sempat mengalami peningkatan yang merupakan dampak dari pandemic Covid-19. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan hingga mencapai 8,92%.

Grafik 2.6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka

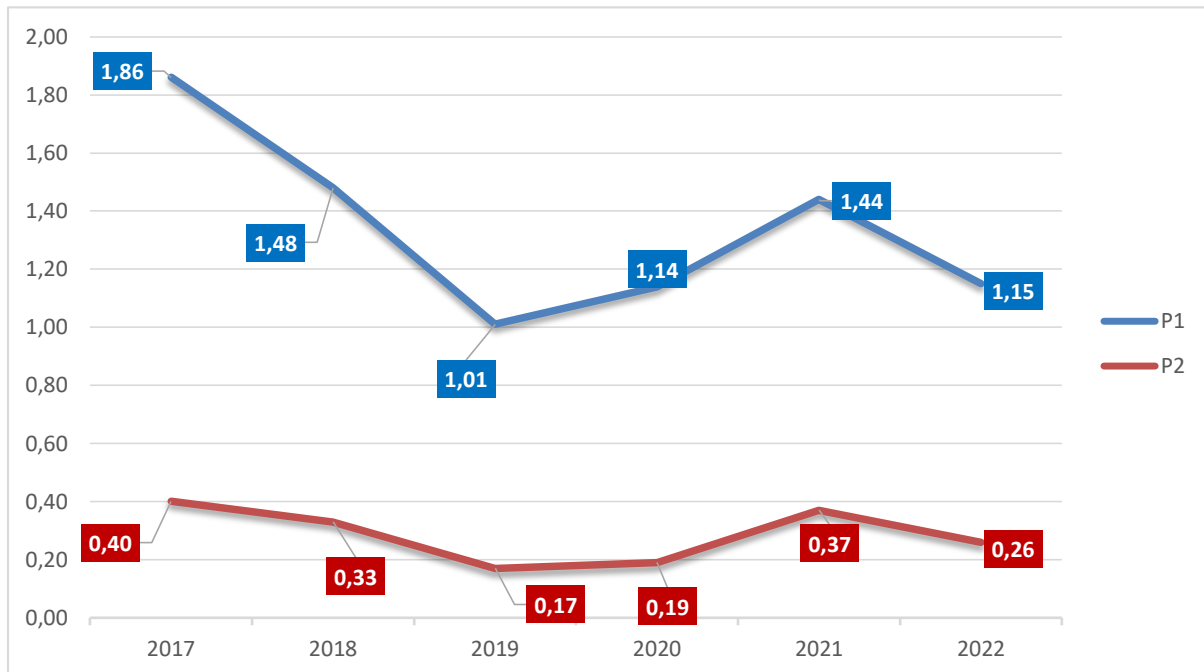
Dari grafik tersebut pada tahun 2022 persentase penduduk miskin Kabupaten Mandailing Natal sebesar 8,92 atau masih lebih besar dibanding Provinsi Sumatera Utara yang memiliki nilai sebesar 8,42%, namun masih lebih rendah dari persentase penduduk miskin secara Nasional yaitu 9,57%.

2.2.2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah rata-rata penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2022



Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 1,15% dari tahun sebelumnya sebesar 1,44%. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan dari 0,37 pada tahun 2021 menjadi 0,26 pada tahun 2022.

2.2.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah Angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal. Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan tabel 2.13, TPAK Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan, TPAK Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 sebesar 71,15%, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Mandailing Natal terdapat 71 penduduk yang potensial untuk mengisi lapangan kerja.

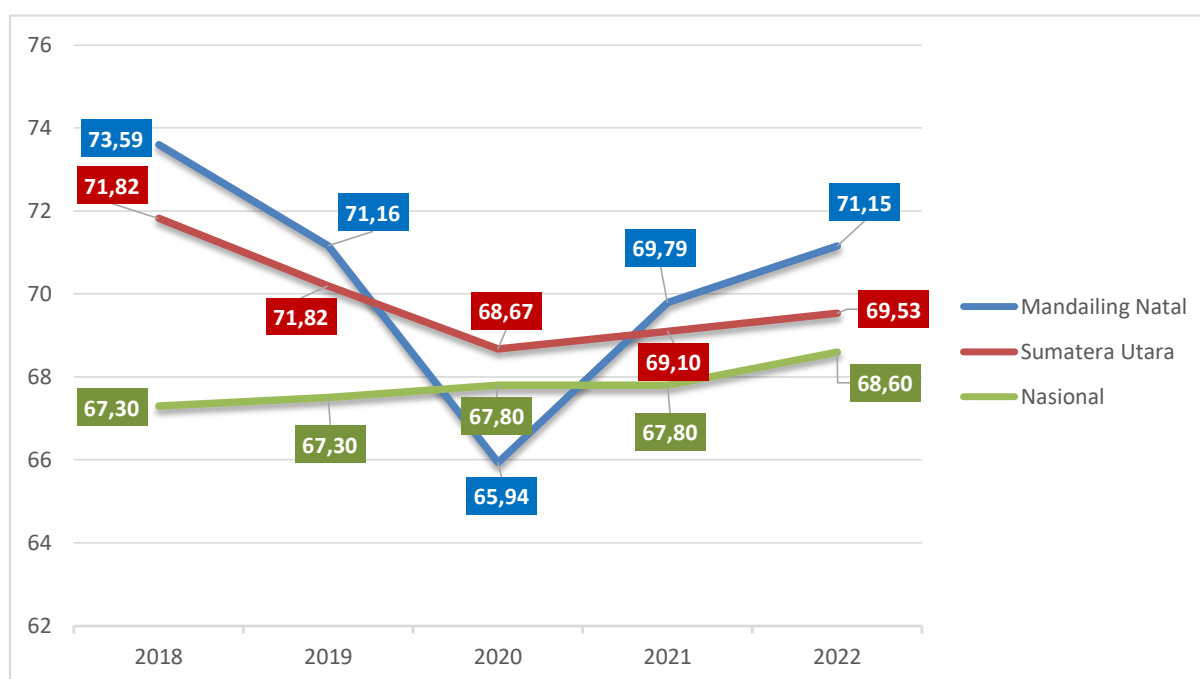


Tabel 2.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Mandailing Natal	73,59	71,16	65,94	69,79	71,15
Provinsi Sumatera Utara	71,82	70,19	68,67	69,10	69,53
Nasional	67,30	67,50	67,80	67,80	68,60

Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka

Grafik 2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 sebesar 71,15%, lebih baik dari TPAK secara nasional yaitu 68,60% dan lebih tinggi dari provinsi Sumatera Utara yaitu 69,53%.

2.2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 sebanyak 321.124 jiwa.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Tingkat



pengangguran terbuka mengalami kenaikan menjadi 7,64 persen pada tahun 2022 naik 1,52 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 6,12 persen.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional di Tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mandailing Natal lebih tinggi. Dimana tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara dan Nasional berada pada angka 6,16 dan 5,86.

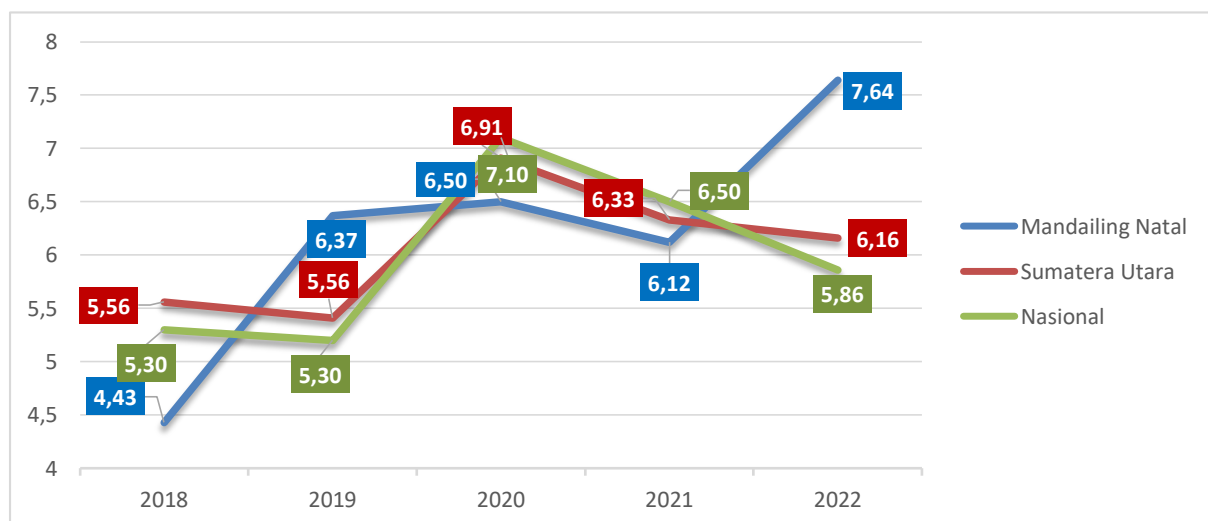
Tingkat pengangguran terbuka yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, diantaranya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mendorong pembukaan lapangan kerja baru serta peningkatan keterampilan dan mental kerja masyarakat yang dapat membangun mental kewirausahaan dan kemandirian masyarakat.

Tabel 2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022

URAIAN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Mandailing Natal	4,43	6,37	6,50	6,12	7,64
Provinsi Sumatera Utara	5,56	5,41	6,91	6,33	6,16
Nasional	5,30	5,20	7,10	6,50	5,86

Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka

Grafik 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka



Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Hal ini karena banyak sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam memproduksi.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

a. Kualitas Pendidikan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui revolusi belajar mengajar dan pelatihan sosial menuju perubahan dari konsumtif menjadi produktif adalah merupakan salah satu misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mandailing Natal 2021-2026. Tujuan dari misi pembangunan daerah ini adalah untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dengan salah satu sasarnya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.

Persentase penduduk yang masih bersekolah di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 yang berusia 7-24 tahun adalah sebesar 74,75 persen, 73,65% laki-laki dan 75,83% perempuan. Sedangkan Persentase penduduk yang tidak sekolah lagi di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 adalah sebesar 22,95% yang terdiri dari 24,16% laki-laki dan 21,78% perempuan.



Tabel 2.13 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, 2018-2021 di Kabupaten Mandailing Natal.

URAIAN		TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
Tidak/Belum Pernah Sekolah	Laki-Laki	0,00	0,00	0,55	0,49
	Perempuan	0,11	0,00	0,00	0,14
Total		0,06	0,00	0,28	0,32
Masih Sekolah	Laki-Laki	71,60	71,57	74,87	67,80
	Perempuan	73,94	74,86	74,19	74,09
Total		72,94	73,19	74,53	70,90
Tidak Sekolah Lagi	Laki-Laki	28,40	28,43	24,58	31,71
	Perempuan	25,95	25,14	25,81	25,77
Total		27,00	26,81	25,19	28,78

Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka

Tabel 2.14 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2022

Karakteristik	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah			Masih Sekolah di Perguruan Tinggi	Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/ke atas			
Jenis Kelamin							
Laki-laki	1,66	38,15	14,08	13,54	5,68	26,88	100
Perempuan	1,38	38,40	14,30	11,89	5,79	28,24	100
Mandailing Natal	1.53	38,27	14,18	12,74	5.73	27.55	100

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

b. Rasio Siswa per Guru

Rasio siswa per guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Kriteria: makin tinggi rasio berarti makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di suatu daerah. Rasio siswa/guru digunakan untuk mengetahui rata rata guru yang dapat melayani siswa disuatu sekolah dan daerah sehingga dapat ditentukan daerah mana yang memerlukan tambahan guru. Rasio guru dan murid sekolah TK/RA,



SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022/2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.15 Jumlah Sekolah, Rasio Guru dan Murid 2022/2023 di Kabupaten Mandailing Natal.

No	Uraian	Di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Di Bawah Kementerian Agama	Total
1.	TK/RA			
	Jumlah Sekolah	66	22	88
	Jumlah guru TK	264	130	394
	Jumlah siswa TK	2.262	1.514	3.776
	Rasio per 1000	116,71	85,87	104,34
2.	SD/MI			
	Jumlah Sekolah	412	7	419
	Jumlah guru SD	4.670	128	4.798
	Jumlah siswa SD	56.609	1.287	57.896
	Rasio per 1000	82,50	99,46	82,87
3.	SMP/MTs			
	Jumlah Sekolah	85	43	128
	Jumlah guru SMP	1.829	1.053	2.882
	Jumlah siswa SMP	11.659	9.819	21.478
	Rasio per 1000	156,87	107,24	134,18

Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka dan Data Diolah

c. Angka Harapan Lama Sekolah & Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pada tahun 2022, harapan lama sekolah di Mandailing Natal telah mencapai 13,85 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga Diploma 1. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Mandailing Natal terus tumbuh dari tahun selama periode 2019 hingga 2022. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Mandailing Natal yang lebih baik. Pada tahun 2022, lama sekolah penduduk Mandailing Natal usia 25 tahun ke



atas secara rata-rata mencapai 8,76 tahun, atau telah menamatkan pendidikan hingga bangku kelas II atau kelas VIII tingkat SLTP.

Tabel 2.16 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Mandailing Natal dan Sumatera Utara, 2018-2022

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	
	Mandailing Natal	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Sumatera Utara
2018	13,15	13,14	8,11	9,34
2019	13,17	13,15	8,36	9,45
2020	13,32	13,23	8,62	9,54
2021	13,61	13,27	8,63	9,58
2022	13,85	13,31	8,76	9,71

Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka

d. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

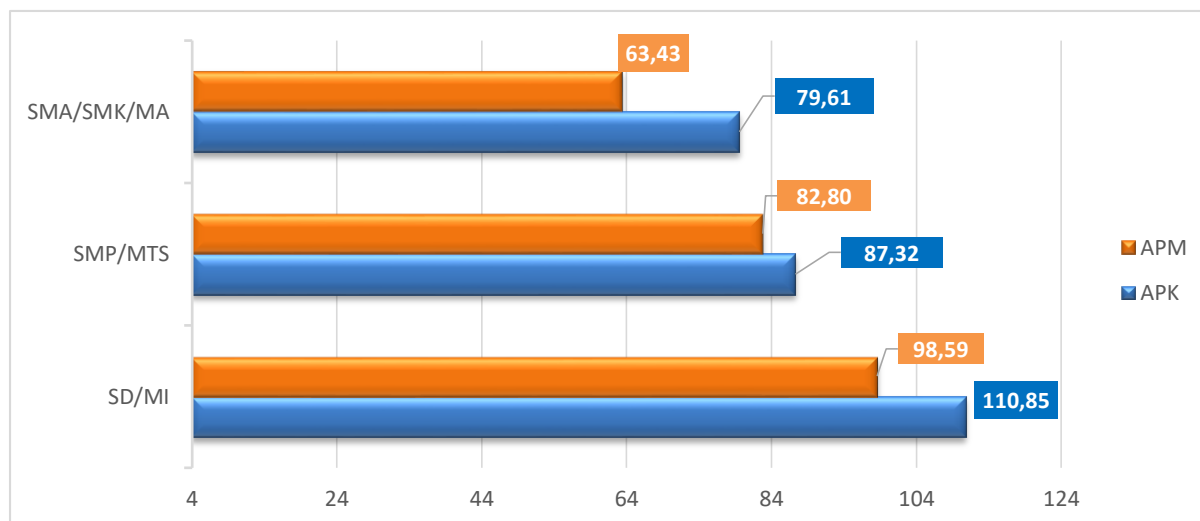
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2022, APK di tingkat SD sebesar 110,85%, di tingkat SMP 87,32% dan ditingkat SMA 79,61%. Sementara Persentase APM Tahun 2022

APM di tingkat SD sebesar 98,59%, di tingkat SMP 82,80% dan ditingkat SMA 63,43%.

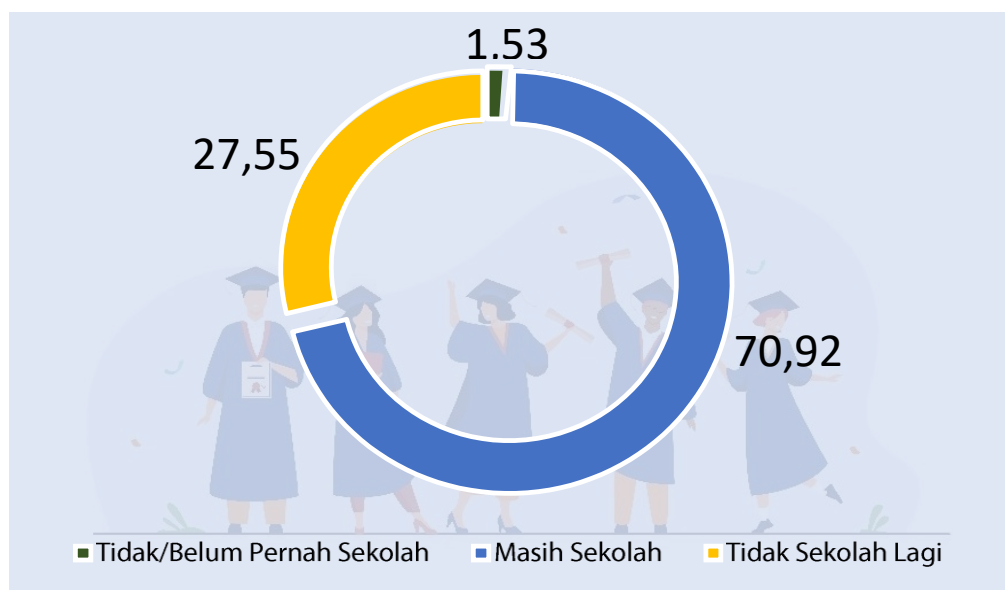
Secara rinci nilai APK dan APM di Kabupaten Mandailing Natal ditampilkan pada diagram berikut:

Grafik 2.10 Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, 2022



Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka

Gambar 2.3. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Partisipasi Sekolah, Tahun 2022 di Kabupaten Mandailing Natal.



Catatan : Termasuk pendidikan non formal (Paket A, Paket B atau Paket C)
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan



Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. SPM Bidang Pendidikan yang merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten meliputi Pendidikan Dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya di dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 disebutkan target capaian untuk SPM bidang urusan harus mencapai 100 persen. Capaian indikator pendidikan yang meliputi pemenuhan SPM Pendidikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.17 Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2019	2020	2021	2022
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	30,70	31,00	49,56	51,20
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	83,40	93,40	83,14	86,30
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	63,60	71,50	79,97	80,50

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, 2022

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Dalam upaya penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pelaksana urusan Pemerintah bidang kesehatan, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini sebagai bentuk

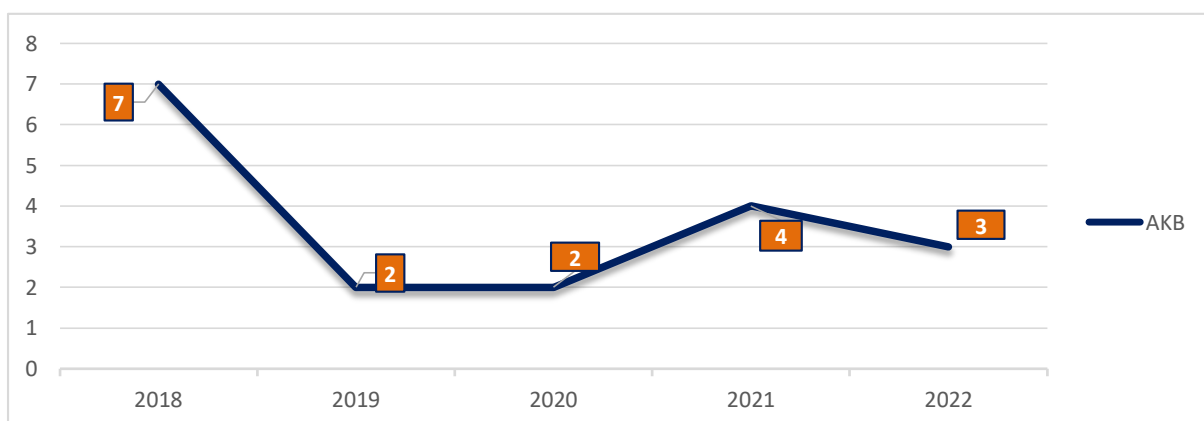


pelaksanaan amanat Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun. Cara perhitungannya adalah jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun di wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah lahir hidup di wilayah dan periode waktu yang sama per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi digunakan untuk menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan. Capaian kinerja angka kematian bayi pada tahun 2022 adalah sebesar 3 per 1.000 kelahiran hidup, dengan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya penurunan angka kematian bayi telah jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu 8 per 1.000 kelahiran hidup. Berikut akan disajikan perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Mandailing Natal dalam lima tahun terakhir.

Grafik 2.11 Tren penurunan dan peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 kelahiran hidup di kabupaten mandailing natal tahun 2018-2022



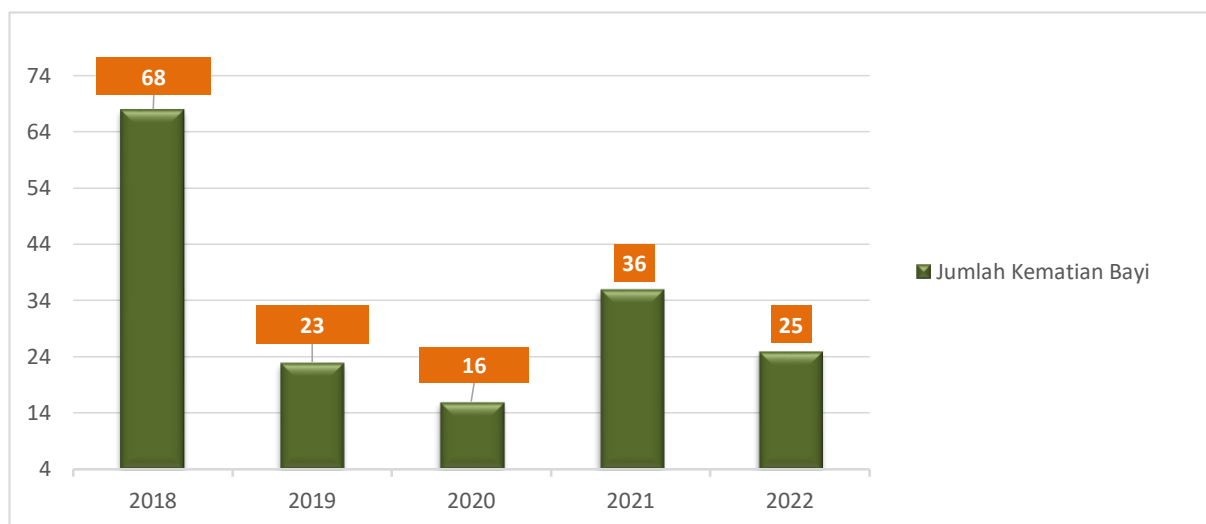
Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Kabupaten Mandailing Natal, 2022



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perkembangan AKB di 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi pada tahun 2018 sebesar 7 per 1.000 kelahiran hidup, menurun pada tahun 2019 dan 2020 yaitu menjadi 2 per 1.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2021 AKB meningkat kembali yaitu sebesar 4 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2022 menurun menjadi 3 per 1.000 kelahiran hidup.

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Mandailing Natal dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Grafik 2.12 Jumlah Kematian Bayi (AKB) Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018-2022



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Kabupaten Mandailing Natal, 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat jumlah kematian bayi tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sebanyak 68 kasus, menurun pada tahun 2019 sebanyak 23 kasus dan berhasil ditekan hingga 16 kasus di tahun 2020. Namun kematian bayi meningkat di 2021 sebanyak 36 kasus dan menurun kembali sebanyak 25 kasus di tahun 2022. Jumlah kasus Kematian bayi tertinggi terjadi di wilayah kerja Puskesmas Panyabungan Jae dan Puskesmas Kayu Laut 4 kasus kematian.

Penyebab utama kematian bayi terbanyak di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 untuk bayi (0-28 hari) yaitu BBLR dan Prematurisasi sebanyak 8 kasus, Asfiksia sebanyak 12 kasus dan 1 kasus penyebab lainnya.



Sedangkan penyebab kematian bayi (29 hari-11 bulan) yaitu penyebab lainnya sebanyak 3 kasus seperti batuk dan demam.

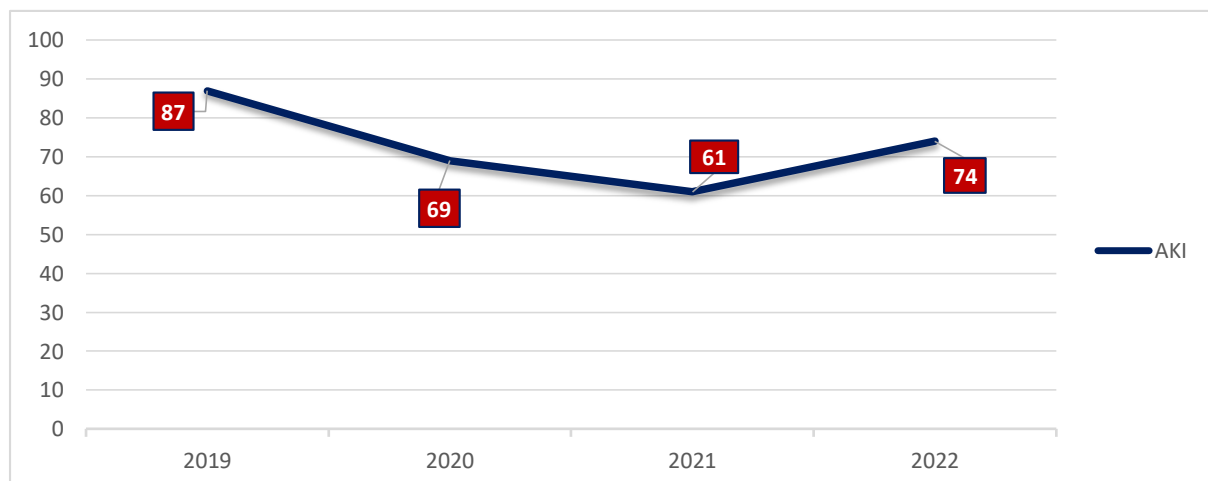
b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah pada periode tertentu. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Keberhasilan kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka kematian ibu merupakan indikator yang sensitif digunakan untuk mengukur keberhasilan pelayanan kesehatan dasar. Angka kematian ibu dihitung dengan menjumlahkan kematian ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama x 100.000 kelahiran hidup.

Berikut disajikan perkembangan Angka kematian ibu di Kabupaten Mandailing Natal selama empat tahun terakhir.

Grafik 2.13 Trend Penurunan Dan Peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Kabupaten Mandailing Natal, 2022



Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat AKI pada tahun 2020 menunjukkan sebesar 69 per 100.000 kelahiran hidup menurun hingga 61 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2021. Namun telah meningkat kembali ditahun 2022 yaitu sebesar 74 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu dihitung dengan menjumlahkan kematian ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama x 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan target urusan Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022, capaian AKI belum melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 55,37 per 100.000 kelahiran hidup.

Jumlah kematian ibu di tahun 2022 tercatat sebanyak 6 kasus kematian. Dalam upaya pencapaian SDG's dan tujuan pembangunan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan ibu diprioritaskan dengan menurunkan Angka Kematian Ibu dibawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan nifas.

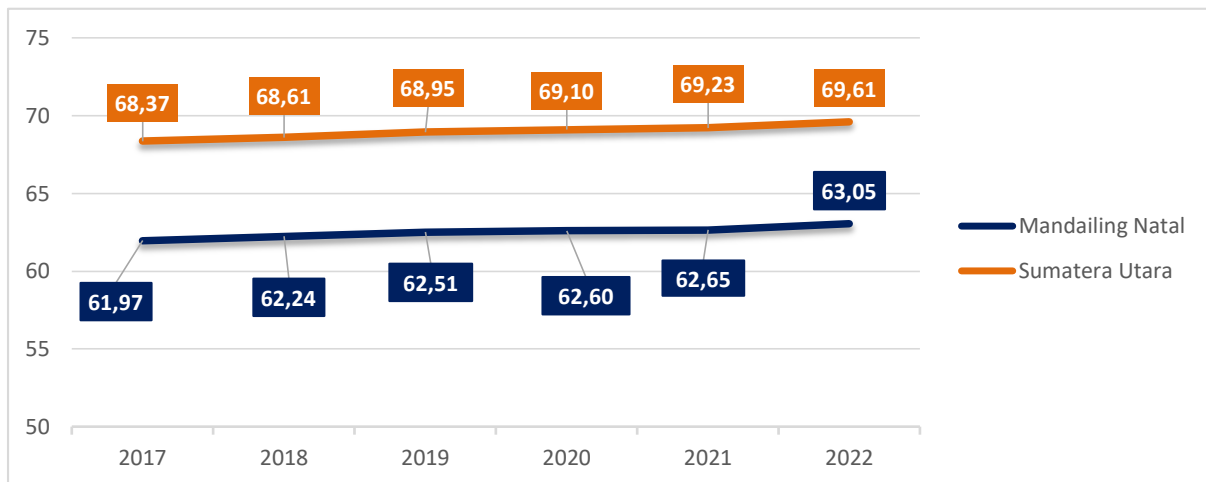
c. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Usia harapan hidup juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia. Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori serta program pemberantasan kemiskinan.

Usia Harapan Hidup di Kabupaten Mandailing Natal di tahun 2022 yaitu sebesar 63,05 tahun, di tahun 2020 sebesar 62,60 tahun dan tahun 2021 yaitu sebesar 62,65 tahun. Selama periode 2020 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 0,55 tahun.



Grafik 2.14 Usia Harapan Hidup Kabupaten Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Tahun 2017-2022



Sumber: BPS, Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka

d. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1000 HPK. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku.

Penurunan *stunting* penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. *Stunting* mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal, hal ini beresiko menurunkan produktifitas pada saat dewasa. *Stunting* dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Upaya penurunan *stunting* dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi sensitif untuk penyebab tidak langsung. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan



pemerintah dari lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan. Penurunan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang harus dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung.

Prevalensi Stunting di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 34,2%. Angka ini menurun sebesar 13,5% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 47,7%.

Tabel 2.18 Prevalensi Stunting Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2022

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Prevalensi Stunting	49,6%	48,1%	47,7%	34,2%

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

e. Universal Health Coverage (UHC)

Jaminan kesehatan adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pada tahun 2022, sebanyak 7,21% penduduk Mandailing Natal yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan.

Tabel 2.19 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2022

Karakteristik	Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan
Jenis Kelamin	
Laki-laki	9,13
Perempuan	5,33
Mandailing Natal	7,21

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau UHC mengandung dua elemen inti yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.



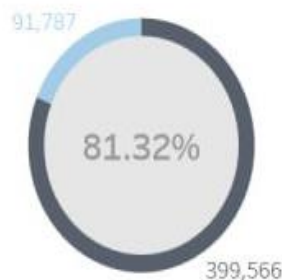
Persentase UHC di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 adalah sebesar 75,59%, di tahun 2023 sebesar 81,32% dan di tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal akan me-*launching* cakupan kesehatan semesta (UHC) sebesar 95%.

**Gambar 2.4. Progress Pencapaian UHC (Universal Health Coverage)
Desember Tahun 2023 di Kabupaten Mandailing Natal**

Sumber :

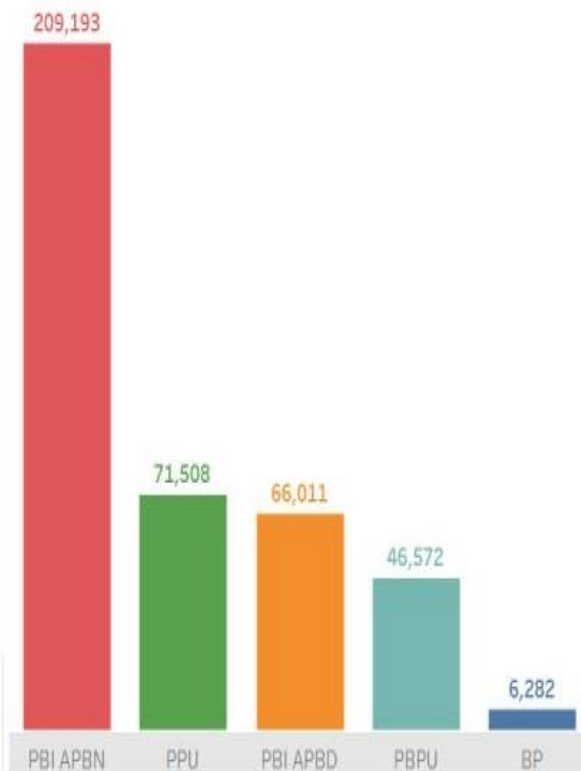
Progress Pencapaian UHC
(Universal Health Coverage) *December 2023*

Jumlah Penduduk
MANDAILING NATAL: 491,353 jiwa



Sumber:
- Jumlah penduduk Nasional : Data dukcapil semester II tahun 2022
- Jumlah Peserta JKN-KIS : Data Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan

Distribusi Peserta JKN-KIS berdasarkan segmentasi



BPJS Kesehatan, Tahun 2023

f. Cakupan Penduduk Miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri atas dua kelompok yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta PBI jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta bukan PBI jaminan kesehatan adalah Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.



Jumlah peserta program JKN pada tahun 2022 adalah sebesar 314.756 jiwa atau 68,37% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 287.819 jiwa atau sebesar 60,2%. Sedangkan cakupan penduduk miskin penerima bantuan iuran (PBI) yaitu 45,32%. Pencapaian ini masih belum mampu mencapai target sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 adalah sebesar 46,7%. Peserta Program JKN pada tahun 2022 terdiri dari peserta PBI yang berjumlah 208.613 jiwa dan peserta non PBI yang berjumlah 106.143 jiwa. Peserta PBI terdiri dari peserta dengan iuran bersumber dari APBN sebanyak 166.103 jiwa dan yang bersumber dari APBD (Provinsi) sebanyak 42.510 jiwa. Sedangkan untuk peserta Non PBI terdiri atas Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 57.779 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri sebanyak 44.476 jiwa, dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 3.888 jiwa.

Tabel 2.20 Anggaran PBI Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI)	4.660.312.500	10.120.368.000	13.343601.600	17.109.859.200	43.442.985.600

Sumber: Bapperida Kabupaten Mandailing Natal

g. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan adalah ukuran kualitas hidup manusia yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia (IPM) yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar, dan kesehatan termasuk dalam salah satu dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 adalah sebesar 0,77, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,684. Angka ini telah mencapai target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026 yaitu 0,689 di tahun 2022.

h. Capaian SPM Urusan Kesehatan

Capaian indikator Kesehatan yang meliputi pemenuhan SPM Pendidikan antara lain sebagai berikut:



**Tabel 2. 21 Capaian SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal
tahun 2020-2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	78,2%	84,60%	92%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	78,0%	85,00%	81%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	82,4%	65,80%	85%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	52,3%	64,10%	54%
5	Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan dasar	100%	73,9%	88,30%	95,10%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	32,9%	9,70%	44,40%
7	Pelayanan Kesehatan Pada usia Lanjut	100%	70,5%	71,60%	79,40%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	7,8%	13,30%	51,70%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	100%	67,2%	48,60%	76,20%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	72,1%	78,40%	79%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%	97,7%	35,03%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	39,4%	52,10%	48,10%

Sumber : Dinkes Kabupaten Mandailing Natal, 2022



**RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026**

Capaian Indikator Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal dapat di lihat pada capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	89/100.000 KLH	87/100.000 KLH	80/100.000 KLH	69/100.000 KLH	72/100.000 KLH	61/100.000 KLH	55,37/100.000 KLH	74,5/100.000 KLH
2	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 kelahiran hidup	9/1.000 KLH	2/1.000 KLH	9/1.000 KLH	2/1.000 KLH	8/1.000 KLH	4/1.000 KLH	4/1.000 KLH	3/1.000 KLH
3	Prevalensi stunting	Persen			N/a	N/a	47,70	47,7	40,00	34,2
4	Cakupan penduduk miskin penerima bantuan iuran (PBI)	Persen			100	50,4	100	43,5	46,7	68,37
5	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Persen			N/a	N/a	12,60	N/a	10,95	4,73
6	Angka Kesakitan malaria (Annual Paracite Incidence) per 1000 penduduk	Per 1000 penduduk			2	0,04	0,02	0,02	0,03	0
7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child	Persen			94	70,3	73	73,0	80	77



**RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026**

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	Immunization (UCI)									
8	Cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen			100	100	100	100	100	100
9	Persentase penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	Persen			72	42,5	43	50	45	58,26
10	Cakupan PIRT yang mendapatkan SPP IRT	Persen			N/a	N/a	60	N/a	65	20
11	Persentase ketersediaan obat esensial di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen			95	100	100	100	95	97,50
12	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen			N/a	N/a	80	42,3	85	23,08
13	Persentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Persen			N/a	N/a	N/a	N/a	70	45,54



**RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026**

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	(SPA) Sesuai standar									
14	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen			N/a	31,9	36	36,4	65	49,6
15	Bed Turn Over (BTO)	Kali			N/a	31,1kali	36 kali	36 kali	40 kali	51 kali
16	Length Of Stay (LOS)	Hari			N/a	3 hari	3 hari	3 hari	6 hari	3 hari
17	Turn Over Internal (TOI)	Hari			N/a	8 hari	6 hari	6 hari	3 hari	4 hari
18	Capaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen								
19	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks			N/a	N/a	0,25 (25%)	N/a	0,27 (27%)	0,98
20	Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen			65	67,7	70	68,34	70	68,37
21	UHC (Universal Health Coverage)	Persen			N/a	N/a	67,20	N/a	70	75,64
22	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks			N/a	N/a	N/a	N/a	3,2	79,01
23	Indeks kesehatan	Indeks	-	-	-	-	-	0,683	0,686	
24	Usia harapan hidup	Tahun	62,40 Tahun	62,51 Tahun	62,61 Tahun	62,60 Tahun	62,82 Tahun	62,65 Tahun	63,77 Tahun	63,05 Tahun
25	Cakupan Pelayanan Kesehatan	Persen			80	100	90	100	58	50



**RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026**

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021		2022	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	Tradisional di Pukesmas									
26	Persentase Puskesmas yang memiliki tanaman toga di puskesmas	persen			N/a	N/a	N/a	N/a	55	60
27	Persentase kasus gawat darurat dengan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPDGT)	Persen			N/a	N/a	N/a	N/a	70	68
28	Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen			100	100	100	100	100	100
29	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	Orang	8,83/100.000 penduduk	8,0/100.000 penduduk	9,71/100.000 penduduk	8,0/100.000 penduduk	10,68 /100.000 penduduk	5,3/100.000 penduduk		
30	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk	Orang	21,51/100.000 penduduk	17,0/100.000 penduduk	24,74 /100.000 penduduk	18,0/100.000 penduduk	28,45 /100.000 penduduk	24,7/100.000 penduduk		
31	Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk	Orang	4,51/100.000 penduduk	4,2/100.000 penduduk	4,74/100.000 penduduk	5,8/100.000 penduduk	4,97 /100.000 penduduk	6,1/100.000 penduduk		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, 2022



2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Indikator Bidang Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 23 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	PEKERJAAN UMUM								
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	49	49	52	52	55,49	55,49	54	46,19
2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	3,6	3,69	3,55	3,6	3,78	3,81	3,73	3,81
3	Persentase Kelurahan/Desa Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	7,14	7	6,64	6,7	8,66	5,9	8,17	5,9
4	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	54	33,78	57	41,92	60	45,87	63	55,18
5	Rasio Jaringan Irigasi	35	30,57	38	31,52	41,74	32,83	45,5	33,95
6	Rasio Jaringan irigasi kondisi baik	35	30,57	38	31,52	41,74	32,83	45,5	33,95
8	Persentase balai kecamatan, kelurahan dan desa dalam kondisi Baik	72	70	73	73	47,83	47,83	50,22	49,8
9	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	66,49	69,6	67,82	71,8	75,04	72	76,8	74
10	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	32,08	32,1	32,73	35	39,44	35,5	48,99	36,74
	PENATAAN RUANG								
1	Rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan	10	10	15	15	15	16	20	50
2	Tersedianya dokumen tata ruang yang telah ditetapkan	2	2	2	2	1	1	1	1
3	Tersedianya SHPK dan Dokumen Terkait IMB	5	5	5	5	-	-	10	150
4	Tersedianya Sistem Informasi Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022



Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 tercapai sebanyak 13,03 Km dan meningkat pada tahun 2022 dengan capaian sebanyak 37,19 Km. Target capaian untuk proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 54 Km.

Tabel 2. 24 Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	100%	78,2%	84,60%	74 %
2	Cakupan Layanan Akses Sanitasi Layak	100%	35%	35,5%	36,74%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian Indikator Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Mandailing Natal dapat di lihat pada capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 25 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase Akses Rumah Layak Huni	18,53	18,53	18,62	31,68	49,11	49,11	50,34	49,45
2	Persentase Permukiman Kumuh	0,009	0,000528	0,065	0,00007365	0,065	0,000076	0,1	0,00007814
3	Jumlah PSU Terbangun	147	66	63	39	160	114	54	55

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2022

a. Persentase Akses Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta Kesehatan penghuni. Definisi rumah layak huni diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Pasal 24



huruf A. Adapun kelayakan rumah layak huni diukur dari fasilitas rumah seperti luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas MCK. Rumah layak huni harus memiliki struktur yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan suplai air bersih pada rumah tersebut. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau menurut Data Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sebesar 64,65 %, tahun 2020 Sebesar 67,44 %, tahun 2021 sebesar 69,48 %, tahun 2022 sebesar 67,26 %. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan persentase rumah yang memiliki akses layak huni masih dibawah data Provinsi.

b. Persentase Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Definisi tersebut di atur dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Permukiman Kumuh di Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan hasil survey lapangan seluas 237,57 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan dan 31 Desa/Kelurahan sampai dengan Tahun 2022.

2.3.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Capaian Indikator Bidang Urusan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dapat di lihat pada capaian indikator sebagai berikut:

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2. 26 Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Cakupan petugas Perlindungan	-	-	-	-	30	30	30	30



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	Masyarakat (Linmas)								
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	270	213	328	221	330	230	335	236
3	Persentase penegakan PERDA	73,30	62	75,53	60	76,60	60	76,60	76,90
4	Persentase Kejadian Kebakaran yang Tertangani	88,10	55	88,37	55	85,71	58	89,00	58
5	Rata Rata Response Time Penanganan Kebakaran	60 Menit	45 Menit	60 Menit	45 Menit	58 Menit	40 Menit	45 Menit	30 Menit

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mandailing Natal, 2022

Tabel 2.27 Capaian SPM Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	25,0%	30,0%	30,0%	31,0%
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	55%	55%	58%	58%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mandailing Natal, 2022

2) Penanggulangan Bencana

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan daerah yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait program penanggulangan bencana, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 28 Tabel Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Pelayanan informasi rawan benana	-	91,0	-	98,1	-	97,40	100	100,00
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	80,0	-	83,0	-	94,70	100	96,47



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	n Terhadap Bencana								
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	84,0	-	98,5	-	91,55	100	100,00
4	Indeks Resiko Bencana	-	214,80*	-	214,80*	-	214,80*	211,80	214,80*

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kab. Mandailing Natal, 2022

a. Pelayanan informasi rawan bencana

Target 2020 dan 2021 adalah 0 (nihil) sedangkan target 2022 sebesar 100% dari hasil laporan realisasi diperoleh capaian kinerja tahun 2020 sebesar 98,1% tahun 2020 turun menjadi 97,4% dan tahun 2022 naik menjadi 100% sesuai target.

b. Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Target 2020 dan 2021 adalah 0 (nihil) sedangkan target 2022 sebesar 100% dari hasil laporan realisasi diperoleh capaian kinerja tahun 2020 sebesar 98,5% tahun 2020 naik menjadi 94,7% dan tahun 2022 naik menjadi 96,47% mendekati target. Kekurangan realisasi disebabkan adanya kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya perubahan jadwal/penundaan.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Target 2020 dan 2021 adalah 0 (nihil) sedangkan target 2022 sebesar 100% dari hasil laporan realisasi diperoleh capaian kinerja tahun 2020 sebesar 98,1% tahun 2020 naik menjadi 91,55% dan tahun 2022 naik menjadi 100% sesuai target.

d. Indeks Resiko Bencana

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada bulan Januari 2023, dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia terdapat 192



Kabupaten/Kota yang berada pada kelas indeks resiko tinggi. Untuk wilayah Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal menempati urutan kedua Kelas Resiko 2022 dengan kategori Tinggi dengan skor 214,8 (dua ratus empat belas koma delapan) setelah Kota Gunung Sitoli yang mempunyai skor 215,6 (dua ratus lima belas koma enam).

Pengurangan risiko bencana (PRB) atau disaster risk reduction (DRR) adalah pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana. Praktiknya adalah dengan melakukan upaya-upaya sistematis dalam menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana. Berkurangnya risiko bencana dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas daerah/masyarakat dalam menghadapi bencana yang digambarkan dengan menurunnya Indeks Risiko Bencana.

Tabel 2. 29 Capaian SPM Bidang Urusan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	91,0%	98,1%	97,40%	52,0%
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80,0%	83,0%	94,70%	71,25%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	84,0%	98,5%	91,55%	68,0%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kab. Mandailing Natal, 2022

2.3.1.6. Urusan Sosial

Capaian Indikator Bidang Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2. 30 Tabel Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Luar Panti	n.a	70	n.a	35	n.a	40	100	62
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	n.a	100	n.a	100	n.a	100	40	7,5
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di Luar Panti	n.a	55	n.a	-	n.a	-	80	31,51
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	n.a	70	n.a	50	n.a	45	60	5
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana	n.a	93,42	n.a	90	n.a	77,2	60	58,3
6	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial	n.a	2,1	n.a	0,8	n.a	2.2	60	52,7

Sumber: Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal, 2022

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Luar Panti

Penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar diluar Panti Sosial tahun 2019-2022 tidak dapat dilaksanakan dengan optimal dikarenakan minimnya anggaran akibat



refocusing. Berdasarkan data yang diterima dari desa / Kelurahan data Penyandang Disabilitas sebanyak 438 orang dan lanjut usia sebanyak 19.581 orang. Penyandang Disabilitas yang sudah ditangani Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal sampai dengan tahun 2022 sebanyak 328 orang.

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti yang ada di Kabupaten Mandailing Natal memiliki capaian 100 % setiap tahunnya (2019 – 2021), dan Ditahun 2022 sebesar 7,5%.

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di Luar Panti

Lanjut usia terlantar sebanyak 690 orang ditahun 2022 dengan capaian 31,51 %, sedangkan untuk tahun sebelumnya tidak dilaksanakan akibat refocusing.

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Tahun 2019, sebanyak 17 Orang dengan Capaian 70%, pada tahun 2020 sebanyak 7 orang dengan capaian 50%, tahun 2021 45% dari 11 orang, dan ditahun 2022 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial adalah 100% dari 38 orang tunasusila dan 3 orang gelandangan.

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2019 sebanyak 76 KK data korban bencana yang ada, 71 KK ditangani Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal, sehingga didapat persentase sebesar 93,42%, di tahun 2020 sebanyak 90 KK data korban bencana yang ada, 81 KK ditangani Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal, sehingga didapat persentase sebesar 90%, dan tahun 2021 sebanyak 44 KK data korban bencana yang ada, 34 KK ditangani Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal, sehingga didapat persentase sebesar 77,2 %. Pada Tahun 2022 diperoleh capaian 58,3% dari 46 KK



korban bencana dan yang dapat ditangani oleh Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal sebanyak 35 KK.

f. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial

Dari 74.007 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di tahun 2019 sebanyak 54.255 KK adalah data fakir miskin yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat, sisanya 19.752 orang. Yang baru dapat ditangani Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal hanya 408 orang, sehingga didapat persentasenya sebesar 2,1%. Tahun 2020 jumlah PMKS sebanyak 73.020, dimana 54.255 KK adalah data fakir miskin yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat, 18.765 orang PMKS adalah sisanya, dan yang ditangani Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 150 orang dengan persentase 0,8%. Sedangkan di tahun 2021 sebanyak 77.860 KK adalah data fakir miskin yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Dimana 95.712 data PMKS yang ada di Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal, sisanya sebanyak 17.852 orang. Dan yang ditangani Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal sebanyak 387 orang dengan persentase 2.2%. Sedangkan ditahun 2022 sebanyak 3.899 orang yang mendapat bantuan, dengan capaian 52,7%.

Tabel 2. 31 Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2019	2020	2021	2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	39,50%	44,20%	64,25%	80%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100 %	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1,30%	0%	10%	80%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100%	100%	100 %	100 %



		dasar tuna sosial diluar panti				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	93,10%	94,40%	95,40%	95%

Sumber: Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal, 2022

2.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 32 Hasil Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Angka sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun (Kasus)	-	3	-	7	-	4	20,0	4,0
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-	1	-	-	-	-	20,0	-
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	211	-	78	-	60	70,0	115,0
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	-	6.124	-	6.124	-	6.174	6.224,0	17.410,0
5	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Berbasis Kompetensi	-	992	-	320	-	160	48,0	400,0
6	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Berbasis Masyarakat	-	-	-	160	-	-	-	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Mandailing Natal, 2022



a. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun (Kasus)

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun di Kabupaten Mandailing Natal terjadi di tahun 2017 berjumlah 4 kasus, tahun 2019 berjumlah 3 kasus, tahun 2020 berjumlah 7 kasus, dan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun di Kabupaten Mandailing Natal menurun menjadi 4 kasus.

b. Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kabupaten Mandailing Natal selama lima tahun terakhir hanya terjadi di tahun 2019 yaitu sebanyak 1 kasus.

c. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Mandailing Natal empat tahun terakhir mengalami perubahan. Pada tahun 2019 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 211 orang. Berturut-turut di tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 211, 78, 60 dan 115 orang.

d. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Mandailing Natal selama empat tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2019 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 6.124 orang. Pada tahun 2019, 2020, 2021 besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Mandailing Natal berjumlah sama yaitu sebanyak 6.124 orang, dan untuk tahun 2021 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Mandailing Natal adalah sebanyak 6.174 orang.

e. Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih Berbasis Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Berbasis Kompetensi di Kabupaten Mandailing Natal selama lima tahun terakhir mengalami perubahan.



Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Berbasis Kompetensi di Kabupaten Mandailing Natal yang paling sedikit di tahun 2017 yaitu sebanyak 64 orang dan Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Berbasis Kompetensi di Kabupaten Mandailing Natal yang paling banyak terjadi di tahun 2018 yaitu sebanyak 1.008 orang

f. Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih Berbasis Masyarakat

Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Berbasis Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal hanya dilakukan di tahun 2017 dan 2020 yaitu sebanyak 48 orang dan 160 orang.

2.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Indikator Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 33 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	-	-	Madya	Pratama	Madya	Pratama
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100%	72,70%	100%	70,01%	100%	70,01%	100%	70,01%
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100%	93,62%	100%	93,24%	100%	93,24%	100%	93,24%
4.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100%	97%	100%	68%	100%	88%	100%	96%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

a. Kabupaten Layak Anak (KLA)

Program Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan kerja kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan didalam SK Tim, komponen penilai kategori yang dikelompokkan dalam klaster satu sampai lima adalah kegiatan OPD sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tahun 2019 target capaian kinerja KLA adalah Pratama, pada tahun 2020 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid 19. Pada tahun 2021 sampai dengan 2022 dari target Madya Kabupaten Mandailing



Natal baru bisa mencapai kategori Pratama, belum mencapai target kinerja Madya, keadaan ini menggambarkan bahwa masih terdapat beberapa kendala pada OPD pemangku kegiatan yang berhubungan dengan program Kabupaten Layak Anak.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pencapaian IDG Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan dan sampai dengan tahun 2022 mengalami stagnan pada angka 17,01 persen.

c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pencapaian IPG Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2019 sampai dengan 2022 masih dibawah 100, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian IPM perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki – laki, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pencapaian IPG tetap pada angka tersebut diatas, hal ini menunjukkan bahwa IPM perempuan dan laki – laki mengalami peningkatan.

d. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pada tahun 2019 pencapain target kinerja sebesar 97%. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan minimnya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari msyarakat. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 88%, ini menunjukkan bahwa pelaporan mulai meningkat. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 96%, tetapi masih dibawah capaian pada tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja masih dibawah 100%.

2.3.2.3. Urusan Pangan

Capaian Indikator Bidang Urusan Pangan terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 34 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Ketersediaan Pangan Utama	176,3	62.284,71	179,9	63.250,50	184,7	62.567,56	62.166,78	63.671,68
2	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	7.623	6.452,00	8.134	6.449,00	8.977	6.454,20	6.460,73	6.942,94



**RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		216,29	140	230,56	145,2	253,38	151,22	153,74	165,21
3	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,3	87,9	83,7	83,3	86,9	83,58	85,3	85,2
4	Penguatan Cadangan Pangan	2,7	2,7	2,7	2,7	4,7	4,7	4,7	7,724
5	Peningkatan Angka Ketersediaan Pangan	377.240	395.109	387.167	307.748	327.752	304.917	325.558	348.347
		26.085	27.321	26.772	21.280	27.458	27.389	28.141	29.031
6	Angka Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	354,98	297,77	378,32	299,95	417,53	300,19	300,5	322,93
		379,46	245,61	404,49	254,74	444,53	265,3	269,72	289,84
7		100	106,6	100	97,6	103,7	101,9	103,5	100,1
		2.150	2.291,40	2.150	2.099,30	2.150	2.190,20	2.150	2.152,70
		57	51,2	57	42,93	57	48	57	48,2
8	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	59	59	59	25	31	39	39	36
9	Jumlah Distribusi dan Cadangan Pangan Daerah	7,6	7,96	7,8	6,2	8	7,98	8,38	6,05
		2,7	2,7	2,7	2,7	4,7	4,7	4,7	7,724
10	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	16	16	16	16	16	14	16	16
12	Skor pola pangan harapan	82,3	87,9	83,7	83,3	86,9	83,6	85,3	85,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal, 2022

a. Ketersediaan Pangan Utama

Peningkatan ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator utama dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Mandailing Natal. Ketersediaan dapat diartikan bahwa pangan pokok atau pangan utama dapat tersedia melalui produksi daerah ataupun import atau masuk dari daerah lain dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Beberapa alat ukur untuk melihat ketersediaan diantaranya energi, protein, dan ketersediaan beras.

Dari Data Produksi Padi Tahun 2021, Produksi GKP Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 sebesar 341.105,29 ton GKP setara dengan



187.133,74 ton beras. Sementara itu Kebutuhan beras kita Tahun 2021 dengan rata-rata konsumsi per kapita penduduk Kabupaten Mandailing Natal yaitu 133,74 Kg/Kapita/Tahun adalah 63.936,01 ton atau masih sangat surplus sebesar 123.197,73 ton apabila hanya dipandang dari aspek produksi.

Tabel 2. 35 Jumlah Produksi, Kebutuhan dan Surplus Beras di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2022.

Tahun	Jumlah Penduduk	Produksi (GKP)/Ton	Produksi (GKG)/Ton (GKP-13,96%)	Produksi Beras Bersih (Ton) (62,74% \times GKG)	Konsumsi/Kap /Th (Ton)=y	Kebutuhan (Ton) (y \times Jlh Pddk)	Surplus (Ton)
2017	439.505	388.723,00	334.457,27	209.838,49	0,15177	66.703,67	143.134,82
2018	443.490	484.273,00	416.668,49	261.417,81	0,14151	62.758,27	198.659,54
2019	447,287	554.989,56	477.513,02	299.591,67	0,13925	62.284,71	237.306,96
2020	472.886	467.815,00	402.508,03	252.533,54	0,13374	63.243,77	189.289,77
2021	478.062	341.105,29	293.487,00	187.133,74	0,13374	63.936,01	123.197,73
2022	484.874	112.230,00	96.562,69	60.583,44	0,13130	63.663,96	-3.080,52

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal 2022, Dinas Pertanian 2022 dan BPS Kabupaten Mandailing Natal.* BPS Prov. Sumatera Utara Tahun 2022.

Berdasarkan luas lahan sawah Kabupaten Mandailing Natal sesuai LP2B di tahun 2022 adalah 13.050 Ha, maka produksi gabah kering panen kita mencapai 112.230 ton, setara dengan 60.583,44 ton beras, dari target awal kita 125.200 ton berdasarkan target konsumsi awal kita. Sedangkan kebutuhan beras kita adalah 359,73 g/kap/hari atau 131,30 kg/kapita/tahun. Dengan jumlah penduduk 484.874 jiwa, maka kita membutuhkan beras sebesar 63.663.956,20 kg setara dengan 63.663,96 ton beras. Dengan demikian kita sudah tidak surplus beras lagi apabila hanya dilihat dari produksi padi sawah dan semua produksi padi beredar dalam kabupaten. Disamping produksi beras kita tersebut, ternyata masih masuk dari luar sebesar 20.927,98 ton, sehingga beras kita yang keluar sebesar 17.839,74 ton. Dengan demikian ketersediaan beras menjadi hanya sebesar jumlah konsumsi kita yakni 63.663,96 ton ditambah Cadangan 7,724 ton atau 63.671,68 ton.

b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Standar Angka Kecukupan Gizi (AKE) yang telah ditetapkan di Indonesia melalui Forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG).



Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan protein 57 gram/kapita/hari. Memang sampai tahun 2022 kita masih menggunakan angka 2.150 kkal/kapita/hari.

Dari hasil analisis terhadap indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, jumlah tingkat ketersediaan energi bagi penduduk sebesar 2.200 kkal/kapita/hari telah terpenuhi dengan capaian akhir tahun 2021 terhadap jumlah tingkat ketersediaan energi sebesar 6.454,20 Kkal/kapita/hari, dan tingkat ketersediaan protein bagi penduduk telah dipenuhi dengan capaian sebesar 151,22 gram/kapita/hari. Capaian akhir tahun 2022 terhadap jumlah tingkat ketersediaan energi sebesar 6.942,94 Kkal/kapita/hari, dan tingkat ketersediaan protein bagi penduduk telah dipenuhi dengan capaian sebesar 165,21 gram/kapita/hari.

Tabel 2. 36 Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2022.

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita:						
Energi (kal/kapita/hari)	6.460,88	6.454,88	6.452,00	6.449,00	6.454,20	6.942,94
Protein (gram/kapita/hari)	151,86	140,28	140,00	145,20	151,22	165,21

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal 2022

c. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan



khususnya produksi pangan. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH ini berfungsi sebagai:

1. Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan.
2. Baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah.
3. Baseline data untuk menghitung proyeksi konsumsi dan penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Susunan Pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Dengan demikian kualitas konsumsi pangan penduduk dapat tercermin dari besaran Skor Pola Pangan Harapan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsipangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH Maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Tabel 2. 37 Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022.

No.	Kelompok Pangan	PPH Tahun 2022				
		Konsumsi		% AKE	Bobot	Skor PPH
		Gram/Hari	Energi (Kkal)			
1	Padi-padian	294,7	1.061,5	49,4	0,5	24,7
2	Umbi-umbian	45,1	41,0	1,9	0,5	1,0
3	Pangan Hewani	166,4	199,7	9,3	2,0	18,6
4	Minyak dan Lemak	44,5	401,7	18,7	0,5	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	442,0	159,5	7,4	0,5	1,0
6	Kacang-kacangan	18,3	65,0	3,0	2,0	6,0
7	Gula	23,2	84,8	3,9	0,5	2,0
8	Sayur dan Buah	363,5	115,8	5,4	5,0	26,9
9	Lain-lain	7,9	23,8	1,1	0,0	0,0
	Total	1.405,6	2.152,7	100,1	11,5	85,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal 2022

Dari hasil analisis kinerja terhadap indikator ini terlihat Target dan (Realisasi) Skor PPH konsumsi Tahun 2017 s/d Tahun 2021 masing-masing sebesar 75,2 (75,1), 75,48 (79,9), 79,82 (87,9), 82,23 (83,3), dan



84,71 (83,6). Hal ini menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal hampir seluruhnya telah berada di atas target kecuali Tahun 2021 ini capaiannya 98,67%, meskipun kondisi ideal belum tercapai tetapi progresnya sudah cukup baik dalam rangka pola konsumsi pangan yang beragam dan berimbang.

d. Penguatan Cadangan Pangan

Target Pengelolaan Cadangan Pangan di tahun 2022 adalah 4,7 ton atau masih sama dengan tahun sebelumnya, tetapi realisasinya adalah 7,724 ton sehingga capaiannya 164,34% dari target. Pada Tahun 2022, tidak ada pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sehubungan dengan minimnya anggaran yang difokuskan untuk kegiatan yang lebih prioritas sehingga cadangan pangan bertambah merupakan bantuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten direncanakan mulai Tahun 2023

e. Peningkatan Angka Ketersediaan Pangan

Angka Ketersediaan Pangan adalah jumlah Pangan yang tersedia selama Tahun perencanaan. Untuk Tahun 2022, direncanakan tersedia Pangan Nabati sebanyak 325.558,29 ton dan Pangan Hewani 28.141,36 ton. Realisasinya adalah tersedia Pangan Nabati sebanyak 348.347,37 ton dan Pangan Hewani sebanyak 29.031,84 ton. Data ini diperoleh dari hasil survey produksi pangan di Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Tabel 2. 38 Ketersediaan Pangan Sumber Pangan Nabati dan Hewani Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022.

No.	Jenis Pangan	Target Tahun 2022 (Ton)	Realisasi Tahun 2022 (Ton)
I	Jumlah Pangan Nabati	325.558,29	348.347,37
1	Jumlah Padi-Padian	293.131,08	314.116,06
2	Jumlah Umbi-umbian	4.093,57	4.134,50
3	Jumlah Minyak dan Lemak	5.063,07	5.316,22
4	Jumlah Buah/Biji Berminyak	1.426,19	1.454,71
5	Jumlah Kacang-Kacangan	474,9	508,14
6	Jumlah Gula	798,9	838,84
7	Jumlah Sayur dan Buah	18.989,78	20.319,06
8	Jumlah Lain-Lainnya	1.580,80	1.659,84
II	Jumlah Pangan Hewani	28.141,36	29.031,84
1	Jumlah Daging Ruminansia	797,75	1.189,25
2	Jumlah Daging Unggas	323,89	427,57



No.	Jenis Pangan	Target Tahun 2022 (Ton)	Realisasi Tahun 2022 (Ton)
3	Jumlah Telur	6.838,97	5.715,20
4	Jumlah Susu	8,17	4,84
5	Jumlah Ikan	20.172,58	21.694,98
III	Total	353.699,65	377.379,21

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal 2022

f. Angka Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan energi dan protein masing-masing diukur berdasarkan jumlah energi dan protein tersedia yang diukur dengan satuan Kkal/kap/hari untuk Energi dan gram/kap/hari untuk protein. Berbeda dengan Angka Ketersediaan yang merupakan proporsi ketersediaan terhadap target konsumsi per kapita. Angka ketersediaan Energi pada Tahun 2022 merupakan persentase tersedianya energi. Sebagaimana Tabel 2.1 di atas, target Angka ketersediaan Energi adalah 300,50 %, sedangkan realisasinya adalah 322,93%. Target ini berdasarkan data ketersediaan Energi dengan target 6.460,73 Kkal/kap/hari dibagi dengan 2,150 Kkal/kap/hari lalu dikalikan dengan 100% , sehingga hasilnya 300,50%. Sedangkan capaian ketersediaan energi adalah 6.942,94 Kkal/kap/hari dibagi dengan 2,150 Kkal/kap/hari lalu dikalikan dengan 100%, sehingga hasilnya 322,93%.

g. Angka Konsumsi Energi dan Protein Perkapita

Sampai tahun 2022 Kabupaten Mandailing Natal masih menggunakan angka konsumsi Energi sebesar 2.150 kkal/kapita/hari. Berdasarkan Survey Konsumsi Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022, maka Angka Konsumsi Energi adalah 2.152,7 Kkal/kapita/hari, sebagaimana tertuang di dalam tabel berikut.

Tabel 2. 39 Jumlah Konsumsi dan Angka Kecukupan Energi (AKE) Perkapita Per Hari Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022.

No.	Kelompok Pangan	Kalori	% tase	% AKE
1	Padi-padian	1.061,5	49,3	49,4
2	Umbi-umbian	41,0	1,9	1,9
3	Pangan Hewani	199,7	9,3	9,3
4	Minyak dan Lemak	401,7	18,7	18,7
5	Buah/Biji Berminyak	159,5	7,4	7,4
6	Kacang-kacangan	65,0	3,0	3,0
7	Gula	84,8	3,9	3,9
8	Sayur dan Buah	115,8	5,4	5,4
9	Lain-lain	23,8	1,1	1,1
	Total	2.152,7	100,0	100,1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022.



Sedangkan Angka Konsumsi Protein adalah 48,2 gram/kapita/hari atau tingkat konsumsi protein adalah 84,6% dari Angka Kecukupan Protein (Ideal) 57 48,2 gram/kapita/hari.

h. Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Pangan

Analisis Kinerja Ketahanan Pangan diarahkan kepada penataan, pemberdayaan dan penanganan berbagai aspek terkait Ketahanan Pangan. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang menghasilkan Kelembagaan Ketahanan Pangan di Kabupaten Mandailing Natal. Kelembagaan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten berbentuk Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dengan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

Adapun kelembagaan ketahanan pangan pendukung diantaranya:

- a. 6 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD.) Balai Peningkatan Mutu dan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.
- b. 16 unit Kelompok/Gapoktan Lumbung Pangan sebagai lembaga cadangan pangan masyarakat.
- c. 8 unit LDPM sebagai lembaga distribusi pangan masyarakat.
- d. 2 unit PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat) dengan 4 unit TTI (Toko Tani Indonesia) sebagai lembaga distribusi pangan masyarakat.
- e. 36 Pasar Pangan di kecamatan dan desa.
- f. Penggilingan padi masyarakat dan Gapoktan Lumbung Pangan.
- g. Satgas Pangan.
- h. Kelompok Tani terkait keamanan pangan.
- i. KWT(Kelompok Wanita Tani).
- j. IRT (Industri Rumah Tangga) Makanan Olahan sumber pangan lokal.



k. Kelompok Binaan Olahan Pangan.

Dengan optimalnya ketersediaan sarana prasarana kelembagaan ketahanan pangan, diharapkan mutu dan tingkat pelayanan yang dapat diberikan kepada Pelaku Usaha bidang pangan maupun masyarakat juga akan semakin baik. Dari sisi Pemantapan Ketahanan Pangan, selain upaya mendorong meningkatnya ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dan pengembangan kelembagaan distribusi pangan seperti lumbung pangan, juga upaya peningkatan diversifikasi pangan menjadi sasaran utama untuk mendukung kemandirian pangan.

i. Jumlah Distribusi dan Cadangan Pangan Daerah

Peningkatan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya atau Target Peningkatan Distribusi pangan di Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2022 adalah 8,38% dan capaiannya 6,05%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah pasokan pangan

Sedangkan Cadangan Pangan masih merupakan bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, yakni jumlah sebelumnya 4,70 ton berkurang menjadi 3,724 ton Tahun. Pada Tahun 2022 ada penambahan sebesar 4,0 ton sehingga total menjadi 7,724 ton pada akhir tahun 2022.

j. Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan

Sampai akhir Tahun 2022, Kabupaten Mandailing Natal tidak lagi termasuk daerah rawan pangan berdasarkan kriteria penetapannya. Tetapi, Tahun 2022 masih ditemukan 13 Desa Rawan Pangan sehingga meningkat kembali dari 7 desa pada tahun 2020 dan 13 desa tahun 2021. Kabupaten Mandailing Natal masih memiliki beberapa desa rawan pangan yang meliputi 6 desa di Kecamatan Muara Batang Gadis Pakantan, 1 desa di Kecamatan Panyabungan, 1 desa di Kecamatan Panyabungan Barat, 2 desa di Kecamatan Panyabungan Timur 1 desa di Kecamatan Muara Sipongi, dan 1 desa di Kecamatan Siabu. Saat ini ada 13 desa rawan pangan dan 44 desa kategori 2 yang beranjak sedikit dari kerentanan pangan tetapi masih bisa terjatuh kembali menjadi desa rawan pangan.



Kondisi kerawanan pangan juga dapat terjadi pada daerah pasca bencana alam.

Berdasarkan Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022, dengan menggunakan metode penghitungan Q-Gis, maka dihasilkan data desa rawan pangan yang mengalami perubahan dari data Tahun 2021 meskipun jumlahnya masih sama. Untuk Tahun 2021, jumlah Desa Rawan Pangan Prioritas 1 bertambah dari 7 desa di tahun 2020, dimana sebagian besar berubah. Untuk Tahun 2022 meskipun jumlahnya sama dengan tahun 2021 tetapi desanya berubah. Adapun Desa-desanya Rawan Pangan (prioritas 1) tersebut adalah seperti dicantumkan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 40 Desa Rawan Pangan Prioritas 1 di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022.

No	Desa	Kecamatan	Indeks Komposit	Peringkat DRP
1	Batang Gadis	Panyabungan Barat	33,18	407 (1)
2	Siobon Julu	Panyabungan	35,58	406 (2)
3	Lubuk Kapundung II	Muara Batang Gadis	35,77	405 (3)
4	Tagilang Julu	Muara Batang Gadis	35,81	404
5	Manuncang	Muara Batang Gadis	35,83	403
6	Batu Mundom	Muara Batang Gadis	35,95	402
7	Suka Makmur	Muara Batang Gadis	37,52	401
8	Tanjung Larangan	Muara Sipongi	37,68	400
9	Aek Nabara	Batang Natal	37,79	399
10	Aek Nabara	Panyabungan Timur	37,82	398
11	Rantau Panjang	Muara Batang Gadis	39,00	397
12	Huta Bangun	Panyabungan Timur	39,03	396
13	Muara Batang Angkola	Siabu	39,04	395

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal 2022.

Pada Tahun 2022, masih ada 2 desa yang tetap prioritas 1 pada tahun 2020 dan 2021, yakni Aek Nabara Kecamatan Panyabungan Timur dan desa Lubuk Kapundung II Kecamatan Muara Batang Gadis. Kemudian ditemukan 3 desa yang tetap prioritas 1 pada tahun 2021 dan 2022, yakni desa Aek Nabara Kecamatan Batang Natal, dan desa Tagilang Julu dan desa Manuncang Kecamatan Muara Batang Gadis. Adapun Desa/Kelurahan yang Paling Tahan Pangan, atau Ketahanan Pangannya paling baik pada Tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel berikut.



Tabel 2.41 Desa Paling Tahan Pangan (DTP) Prioritas 6
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022

No	Desa	Kecamatan	Skor Komposit	Peringkat DTP
1	Sopo Sorik	Kotanopan	74,38	1
2	Kampung Kapas I	Batahan	72,57	2
3	Bintuas	Natal	71,06	3
4	Pasar V Natal	Natal	69,40	4
5	Ampung Padang	Batang Natal	68,85	5
6	Batahan IV	Batahan	68,60	6
7	Padang Silojongan	Ranto Baek	68,39	7
8	Pasir Putih	Sinunukan	68,06	8
9	Pakantan Dolok	Pakantan	67,80	9
10	Rao-Rao Kase	Batang Natal	67,74	10
11	Buburan	Natal	67,19	11
12	Air Apa	Sinunukan	66,64	12
13	Banjar Aur Utara	Sinunukan	66,62	13

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal 2022.

Pada Tahun 2022 ditemukan 3 (tiga) desa yang tetap sebagai desa yang paling baik Ketahanan Pangannya atau Desa Tahan Pangan sejak Tahun 2021 yakni Desa Sopo Sorik, Desa Bintuas dan Desa Padang Slojongan.

2.3.2.4. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian Indikator Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 42 Capaian Indikator Bidang Urusan Kinerja Lingkungan Hidup pada Tahun 2019-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)					n.a	79,67	79,76	75,03
1.1	Indeks Kualitas Air		60,5		60,5	63,2	64	64,8	63,30
1.2	Indeks Kualitas Udara		-		94,95	95,2	95,2	95,25	95,27
1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		-		83	81,80	81	79,67	80,60
1.4	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan		21,01		21,01	22	22,05	23	23
1.5	Pengelolaan Bahan dan Limbah B3		-	3	-	3	4	5	5
1.6	Peningkatan Edukasi Pengelolaan Lingkungan		22						



No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
2	Indeks Daya Dukung Lingkungan		-		-				
3	Indeks Daya Tampung Lingkungan		-		-				
4	Kelembagaan Pengelolaan Sampah (%)								
4.1	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Persampahan		29,03		29,03	32	33	35,5	37,00
4.2	Fungsi Pengelolaan Sampah di TPA		28,35		31,50	35	35	37,0	37,5
4.3	Pelayanan Pengangkutan Sampah		19,00		18,00	24,00	23,00	27,00	27,74

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal, 2022

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 sebesar 75,03 sedangkan target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 79,76. Sedangkan capaian per indeks sebagai berikut:

- o Indeks Kualitas Air 63,30 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai 64
- o Indeks Kualitas Udara 95,27 atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan nilai 95,2
- o Indeks Kualitas Tutupan Lahan 80,60 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai 81

2.3.2.5. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Indikator Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 43 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan pekerjaan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
2	Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
4	Terciptanya Data Kependudukan yang Valid sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

a. Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan pekerjaan

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2019 s/d 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal bisa dikatakan tidak menemui halangan dan permasalahan yang berarti namun masih memiliki kekurangan, sehingga mengakibatkan terhambatnya kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari seperti ruang kerja yang kurang memadai baik dari segi luas ruangan maupun peralatan pendukung.

b. Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan

Di kabupaten Mandailing Natal pada rentang tahun 2019 s/d 2022 persentase kepemilikan Kk (Kartu Keluarga), KTP el, dan Akta Kelahiran Terus mengalami Peningkatan hal ini dikarenakan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terus Melakukan upaya-upaya percepatan Kepemilikan dokumen kependudukan dengan melaksanakan pelayanan Secara Aktif.

c. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Hal ini dapat dilihat dari hasil survei kepuasan masyarakat bahwa pelayanan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mandailing Natal sangat memuaskan.



2.3.2.6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian Indikator Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 44 Tabel Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif		63,01		63,07		64,25	66,08	70,29
2	Persentase Kelompok Binaan PKK		42,06		45,29		46,34	47,29	47,29
3	Jumlah LPM Berprestasi		3		2		2	4	4
4	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat		50		60		60	70	70
5	Indeks Desa Membangun		3		3		3	3	3

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mandailing Natal, 2022

2.3.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Indikator Bidang Urusan penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 45 Tabel Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Total Fertility Rate (TFR)	3,5	3,80	3,4	3,80	3,2	3,80	2,95	3.124
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,9	0,86	0,9	0,85	0,85	1,70	0,85	0,60
3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	-	-	-	60	50,00	55	48,8
4.	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa		-		-		80,00	80	80



No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
5.	Rata-rata Anak Per Keluarga	3,4	4,10	3,3	2,48	3,2	3,78	3,0	3,9
6.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi/ CPR	72	69,9	73	69,9	75	70,0	75	43,66
7.	Rasio Akseptor KB	76,5	82,9	78	71,0	80	72,0	75	81,5
8.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	25	20,5	25	20,2	25	25,0	25	64,9
9.	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	12,5	14,30	12,3	14,10	12,2	12,00	12	37,8
10.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20	18,60	22	18,50	20	19,00	19	14,56
11.	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100
12.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	100	100	100
13.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
14.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75	53,3	80	54,7	74	70,0	70	70,36
15.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	70	34,0	75	36,1	64	50,0	55	91,43
16.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	70	43,0	75	47,2	64	50,0	55	64,5
17.	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	70	43,0	75	46,0	64	43,4	55	86,6

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mandailing Natal, 2022

a. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Pada Tahun 2022 angka TFR menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Secara umum faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah faktor alami yaitu kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) serta faktor non alami yaitu migrasi (imigrasi dan emigrasi). Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Mandailing Natal mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, artinya laju pertumbuhan penduduk melambat, ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Berencana menunjukkan hasil dalam upaya menghambat jumlah kelahiran penduduk.

2.3.2.8. Urusan Perhubungan

Capaian Indikator Bidang Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)	4110	4113	1420	1431	1431	1.431,00	1.435	1.422
Rasio Izin trayek (%)		11%	10%	9%	11%	11,%	13%	9%
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	2310	2315	968	968	968	968	968	1.083
Jumlah Pelabuhan Laut, Udara/Terminal Bus	2	2	2	2	2	2	2	2
Persentase Layanan Angkutan Darat	11%	88%	11%	88%	11%	88%	12%	88%
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	36%	87%	36%	46%%	36%	47%,	55%	63%
Pemasangan Rambu-Rambu	21,91%	15%	21,91%	15%	21,91%	15,31	21,91%	22%
Jumlah Orang/Barang Melalui	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000



Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun								
Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	37,11	38%

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Mandailing Natal, 2022

2.3.2.9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian Indikator Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 47 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah Desa yang tidak terjangkau akses telekomunikasi	-	90	-	80	-	73	63	49
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan	-	13.04	-	13.04	-	13.04	25	13.04
Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		6.957		6.760	-	6.103	8.800	8.088
Rasio Sistem Pelayanan Berbasis Online		15		5		9	11	1
Data Statistik Sektoral yang terintegrasi	-	-	-	-	-	-	40	-
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengaman Informasi dan Persandian		-		-		-	40	-

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal, 2022

a. Jumlah Desa yang tidak terjangkau akses telekomunikasi

Jumlah desa yang tidak terjangkau akses telekomunikasi (Blankspot Area) di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 sebanyak 49 desa. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan



Informatika mampu menyelesaikan permasalahan blankspot area bahkan melebihi target yang diharapkan pada tahun 2022.

b. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 sebesar 13,04% dan tidak mengalami perubahan dari tahun 2021, 2020 dan 2019. Dikarenakan pada tahun 2022 kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan tidak terlaksana. Oleh karena itu jumlah KIM yang ada di Kabupaten Mandailing Natal di tingkat kecamatan sampai dengan tahun 2022 hanya memiliki 3 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

c. Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Jumlah informasi yang disebarluaskan kepada publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 sebanyak 8.088 berita/informasi.

d. Rasio Sistem Pelayanan Berbasis Online

Jumlah pelayanan online yang bisa di akses masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 sebanyak 1 pelayanan yaitu aplikasi Simanja (Sistem Informasi Data Analisis Jabatan). Penerapan *e-government* sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 terutama pelaksanaan Kota Cerdas pada saat ini belum terlaksana, untuk itu perlu diprioritaskan dilaksanakan pada tahun 2024.

2.3.2.10. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Capaian Indikator Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2. 48 Capaian Indikator Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Koperasi Aktip	195	204	199	219	203	230	222	250
Persentase Koperasi Sehat	-	68	-	70	-	75	83	7
Persentase Pertumbuhan Volume Koperasi yang Melaksanakan RAT	-	50	-	-	-	60	70	30
Jumlah Koperasi yang terbentuk Tahunan	-	11	-	6	-	10	10	20
Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil (Unit)	6115	6697	6131	7015	6148	7.120	7.250	-
Jumlah Produk Unggulan UMKM Binaan	-	5	-	5	-	8	11	11
Jumlah Izin Halal	-	-	-	6		20	25	2

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal, 2022

2.3.2.11. Urusan Perpustakaan

Capaian Indikator Bidang Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 49 Capaian Indikator Bidang Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	1.000	3.832	1.200	1.306	1.500	355	2.000	4.694
Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	20.000	24.658	22.000	25.624	25.000	25.979	28.000	29.329
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,1	0,0008	0,1	0,0007	0,1	0,0007	0,2	0,0008
Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	150	320	200	109	250	30	300	391
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	2.500	3.948	3.000	4.246	4.000	4.446	4.500	5.273
Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	200	373	250	373	300	373	400	95
Indeks Minat Membaca	0,005	0,008	0,009	0,002	0,1	0,0007	0,3	0,011

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022



a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Berdasarkan data jumlah pengunjung perpustakaan yang ada pada tahun 2019 – 2020, diketahui minat baca masyarakat berfluktuasi setiap tahun nya. Di tahun 2021 pengunjung perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mandailing Natal menurun dari 1.306 pengunjung menjadi 355 orang, dampak dari masa pandemi yang terjadi pada tahun 2021. Namun di tahun 2022 kembali terjadi peningkatan menjadi 4.694 pengunjung.

b. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mandailing Natal menyediakan beragam jenis buku yang dapat membantu masyarakat menemukan informasi yang diperlukan. Mulai dari buku filsafat, buku karya umum, ilmu komputer, psikologi, ilmu agama, sosial, ekonomi, hukum, ilmu bahasa, ilmu murni, jurnalistik, seni, olahraga, sastra, sejarah, biografi, tokoh-tokoh dan lainnya. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Mandailing Natal dari rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2022 memiliki perkembangan yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 jumlah koleksi buku adalah sebanyak 24.658 eksemplar, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 29.329 eksemplar.

c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Perbandingan jumlah perpustakaan pertahun dengan jumlah penduduk per tahun di Kabupaten Mandailing Natal dari rentang waktu 2019 hingga 2022 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun memiliki kecenderungan yang menurun. Rasio perpustakaan persatuan penduduk setiap tahun nya tidak memenuhi target yang ada.

d. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Perbandingan jumlah rata-rata kunjungan perpustakaan pertahun dari rentang waktu 2019 sebanyak 320 orang, di tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 109 orang dan di tahun 2021 masa pandemi jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang sangat



signifikan menjadi 30 orang. Namun ditahun 2022 kembali normal dengan capaian sebanyak 391 pengunjung perpustakaan/tahun.

e. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Mandailing Natal dari rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2022 memiliki perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2019 jumlah judul buku adalah sebanyak 3.948 judul, di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 4.246 judul, di tahun 2021 terjadi peningkatan lagi menjadi 4.446 judul dan di tahun 2022 berjumlah 5.273 judul.

f. Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat dari tahun 2019-2021 capaian nya sama dan di tahun 2022 sebanyak 95 orang.

g. Indeks Minat Membaca

Dalam menghitung indeks minat baca dilihat dari data kunjungan perpustakaan pertahunnya dan data jumlah penduduk di kabupaten Mandailing Natal. Indeks Minat Baca masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal belum mencapai target yang diharapkan.

2.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian Indikator Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 50 Capaian Indikator Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	23.102,15	18.886,95	24.257,25	17.847,63	25.470,12	18.026,10	18.116,23	18.045
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.860,00	1.731,48	1.926,03	1.732,98	1.994,40	1.819,60	2.001,56	1.824,2



Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	34,98	35,70	35,70	35,37	38,39	38,38	40,65	39,89
Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	5,44	5,59	5,59	5,35	5,16	5,14	5,44	5,27

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mandailing Natal, 2022

a. Hasil Produksi Perikanan Tangkap

Hasil Produksi Perikanan tangkap untuk tahun 2022 belum tercapai dari target yang ditentukan yaitu 18.116,23 ton sedangkan realisasi sebesar 18.045,00 ton. Realisasi kurang dari 71,23 ton (99,3%) agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kurang dari realisasi disebabkan oleh:

- Kurangnya hasil tangkapan oleh Nelayan akibat sering Cuaca Eksrim
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Nelayan termasuk Alat Penangkapan Ikan dan Juga Alat Bantu penangkapan Ikan.
- Sumber daya alam yang semakin berkurang.

b. Jumlah Hasil Produksi Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar

Hasil Produksi Perikanan Budidaya untuk Tahun 2022 belum tercapai dari target yang ditentukan yaitu 2.001,56 ton sedangkan realisasi sebesar 1.824, 2. Realisasi kurang produksi kurang sebesar 177,36 ton (91,1%) agar produksi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi Hasil produksi ini kurang dari target disebabkan oleh:

- Hasil Produksi Budidaya Ikan Air Tawar sangat ditentukan oleh cuaca, tingginya curah hujan dapat mengakibatkan gagal panen oleh pembudidaya Ikan dan seringnya Ikan Mengalami Virus yang menyebar dari sumber perairan dari tambak.
- Tingginya harga Pakan meningkatkan biaya operasional sehingga meminimkan hasil produksinya.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung Pembudidaya Ikan Air Tawar.



- Kurangnya Kualitas Air Kolam sebagai sumber Perairan dari Kolam.

c. Jumlah Konsumsi Ikan Pada Masyarakat

Konsumsi Ikan masyarakat Tahun 2022 belum tercapai dari target yang ditentukan yaitu 40,65 kg/kap/thn sedangkan realisasi sebesar 39,89 kg/kap/thn. Realisasi kurang kurang sebesar 0,76 kg/kap/thn (98,1%) agar produksi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi Hasil produksi ini kurang dari target disebabkan oleh:

- Kurangnya Kesadaran masyarakat akan manfaat dari konsumsi ikan terutama bagi anak dalam masa pertumbuhan.
- Kurangnya daya beli ikan oleh masyarakat sebagai sumber protein
- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan ibu rumah tangga mengenai pengolahan ikan sebagai penarik untuk dikonsumsi oleh anak anak.

d. Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Persentase Kontribusi sector Kelautan dan perikanan terhadap PDRB Tahun 2022 belum mencapai target yang ditentukan yaitu 5,44 sedangkan realisasi sebesar 5,27. Realisasi kurang dari target sebesar 0,17 (96,87). Rendahnya Kontribusi Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB disebabkan oleh Hasil Produksi Perikanan rendah Baik Produksi Perikanan tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya Ikan Tawar.

2.3.3.2. Urusan Pariwisata

Capaian Indikator Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 51 Capaian Indikator Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	50.579	154.040	55,637	139.697	61.200	58.329	60.331	65.471
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	-	-	-	53	-	66	69	72
Lama Kunjungan Wisata	-	-	-	-	-	1,05	1,00	1,00



Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah lokasi yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi	-	1	-	-	-	3	3	1

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Mandailing Natal, 2023

a. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Dari tabel capaian indikator, diperoleh data bahwa mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 ini terjadi fluktuasi capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara. Dimana terjadi tren penurunan capaian mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, hal ini diakibatkan dampak dari pandemi covid-19 yang melanda secara global.

Akan tetapi, untuk capaian dari target yang ditetapkan secara keseluruhan dapat tercapai terkecuali pada Tahun 2021. Hal ini diakibatkan gejolak perekonomian secara global dan titik balik dari pandemi covid-19 pada 2 tahun sebelumnya.

Sementara untuk capaian pada Tahun 2022, terjadi tren kenaikan jumlah kunjungan wisatawan dibanding Tahun 2021. Dimana capaian pada Tahun 2022 melebihi target dari yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 yakni sebesar 109%.

Sebagai destinasi tujuan wisatawan pada umumnya adalah objek wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, wisata agro, wisata kuliner dan wisata buatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

b. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Dari tabel capaian indikator, bahwa untuk target Jumlah Wisatawan Mancanegara pada 3 tahun pertama yaitu mulai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 bahwa target indikator ini belum ditetapkan. Akan tetapi capaian dari indikator ini telah ada pada Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai Tahun 2022 sesuai dengan penetapan pada RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026.



Capaian pada Tahun 2022 dari target yang ditetapkan sebesar 104%, dimana target sebesar 69 (enam puluh sembilan) orang dengan capaian sebesar 72 (tujuh puluh dua) orang.

Adapun wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Mandailing Natal didominasi wisatawan asal negara Belanda, Jepang, China, Spanyol dan Jerman. Sementara destinasi yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara tersebut adalah objek wisata alam, wisata budaya, wisata bahari dan wisata kuliner.

Capaian Indikator Bidang Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

2.3.3.3. Urusan Pertanian

Capaian Indikator Bidang Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 52 Capaian Indikator Bidang Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022*	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian*
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	43,57	42,97	42,97	43,55	43,55	43,57	40,82	
Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan								
Jumlah Produksi Tanaman Pangan								
- Padi (ton GKG)	244.503	557.780	256.701	466.944	269.508	293.487	277.140	244.902
- Jagung (ton pipilan kering)	982	32.521,45	1.017	24.086,00	1.053	1.782	1.781,67	11.426,98
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura								
- Bawang Merah (ton)	32,33	56,40	35,14	341,80	38,20	38,81	41,91	324,08
- Cabe (ton)	482,60	1.829,20	489,45	5.348,35	496,40	497,50	504,51	2.161,49



**RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022*	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian*
- Kentang (ton)	-	407,20	-	553,40	-	63,00	64,04	249,13
- Sayur-sayuran (ton)	-	10.177,40	-	13.512,02	-	8.114,00	8.115,59	7.985,26
- Buah-Buahan (ton)	-	35.035,00	-	99.469,04	-	97.648,59	97.746,24	69.324,44
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (PR)								
Komoditi Prioritas								
- Kelapa Sawit (ton)	289.754,84	64.357,66	298.408,69	298.735,73	307.321,31	293.602,85	316.928,4	319.945,45
- Karet (ton)	49.246,19	52.392,40	50.716,98	50.847,79	52.231,70	52.826,23	53.892,0	52.404,00
- Kopi Arabica (ton)	2.563,50	2.154,31	2.727,13	2.390,03	2.901,20	2.565,16	2.698,4	3.049,00
- Kopi Robusta (ton)	-	400,60	-	393,42	-	400,32	405,8	436,00
- Kelapa (ton)	-	1.565,00	-	1.516,14	-	1.548,51	1.579,6	1.787,00
- Kakao (ton)	-	3.552,40	-	2.686,31	-	2.825,07	2.909,7	2.825,00
Komoditi Potensial								
- Cengkeh (ton)	-	11,97	-	25,07	-	12,26	12,30	15,30
- Aren (ton)	-	2.128,79	-	2.202,63	-	2.181,95	2.359,7	762,00
- Nilam (ton)	-	28,00	-	0,74	-	1,11	1,12	3,40
- Tembakau (ton)	-	1,00	-	0,08	-	0,070	0,075	1,00
Komoditi Lainnya								
Jumlah Produksi Peternakan								
Produksi Daging (ton)	-	4.585,11	-	4.949,82	-	4.942,25	4.944,64	4.943,76
- Sapi	254,02	432,71	260,37	467,33	266,88	469,67	470,25	470,27
- Kerbau	88,11	136,06	90,31	146,94	92,57	147,53	147,71	147,14
- Kambing	-	101,75	-	109,89	-	111,21	111,88	111,90
- Domba	-	13,10	-	14,14	-	14,85	14,94	14,97
- Babi	-	16,62	-	17,81	-	4,45	4,49	4,46
- Unggas	-	3.884,87	-	4.193,70	-	4.194,54	4.195,38	4.195,02
Produksi Telur (kg)	-	5.989.737	-	6.468.916	-	6.523.512	6.552.477	6.552.534
- Ayam Kampung	-	2.634.367	-	2.845.116	-	2.870.722	2.885.076	2.885.132
- Itik	-	3.355.370	-	3.623.800	-	3.652.790	3.667.401	3.667.402

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Mandailing Natal, 2022

a. Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2021, produksi padi sebesar 293.487 Ton GKP. Bila dibandingkan dengan Produksi Padi Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 37,14%. Hal ini terjadi karena



terjadi penurunan luas panen dibandingkan tahun 2020 dan 2019. Penurunan luas panen ini disebabkan karena terjadi penurunan luas tanam pada padi sekitar 32.184,6 Ha. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran tanam sehingga ada pertanaman di tahun 2021 yang dipanen di tahun 2022. Selain itu penurunan ini terjadi karena sedikitnya bantuan benih padi dari pusat karena pengalihan anggaran ke penanganan Covid 19. Penurunan luas tanam ini banyak terjadi pada padi ladang /gogo. Penurunan produksi jagung juga disebabkan hal yang sama. Produksi jagung meningkat pada tahun 2022 disebabkan semakin banyak luas tambah tanam dibandingkan tahun 2021, karena pada tahun 2022 terdapat banyak bantuan benih jagung.

b. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan

Produktivitas padi pada tahun 2022 sebesar 45,89 kw/ha. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 46,17 kw/ha. Penurunan produktivitas disebabkan serangan hama tikus dan burung. Selain itu pemupukan yang kurang karena harga pupuk yang tinggi juga menyebabkan penurunan produktivits padi.

Produktivitas jagung pada tahun 2022 sebesar 56,12 kw/ha. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 54,10 kw/ha. Kenaikan produktivitas jagung disebabkan penanam jagung dengan benih unggul dan berkualitas.

c. Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura

Penurunan produksi cabai karena luas tanam berkurang dan serangan hama pada tahun 2021. Produksi bawang merah menurun disebabkan luas tanam berkurang dan petani hanya mengandalkan bantuan pemerintah karena petani merasa harga bibit relatif mahal. Produksi kentang dan sayur-sayuran juga menurun disebabkan berkurangnya luas tanam. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan produksi cabai dan bawang merah karena banyak terdapat penambahan luas tanam, yang disebabkan banyaknya bantuan pemerintah untuk bibit cabe dan bawang merah pada tahun 2022.

d. Jumlah Produktivitas Tanaman Holtikultura

Produktivitas bawang merah pada tahun 2022 sebesar 74,5 kw/ha, menurun jika dibandingkan dengan produktivitas pada tahun 2020 dan



2021 yaitu sebesar 76,36 kw/ha. Namun produksi justru meningkat pada tahun 2022 disebabkan peningkatan luas tanah tanam bawang merah. Produktivitas Cabe pada tahun 2022 sebesar 64,9 kw/ha, juga menurun jika dibandingkan tahun 2021. Tetapi produksi juga meningkat pada tahun 2022 karena pemblahan luas tanam cabe yang meningkat.

2.3.3.4. Urusan Perdagangan

Capaian Indikator Bidang Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 53 Capaian Indikator Bidang Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Perdagangan, reperasi mobil dan motor terhadap PDRB	-	14,53	-	14,47	-	14,15	15	13,84
Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	-	-1.151,13	-	- 1.053,44	-	- 800,77	1.103.012,84	-619.590

Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Mandailing Natal, 2022

a. Perdagangan, reperasi mobil dan motor terhadap PDRB

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mandailing Natal Sektor Perdagangan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun 2019-2022 mengalami penurunan 0,69% perhitungan dari sektor Perdagangan besar dan eceran serta referasi Mobil dan Sepeda Motor.

b. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan

Ekpor Bersih Perdagangan mengalami Peningkatan dari tahun 2019-2022 di Karenakan Masa Pandemi yang telah berakhir dan dengan bertambahnya minat masyarakat terhadap produk lokal, dan hasil pertanian yang semakin membaik oleh sebab itu Mandailing Natal tidak perlu lagi melakukan impor barang kebutuhan yang bisa dihasilkan dari kekayaan alam Mandailing Natal sehingga Menurut Perhitungan Ekspor Bersih Perdagangan adalah Nilai Ekspor-Nilai Impor, sehingga dengan



nilai Impor yang lebih rendah dari Nilai ekspor mengakibatkan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Jadi Meningkat dari Tahun sebelumnya.

2.3.3.5. Urusan Perindustrian

Capaian Indikator Bidang Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 54 Capaian Indikator Bidang Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019		2020		2021		2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Indutri pengolahan terhadap PDRB	-	11,45	-	11,43	-	11,47	11,47	11,44
Jumlah Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	-	-	-	-	-	104	110	845

Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Mandailing Natal, 2022

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Kabupaten Mandailing Natal. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 55 Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Kabupaten Mandailing Natal (rupiah/kapita/bulan) Tahun 2019-2022

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita		Total
	Makanan	Non Makanan	
2019	554.358	310.698	865.056
2020	540.254	344.741	884.995



Tahun	Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita		Total
	Makanan	Non Makanan	
2021	542.045	329.497	871.542
2022	N.A	N.A	N.A

Sumber: BPS Kab. Mandailing Natal

Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 884.995 rupiah/kapita/bulan. Nilai ini naik dari 865.056 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2019. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok makanan yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal masih rendah karena proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan masih rendah.

2) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Tabel 2.56 Pembentukan Modal Tetap bruto (ADHK dan ADHB)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2022

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021 *)	2022**)	2020r	2021 *)	2022**)
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Milliar Rp.)	3.066,03	3.234,11	3.436,53	2.222,66	2.298,77	2.382,66

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal

Bila dilihat dari pendekatan pengeluaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 untuk komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto berdasarkan ADHK dan ADHB mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 berdasarkan ADHB sebesar Rp3.066,03 miliar menjadi sebesar Rp3.436,53 miliar sedangkan untuk ADHK pada tahun 2020 sebesar Rp2.222,66 miliar meningkat sebesar Rp2.382,66 miliar.

3) Indeks Resiko Bencana Daerah

Indeks Risiko Bencana adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan



menimbulkan kerugian di suatu wilayah. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia. Indeks resiko bencana Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2019-2022 tidak mengalami peningkatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 57 Indeks Resiko Bencana Kabuapten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

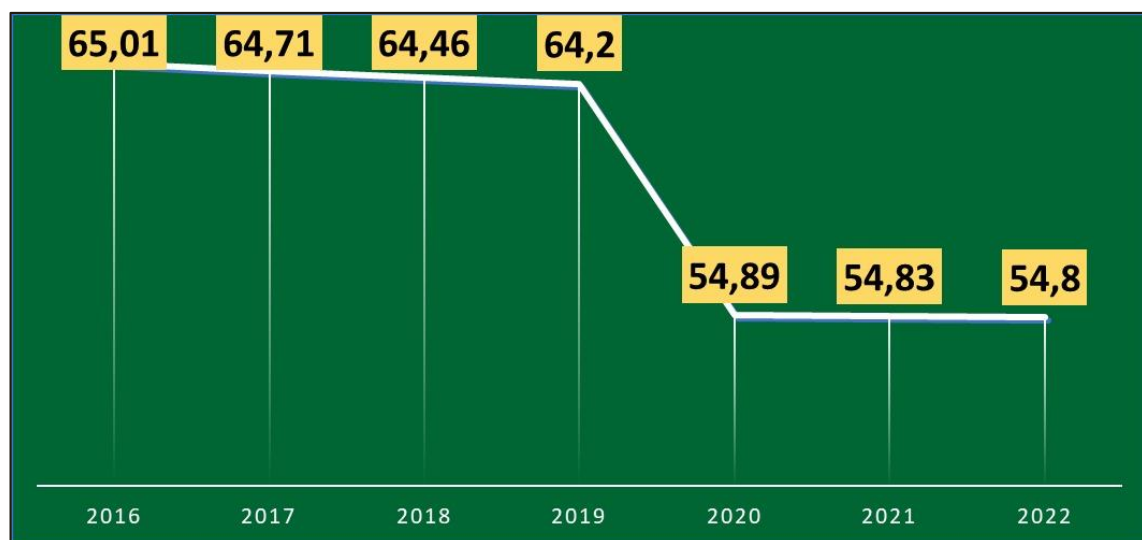
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capainan Kinerja			
	2019	2020	2021	2022
Indeks Resiko Bencana	214,80*	214,80*	214,80*	214,80*

Sumber: Buku IRBI 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

4) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (depencyency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan Kabupaten Mandailing Natal dapat digambarkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 15 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2022



Sumber : BPS, Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka

Dari grafik tersebut diatas dapat dilihat rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,03 persen. Semakin tingginya persentase



dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

5) Kemandirian Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PM.07/2021 tentang peta kapasitas fiskal daerah, Kabupaten Mandailing Natal memiliki indeks kapasitas fiskal daerah sebesar 0,679 poin dengan kategori rendah.

2.4.2. Fokus Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah, dapat dilihat berdasarkan aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telekomunikasi, ketersediaan rumah makan/restoran dan ketersediaan penginapan.

Aksesibilitas daerah dapat dilihat berdasarkan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun.

1) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan



semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi.

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan dihitung berdasarkan Panjang Jalan di bagi jumlah kendaraan yang ada. Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2019 sebesar 0,09 yang berarti bahwa setiap satu km jalan di Mandailing Natal dapat diakses oleh $(1/0,09) = 11$ kendaraan sedangkan pada tahun 2018 rasio tersebut sebesar 0,10 atau 10 kendaraan untuk setiap km jalan. Data tersebut menunjukkan bahwa panjang jalan yang tersedia di Kabupaten Mandailing Natal masih cukup besar dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang ada.

Perkembangan rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019-2022 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 58 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2019-2022

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Kabupaten (Km)	1 848,48	1 848,48	1 848,48	1 848,48
Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)	20.072	2.379	2.501	1.707
Rasio	0,09			

Sumber: BPS Kab. Mandailing Natal

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya.

Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio



ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 59 Rasio Ketergantungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun (Jiwa)	154.818	154.818	146.646	147.381,00
Jumlah Penduduk usia > 64 tahun (Jiwa)	20.222	20.222	22.660	24.279,00
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) + (2) (Jiwa)	175.040	175.040	169.306	171.660,00
Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun (Jiwa)	272.654	272.654	308.756	313.214,00
Rasio ketergantungan (3) / (4) (%)	64,20	64,20	54,83	54,8

Sumber: BPS, Mandailing Natal Dalam Angka dan Data diolah dari SIPD



BAB III

PROFIL KEMISKINAN

KABUPATEN MANDAILING NATAL

3.1. Analisis Profil Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan secara harfiah dapat dikatakan sebagai keadaan tidak memiliki apa-apa secara cukup. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Profil Kemiskinan Mandailing Natal menggambarkan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal mengalami penurunan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait Kemiskinan secara intens baik pertemuan dengan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota pada Pasal 4 ayat 1 s/d 2 dan Pasal 5 ayat 1 s/d 2 yang menyatakan bahwa TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Konsep kemiskinan terbagi atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang/keluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (social distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif, kategorisasi kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

- a. Kemiskinan absolut secara sederhana kemiskinan absolut adalah derajat kepemilikan materi atau standar kelayakan hidup orang-orang atau keluarga yang berada di garis atau di bawah garis subsisten. Indikatornya sangat terukur, di mana ada standar kehidupan yang dikategorikan secara berjenjang, yakni dibawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan (Sayogya, 1988). Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik dan kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami (Sayogya, 1988). Kemiskinan absolut diukur dengan menggunakan garis kemiskinan yang konstan sepanjang waktu yang biasanya berupa jumlah atau nilai pendapatan dan unit uang. Namun ukuran bisa pula berbentuk jumlah konsumsi kalori, atau lainnya, yang memungkinkan adanya perbedaan jumlah atau nilai perbedaan pendapatan dalam unit uang. Parameter ini merupakan ukuran yang tetap dan kriteria pengukuran seperti itu diperoleh dari pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan biologis dan pendekatan kebutuhan dasar.
- b. Kemiskinan relatif berbeda dengan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada di lapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin.



Dengan kategorisasi seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak-hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhinya berada di lapisan terbawah. Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya perbedaan antara 20 atau 10 persen masyarakat paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara mereka yang di bawah (miskin) dan mereka yang makmur (better-off) dalam setiap dimensi stratifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan dan para ahli sosiologi pada hakikatnya lebih tertarik pada isu ketimpangan. Misalnya mereka lebih tertarik pada kelompok masyarakat pada spektrum pendapatan 5 persen atau 10 persen paling bawah dalam hirarki pendapatan. Dalam pendekatan ini persentase orang yang relatif miskin cenderung konstan walaupun kondisi ekonomi berubah.

3.2 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal

Data-data terkait kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu data makro dan data mikro, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data Makro Data makro kemiskinan merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme survey (sampel), bersifat kualitatif, memberikan gambaran umum dan profil suatu daerah, sebagai pengambilan kebijakan makro, dan tidak dapat menampilkan secara by name by address. Contoh data makro adalah data kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota yang diterbitkan 2 kali setahun dalam Berita Resmi Statistik BPS.
- b. Data Mikro Data mikro kemiskinan merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme sensus (bersifat menyeluruh), bersifat kuantitatif, dapat memberikan informasi detail, dan dapat dipergunakan sebagai intervensi program/kegiatan secara by name by address; Contoh data mikro adalah data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dan yang terbaru adalah data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, data



Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2022.

3.2.1. Kondisi Kemiskinan Makro

Masalah kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kondisi kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya akan dibahas sebagai berikut:

a. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Persentase kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal mengalami penurunan sebesar 0,57 poin yaitu dari 9,49 persen pada tahun 2021 menjadi 8,92 persen pada tahun 2022. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara yang berada di angka 8,42 persen, akan tetapi lebih baik dibandingkan dengan Nasional yang berada di angka 9,57 persen pada Tahun 2022. Persentase kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal setara dengan 40.980 jiwa pada tahun 2022, atau berkurang sekitar 2.260 jiwa dalam satu tahun terakhir.

Tabel. 3.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mandailing Natal,
Kabupaten Mandailing Natal dan Nasional 2018–2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Mandailing Natal (Ribu)	Provinsi Sumatera Utara (Ribu)	Nasional (juta)	Mandailing Natal	Provinsi Sumatera Utara	Nasional
2018	42,39	1.463	25,67	9,58	10,79	9,66
2019	40,64	1.282	24,79	9,11	8,63	9,22
2020	41,31	1.283	27,55	9,18	9,14	10,19
2021	43,24	1 343	26,50	9,49	8,49	9,71
2022	40,98	1 268	26,36	8,92	8,33	9,57

Sumber : BPS, Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka Tahun 2023



b. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal yang berada di Desil 1 sebanyak 54.540 jiwa atau 11,25%. Terbanyak ada di Kecamatan Panyabungan yaitu sebanyak 9.075 jiwa dan paling sedikit ada di Kecamatan Sinunukan sebanyak 255 jiwa. Sedangkan persentase penduduk Mandailing Natal yang berada di desil 1 tertinggi ada di Kecamatan Panyabungan Timur sebesar 36,63% dan terendah ada di Kecamatan Sinunukan sebesar 1,12%, seperti dilihat dari Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel. 3.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Desil 1 yang terdaftar di P3KE Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Desil 1	Persentase Penduduk Desil 1
1	KECAMATAN PANYABUNGAN	91.929	9.075	9,87%
2	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA	22.915	4.677	20,41%
3	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT	10.964	1.585	14,46%
4	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN	10.421	1.999	19,18%
5	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR	14.492	5.308	36,63%
6	KECAMATAN SIABU	54.054	6.086	11,26%
7	KECAMATAN BUKIT MALINTANG	13.059	1.748	13,39%
8	KECAMATAN NAGA JUANG	5.075	462	9,10%
9	KECAMATAN HUTA BARGOT	9.062	1.559	17,20%
10	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI	9.110	1.140	12,51%
11	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI	11.116	1.590	14,30%
12	KECAMATAN TAMBANGAN	11.058	1.265	11,44%
13	KECAMATAN KOTANOPAN	28.024	3.342	11,93%
14	KECAMATAN MUARASIPONGI	12.873	1.800	13,98%
15	KECAMATAN PAKANTAN	2.243	339	15,11%
16	KECAMATAN ULU PUNGKUT	4.721	774	16,39%
17	KECAMATAN BATANG NATAL	25.685	3.275	6,00%
18	KECAMATAN LINGGA BAYU	28.452	2.807	5,15%
19	KECAMATAN RANTO BAEK	14.585	1.904	3,49%
20	KECAMATAN NATAL	35.050	1.248	2,29%
21	KECAMATAN BATAHAN	23.427	1.009	1,85%
22	KECAMATAN SINUNUKAN	22.782	255	0,47%
23	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS	23.777	1.293	2,37%
TOTAL		484.874	54.540	11,25%

Sumber : Kemenko PMK, Data P3KE per Bulan November 2023



c. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan adalah besaran jumlah rupiah yang ditetapkan sebagai suatu batas pengeluaran minimal untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Garis Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor harga pasar komoditi yang dibeli dan dikonsumsi, yang cenderung naik dari waktu ke waktu, sehingga garis kemiskinan cenderung meningkat juga dari waktu ke waktu. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Pada Tahun 2022 garis kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal tercatat sebesar Rp.450.345,-/kapita/bulan, naik sebesar Rp.27.328,-/kapita/bulan dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat di angka Rp.423.017,-/kapita/bulan seperti dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.3
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Mandailing Natal,
Kabupaten Mandailing Natal dan Nasional 2018–2022

Tahun	Mandailing Natal	Provinsi Sumatera Utara	Nasional
2018	336 820	435.970	410.670
2019	356 058	466.122	440.538
2020	400 721	502.904	458.947
2021	423 017	525.756	486.168
2022	450 345	561.004	535.547

Sumber : BPS, Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka Tahun 2023

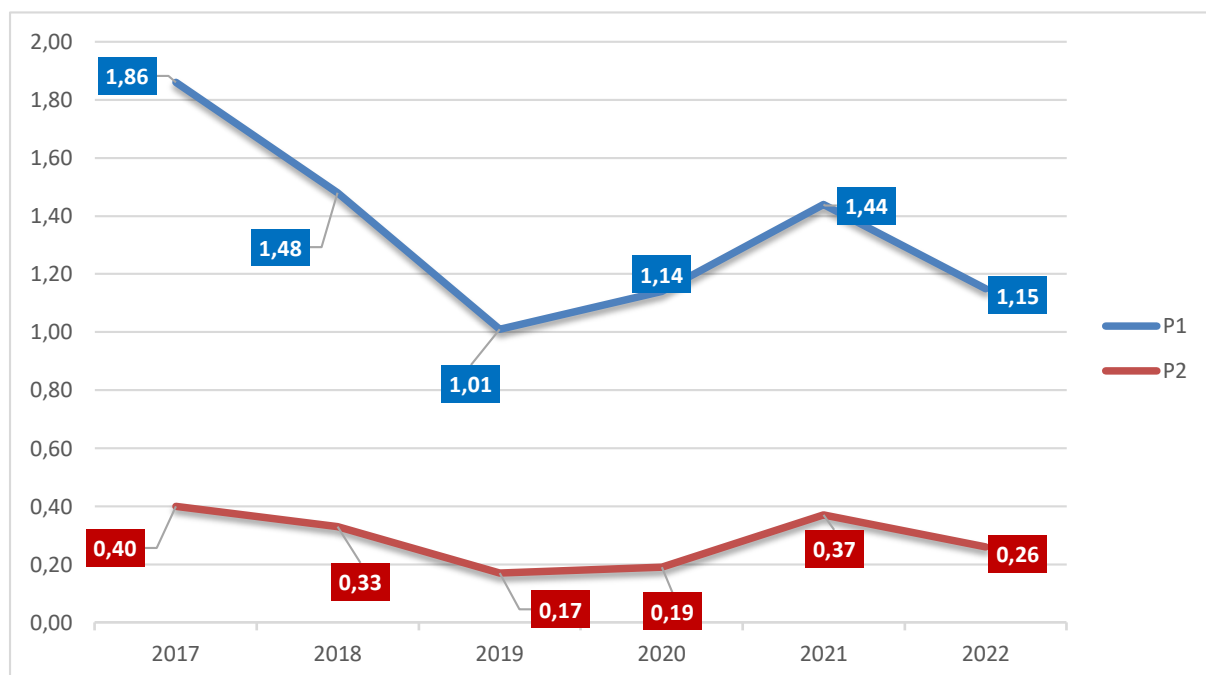
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis Kemiskinan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Gambaran Indeks Kedalaman Keparahan Kemiskinan adalah sebagai berikut :



d. Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan (P1 & P2)

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 1,15% dari tahun sebelumnya sebesar 1,44%. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan dari 0,37 pada tahun 2021 menjadi 0,26 pada tahun 2022, dapat kita lihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2022



Sumber : BPS, Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka Tahun 2023

3.2.2. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran 1,9 USD PPP, sebagai standar yang diacu bersama oleh bangsa-bangsa berdasarkan standar World Bank, berdasarkan hitungan BPS persentase penduduk miskin ekstrem Nasional tahun 2023 adalah 1,12%, BPS Pusat melakukan perhitungan untuk standarisasi 1,9 USD PPP untuk di konversikan ke dalam rupiah, pada tahun 2023 1,9 USD PPP adalah Rp. 11.571,21 per kapita perhari, jika dikalikan dengan 30 hari dalam sebulan, maka garis kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 adalah Rp. 351.957,40/kapita/bulan dan berlaku secara Nasional.



1. Agar Kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada 2024 dapat mencapai 0%;
2. Yang terpenting adalah validasi data mengenai identitas penduduk sangat miskin yang mencapai 9,91 juta jiwa;
3. Validasi data agar mencakup nama (by name) dan lokasi (by address);
4. Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran;
5. Kementrian Sosial agar terus berkoordinasi mengelola dan memutakhirkan DTKS dan Kementerian Koordinator PMK RI memvalidasi Data P3KE.

Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 adalah 40.980 jiwa, dalam komposisi jumlah tersebut terdapat 4.950 jiwa yang masuk sebagai kategori penduduk miskin ekstrem, yang digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.4
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2022

NO	KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE	JUMLAH PENDUDUK MISKIN EKSTREM (RIBU/JIWA)
1	Tapanuli Tengah	2,73	10.98
2	Tapanuli Utara	0,73	2.24
3	Tapanuli Selatan	0,26	0.74
4	Nias	3,11	4.52
5	Langkat	2,08	22.00
6	Karo	1,58	6.93
7	Deli Serdang	0,84	19.72
8	Simalungun	2,19	19.17
9	Asahan	1,52	11.35
10	Labuhanbatu	0,46	2.42
11	Dairi	0	0
12	Toba Samosir	1,16	2.15
13	Mandailing Natal	1,08	4.95
14	Nias Selatan	3,58	11.78
15	Pakpak Bharat	2,32	1.21
16	Humbang Hasundutan	2,26	4.41



**RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026**

NO	KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE	JUMLAH PENDUDUK MISKIN EKSTREM (RIBU/JIWA)
17	Samosir	2,09	1.66
18	Serdang Bedagai	0,92	5.64
19	Batu Bara	2,03	8.69
20	Padang Lawas Utara	0,24	0.69
21	Padang Lawas	0,46	1,38
22	Labuhanbatu Selatan	1,16	4.22
23	Labuhanbatu Utara	1,43	5.33
24	Nias Utara	8,82	12.40
25	Nias Barat	3,09	2.55
26	Kota Medan	1,23	28.64
27	Kota Pematangsiantar	1,31	3.41
28	Kota Sibolga	0,46	0.40
29	Kota Tanjung Balai	1,66	3.03
30	Kota Binjai	0,25	0.71
31	Kota Tebing Tinggi	1,97	3.36
32	Kota Padang Sidempuan	0,19	0,44
33	Kota Gunungsitoli	3,18	4.69
	SUMATERA UTARA	1,41	212.81

Sumber : BPS, rovinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Penduduk miskin ekstrem Kabupaten Mandailing Natal berada di persentil 1 dan 2 yang berada di angka 7.303 jiwa seperti tercantum di tabel bawah ini,

Tabel. 3.5
Persentase Penduduk yang berada di Persentil 1 dan 2
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK PERSENTIL 1 DAN 2	PERSENTASE
1	KECAMATAN PANYABUNGAN	91.929	1.171	1,27%
2	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA	22.915	792	3,46%
3	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT	10.964	180	1,64%
4	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN	10.421	417	4,00%
5	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR	14.492	1.235	8,52%



**RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026**

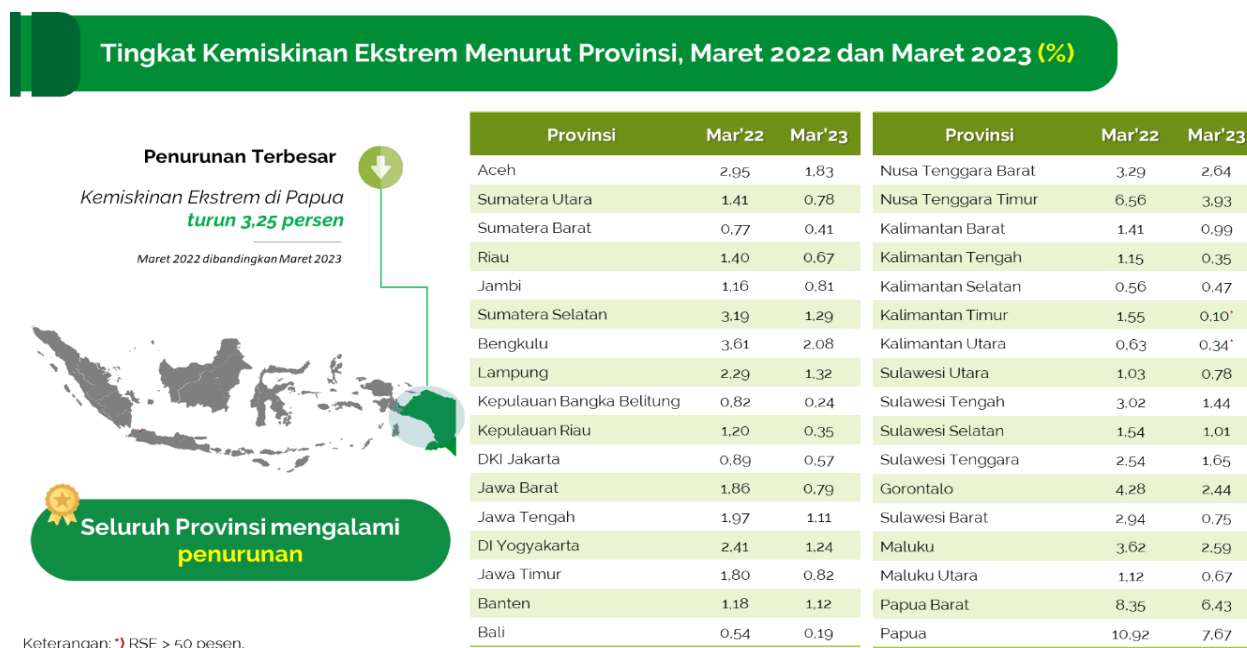
NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK PERSENTIL 1 DAN 2	PERSENTASE
6	KECAMATAN SIABU	54.054	828	1,53%
7	KECAMATAN BUKIT MALINTANG	13.059	212	1,62%
8	KECAMATAN NAGA JUANG	5.075	6	0,12%
9	KECAMATAN HUTA BARGOT	9.062	266	2,94%
10	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI	9.110	93	1,02%
11	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI	11.116	165	1,48%
12	KECAMATAN TAMBANGAN	11.058	116	1,05%
13	KECAMATAN KOTANOPAN	28.024	390	1,39%
14	KECAMATAN MUARASIPONGI	12.873	220	1,71%
15	KECAMATAN PAKANTAN	2.243	35	1,56%
16	KECAMATAN ULU PUNGKUT	4.721	55	1,17%
17	KECAMATAN BATANG NATAL	25.685	218	0,85%
18	KECAMATAN LINGGA BAYU	28.452	413	1,45%
19	KECAMATAN RANTO BAEK	14.585	211	1,45%
20	KECAMATAN NATAL	35.050	119	0,34%
21	KECAMATAN BATAHAN	23.427	53	0,23%
22	KECAMATAN SINUNUKAN	22.782	-	0,00%
23	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS	23.777	108	0,45%
MANDAILING NATAL		484.874	7.303	1,51%

Sumber : Kemenko PMK, Data P3KE per Bulan November 2023 (Data diolah)

Jumlah dan persentase penduduk Kabupaten Mandailing Natal yang berada di persentil 1 dan 2 terbanyak ada di Kecamatan Panyabungan Timur yaitu sebanyak 1.235 jiwa (8,52%) dan paling sedikit ada di Kecamatan Sinunukan sebanyak 0 jiwa (0%).



Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh BPS untuk level provinsi, sebaran persentase penduduk miskin ekstrem berdasarkan provinsi pada periode Maret 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS 2023

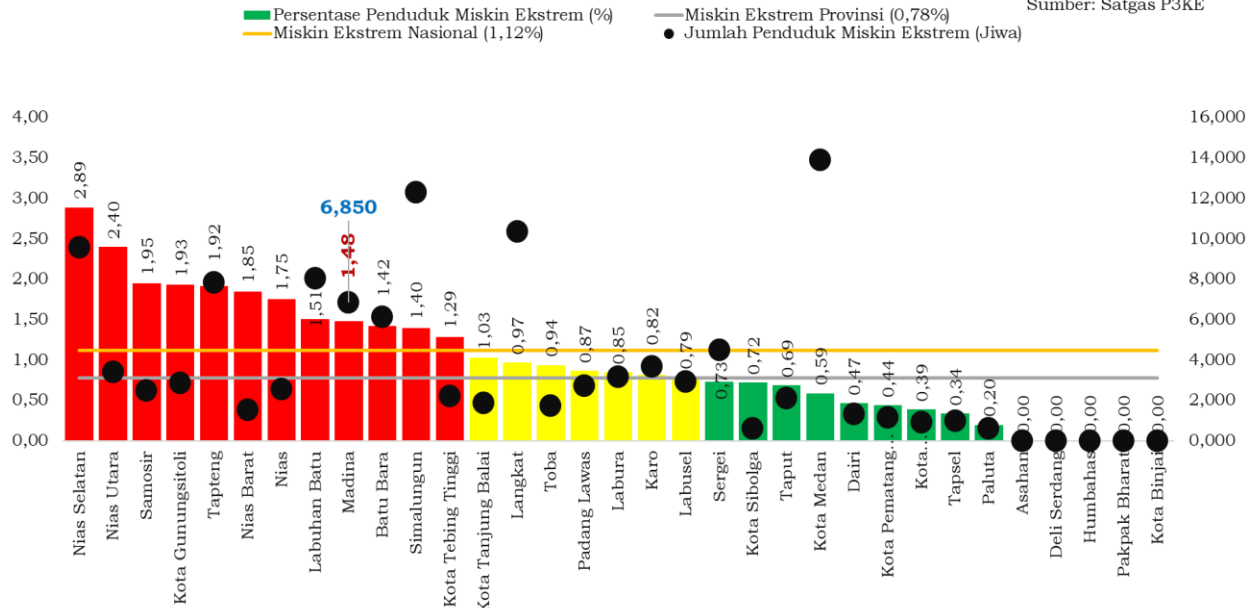
Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa secara persentase, persentase penduduk miskin ekstrem Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 adalah sebesar 0,78%. Sedangkan untuk level kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara, sebaran persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem tahun 2023 adalah sebagai berikut:



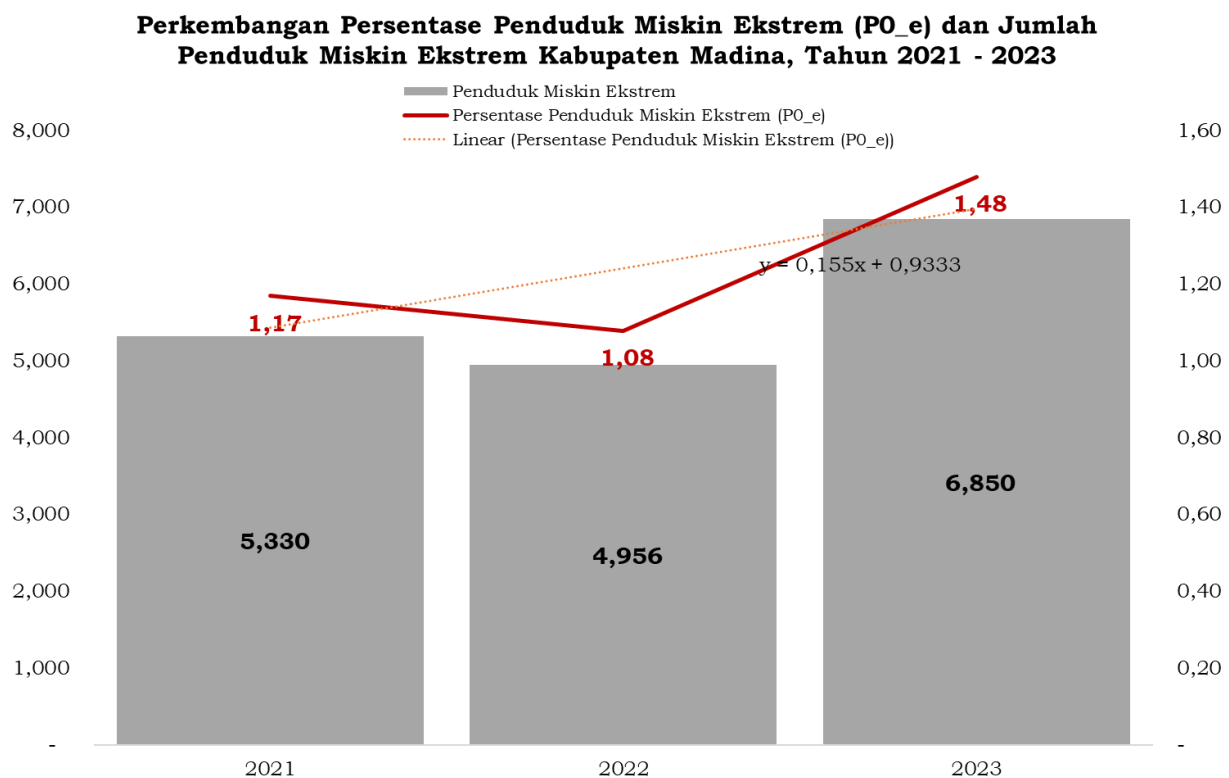
RPKD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 - 2026

**Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem
Menurut Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2023**

Sumber: Satgas P3KE



Capaian persentase kemiskinan ekstrem Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2023 adalah 1,48% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 6.850 jiwa, capaian ini merupakan tertinggi ke sembilan (9) diantara kabupaten/kota dilingkup Provinsi Sumatera Utara, sedangkan kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi adalah Kabupaten Nias Selatan (2,89%), Nias Utara (2,40%), untuk kabupaten/kota yang paling rendah dan sudah 0 persen kemiskinan ekstrem adalah Kota Binjai, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbahas, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Asahan. Sedangkan untuk daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi adalah Kota Medan, diikuti oleh Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Langkat.



Sumber: 2021-2022 (BPS) dan 2023 (Satgas P3KE Kemenko PMK)

Capaian persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2023 sebesar 1,48% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 6.850 jiwa menempatkan Kabupaten Mandailing Natal sebagai salah satu daerah dengan persentase kemiskinan ekstrem tinggi. Sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem turun dan meningkat, dari 1,17% (2021), 1,08% (2022) serta 1,48% (2023), fluktuatif persentase penduduk miskin ekstrem juga diikuti dengan fluktuatifnya jumlah penduduk miskin ekstrem, pada tahun 2021 (5.330 jiwa), 2022 (4.956 jiwa) serta tahun 2023 (6.850 jiwa). Dalam kurun waktu 2021 sampai 2023, rata-rata peningkatan kemiskinan ekstrem Kabupaten Mandailing Natal sebesar 0,15% setiap tahunnya dalam tiga tahun terakhir.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tersebut dengan menyiapkan program dan anggaran yang sudah di tangging oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kepmendagri 900.1.5.15-1317 untuk tahun 2024 dengan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat maupun



menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Program, kegiatan dan anggaran 2023 dan 2024 tersebut telah dilaporkan dalam matriks satu dan dua (untuk triwulan satu (1) dan dua (2)) kepada Kemenko PMK melalui web.p3ke.kemenkopmk.go.id_pelaporan.

3.4 Kondisi Masyarakat Rentan Miskin

Masyarakat Rentan Miskin adalah kelompok masyarakat yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah. Kelompok ini bukanlah penerima bantuan sosial sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan bukan hanya menggerus pendapatan mereka namun bisa mengubah status mereka dari rentan miskin menjadi miskin. Klasifikasi rentan miskin juga termasuk mereka juga berasal dari rumah tangga dengan kepala keluarga yang sudah pensiun atau lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan berpenyakit kronis. Saat ini kelompok rentan miskin ini cukup banyak dan didominasi mereka yang usianya antara 18 hingga 35 tahun.

Mengacu pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang merupakan database kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil), Kabupaten Mandailing Natal memiliki jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 40.980 jiwa.

Jumlah penduduk miskin ini dapat diklasifikasikan per Desil, dari Desil 1 s/d Desil 3, dengan Total Desil 1-3: 160.998 jiwa, sebagai berikut:

- Desil 1: 54.540 jiwa;
- Desil 2: 52.486 jiwa;
- Desil 3: 53.972 jiwa;



Dengan kalkulasi jika total desil 1 s/d desil 3 dikurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal maka terdapat 120.018 jiwa yang dapat dikategorikan sebagai penduduk rentan miskin. Secara keseluruhan data desil 1 s/d desil 3 Kabupaten Mandailing Natal per kecamatan tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.6
Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem, Miskin dan Rentan Miskin (Desil 1–3)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023

NO	KECAMATAN	KELUARGA			
		JUMLAH	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3
1	KECAMATAN PANYABUNGAN	5.084	1.514	1.651	1.919
2	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA	2.246	771	718	757
3	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT	1.032	261	364	407
4	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN	869	331	267	271
5	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR	1.692	846	438	408
6	KECAMATAN SIABU	3.264	1.017	1.088	1.159
7	KECAMATAN BUKIT MALINTANG	1.080	300	351	429
8	KECAMATAN NAGA JUANG	396	73	139	184
9	KECAMATAN HUTA BARGOT	894	273	319	302
10	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI	745	169	247	329
11	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI	783	246	264	273
12	KECAMATAN TAMBANGAN	863	205	298	360
13	KECAMATAN KOTANOPAN	2.119	543	676	900
14	KECAMATAN MUARASIPONGI	1.224	322	378	524
15	KECAMATAN PAKANTAN	232	57	76	99
16	KECAMATAN ULU PUNGKUT	425	119	135	171
17	KECAMATAN BATANG NATAL	1.949	511	670	768
18	KECAMATAN LINGGA BAYU	1.768	474	545	749
19	KECAMATAN RANTO BAEK	1.014	308	323	383
20	KECAMATAN NATAL	1.052	217	338	497
21	KECAMATAN BATAHAN	954	160	320	474



NO	KECAMATAN	KELUARGA			
		JUMLAH	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3
22	KECAMATAN SINUNUKAN	447	40	133	274
23	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS	827	203	270	354
	MANDAILING NATAL	30.959	8.960	10.008	11.991

Sumber : Kemenko PMK, Data P3KE per Bulan November 2023 (Data diolah)

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah memberikan amanat bagi seluruh lapis pemerintah sampai Pemerintahan Desa untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk dengan meraih dukungan dari unsur non pemerintah untuk terlibat dalam upaya intervensi. Arahan Presiden tersebut di antaranya:

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
 - a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan



Target 0% Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2024



Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terbit tanggal 8 Juni 2022



Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah,

dengan ini menginstruksikan, kepada:

- ✓ **22 Kementerian;**
- ✓ **6 Lembaga; serta**
- ✓ **Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia.**

Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini, dilaksanakan dengan prinsip Tepat sasaran: Seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program PPKE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini, Pendekatan multidimensi: Pelaksanaan program PPKE dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan. Keterpaduan dan sinergi: Penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN/P, APBD/P Provinsi, APBD/P Kabupaten/Kota, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin ekstrem. Tersampainya dan dipahaminya informasi: Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa/kelurahan dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program PPKE. Koordinasi dan kerja sama multipihak: Pelaksanaan program



PPKE memerlukan koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur nonpemerintah serta Terpantau dan terkendali: Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrumen dan indikator yang relevan dan terukur.

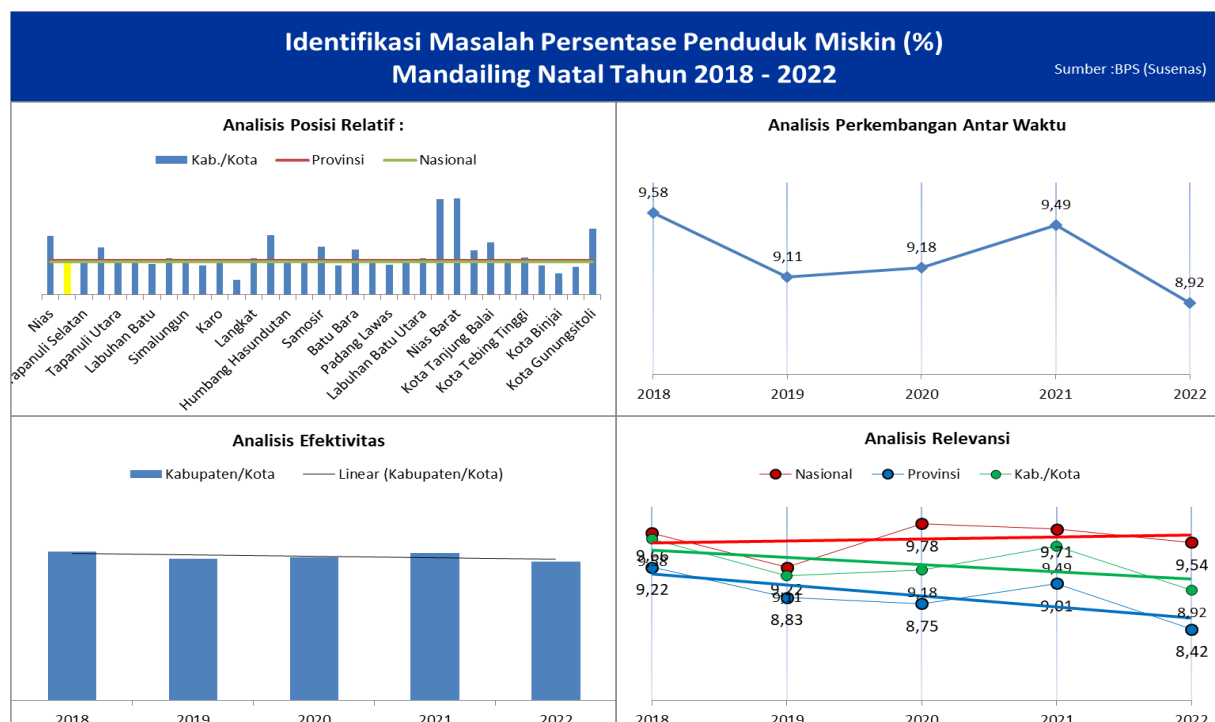
3.5. Analisis Karakteristik Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal

Kondisi kemiskinan daerah digambarkan secara umum dengan menggunakan indikator kemiskinan, yaitu: persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Sedangkan bidangbidang terkait kemiskinan yang akan dianalisis diantaranya bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ketahanan pangan dan bidang infrastruktur dasar. Analisis karakteristik kemiskinan dan bidang-bidang terkait akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini.

3.5.1. Analisis Karakteristik Kemiskinan Konsumsi

3.5.1.1. Persentase Penduduk Miskin (%)

Grafik 3.2
Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022



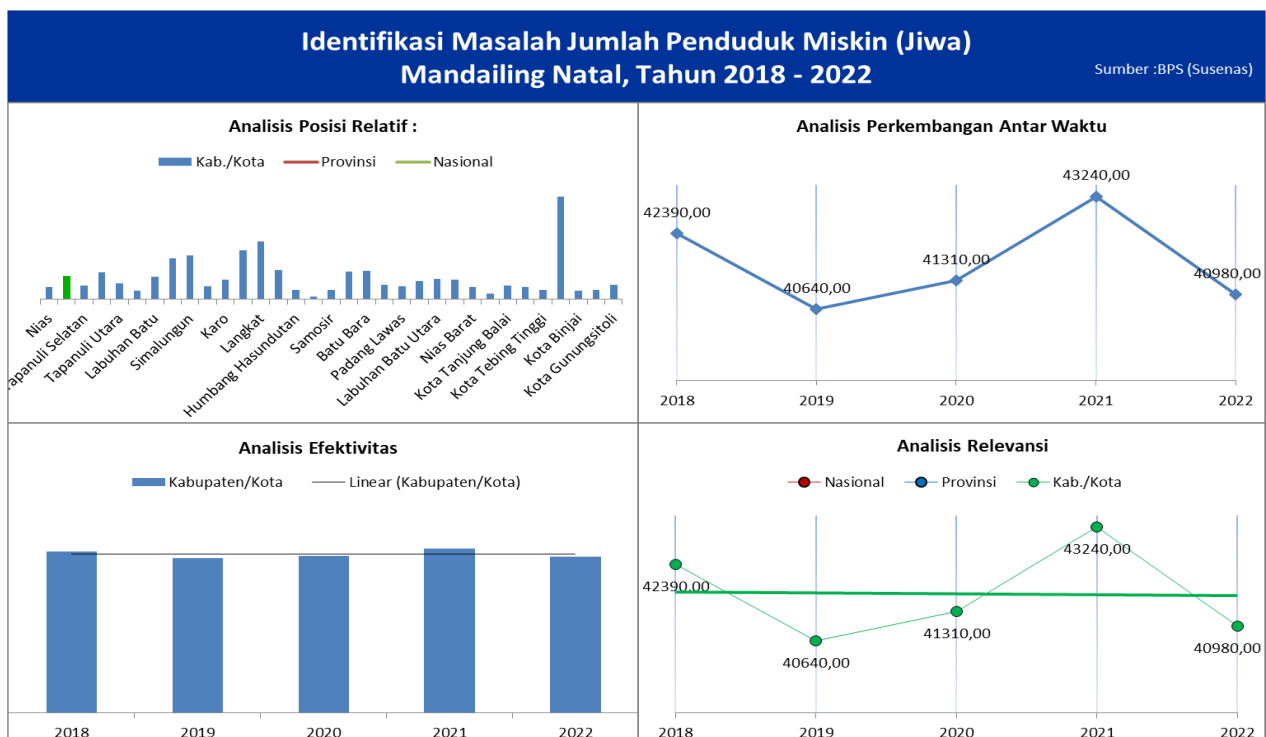


Capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 adalah 8,92% capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Nasional pada tahun yang sama, yaitu 9,57%. Namun lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara yang berada di angka 8,42%. Target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Mandailing Natal sebesar 8,55% pada tahun 2022, maka capaian ini belum sesuai dengan target.

Berdasarkan data P3KE Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022, daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi berada di Kecamatan Panyabungan Timur (36,63%), Kecamatan Panyabungan Utara (20,41%), Kecamatan Panyabungan Barat (14,46%), dan Kecamatan Panyabungan Selatan (19,18%).

3.5.1.2. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Grafik 3.3
Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022



Jumlah penduduk miskin Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 adalah 40.980 jiwa, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, maka jumlah penduduk

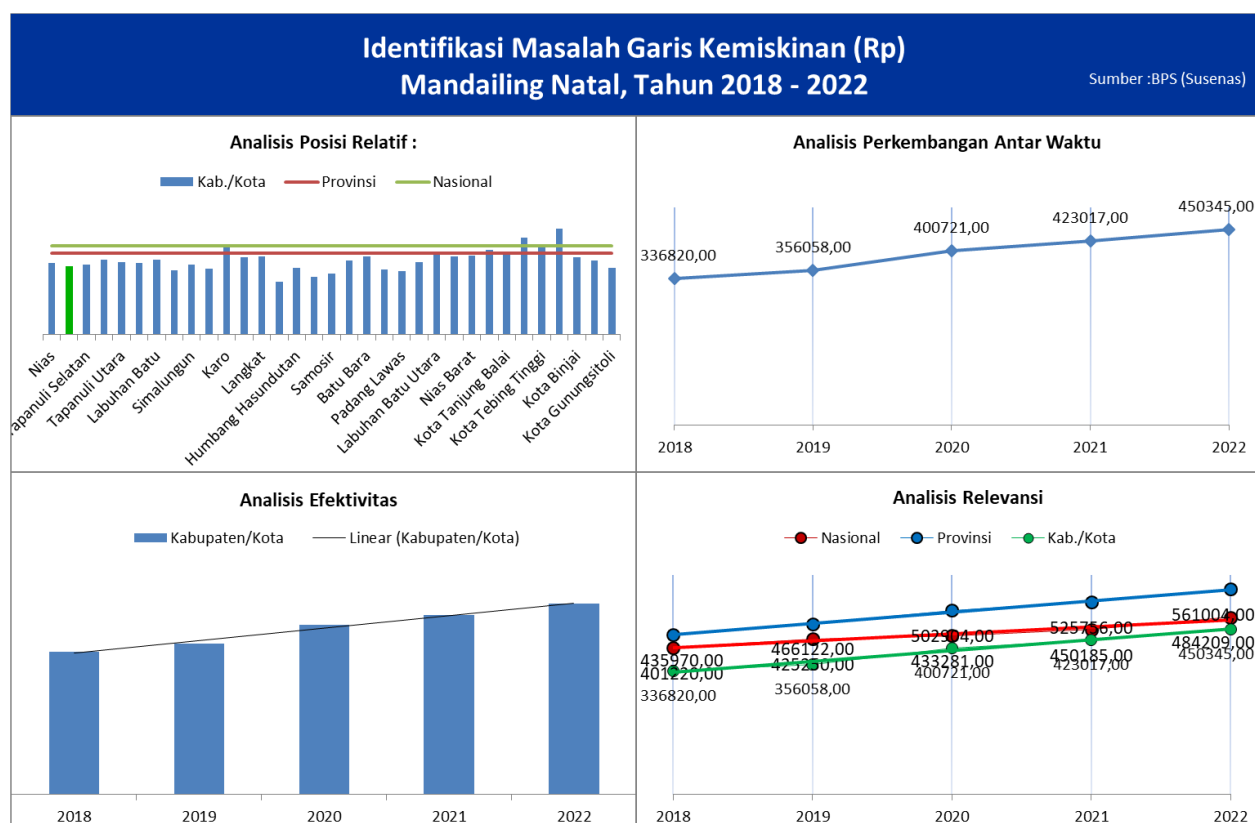


miskin Kabupaten Mandailing Natal berada di urutan ke 13. Berdasarkan perkembangan antar waktu, tren menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Sumatera Utara fluktuatif dan kembali menurun di tahun 2022 (40.980 jiwa), walaupun sempat meningkat pada tahun 2021 (43.240 jiwa).

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal yang berada di Desil 1 Tahun 2022 adalah 54.540 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 berdasarkan tiga (3) daerah dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Kecamatan Panyabungan (9.075 jiwa), Kecamatan Siabu (6.086 jiwa), dan Kecamatan Panyabungan Timur (5.308 jiwa).

3.5.1.3. Garis Kemiskinan (Rp)

Grafik 3.4
Identifikasi Masalah Garis Kemiskinan (Rp)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022

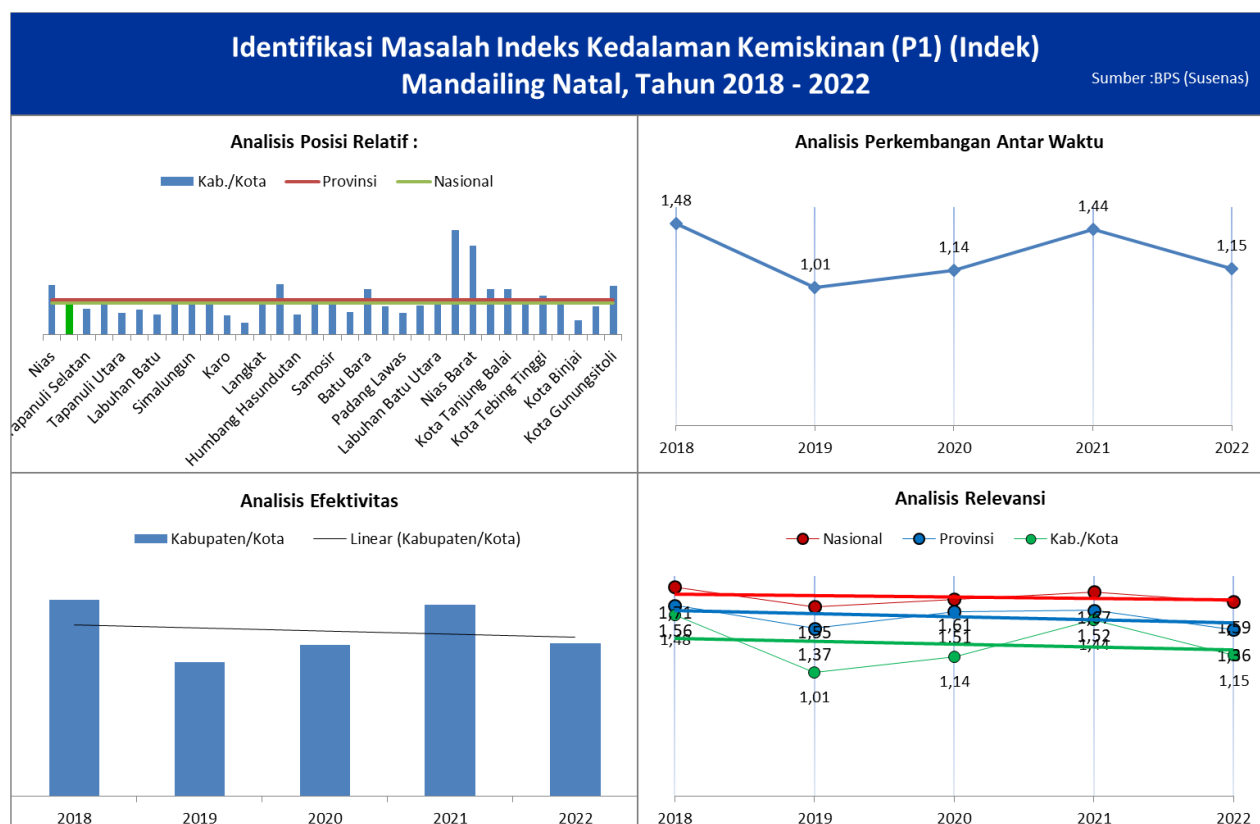


Pada tahun 2022, garis kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal adalah Rp. 450.345, jumlah rupiah ini terus meningkat dari tahun ke tahun sampai 2022. Pada tahun 2018, garis kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal sebesar

Rp. 336.820 terus meningkat sehingga tahun 2022 garis kemiskinan sebesar Rp. 450.345, salah satu penyebabnya adalah inflasi yang cenderung dan terus meningkat. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, secara khusus Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya menjaga agar laju inflasi harus benar-benar terkendali dan perlu memastikan agar harga komoditi-komoditi, khususnya komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin seperti beras, daging, telur, ikan, minyak harus murah, terjangkau dan tersedia.

3.5.1.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Grafik 3.5
Identifikasi Masalah Kedalaman Kemiskinan(P1)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022



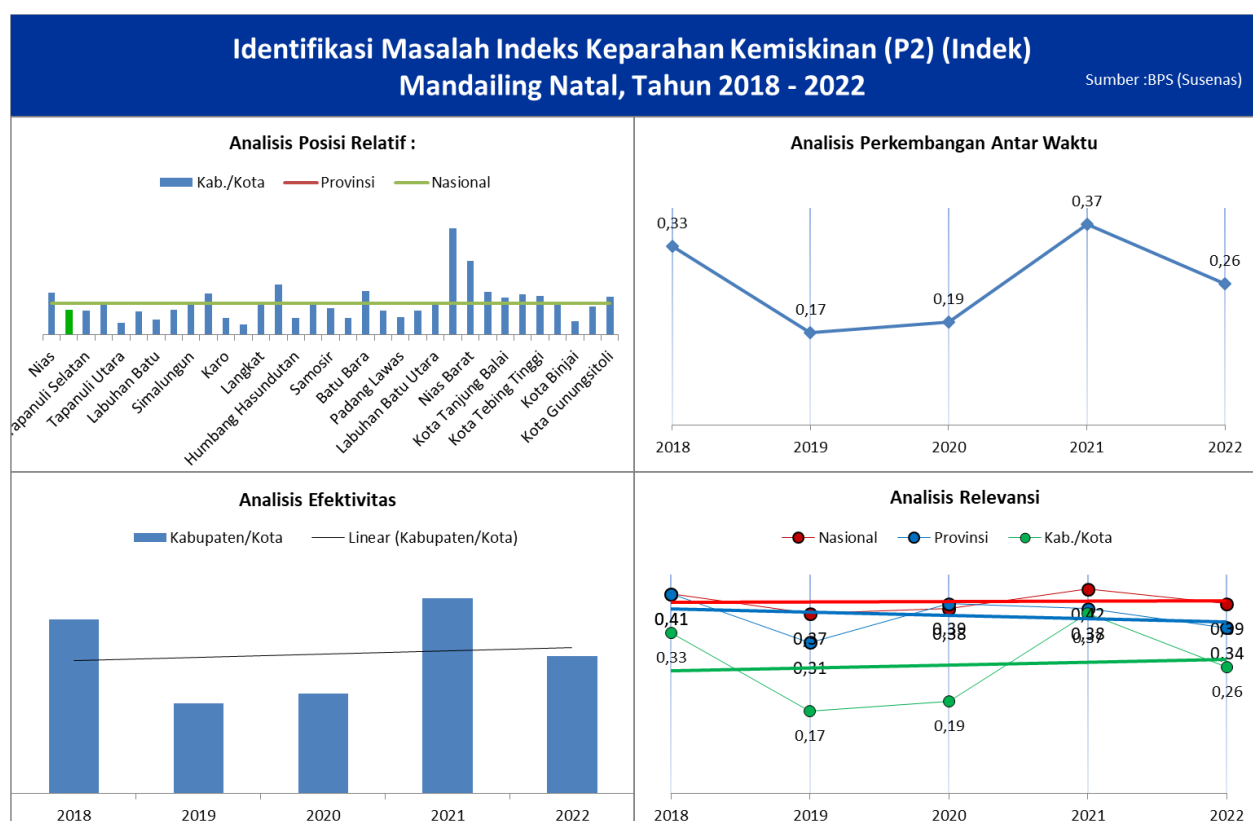
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 sebesar 1,15 poin jauh lebih baik



dari Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,36 poin dan nasional sebesar 1,58 poin. Jika dilihat dari perkembangan antar waktu, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan tren fluktuatif menurun.

3.5.1.5. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)

Grafik 3.6
Identifikasi Masalah Keparahannya Kemiskinan (P2)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022



Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kabupaten Mandailing Natal dengan posisi relatif Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada tahun 2022 sebesar 0,26 poin berada di bawah rata-rata capaian Provinsi sebesar 0,34 poin dan Nasional sebesar 0,38 poin. Jika dilihat dari perkembangan antar waktu, Indeks Keparahannya



Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan tren fluktuatif menurun.

Berdasarkan analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektivitas dan relevansi pada indikator- indikator utama kemiskinan konsumsi, maka permasalahan kemiskinan konsumsi Kabupaten Mandailing Natal adalah:

1. Masih tingginya persentase kemiskinan dan melambatnya penurunannya
2. Masih besarnya jumlah penduduk miskin dan komposisi penduduk rentan cukup besar
3. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) menurun, namun dalam laju yang semakin melambat.

3.5.2. Analisis Karakteristik Masalah Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa harus terus dilakukan dan tidak boleh berhenti, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Demikian juga bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, sejalan dengan target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, fokus pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada:

1. Penuntasan wajib belajar 9 tahun masih belum terwujud
2. Belum merata dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik
3. Belum merata dan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan
4. Belum optimalnya pelestarian nilai adat dan budaya
5. Perlunya penguatan budaya dan mata pelajaran muatan lokal.

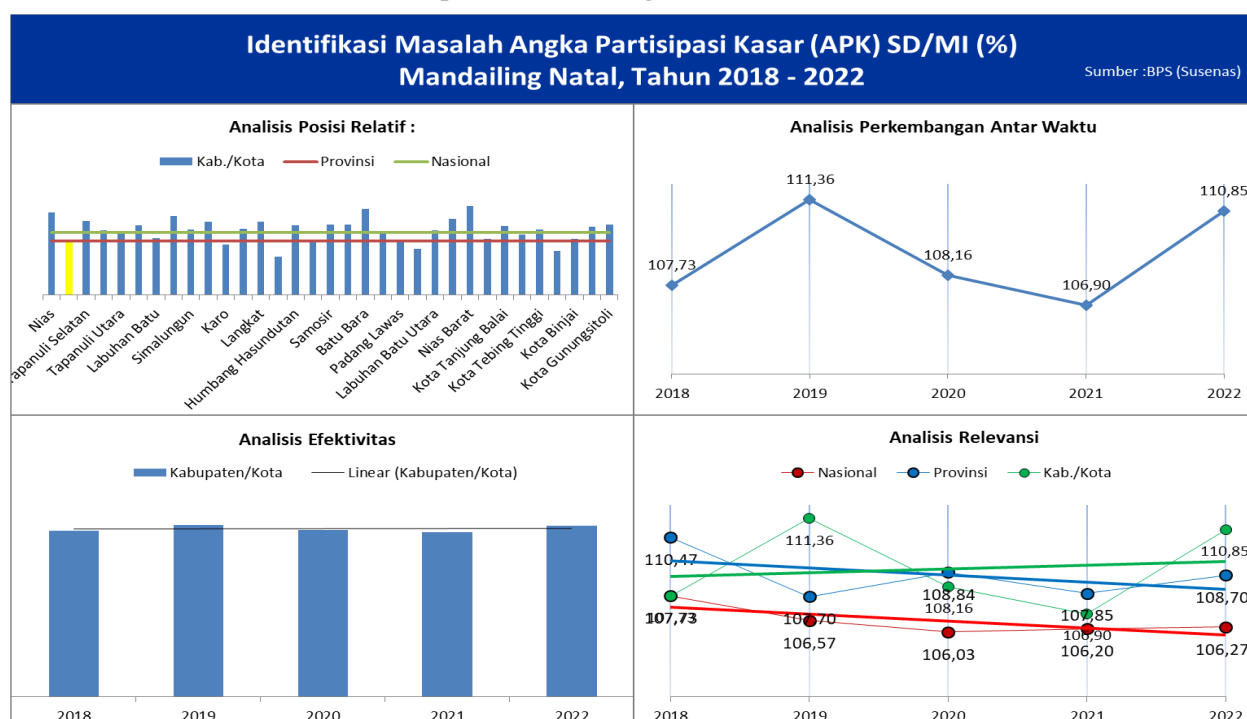
Salah satu determinan pembentuk kemiskinan adalah aspek pendidikan, untuk memutus mata rantai kemiskinan dalam jangka panjang menuju Kabupaten Mandailing Natal yang berdaya saing dan bermartabat, maka pembangunan pendidikan perlu terus menerus menjadi prioritas. Untuk analisis lebih lanjut permasalahan kemiskinan dalam bidang pendidikan akan



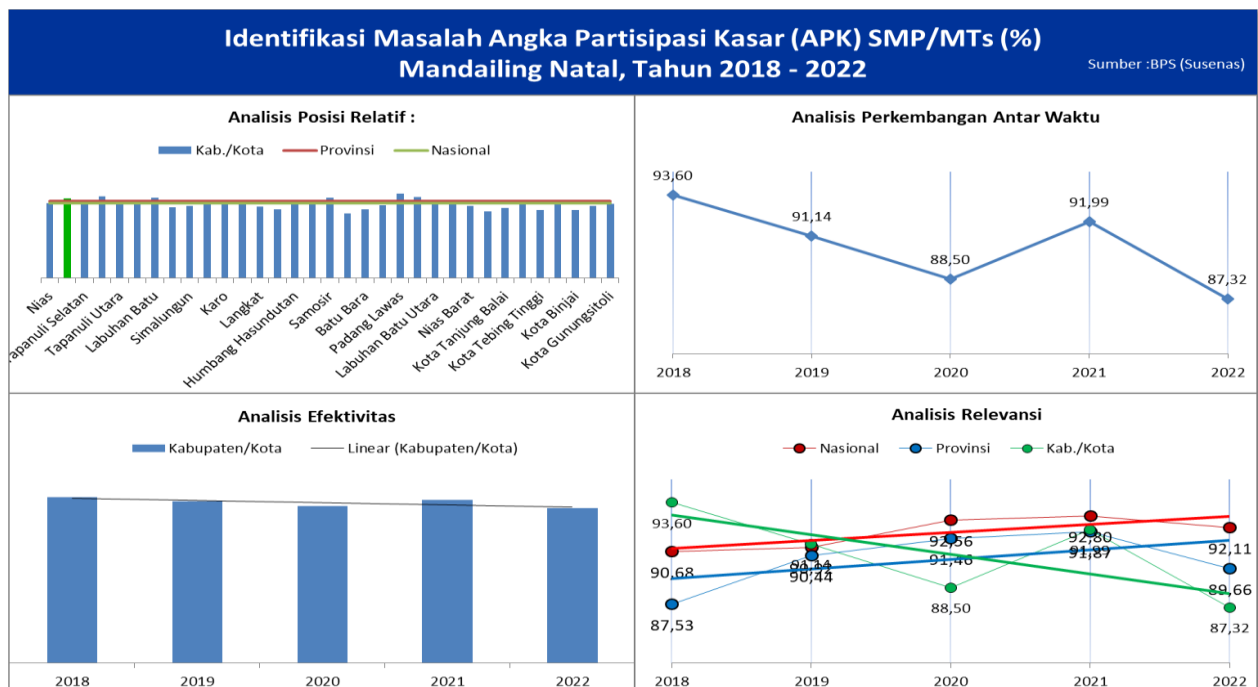
difokuskan pada partisipasi pendidikan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dengan harapan seluruh penduduk usia sekolah dan secara khusus penduduk usia sekolah dalam 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan (Desil 1-4) dapat mengakses dan mengenyam pendidikan sebagaimana tujuan tersebut telah ditetapkan.

3.5.2.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Grafik 3.7
Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022



Grafik 3.8
Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022

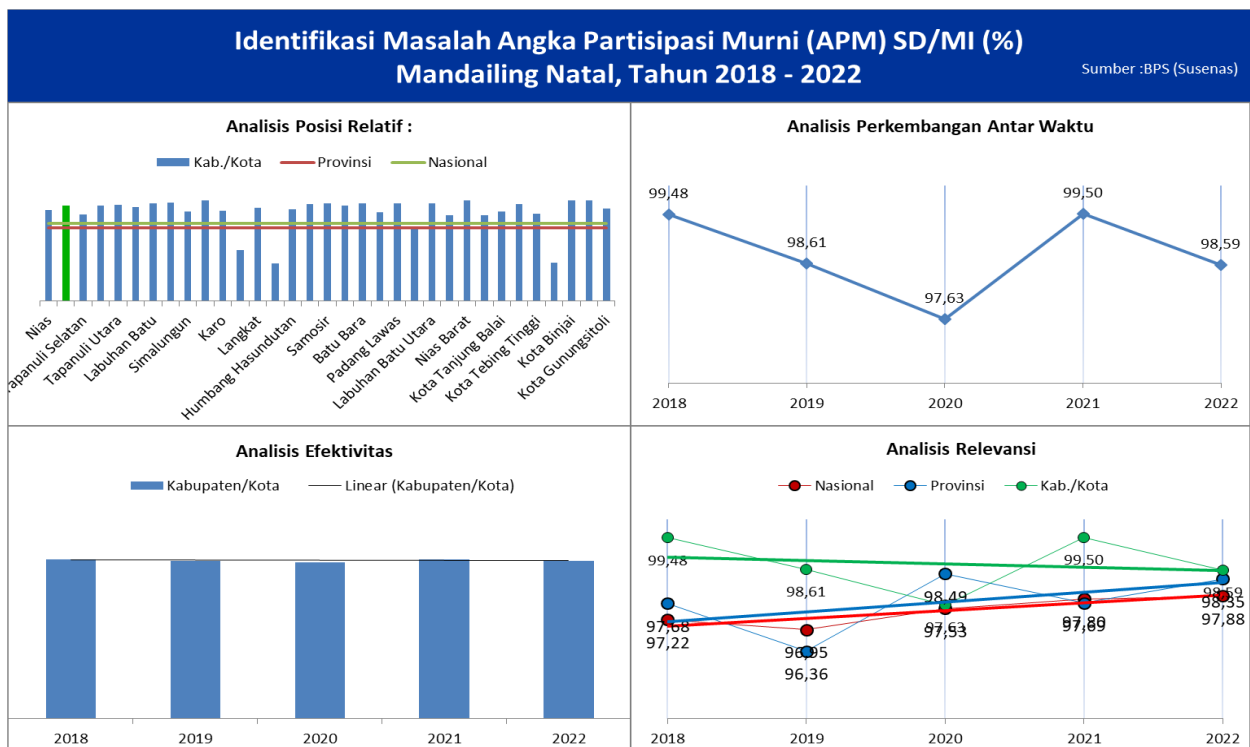


Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia), dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Capaian angka partisipasi kasar (APK) SD/MI Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 adalah 110,85%, capaian ini berada diatas capaian rata-rata Nasional (106,27%), untuk bidang pendidikan, yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah pendidikan dasar dan atau sederajat. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 adalah 87,32%, capaian ini berada dibawah capaian rata-rata Nasional (92,11%)

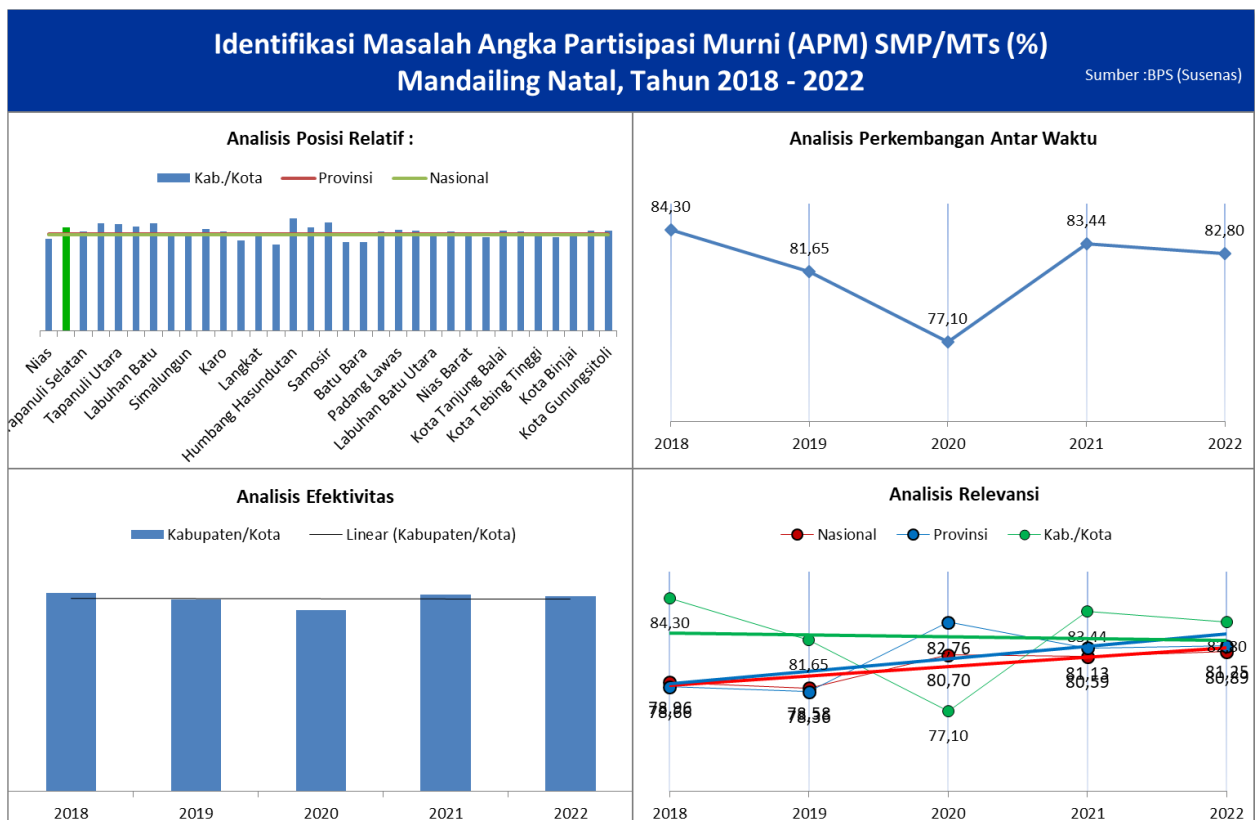
Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026, maka capaian ini melebihi dengan target, karena RPJMD menargetkan tahun 2022 untuk capaian APK SD/MI adalah 104,03%. Sedangkan target capaian APK SMP/MTs RPJMD di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 adalah 99,99%, maka capaian ini berada dibawah target.

3.5.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Grafik 3.9
Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022



Grafik 3.10
Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022





Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Capaian angka partisipasi murni (APM) SD/MI Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 adalah 98,59%, capaian ini di atas capaian rata-rata Nasional (97,88%) pada tahun yang sama. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 adalah 82,80%, capaian ini berada diatas capaian rata-rata Nasional (80,89%).

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026, maka capaian ini melebihi dengan target, karena RPJMD menargetkan tahun 2022 untuk capaian APM SD/MI adalah 94,83%. Sedangkan target capaian APM SMP/MTs RPJMD di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 adalah 90,90%, maka capaian ini berada dibawah target.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 terdapat 0,28% penduduk usia 7-24 tahun yang tidak atau belum pernah bersekolah sedangkan 25,19% dengan status tidak sekolah lagi. Merujuk kepada data P3KE Kemenko PMK tahun 2024, terdapat 15.284 jiwa penduduk usia 7-12 tahun (Desil 1-4) yang tidak/belum bersekolah dan atau putus sekolah, sedangkan untuk usia 13-15 tahun terdapat 864 jiwa yang tidak/belum bersekolah, namun perlu di cross chek dengan data pokok pendidikan yang dimiliki oleh Kabupaten Mandailing Natal.

Capaian APM SD/MI yang tinggi 98,59% yang tinggi sudah diatas capaian Provinsi dan Nasional juga memberikan pengertian yang lain, yaitu masih adanya penduduk usia 7-12 tahun tidak bersekolah dan atau putus sekolah pada tahun 2024 di Kabupaten Mandailing Natal yaitu sebesar 1,41%. Untuk pencapaian 100% target partisipasi pendidikan usia 7-12 tahun, maka menemukan 1,41% penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah adalah tugas bersama yang segera perlu dilakukan. Karena dalam asumsi sederhana 1,41% penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, rentan miskin dan atau keluarga tidak mampu lainnya.



Demikian juga untuk penduduk usia 13-15 tahun, capaian Kabupaten Mandailing Natal sudah pada angka 82,80% yang tinggi sudah diatas capaian Provinsi dan Nasional juga memberikan pengertian yang lain, yaitu masih adanya penduduk usia 13-15 tahun tidak bersekolah dan atau putus sekolah pada tahun 2024 di Kabupaten Mandailing Natal yaitu sebesar 17,20%. Untuk pencapaian 100% target partisipasi pendidikan usia 13-15 tahun, maka menemukan 17,20 % penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah adalah tugas bersama yang segera perlu dilakukan. Karena dalam asumsi sederhana 1,41% penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, rentan.

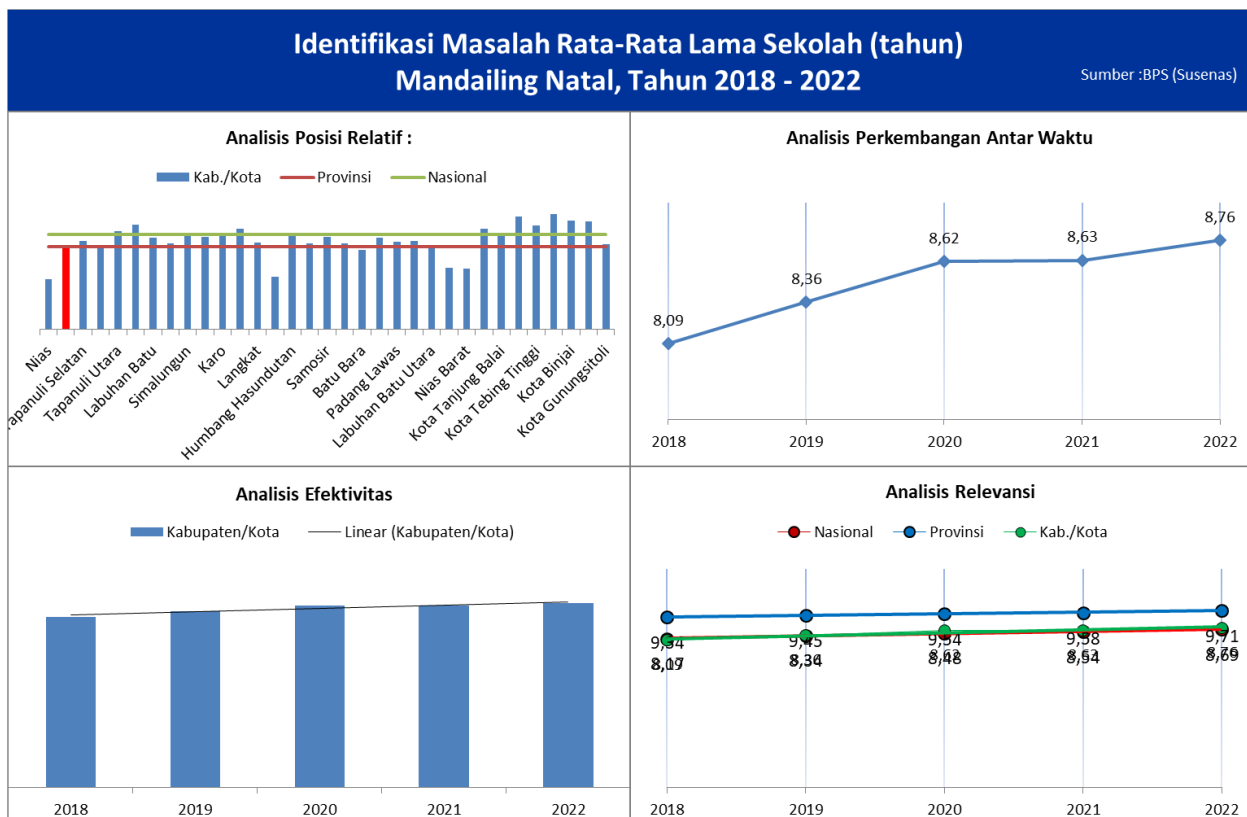
40% (Desil 1-4) Penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak bersekolah, putus sekolah dan atau belum bersekolah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal 2024

No	Kecamatan	Penduduk Usia Sekolah Tidak Bersekolah dan atau putus sekolah					
		7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun	
		P	L	P	L	P	L
1	Panyabungan	1292	1319	56	56	56	42
2	Panyabungan Utara	487	505	29	29	13	14
3	Panyabungan Timur	346	325	28	28	20	15
4	Panyabungan Selatan	194	169	12	12	5	3
5	Panyabungan Barat	215	235	17	17	9	5
6	Siabu	634	710	75	75	58	54
7	Bukit Malintang	243	221	12	12	10	11
8	Kotanopan	510	467	18	18	4	8
9	Lembah Sorik Marapi	187	192	9	9	8	10
10	Tambangan	194	168	5	5	3	2
11	Ulu Pungkut	102	124	10	10	6	4
12	Muara Sipongi	361	360	15	15	10	9
13	Batang Natal	512	499	32	32	16	11
14	Lingga Bayu	515	540	23	23	26	15
15	Batahan	255	236	6	6	6	10
16	Natal	330	351	33	33	29	21
17	Muara Batang Gadis	167	157	23	23	12	11
18	Ranto Baek	253	303	9	9	11	4
19	Huta Barget	227	207	7	7	5	6
20	Puncak Sorik Marapi	209	216	0	0	0	3
21	Pakantan	47	49	0	0	1	2
22	Sinunukan	169	150	6	6	3	4
23	Naga Juang	168	164	7	7	4	9
		7617	7667	432	432	315	273

Sumber: P3KE Kemenko PMK Tahun 2024

3.5.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

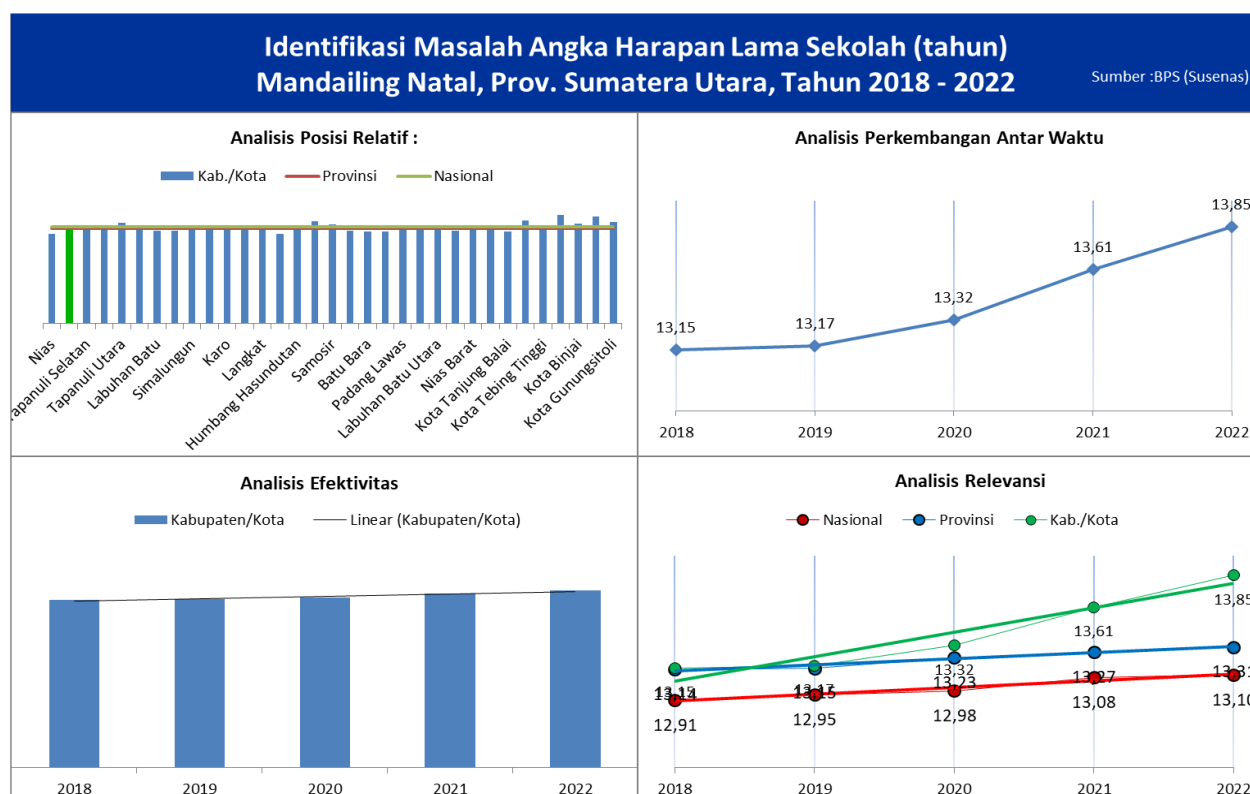
Grafik 3.11
Identifikasi Masalah Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022



Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Pada tahun 2022, capaian Kabupaten Mandailing Natal untuk indikator rata-rata lama sekolah adalah 8,76 tahun, capaian ini lebih baik dari capaian Nasional (8,69 tahun). Dalam kurun lima tahun terakhir, tren menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah Kabupaten Mandailing Natal konsisten meningkat dari 8,11 tahun (2018) dan 8,76 tahun (2022). Peningkatan secara konsisten rata-rata lama sekolah ini sejalan dengan perbaikan yang terjadi pada level Provinsi dan Nasional.

3.5.2.4. Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Grafik 3.12
Identifikasi Masalah Harapan Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022



Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Capaian Kabupaten Mandailing Natal untuk indikator harapan lama sekolah adalah 13,85 tahun, capaian ini lebih baik dari target capaian Provinsi (13,31 tahun) dan Nasional (13,10 tahun). Dalam kurun lima tahun terakhir, tren menunjukkan bahwa harapan lama sekolah Kabupaten Mandailing Natal konsisten meningkat dari 13,15 tahun (2018) dan 13,85 tahun (2022).

Berdasarkan analisis data makro, meso dan agregat serta diskusi terfokus Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mandailing Natal, maka permasalahan kemiskinan dalam bidang pendidikan yang masih menjadi fokus pembangunan adalah:



1. Masih tingginya penduduk usia sekolah 7-12 tahun yang tidak bersekolah, putus sekolah dan atau belum bersekolah, khususnya dari rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.
2. Masih tingginya penduduk usia sekolah 13-15 tahun yang tidak bersekolah, putus sekolah dan atau belum bersekolah, khususnya dari rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.
3. Belum terdistribusinya tenaga kependidikan secara merata di seluruh wilayah kecamatan dan desa serta
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

3.5.3. Analisis Karakteristik Masalah Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu modal manusia (human capital) yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas setiap manusia. Sehat merupakan suatu kondisi sejahtera secara sempurna fisik, mental dan sosial tidak terbatas pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat menghasilkan derajat kesehatan masyarakat lebih tinggi sehingga memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, baik secara ekonomi maupun sosial sehingga tercipta masyarakat sehat secara keseluruhan. Di samping itu, kondisi kesehatan merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan daerah yang dapat menjadi faktor meningkatnya kemiskinan daerah.

Dalam upaya penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pelaksana urusan pemerintah bidang kesehatan, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi



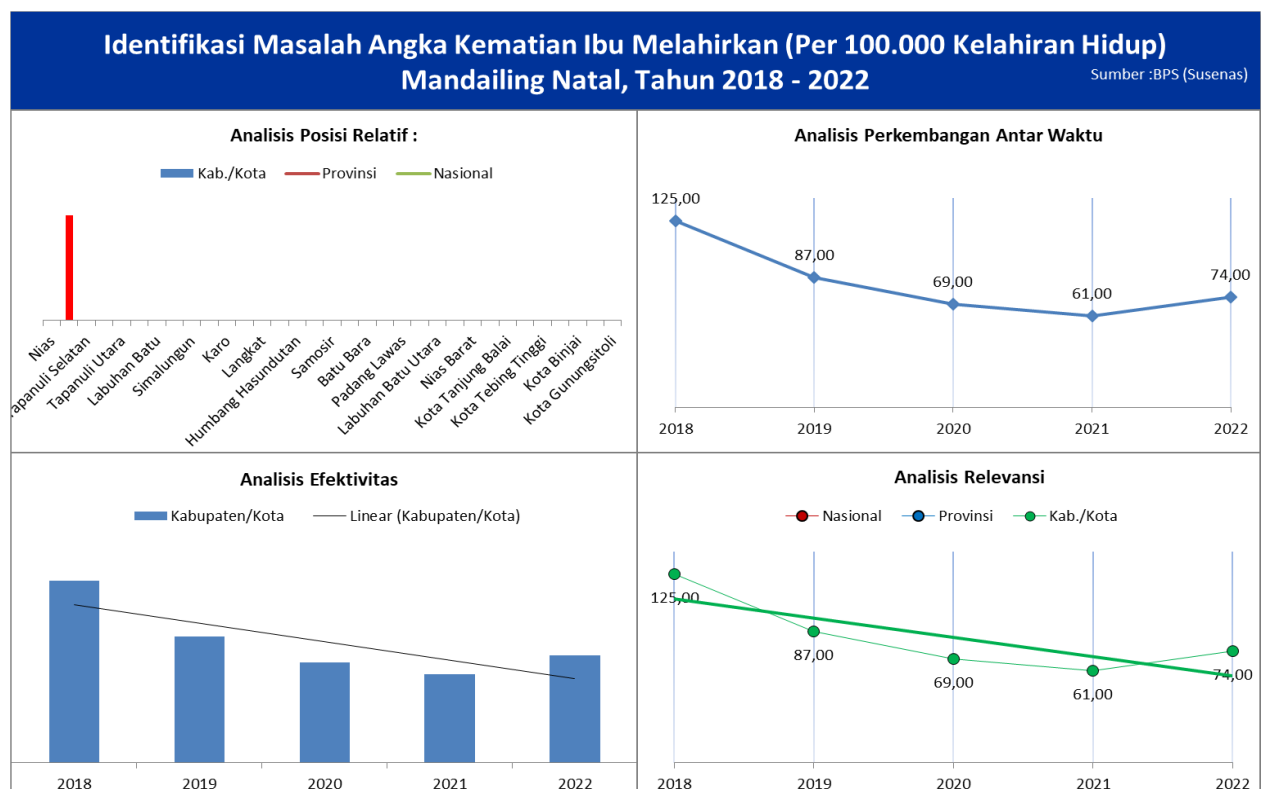
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Dimensi kesehatan merupakan aspek penting dalam pembangunan yang mencerminkan implikasi dari baik atau tidaknya pembangunan yang ada. Hal ini dapat dinilai melalui standar dan kualitas hidup yang dicerminkan dalam Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, dan stunting. Akan tetapi, selain efektivitas intervensi pemerintah daerah untuk memperbaiki standar dan kualitas hidup masyarakat, terdapat faktor eksternal yang dapat memengaruhi seperti adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pada dimensi kesehatan.

Dalam urusan kesehatan ini terdapat permasalahan pembangunan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang juga telah tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026.

3.5.3.1. Angka Kematian Ibu

Grafik 3.13
Identifikasi Masalah Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan
(Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022





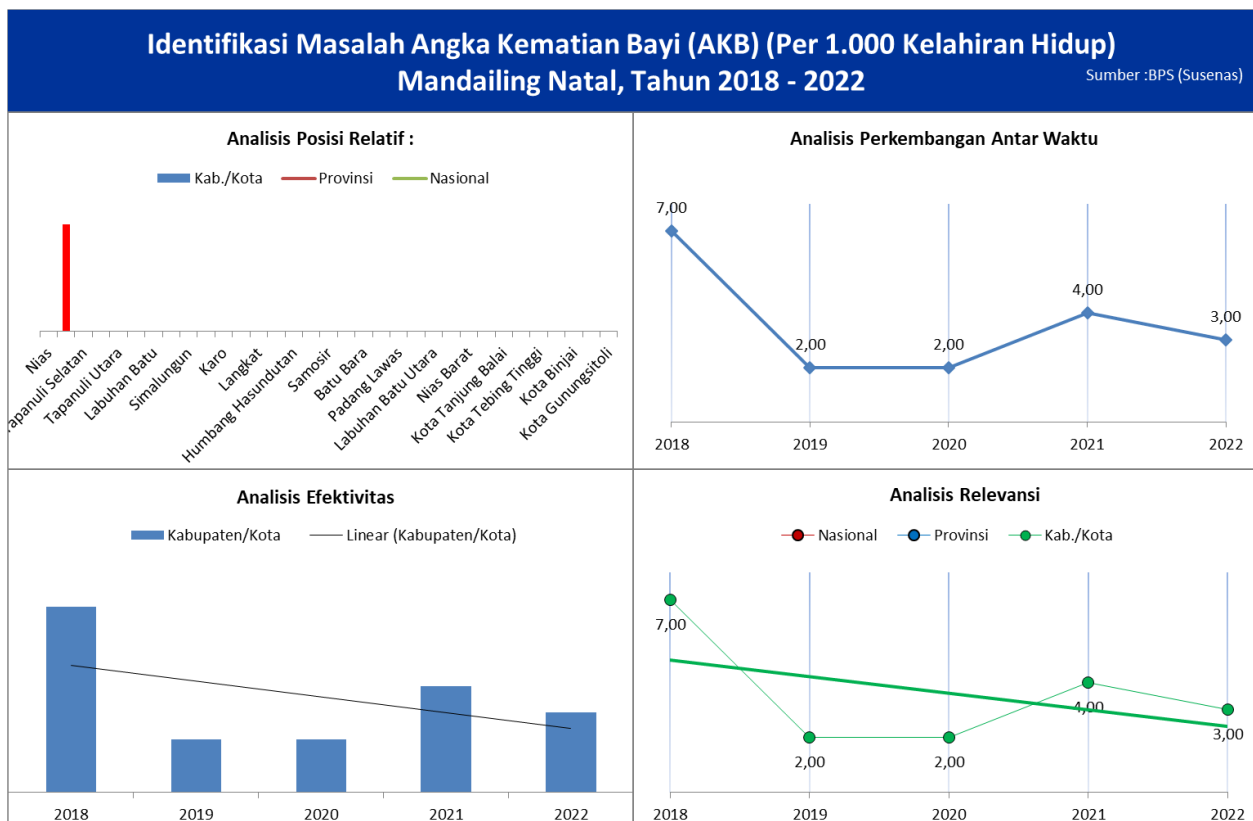
AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Keberhasilan kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka kematian ibu pada tahun 2022 adalah sebesar 74 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini berarti capaian AKI di tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal yaitu sebesar 55,37 per 100.000 kelahiran hidup.

Perkembangan AKI di 4 tahun terakhir terus menunjukkan penurunan hingga tahun 2020 namun AKI telah meningkat di tahun 2022 . Pada tahun 2018 Capaian AKI yaitu sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup dan terus menunjukkan penurunan di tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019 menjadi 87 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2020 sebesar 69 per 100.000 kelahiran hidup dan berhasil ditekan hingga di tahun 2021 menunjukkan 61 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, AKI meningkat kembali di tahun 2022 sebesar 74 per 100.000 kelahiran hidup. Jika dilihat dari perkembangan antar waktu, Angka Kematian Ibu melahirkan Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan tren fluktuatif menurun.

3.5.3.2. Angka Kematian Bayi

Grafik 3.14
Identifikasi Masalah Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022

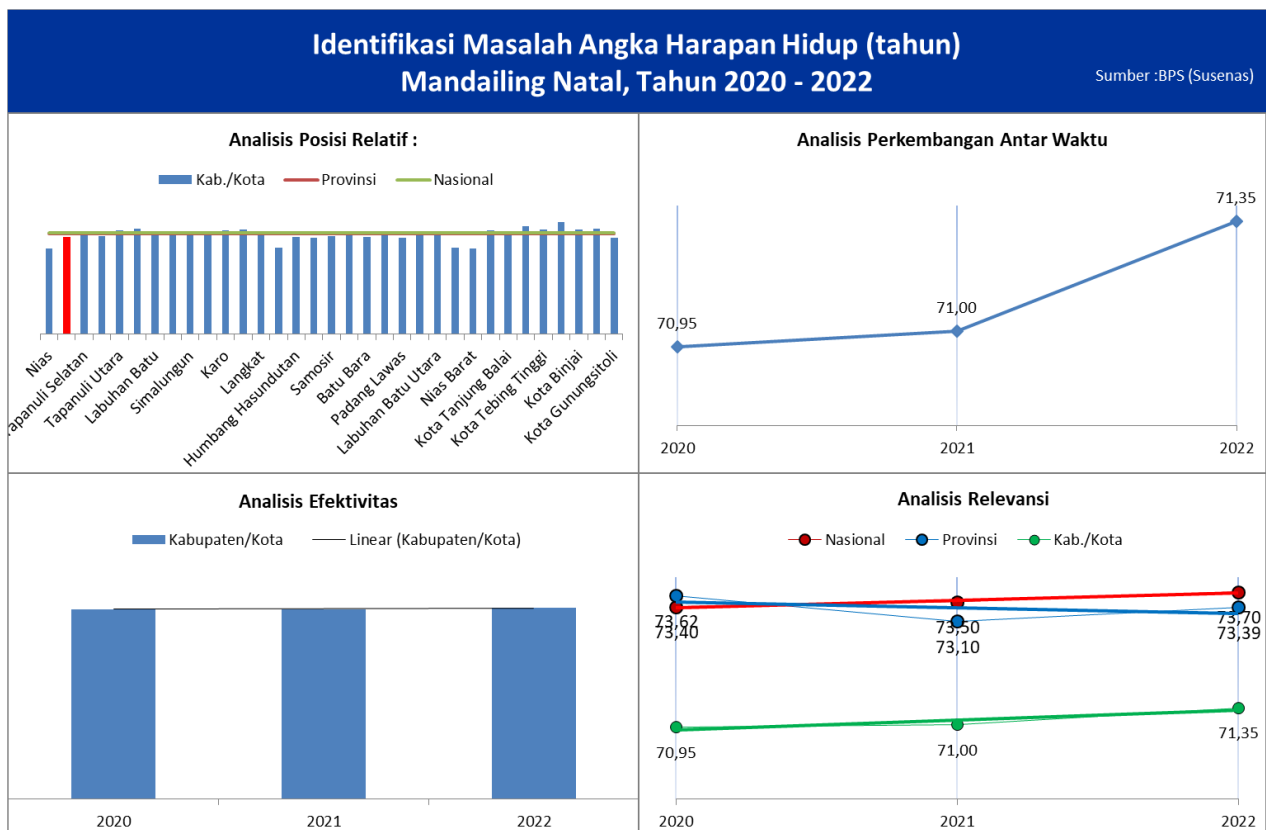


Angka kematian bayi pada tahun 2022 adalah sebesar 3 per 1.000 kelahiran hidup, dengan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya penurunan angka kematian bayi telah melampaui target yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 yaitu 4 per 1.000 kelahiran hidup. Berikut akan disajikan perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Mandailing Natal dalam lima tahun terakhir.

Angka Kematian Bayi pada tahun 2018 sebesar 7 per 1.000 kelahiran hidup, menurun pada tahun 2019 dan 2020 yaitu menjadi 2 per 1.000 kelahiran hidup. Namun pencapaian ini tidak dapat dipertahankan dan kembali meningkat di tahun 2021 yaitu sebesar 4 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2022 menurun kembali hingga AKB sebesar 3 per 1.000 kelahiran hidup.

3.5.3.3. Angka Harapan Hidup (AHH)

**Grafik 3.15
Identifikasi Masalah Angka Harapan Hidup (AHH)
Mandailing Natal Tahun 2022**



Angka harapan hidup atau disingkat AHH adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data AHH di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. AHH menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

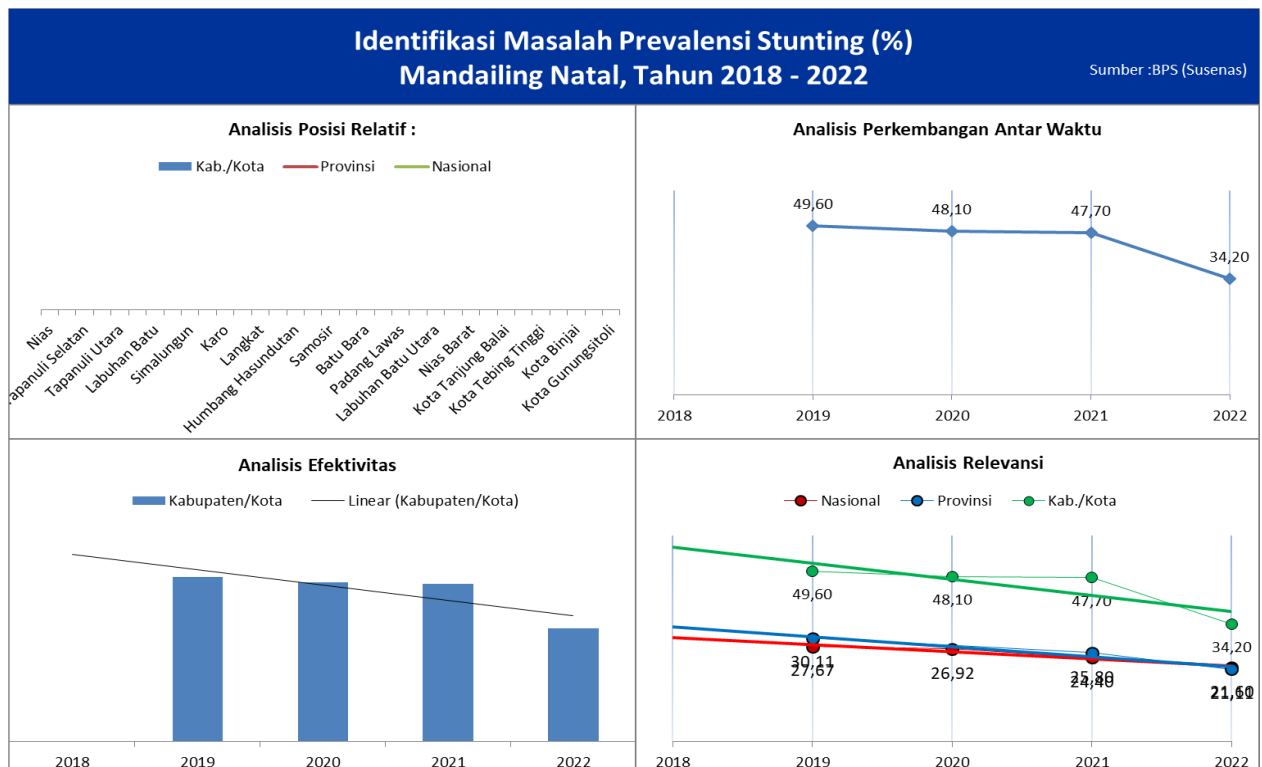
Berdasarkan data BPS, capaian angka harapan hidup tahun 2022 Kabupaten Mandailing Natal adalah 71,35 tahun. Capaian ini masih lebih



rendah dari capaian Provinsi (73,39) dan Nasional (73,7 tahun). Jika dilihat dari perkembangan antar waktu, Angka Harapan Hidup Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan tren konsisten membaik.

3.5.3.4. Prevalensi Stunting

Grafik 3.16
Identifikasi Masalah Prevalensi Stunting (%)
Mandailing Natal Tahun 2022



Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Penyebab utama dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Pada tahun 2022, capaian prevalensi stunting Kabupaten Mandailing Natal adalah 34,2%, capaian ini merupakan hasil penurunan yang signifikan sepanjang tahun 2021 (47,7%) sampai 2022 (34,2%).

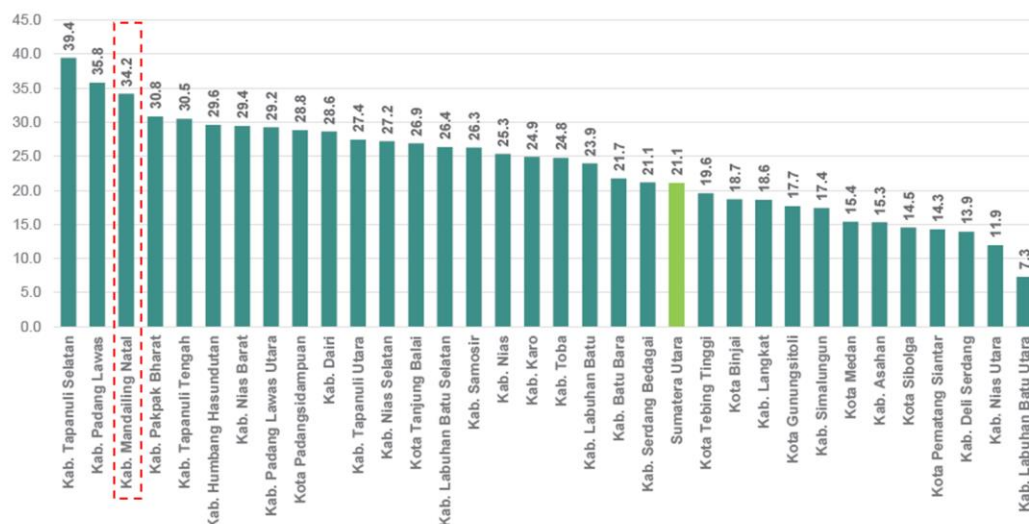
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang telah dirilis oleh Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa capaian kinerja Kabupaten Mandailing Natal untuk prevalensi stunting adalah sebagai berikut:



RPKD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 - 2026

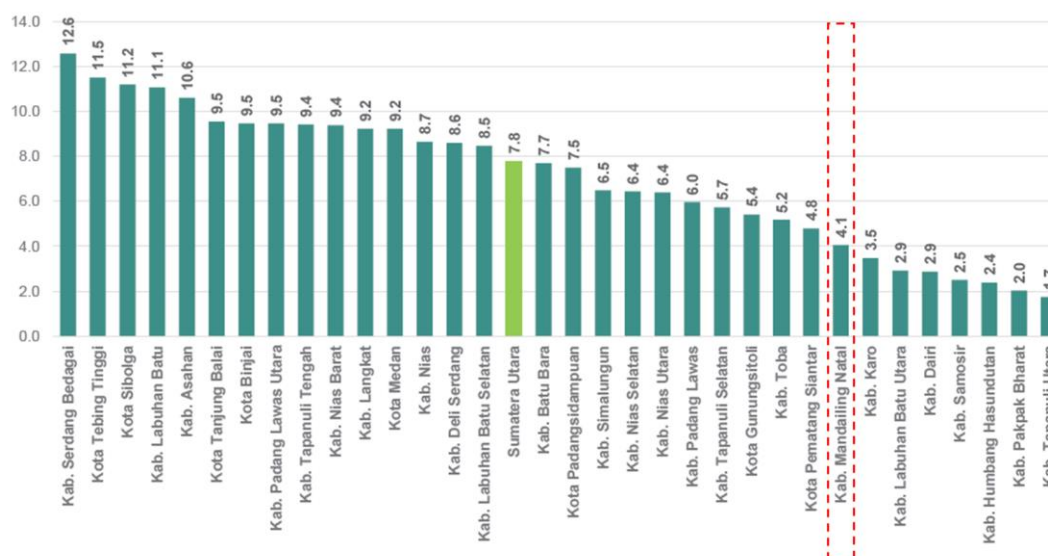
1. Prevalensi balita stunting (tinggi badan menurut umur), capaian Kabupaten Mandailing Natal adalah 34,2 lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Utara (21,1)

PREVALENSI BALITA STUNTING (TINGGI BADAN MENURUT UMUR)
BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA, SSGI 2022



2. Prevalensi balita wasting (berat badan menurut tinggi badan), capaian Kabupaten Mandailing Natal adalah 4,1 lebih baik dari capaian Provinsi Sumatera Utara (7,8)

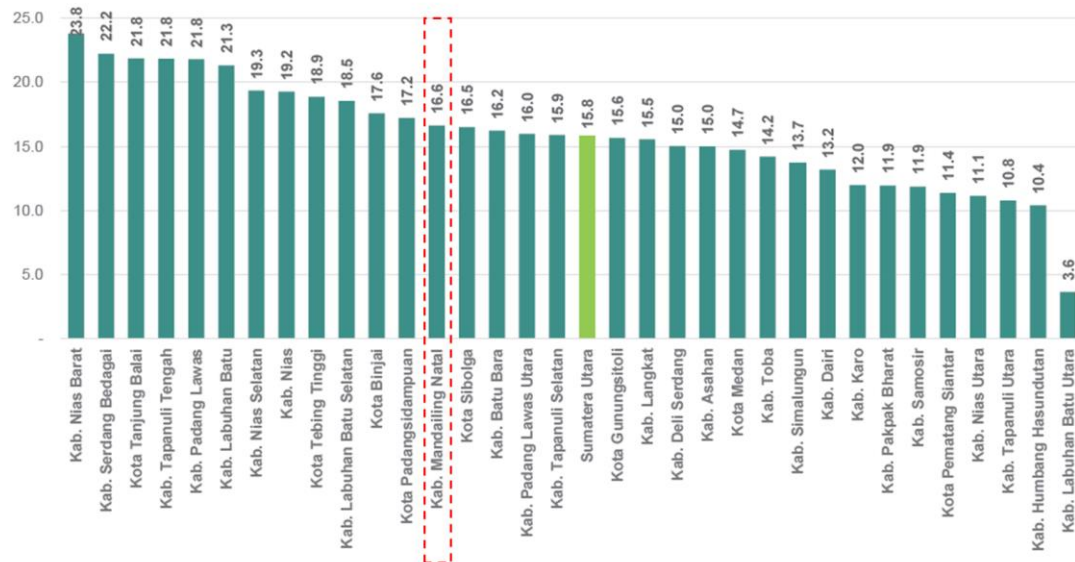
PREVALENSI BALITA WASTING (BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN)
BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA, SSGI 2022





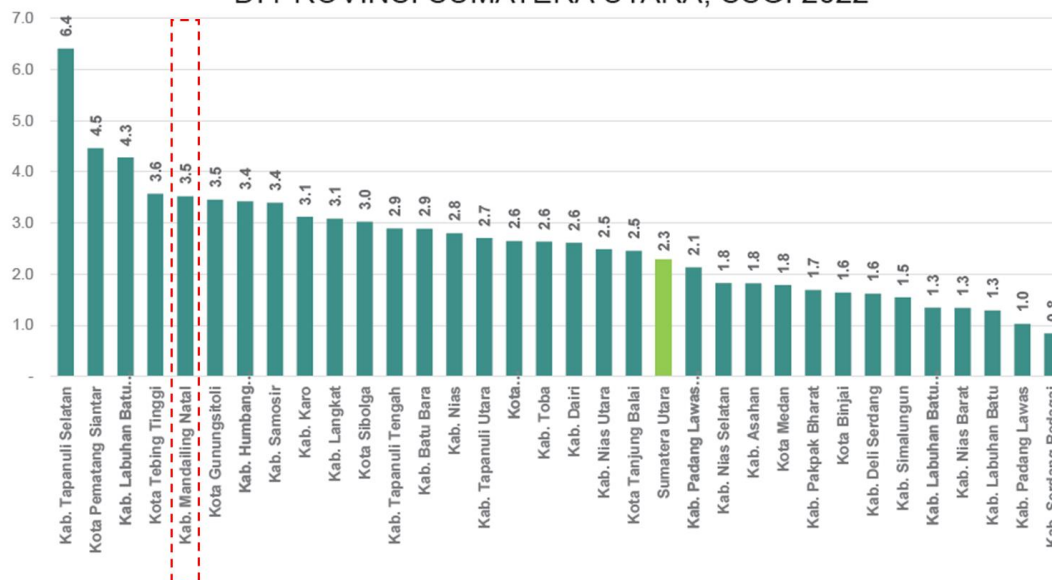
3. Prevalensi balita underweight (berat badan menurut umur), capaian Kabupaten Mandailing Natal adalah 16,6 lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Utara (15,8)

PREVALENSI BALITA *UNDERWEIGHT* (BERAT BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA, SSGI 2022



4. Prevalensi balita overweight (berat badan menurut tinggi badan), capaian Kabupaten Mandailing Natal adalah 3,5 lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Utara (2,3)

PREVALENSI BALITA *OVERWEIGHT* (BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA, SSGI 2022





5. Sedangkan pada tahun 2023, dengan data Statistik Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa capaian prevalensi balita stunting Kabupaten Mandailing Natal adalah 20,70%. Dengan cakupan status balita wasting sebesar 7,8%, underweight 15,8% serta overweight 2,3%.

Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara, Statistik Kesehatan Indonesia Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Status Gizi Balita								N tertimbang
	Stunting		Wasting		Underweight		Overweight		
	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	
Nias	20,3	16,6 - 24,6	7,6	5,4 - 10,6	12,7	10,0 - 16,0	3,8**	2,2 - 6,3	211
Mandailing Natal	20,7	16,1 - 26,3	7,8	5,7 - 10,5	15,8	11,7 - 21,1	2,3**	1,4 - 3,7	716
Tapanuli Selatan	15,6	11,1 - 21,5	0,9**	0,3 - 2,7	5,7**	3,4 - 9,4	1,8**	1,0 - 3,3	405
Tapanuli Tengah	23,8	19,0 - 29,2	7,5	5,4 - 10,4	16,5	13,0 - 20,7	2,2**	1,2 - 4,0	515
Tapanuli Utara	27,4	24,4 - 30,7	4,0	2,7 - 6,0	10,2	8,1 - 12,8	2,9**	1,7 - 4,7	400
Toba	28,0	24,1 - 32,3	2,2**	1,1 - 4,7	15,1	12,3 - 18,5	4,0	2,7 - 5,8	283
Labuhan Batu	20,2	16,3 - 24,7	6,9	4,7 - 9,8	12,1	9,1 - 15,9	3,9	2,4 - 6,3	659
Asahan	11,0	8,2 - 14,7	6,7	4,9 - 9,0	11,1	8,6 - 14,1	1,8**	1,0 - 3,3	1.050
Simalungun	17,7	13,8 - 22,4	7,3	5,4 - 9,9	12,9	10,0 - 16,3	1,3**	0,5 - 3,0	1.169
Dairi	32,6	28,9 - 36,4	4,0	2,8 - 5,9	11,5	9,4 - 13,9	4,3	2,9 - 6,4	439
Karo	24,7	20,4 - 29,5	6,1	4,0 - 9,2	10,6	8,0 - 13,8	5,9	4,1 - 8,3	472
Deli Serdang	33,8	27,7 - 40,5	13,9	11,3 - 17,0	24,3	19,8 - 29,4	5,3	3,6 - 7,6	2.401
Langkat	16,9	13,1 - 21,6	10,7	8,2 - 13,9	14,5	11,1 - 18,8	3,6**	2,1 - 6,2	1.379
Nias Selatan	31,8	27,6 - 36,4	8,1	5,8 - 11,3	13,0	10,2 - 16,4	7,5	4,9 - 11,3	569
Humbang Hasundutan	18,4	14,6 - 22,9	3,1	2,1 - 4,7	8,7	6,4 - 11,6	2,6**	1,5 - 4,2	269
Pakpak Bharat	28,9	23,9 - 34,5	3,0	1,9 - 4,7	13,2	10,1 - 17,0	2,5**	1,5 - 4,0	97
Samosir	22,4	17,8 - 27,8	1,9**	1,1 - 3,3	8,2	6,2 - 10,9	4,0	2,8 - 5,7	182
Serdang Bedagai	14,4	11,3 - 18,2	5,1	3,5 - 7,3	12,1	9,0 - 16,1	0,9**	0,4 - 1,9	842
Batu Bara	17,7	14,3 - 21,7	17,6	14,2 - 21,5	22,4	18,8 - 26,5	3,4	2,2 - 5,3	647
Padang Lawas Utara	21,8	16,8 - 27,8	8,4	6,1 - 11,4	14,5	11,5 - 18,1	6,0	4,0 - 9,1	385
Padang Lawas	17,7	13,4 - 23,1	9,3	6,4 - 13,4	16,3	11,8 - 22,0	1,4**	0,6 - 3,1	418
Labuhan Batu Selatan	16,0	11,5 - 21,8	10,5	7,7 - 14,1	10,3	7,3 - 14,4	4,7**	2,5 - 8,6	465
Labuhan Batu Utara	9,6	6,7 - 13,4	4,6	3,2 - 6,5	7,9	5,5 - 11,2	1,5**	0,9 - 2,7	552
Nias Utara	20,3	16,1 - 25,3	11,2	8,5 - 14,7	15,7	12,7 - 19,2	1,3**	0,6 - 2,6	229
Nias Barat	28,9	24,5 - 33,8	15,5	12,2 - 19,5	25,7	21,9 - 30,0	5,1	3,3 - 7,7	152
Kota Sibolga	10,6	8,1 - 13,8	8,5	5,8 - 12,2	11,5	8,5 - 15,3	1,8**	0,8 - 4,0	122
Kota Tanjung Balai	5,7	3,7 - 8,7	5,1	3,3 - 7,8	3,2	2,1 - 5,1	1,9**	1,1 - 3,5	249
Kota Pematang Siantar	7,7	5,2 - 11,4	4,2	2,8 - 6,3	7,2	5,0 - 10,1	4,5	3,0 - 6,7	303
Kota Tebing Tinggi	10,4	7,9 - 13,6	15,8	11,7 - 20,8	15,8	12,7 - 19,6	3,4	2,1 - 5,2	218
Kota Medan	5,8	3,9 - 8,6	4,0**	2,3 - 6,7	3,3**	1,9 - 5,8	3,9	2,5 - 6,2	2.606
Kota Binjai	19,4	16,1 - 23,3	11,6	9,6 - 14,0	17,3	14,3 - 20,7	4,0	2,6 - 6,2	370
Kota Padangsidempuan	26,1	21,3 - 31,5	8,3	6,2 - 10,9	17,2	13,9 - 21,2	3,0	2,0 - 4,4	312
Kota Gunungsitoli	18,9	15,3 - 23,0	4,3**	2,5 - 7,6	14,3	10,7 - 18,9	2,5**	1,5 - 4,3	211
SUMATERA UTARA	18,9	17,7 - 20,2	7,9	7,3 - 8,6	13,2	12,3 - 14,1	3,5	3,1 - 3,9	19.298

**Relative Standard Error (RSE) > 25% merupakan estimasi akurasi yang kurang baik untuk menggambarkan populasi balita di kab/kota

Sumber: Statistik Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Kementerian Kesehatan

Berdasarkan analisis data makro, meso dan agregat serta diskusi terfokus Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mandailing



Natal, maka permasalahan kemiskinan dalam bidang kesehatan yang masih menjadi fokus pembangunan adalah:

1. Masih terjadinya kasus kematian ibu, bayi dan balita, dengan fokus pada keluarga keluarga miskin dan tidak mampu
2. Masih tingginya prevalensi stunting, dengan fokus pada keluarga keluarga miskin dan tidak mampu
3. Masih rendahnya PHBS, dengan fokus pada keluarga keluarga miskin dan tidak mampu
4. Belum terdistribusinya tenaga kesehatan secara merata
5. Belum sepenuhnya terpenuhi sarana dan prasarana pendukung kesehatan
6. Kesehatan lingkungan yang masih relatif rendah.

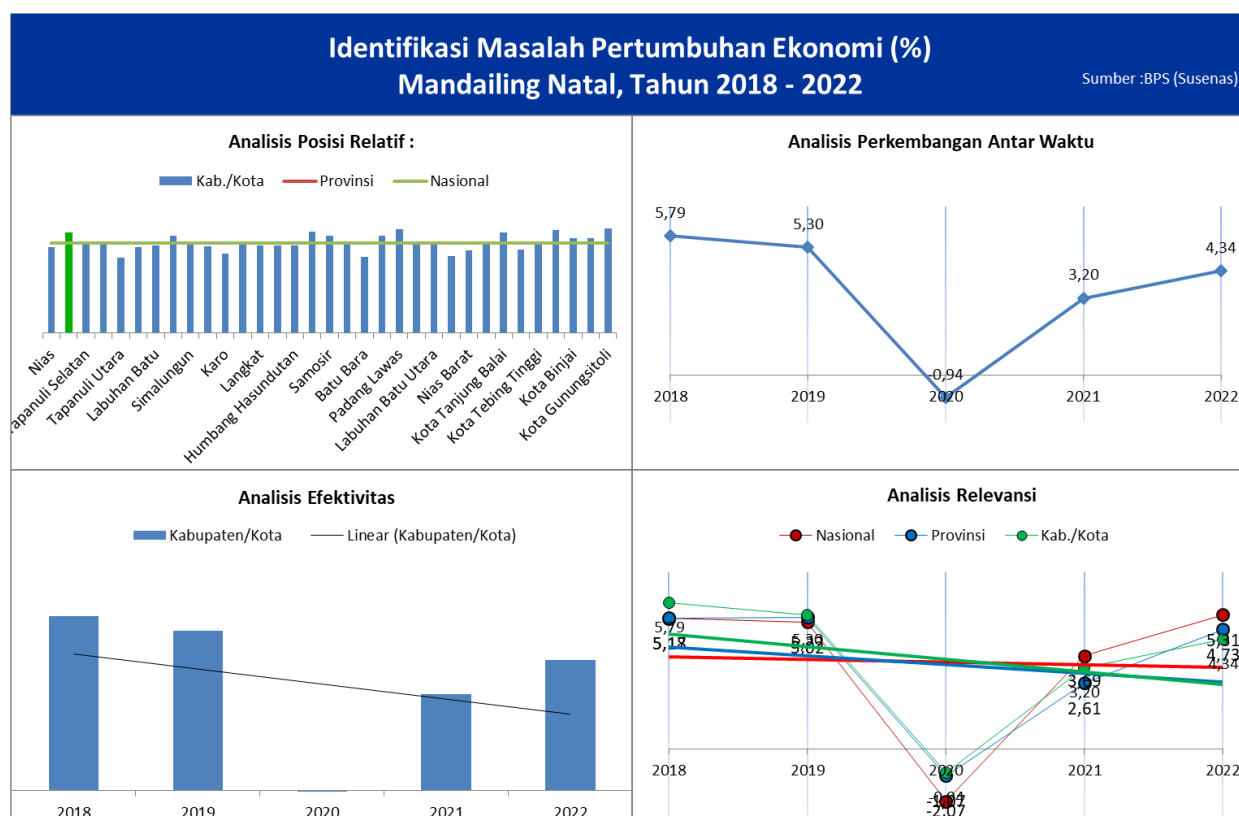
3.5.4. Ekonomi

3.5.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Penanggulangan kemiskinan saat ini merupakan salah satu program prioritas nasional, yang mana setiap pembangunan menjadi tidak merata dan cukup berarti ketika ketimpangan sangat tinggi dan juga kemiskinan terus meningkat. Ditambah lagi, tren pembangunan saat ini sudah beralih dari yang berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilihat dari aspek kontribusi dan dampak dari pembangunan, serta dapat pula dilihat dari konteks penghidupan masyarakat (livelihood). Kemiskinan memiliki berbagai arti dan karakteristik. Menurut Wagle (2008), kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi, yang meliputi permasalahan kesejahteraan ekonomi, kapasitas maupun inklusi sosial. Di samping itu, karakteristik kemiskinan masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa sebab, seperti ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses fasilitas pelayanan, kemiskinan yang disebabkan oleh struktur keluarga dan sosial di sekitarnya, serta kemiskinan yang juga disebabkan oleh kondisi lingkungan alam sekitar, seperti bencana, iklim, atau bahkan tingkat kesuburan tanah.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan.

Grafik 3.17
Identifikasi Masalah Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022



Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal berkisar pada angka 4,34%. Capaian 2022 ini meningkat positif dari tahun 2021 (3,20%), setelah berkontraksi sangat dalam pada tahun 2020 (-1,58%) sebagai tahun pertama terjadinya Covid-19 di Indonesia. Padahal pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal sempat pada angka 5,30%.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu instrumen terpenting yang diharapkan dapat berkontribusi signifikan pada meningkat kesejahteraan

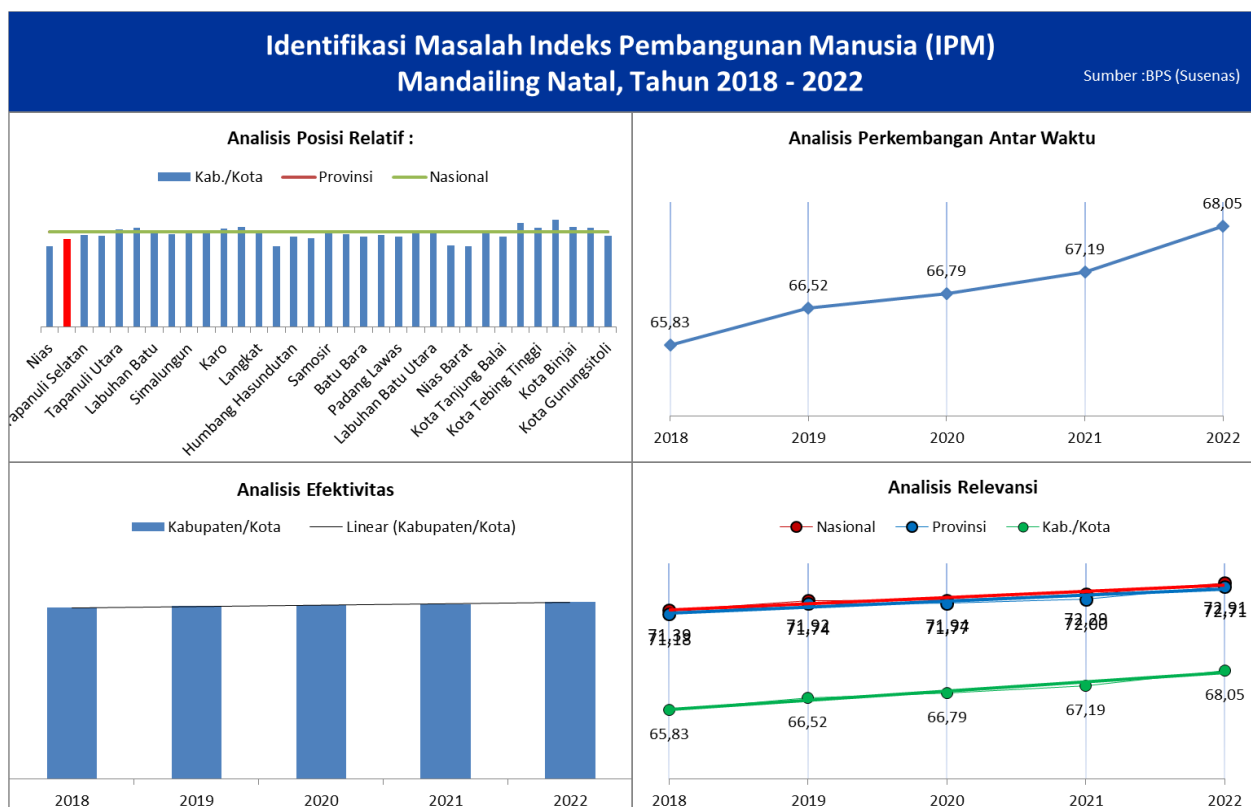


masyarakat, namun dari beberapa pengalaman dan analisis juga memberikan informasi yang sangat penting; ketika pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan, juga diikuti dengan meningkatnya kemiskinan. Untuk kasus seperti ini Pemerintah Daerah perlu memperhatikan secara cermat kebermanfaatan distribusi pertumbuhan ekonomi. Selain berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal terpenting lainnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan inklusifitas dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi harus bisa melibatkan, sekaligus dirasakan manfaatnya secara tepat oleh penduduk miskin ekstrem, penduduk miskin, penduduk rentan miskin dan kelompok-kelompok marginal lainnya.

3.5.4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Grafik 3.18
Identifikasi Masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022

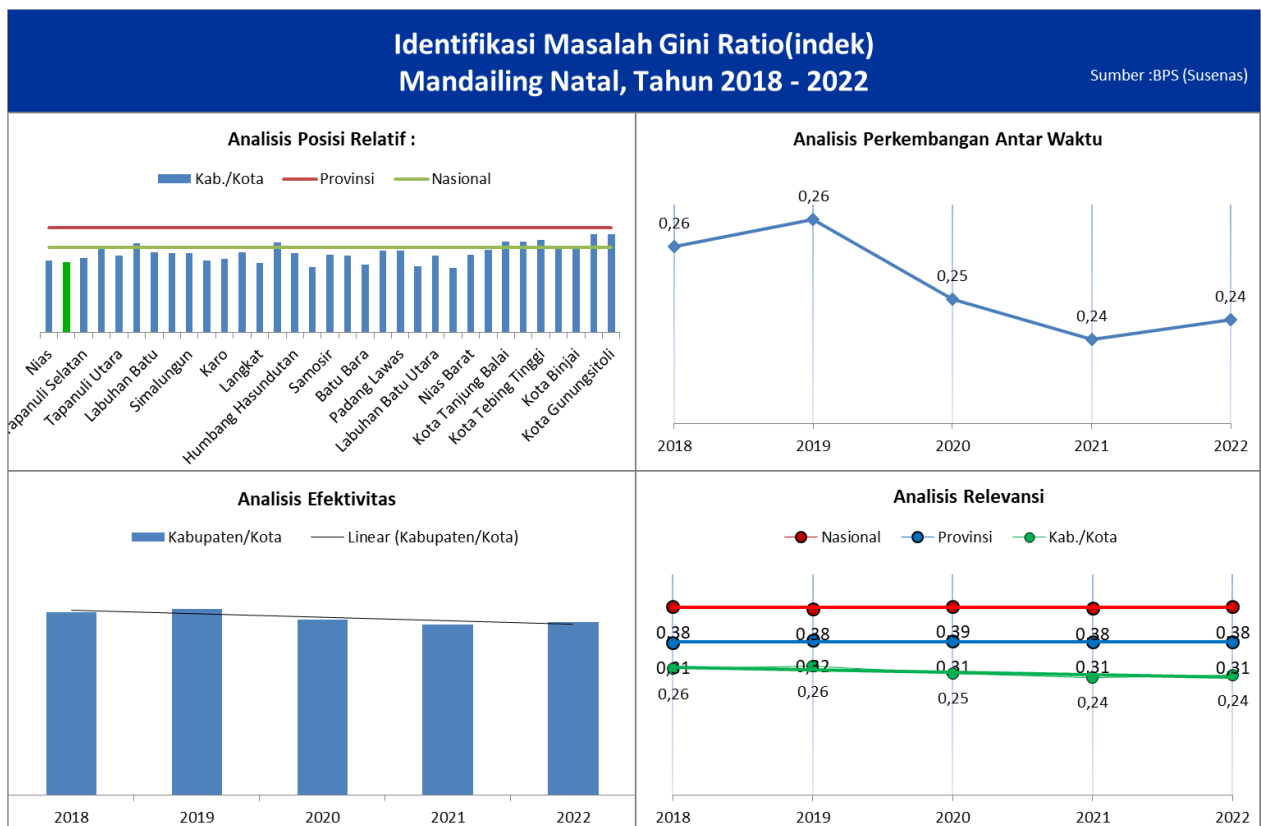


Pada tahun 2022, capaian IPM Kabupaten Mandailing Natal adalah 68,05, capaian Kabupaten Mandailing Natal ini lebih rendah dari capaian Provinsi (72,71) dan Nasional (72,91), namun jika dilihat sepanjang 2018 sampai 2022, perkembangan IPM Kabupaten Mandailing Natal konsisten meningkat dari tahun ke tahun.

3.5.4.3. Gini Ratio

Indeks Gini (gini ratio) merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah, juga menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi, dengan rentang skor 0 - 1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total sedangkan indeks 1 terjadi ketidakmerataan atau ketimpangan sama sekali.

**Grafik 3.19
Identifikasi Masalah Gini Ratio
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022**



Berdasarkan data BPS, capaian indeks gini Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 adalah 0,244. Capaian indeks gini Kabupaten Mandailing Natal selalu mengalami penurunan sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, baru di tahun 2022 yang mengalami kenaikan dari 0,240 di tahun 2021.

3.5.5. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia 15 ke atas. Penduduk usia kerja terbagi menjadi 2 bagian yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja yang besar dapat menjadi sumber pembangunan daerah. Di sisi lain, penduduk usia kerja yang melimpah dan tidak dibekali dengan pengembangan softskill serta lapangan pekerjaan yang memadai akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi tersebut tentunya akan mengganggu kestabilan ekonomi suatu daerah. Masalah ketenagakerjaan adalah masalah kemiskinan baik secara nasional, provinsi maupun di lingkup kabupaten/kota, permasalahan timbul karena tidak adanya perimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun dengan perkembangan jumlah lapangan usaha yang menampung tenaga kerja tersebut.

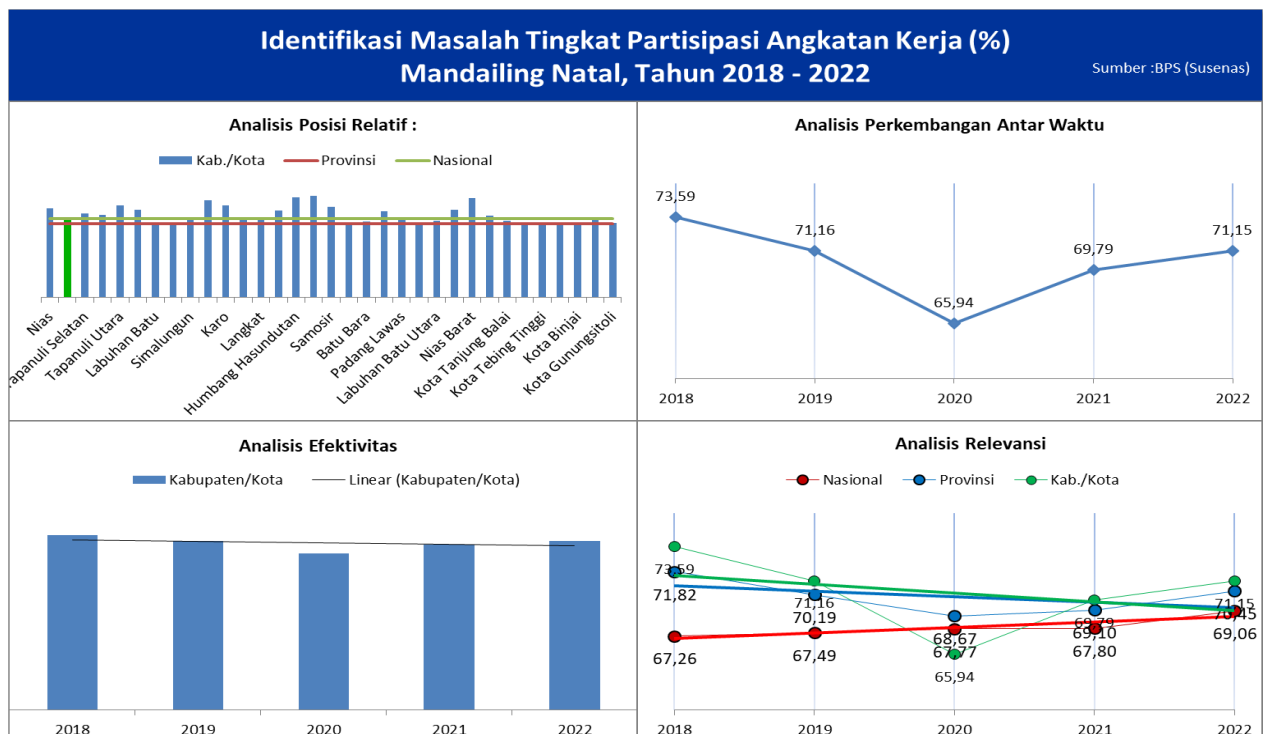


Sejalan dengan target dan tujuan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal 2021-2026, fokus pembangunan bidang ketenagakerjaan dititikberatkan pada penanganan: (1) Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat dari tahun ke tahun, (2) Kebutuhan pasar kerja tidak sesuai dengan pencari kerja yang ada, (3) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi angkatan kerja muda yang memasuki dunia kerja, serta masih terbatasnya lembaga sertifikasi profesi (LSP), (4) Kurang optimalnya pembinaan hubungan industrial perusahaan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) mediator.

Terkait dengan kemiskinan, permasalahan utama dalam urusan ketenagakerjaan dibatasi analisis pada beberapa indikator pokok sebagai berikut:

3.5.5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Grafik 3.20
Identifikasi Masalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
Mandailing Natal Tahun 2022



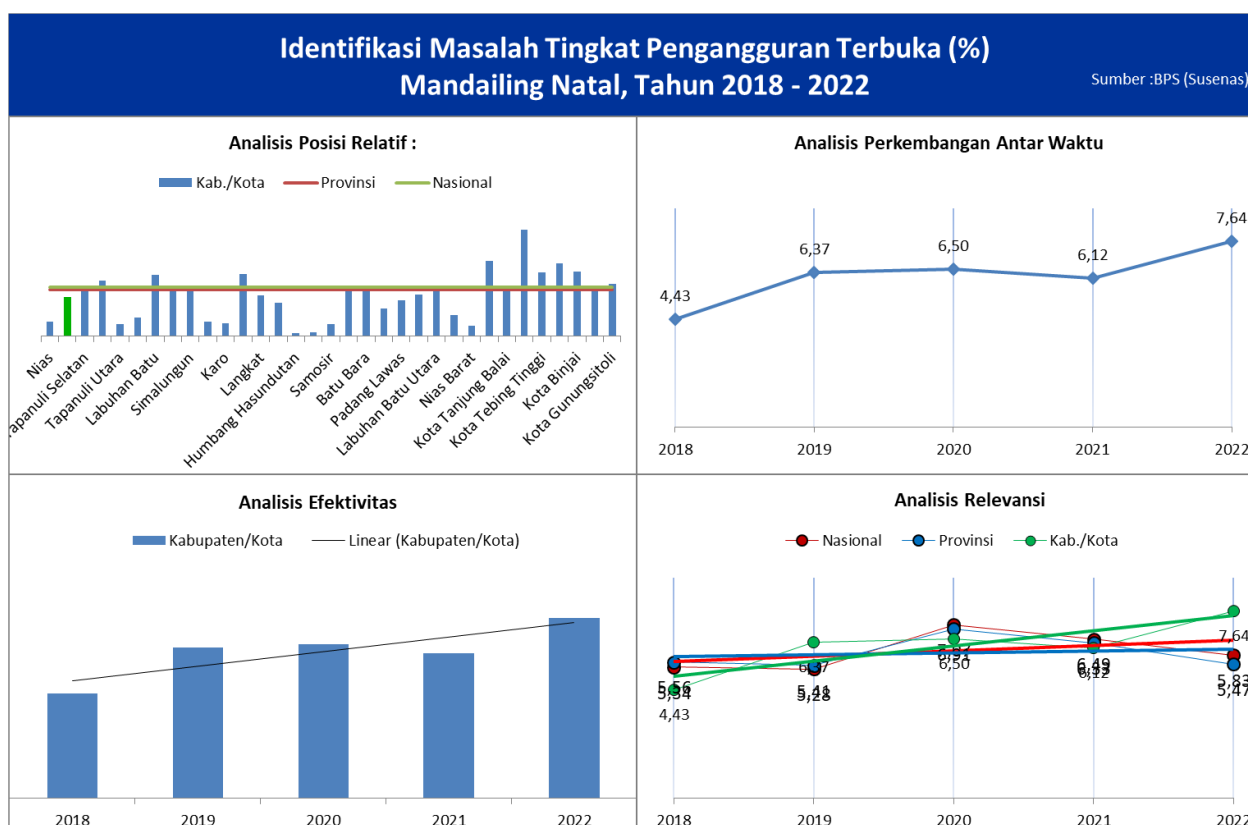
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin besar peluang penduduk usia kerja mendapatkan pekerjaan atau bekerja di sebuah daerah, demikian juga dengan



Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2022, capaian partisipasi angkatan kerja adalah 71,15%, yang artinya masih terdapat 28,85% penduduk usia kerja yang belum memiliki kesempatan bekerja ditengah meningkatnya partisipasi angkatan kerja. Dari tahun 2018 ke tahun 2020, partisipasi angkatan kerja Kabupaten Mandailing Natal sempat menurun yaitu 70,16% (2019) dan 65,94% (2020), sedangkan 2021-2022 partisipasi angkatan kerja ini kembali meningkat menjadi 69,79% (2021) dan 71,15% di tahun 2022.

3.5.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Grafik 3.21
Identifikasi Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Mandailing Natal Tahun 2022



Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin rendah tingkat pengangguran terbuka, semakin besar kesempatan dan partisipasi angkatan kerja di sebuah daerah, demikian juga untuk Kabupaten Mandailing Natal, tingkat pengangguran



terbuka tahun 2022 adalah 7,64%. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Mandailing Natal naik dari 6,50 (2020) menjadi 7,64% (2022).

Sedangkan berdasarkan Data P3KE Kemenko PMK Tahun 2024 menunjukkan bahwa, 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data informasi bekerja dan tidak bekerja berdasarkan kecamatan serta berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Data Desil 1-4 Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Kecamatan, Informasi Bekerja dan Tidak Bekerja serta Berdasarkan Usia Tahun 2024

No	Kecamatan	5-14 tahun			15-59 tahun			Usia di atas 60 tahun		
		Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja	Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja	Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja
1	Panyabungan	8500	8458	42	23535	12420	11115	2549	422	2127
2	Panyabungan Utara	3236	3220	16	9016	3857	5159	1188	52	1136
3	Panyabungan Timur	2345	2338	7	6984	3417	3567	1020	53	967
4	Panyabungan Selatan	1284	1280	4	3590	1718	1872	657	47	610
5	Panyabungan Barat	1480	1473	7	4595	2192	2403	692	46	646
6	Siabu	4567	4542	25	14620	7498	7122	2478	131	2347
7	Bukit Malintang	1571	1564	7	4999	2391	2608	841	54	787
8	Kotanopan	3252	3237	15	9603	4406	5197	1761	165	1596
9	Lembah Sorik Marapi	1317	1310	7	3679	1947	1732	578	52	526
10	Tambangan	1352	1342	10	4013	1721	2292	717	100	617
11	Ulu Pungkut	599	597	2	1943	839	1104	376	42	334
12	Muara Sipongi	1943	1934	9	5408	2596	2812	519	74	445
13	Batang Natal	3479	3455	24	9714	4313	5401	1062	93	969
14	Lingga Bayu	2944	2928	16	8382	4602	3780	686	112	574
15	Batahan	1665	1653	12	5487	2964	2523	572	121	451
16	Natal	2017	2009	8	5607	3042	2565	623	172	451
17	Muara Batang Gadis	1504	1494	10	4652	2428	2224	478	152	326
18	Ranto Baek	1660	1652	8	4826	2336	2490	359	41	318
19	Huta Bargot	1400	1396	4	3509	1639	1870	454	68	386
20	Puncak Sorik Marapi	1343	1339	4	3587	1637	1950	597	22	575
21	Pakantan	272	271	1	990	404	586	221	22	199
22	Sinunukan	935	933	2	2686	1486	1200	247	70	177
23	Naga Juang	791	789	2	1937	837	1100	251	9	242
		49.456	49.214	242	143.362	70.690	72.672	18.926	2.120	16.806

Sumber: P3KE Kemenko PMK 2024

Berdasarkan usia 5-14 tahun, jumlah total penduduk bekerja dan tidak bekerja adalah 49.456 jiwa, dengan rincian 242 jiwa yang bekerja dan 49.214 jiwa tidak bekerja dan seharusnya memang tidak bekerja karena dalam usia sekolah. Sedangkan dalam usia 15-59 tahun, usia 15 tahun sampai 18 tahun adalah usia sekolah SMP/MTs dan SMA/MA, selebihnya adalah usia produktif, berdasarkan informasi tersebut, jumlah total yang bekerja dan tidak bekerja dalam usia produktif adalah 143.362 jiwa dengan rincian yang bekerja sebanyak hanya 72.672 jiwa dan tidak bekerja 70.690 jiwa. Sedangkan usia 60 tahun ke atas, data menunjukkan bahwa jumlah total yang bekerja dan tidak



bekerja adalah 18.926 jiwa dengan rincian 16.806 jiwa bekerja dan 2.120 jiwa tidak bekerja.

Informasi ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka meningkatkan partisipasi angkatan kerja, kesempatan kerja maupun upaya untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan memberikan dan melibatkan penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin yang tidak bekerja dalam program-program pemberdayaan, padat karya dan pembukaan lapangan kerja di Kabupaten Mandailing Natal.

Dari analisis data dan diskusi terarah yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, permasalahan kemiskinan dalam bidang ketenagakerjaan yang masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal adalah:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%), khususnya penduduk usia produktif miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) khususnya penduduk usia produktif miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin
3. Terbatasnya lapangan kerja dengan tingginya angkatan kerja
4. Minimnya tenaga kerja terampil, khususnya penduduk usia produktif miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin serta
5. Rendahnya pendidikan dan keterampilan pencari kerja lokal, termasuk penduduk miskin ekstrem dan miskin.

3.5.6. Infrastruktur Dasar

Bidang infrastruktur dasar yang merupakan salah satu karakteristik terpenting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, kondisi perumahan rakyat, kawasan permukiman dan akses perhubungan antar desa, kecamatan, ibukota kabupaten dan ibukota provinsi menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan daerah yang dapat menjadi faktor meningkatnya kemiskinan. Permasalahan pembangunan penyediaan infrastruktur dasar dan aksesibilitasnya sudah menjadi fokus



Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Dalam bidang infrastruktur dasar ini menganalisis secara mendasar pada beberapa indikator utama, yaitu (1) rumah tangga layak huni, (2) rumah tangga dengan sanitasi layak, (3) rumah tangga dengan sumber air minum layak dan (4) rumah tangga dengan akses listrik.

3.5.6.1. Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau

Rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

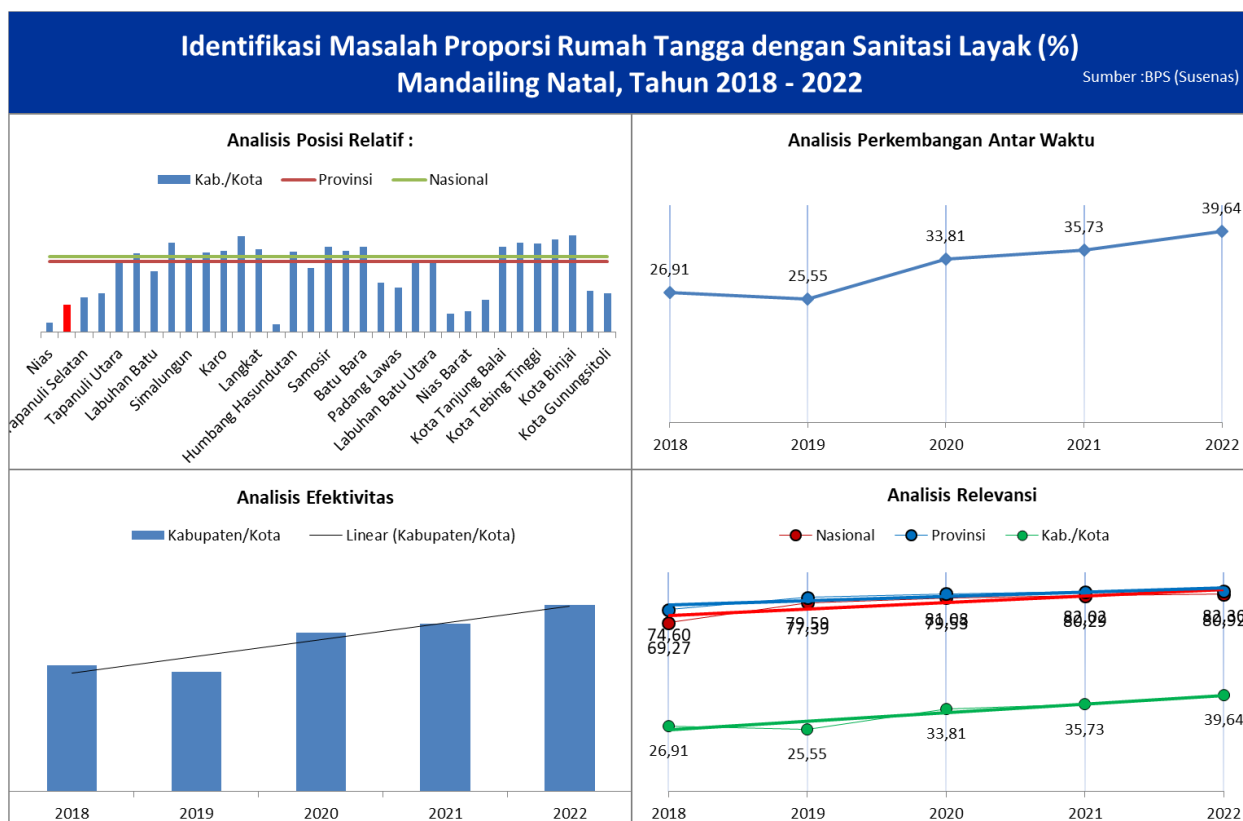
1. Luas rumahnya lebih dari 8 m² per penghuni
2. Memiliki akses terhadap air minum layak
3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak
4. Rumah dengan bahan berkualitas yang baik, yaitu:
 - a) Atap yang terbuat dari bahan beton atau genteng;
 - b) Dinding yang terbuat dari bahan tembok atau plasteran;
 - c) Lantai yang terbuat dari marmer/granit/keramik/parket, atau ubin/tegel/teraso.

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau menurut Data Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sebesar 64,65 %, tahun 2020 Sebesar 67,44 %, tahun 2021 sebesar 69,48 %, tahun 2022 sebesar 67,26 %.

3.5.6.2. Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/sistem terpusat

Grafik 3.22
Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)
Mandailing Natal Tahun 2022



Capaian Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 untuk indikator proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 39,64%, capaian ini jauh di bawah Provinsi (82,30%) dan Nasional sebesar (80,92%).

Sedangkan berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK Tahun 2022, menunjukkan bahwa dari 30.959 rumah tangga Kabupaten Mandailing Natal yang berada di desil 1 – 3 (tingkat kesejahteraan 0 – 30%) yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas buang air besar yang layak sebanyak 6.898 rumah tangga.

Informasi kepemilikan fasilitas BAB berdasarkan P3KE Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas Buang Air Besar berdasarkan data P3KE Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA
1	KECAMATAN PANYABUNGAN	1.090
2	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA	276
3	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT	140



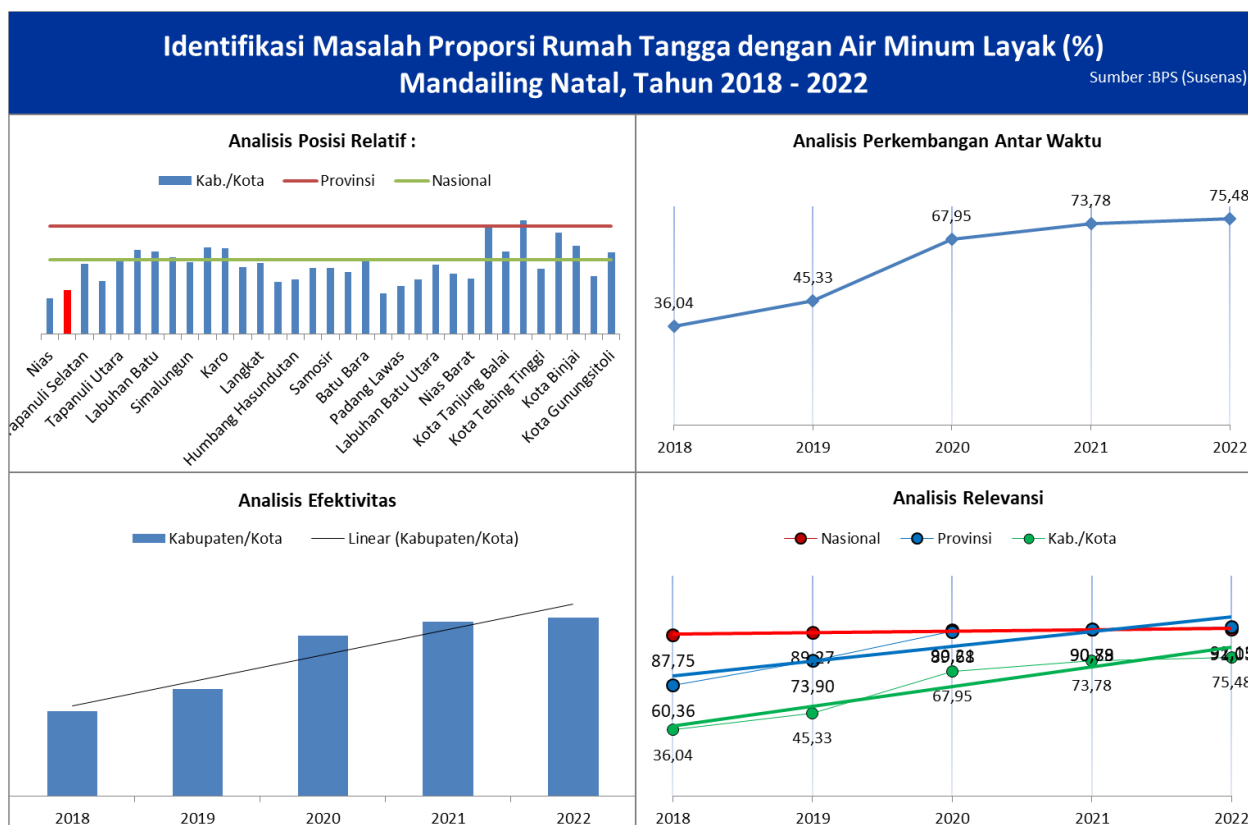
**RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026**

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA
4	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN	242
5	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR	653
6	KECAMATAN SIABU	567
7	KECAMATAN BUKIT MALINTANG	109
8	KECAMATAN NAGA JUANG	23
9	KECAMATAN HUTA BARGOT	235
10	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI	93
11	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI	140
12	KECAMATAN TAMBANGAN	166
13	KECAMATAN KOTANOPAN	333
14	KECAMATAN MUARASIPONGI	438
15	KECAMATAN PAKANTAN	18
16	KECAMATAN ULU PUNGKUT	56
17	KECAMATAN BATANG NATAL	599
18	KECAMATAN LINGGA BAYU	540
19	KECAMATAN RANTO BAEK	308
20	KECAMATAN NATAL	290
21	KECAMATAN BATAHAN	302
22	KECAMATAN SINUNUKAN	49
23	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS	231
	MANDAILING NATAL	6.898

Sumber : Kemenko PMK, Data P3KE per Bulan November 2022 (Data diolah)

3.5.6.3. Proporsi Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak

Grafik 3.23
Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)
Mandailing Natal Tahun 2022



Capaian Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 untuk indikator proporsi rumah tangga dengan air minum layak sebesar 75,48%, capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi (92,13%) dan Nasional sebesar (91,05%).

Sedangkan berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK Tahun 2022, menunjukkan bahwa dari 30.959 rumah tangga Kabupaten Mandailing Natal yang berada di desil 1 – 3 (tingkat kesejahteraan 0 – 30%) yang tidak memiliki akses terhadap Sumber Air Minum Layak sebanyak 11.168 rumah tangga.

Informasi sumber air minum berdasarkan P3KE Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum layak berdasarkan data P3KE Tahun 2022



NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA
1	KECAMATAN PANYABUNGAN	944
2	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA	536
3	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT	289
4	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN	564
5	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR	824
6	KECAMATAN SIABU	877
7	KECAMATAN BUKIT MALINTANG	257
8	KECAMATAN NAGA JUANG	114
9	KECAMATAN HUTA BARGOT	332
10	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI	407
11	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI	222
12	KECAMATAN TAMBANGAN	570
13	KECAMATAN KOTANOPAN	933
14	KECAMATAN MUARASIPONGI	683
15	KECAMATAN PAKANTAN	203
16	KECAMATAN ULU PUNGKUT	286
17	KECAMATAN BATANG NATAL	1.344
18	KECAMATAN LINGGA BAYU	301
19	KECAMATAN RANTO BAEK	553
20	KECAMATAN NATAL	280
21	KECAMATAN BATAHAN	311
22	KECAMATAN SINUNUKAN	79
23	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS	259
	MANDAILING NATAL	11.168

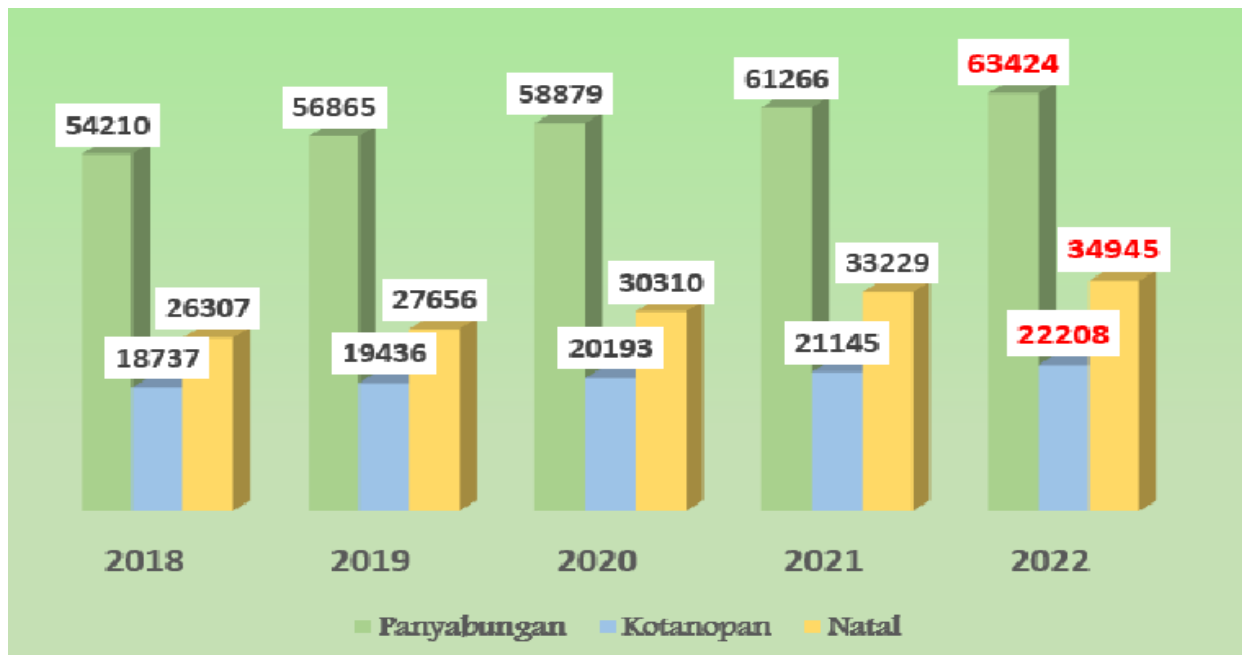
Sumber : Kemenko PMK, Data P3KE per Bulan November 2022 (Data diolah)

3.5.6.4. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik

Penerangan listrik dapat bersumber dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan non-PLN. Listrik non-PLN menggunakan sumber penerangan dari akumulator/aki, generator, dan pembangkit listrik tenaga surya yang tidak dikelola oleh PLN. Sumber penerangan rumah tangga merupakan kebutuhan vital dari perumahan. Akses pada sumber penerangan yang kontinu berkontribusi pada peningkatan produktifitas dan kualitas hidup penduduk. Fungsi sumber penerangan tidak hanya untuk pencahayaan, namun memiliki kontribusi perekonomian bagi rumah tangga.



Grafik 3.24 Jumlah Pelanggan Listrik menurut Rayon, 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2023

Berdasarkan grafik di atas jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 sebanyak 120.577 pelanggan. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Mandailing Natal konsisten meningkat sejak tahun 2018.

Sedangkan berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK Tahun 2022, menunjukkan bahwa dari 30.959 rumah tangga Kabupaten Mandailing Natal yang berada di desil 1 – 3 (tingkat kesejahteraan 0 – 30%) rumah tangga non listrik sebanyak 1.376 rumah tangga.

Informasi sumber penerangan berdasarkan P3KE Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Jumlah rumah tangga non listrik berdasarkan data P3KE Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA
1	KECAMATAN PANYABUNGAN	131
2	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA	51
3	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT	26
4	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN	36
5	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR	171
6	KECAMATAN SIABU	67



NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA
7	KECAMATAN BUKIT MALINTANG	27
8	KECAMATAN NAGA JUANG	4
9	KECAMATAN HUTA BARGOT	22
10	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI	6
11	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI	8
12	KECAMATAN TAMBANGAN	32
13	KECAMATAN KOTANOPAN	94
14	KECAMATAN MUARASIPONGI	77
15	KECAMATAN PAKANTAN	44
16	KECAMATAN ULU PUNGKUT	14
17	KECAMATAN BATANG NATAL	204
18	KECAMATAN LINGGA BAYU	85
19	KECAMATAN RANTO BAEK	26
20	KECAMATAN NATAL	67
21	KECAMATAN BATAHAN	55
22	KECAMATAN SINUNUKAN	1
23	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS	128
MANDAILING NATAL		1.376

Sumber : Kemenko PMK, Data P3KE per Bulan November 2022 (Data diolah)

Berdasarkan analisis data makro, meso dan data agregat P3KE serta diskusi terarah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), permasalahan kemiskinan dalam bidang infrastruktur dasar yang masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal adalah:

1. Terpenuhinya rumah layak huni, secara khusus penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.
2. Meningkatnya persentase rumah tangga dengan sanitasi layak, secara khusus penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.
3. Meningkatnya persentase rumah tangga dengan air minum layak, secara khusus penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.
4. Meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses listrik, secara khusus penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.



3.5.6.5 Isu Strategis Kemiskinan dalam Bidang Lainnya

Data P3KE Kemenko PMK juga memuat informasi tentang pekerjaan kepala keluarga dan individu dari 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Berdasarkan data pekerjaan kepala keluarga paling dominan di mana penduduk miskin ekstrem, penduduk miskin dan rentan miskin Kabupaten Mandailing Natal menggantungkan hidupnya/bekerja yang paling banyak adalah sektor petani dengan jumlah (35.202 kepala keluarga), selanjutnya diikuti pegawai swasta (7.296 kepala keluarga), pekerja lepas (2.658 kepala keluarga), pedagang (2.039 kepala keluarga), nelayan (6.14 kepala keluarga) serta pensiunan (422 kepala keluarga). Sedangkan kepala keluarga yang tidak bekerja sebanyak 1.896 kepala keluarga.

Informasi 40% Kepala Keluarga dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah (Desil 1-4) Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Paling Dominan, Kabupaten Mandailing Natal 2024

No	Kecamatan	Tidak Bekerja			Petani			Nelayan			Pedagang			Pegawai Swasta			Pensiunan			Pekerja Lepas		
		Jumlah	P	L	Jumlah	P	L	Jumlah	P	L	Jumlah	P	L	Jumlah	P	L	Jumlah	P	L	Jumlah	P	L
1	Panyabungan	349	241	108	3625	913	2712	10	4	6	479	112	367	2189	173	2016	129	30	99	1161	128	1033
2	Panyabungan Utara	58	39	19	2442	637	1805	6	1	5	224	33	191	454	36	418	7	4	3	136	26	110
3	Panyabungan Timur	37	20	17	2158	544	1614	5	1	4	72	14	58	102	7	95	10	5	5	8	0	8
4	Panyabungan Selatan	48	36	12	1097	353	744	1	0	1	29	6	23	173	16	157	5	5	0	52	12	40
5	Panyabungan Barat	33	24	9	1379	395	984	1	0	1	57	15	42	150	6	144	2	1	1	21	1	20
6	Siabu	138	88	50	4417	1236	3181	29	8	21	223	57	166	547	48	499	34	8	26	22	2	20
7	Bukit Malintang	51	42	9	1508	416	1092	2	1	1	66	20	46	200	22	178	8	8	0	88	23	65
8	Kotanopan	153	117	36	2812	823	1989	3	1	2	92	35	57	438	45	393	33	21	12	149	26	123
9	Lembah Sorik Marapi	40	28	12	871	248	623	2	0	2	46	12	34	230	23	207	4	1	3	37	9	28
10	Tambangan	97	82	15	1244	360	884	2	0	2	53	18	35	65	4	61	2	2	0	62	6	56
11	Ulu Pungkut	34	25	9	559	139	420	2	0	2	10	2	8	48	2	46	3	3	0	11	2	9
12	Muara Sipongi	52	38	14	1594	231	1363	8	0	8	27	5	22	122	8	114	7	2	5	30	5	25
13	Batang Natal	100	55	45	2616	509	2107	3	0	3	154	30	124	231	19	212	29	6	23	107	10	97
14	Lingga Bayu	108	62	46	1800	318	1482	4	1	3	52	12	40	563	23	540	5	2	3	55	6	49
15	Batahan	101	81	20	863	175	688	233	2	231	87	41	46	372	38	334	9	2	7	80	14	66
16	Natal	138	102	36	804	164	640	172	3	169	76	12	64	541	26	515	29	7	22	218	31	187
17	Muara Batang Gadis	132	93	39	821	127	694	110	0	110	134	40	94	119	12	107	80	31	49	98	19	79
18	Ranto Baek	44	21	23	1246	209	1037	6	3	3	34	5	29	124	5	119	15	1	14	17	1	16
19	Huta Bargot	66	57	9	943	305	638	3	3	0	58	18	40	86	4	82	3	2	1	194	9	185
20	Puncak Sorik Marapi	20	14	6	1025	314	711	6	1	5	16	4	12	152	3	149	3	0	3	49	16	33
21	Pakantan	21	17	4	334	81	253	3	1	2	5	3	2	21	1	20	2	1	1	0	0	0
22	Sinunukan	66	42	24	398	61	337	3	0	3	38	7	31	335	15	320	2	0	2	59	4	55
23	Naga Juang	10	4	6	646	150	496	0	0	0	7	3	4	34	7	27	1	1	0	4	0	4
		1896	1328	568	35202	8708	26494	614	30	584	2039	504	1535	7296	543	6753	422	143	279	2658	350	2308

Sumber: P3KE Kemenko PMK 2024

Berdasarkan data pekerjaan individu paling dominan di mana penduduk miskin ekstrem, penduduk miskin dan rentan miskin Kabupaten Mandailing Natal menggantungkan hidupnya/bekerja yang paling banyak adalah sektor petani dengan jumlah (62.597 individu), selanjutnya diikuti pegawai swasta (13.321 individu), pekerja lepas (6.614 individu), pedagang (5.370 individu) serta nelayan (787 individu). Sedangkan individu yang tidak bekerja sebanyak 126.472 individu.



**Informasi 40% Individu dengan Tingkat Kesejahteraan Terrendah (Desil 1-4)
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Paling Dominan, 2024**

No	Kecamatan	Tidak Bekerja			Petani			Nelayan			Pedagang			Pegawai Swasta			Pensiunan			Pekerja Lepas		
		Jumlah	P	L	Jumlah	P	L	Jumlah	P	L	Jumlah	P	L	Jumlah	P	L	Jumlah	P	L	Jumlah	P	L
1	Panyabungan	22.078	12.291	9.787	6.356	3.448	2.908	27	20	7	1.198	690	508	3.301	890	2.411	275	77	198	2.127	584	1.543
2	Panyabungan Utara	7.513	3.744	3.769	4.416	2.460	1.956	18	12	6	513	240	273	954	375	579	9	6	3	401	124	277
3	Panyabungan Timur	5.980	3.034	2.946	3.905	2.042	1.863	8	4	4	190	93	97	244	83	161	62	20	42	132	31	101
4	Panyabungan Selatan	3.233	1.675	1.558	1.861	1.077	784	1	-	1	98	39	59	357	100	257	5	5	-	164	59	105
5	Panyabungan Barat	3.807	1.915	1.892	2.398	1.333	1.065	5	4	1	189	88	101	273	76	197	44	13	31	147	55	92
6	Siabu	12.444	6.233	6.211	7.744	4.343	3.401	43	20	23	487	242	245	961	345	616	106	30	76	153	44	109
7	Bukit Malintang	4.145	2.066	2.079	2.552	1.414	1.138	5	3	2	176	92	84	427	150	277	42	29	13	200	109	91
8	Kotanopan	8.209	4.236	3.973	4.895	2.752	2.143	6	3	3	393	166	227	1.049	358	691	47	28	19	418	137	281
9	Lembah Sorik Marapi	3.397	1.792	1.605	1.569	877	692	4	1	3	177	80	97	380	107	273	15	4	11	120	29	91
10	Tambangan	3.320	1.779	1.541	2.283	1.270	1.013	6	1	5	202	74	128	211	66	145	2	2	-	215	43	172
11	Ulu Pungkut	1.530	802	728	1.039	554	485	4	2	2	100	37	63	233	68	165	3	3	-	61	12	49
12	Muara Sipongi	4.771	2.475	2.296	2.897	1.432	1.465	15	7	8	53	31	22	198	60	138	10	5	5	93	18	75
13	Batang Natal	8.197	4.243	3.954	5.037	2.487	2.550	4	1	3	380	203	177	510	182	328	54	17	37	409	126	283
14	Lingga Bayu	7.814	4.353	3.461	2.999	1.367	1.632	10	5	5	129	71	58	825	165	660	5	2	3	402	132	270
15	Batahan	4.833	2.773	2.060	1.522	691	831	277	16	261	188	118	70	789	287	502	35	16	19	175	67	108
16	Natal	5.447	3.277	2.170	1.360	655	705	197	9	188	175	108	67	814	186	628	54	13	41	424	133	291
17	Muara Batang Gadis	4.178	2.387	1.791	1.420	625	795	121	2	119	299	191	108	248	92	156	199	99	100	273	85	188
18	Ranto Baek	4.202	2.184	2.018	2.253	1.119	1.134	13	10	3	86	41	45	345	111	234	42	10	32	77	17	60
19	Huta Barget	3.320	1.760	1.560	1.636	966	670	4	4	-	146	88	58	157	48	109	3	2	1	314	40	274
20	Puncak Sorik Marapi	3.088	1.531	1.557	1.985	1.164	821	8	3	5	77	27	50	292	49	243	14	1	13	153	40	113
21	Pakantan	732	358	374	635	317	318	5	2	3	10	7	3	105	44	61	2	1	1	29	13	16
22	Sinunukan	2.548	1.484	1.064	648	282	366	3	-	3	77	43	34	543	168	375	2	-	2	106	26	80
23	Naga Juang	1.686	857	829	1.187	630	557	3	3	-	27	10	17	105	39	66	1	1	-	21	7	14
		126.472	67.249	59.223	62.597	33.305	29.292	787	132	655	5.370	2.779	2.591	13.321	4.049	9.272	1.031	384	647	6.614	1.931	4.683

Sumber: P3KE Kemenko PMK 2024

Berdasarkan informasi tersebut, penajaman sasaran program, anggaran dan intervensi oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal baik untuk pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD 2024 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD 2025 agar dapat diarahkan kepada individu dan keluarga penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah baik yang menjadi sasaran intervensi penduduk miskin ekstrem dan miskin, maupun untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan menggiring intervensi kepada pekerjaan paling dominan masyarakat 40% dengan tingkat kesejahteraan terendah, dan bahkan dalam rangka pemenuhan target yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.



BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

Kesadaran bahwa kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi, didasari oleh kesadaran bahwa masalah kemiskinan saling terkait dengan dimensi lain yang sangat kompleks, dan tidak terkait sekedar kemampuan ekonomi (konsumsi) masyarakat, tetapi juga menyangkut status kehidupan sosial mereka dalam makna yang luas. Karenanya Rencana penanggulangan kemiskinan dalam hal ini perlu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk upaya penanggulangannya, secara komprehensif.

Dalam penanganan strategi penanggulangan kemiskinan, harus ada masalah yang perlu diprioritaskan penanganannya. Ada karakteristik tertentu dari kemiskinan yang secara empiris cenderung tipikal antar daerah dan oleh sebab itu menjadi target nasional. Dokumen penanggulangan kemiskinan dalam hal ini perlu memastikan bahwa indikator itu menjadi prioritas intervensi kebijakan daerah dan merancang sinergi antara inisiatif kebijakan (program) nasional dan daerah.

4.1 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Mandailing Natal

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh Pemerintah, yang akan memberikan pengaruh yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Maka hasil telaah dari gambaran kondisi daerah tersebut, serta isu-isu global, nasional dan regional, maka dapat diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam lima tahun mendatang yaitu:

a. Pendidikan

Terkait bidang pendidikan yang dihadapi saat ini yaitu capaian-capaian kinerja pendidikan berupa angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah pada semua jenjang pendidikan, kualitas guru,



proses belajar mengajar, ketersediaan sarana prasarana pendidikan. Berkaitan dengan permasalahan pendidikan tersebut, maka pembangunan pendidikan selama lima tahun ke depan dihadapkan pada tantangan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan pendidikan khususnya pada wilayah-wilayah yang potensial jumlah peserta didiknya dan belum tersedia fasilitas sekolah. Disamping itu juga dihadapkan pada upaya-upaya dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas, perbaikan tata kelola pendidikan pada semua jenjang pendidikan serta upaya-upaya untuk mempercepat angka melek huruf. Dengan demikian maka pembangunan pendidikan lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan sarana prasarana, meningkatkan proses belajar mengajar, meningkatkan mutu keluaran pendidikan SD dan SLTP.

b. Kesehatan

Pada sektor kesehatan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja kesehatan dan terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit, status gizi masyarakat, angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan, stunting, kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, teknologi, obat-obatan, dokter dan paramedis, kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global dan upaya penanganan Covid 19 dalam tatanan adaptasi kehidupan baru. Untuk itu pembangunan kesehatan selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit dengan dukungan sarana dan prasarana kesehatan, teknologi, obat-obatan, dokter dan paramedis yang memadai dan berkualitas. Demikian pula halnya dengan angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan, stunting, kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global dan upaya penanganan Covid 19 dalam tatanan adaptasi kehidupan baru



merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan demikian maka pembangunan kesehatan lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan PHBS masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan.

c. Infrastruktur

Kondisi infrastruktur yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja berupa ketersediaan sarana transportasi, air bersih, irigasi, bangunan gedung, listrik, telekomunikasi. Disamping itu juga terkait ketersediaan sarana prasarana pemuda, olahraga, seni dan budaya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pembangunan infrastruktur selama lima tahun kedepan dihadapkan pada sejumlah tantangan berupa penyediaan sarana prasarana dasar, pengembangan interkoneksi wilayah dan mobilitas barang, jasa dan manusia. Selain itu juga dihadapkan pada penyediaan air bersih, irigasi, listrik dan telekomunikasi guna mendukung lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat serta penyediaan sarana prasarana pemuda, olahraga, seni dan budaya.

d. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana

Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja berupa pelestarian sumber daya alam, pemeliharaan kualitas lingkungan yang baik, penyediaan sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien, antisipasi dan kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada sejumlah tantangan berupa mempertahankan kualitas sumber daya alam yang masih baik, penanganan persampahan yang komprehensif, Selain itu juga diperhadapkan pada pengembangan sistem dan kelembagaan penanganan bencana. Dengan demikian maka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana lima tahun ke depan diarahkan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan serta ketangguhan terhadap bencana.



e. Kemiskinan

Tingginya angka kemiskinan saat ini menjadi permasalahan di Kabupaten Mandailing Natal terlebih dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid 19 beberapa tahun terakhir, dimana terjadi kenaikan tingkat kemiskinan sehingga diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang terpadu. Berkaitan dengan permasalahan kemiskinan tersebut, maka penanggulangan kemiskinan selama lima tahun ke depan dihadapkan pada tantangan berupa mengurangi beban masyarakat terhadap pengeluaran kelompok miskin dan rentan terutama akibat pandemi covid 19 berupa bantuan sosial termasuk terhadap akses terhadap pelayanan dasar dan melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan membuat program-program yang konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama. Konvergensi sangat penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak.

f. Ketahanan Ekonomi Daerah

Ketahanan ekonomi daerah yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja berupa perekonomian daerah, peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri/UMKM dan pengembangan koperasi. Disamping itu juga terkait dengan pengembangan wilayah agrowisata dan pengembangan iklim penanaman modal. Pendapatan per kapita di Kabupaten Mandailing Natal baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan masih lebih rendah dari rata-rata PDRB Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten/Kota sekitarnya. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan dukungan sektor yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan tersebut, serta mengakselerasi transformasi struktural perekonomian dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor nonpertanian. Kekuatan yang dimiliki dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah adanya peraturan daerah tentang perlindungan investasi, mulai terbentuknya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi, pembentukan perusahaan daerah dan sektor-sektor non agribisnis serta



ketersediaan infrastruktur ekonomi lainnya. Peluang yang dimiliki dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana menarik investor sehingga menaikkan tingkat partisipasi angkatan kerja serta mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan demikian maka pembangunan ketahanan ekonomi daerah lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan menurunkan jumlah pengangguran.

g. Ketahanan Pangan

Secara umum permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja berupa produksi, ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan. Tantangan yang dihadapi terkait dengan ketahanan pangan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi pangan yang mampu menjamin ketersediaan pangan masyarakat yang seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan pergeseran pola konsumsi pangan serta untuk meningkatkan pola pangan harapan dan pendapatan petani.

h. Reformasi Birokrasi

Secara umum permasalahan reformasi birokrasi yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja berupa efektifitas dan efisiensi transparansi, akuntabel dan partisipatif, penganggaran dan pengawasan, kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan, kapasitas yang sesuai dengan tuntutan perwujudan pemerintahan yang baik dan saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan swasta, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pelayanan publik yang prima, pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib, sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan, organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan kemampuan manajerial dan teknis aparatur. Tantangan kedepan adalah berfungsinya kelembagaan secara efektif dan efisien sesuai tugas pokok masing-masing OPD serta semakin meningkatnya tuntutan praktek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dibalik penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut. Adanya legislasi



daerah yang melahirkan produk hukum daerah, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, yang memberikan dasar hukum/legitimasi pembentukan organisasi perangkat daerah, merupakan kekuatan bagi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam penataan kelembagaannya. Peluang kedepan yang dapat dimanfaatkan adalah adanya regulasi pemerintah dan pengembangan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tantangan terletak pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas yang belum diimbangi oleh kemampuan SDM pemerintah daerah dalam penguasaan teknologi informasi di era globalisasi. Meskipun secara kuantitatif sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sudah memadai, namun belum semua pegawai memiliki kemampuan yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi-fungsi manajemen birokrasi. Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menangani isu ini adalah sistem pembinaan karier pegawai yang dijamin oleh peraturan per Undang-Undangan. Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan umum adalah terjadinya pergeseran paradigma pelayanan dari Old Public Adminstrasion (OPA) menjadi New Public Management (NPM) dan selanjutnya dikembangkan menjadi paradigma New Public Service (NPS). Adapun tantangan yang perlu dijawab adalah semakin meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pembangunan yang menuntut kebijakan pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian maka pembangunan reformasi birokrasi lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan tertib administrasi dan keuangan pada tingkatan OPD, meningkatkan pencapaian sasaran kinerja OPD, meningkatkan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan, mengembangkan sistem data yang terintegrasi, akurat dan up to date, penyusunan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas, penataan dokumen arsip pemerintah daerah yang lebih rapi dan aman, penataan stuktur jabatan, penataan asset daerah yang sesuai peruntukannya, penataan sertifikasi aset daerah, pengadaan lahan/lokasi fasilitas umum, penyediaan dokumen dan



sistem pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja, meningkatkan ketersediaan fasilitas pada tempat-tempat umum, meningkatkan tertib pengelolaan kependudukan dan catatan sipil, penanganan pengaduan masyarakat, meningkatkan fungsi organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan jumlah aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional, meningkatkan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan, mengembangkan pola pengembangan diri dan karir yang jelas dan mengembangkan sistem reward and punishment serta pelaksanaan system merit bagi aparatur.

4.2 Analisis Akar Masalah (Determinan) Kemiskinan

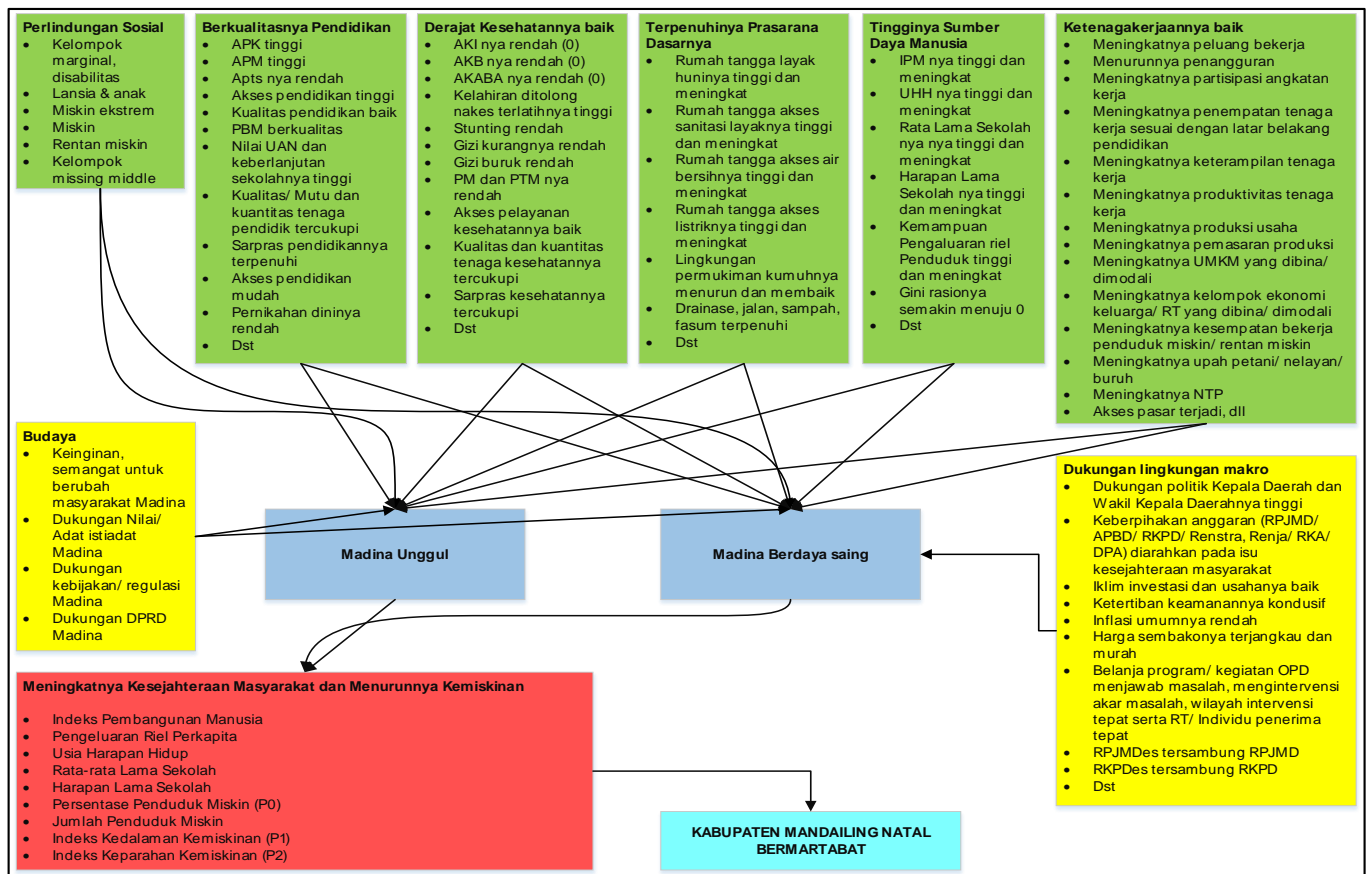
4.2.1 Pengembangan Logika Program (TOC)

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada setiap bidang selanjutnya akan dijadikan prioritas kebijakan. Analisis akar masalah merupakan analisis lebih mendalam setelah menggambarkan kondisi umum kemiskinan daerah atau disebut juga sebagai determinan kemiskinan. Untuk itu sebelum melakukan intervensi perlu mencari tahu akar masalah dari setiap permasalahan pada setiap bidang tersebut. Akar masalah dari determinan kemiskinan dapat diperoleh melalui analisis dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan/supply side dan aspek pemanfaatan/demand side.

Theory of Change (ToC) atau teori perubahan, lazim digunakan oleh para perancang pembangunan dalam mendisain sebuah program agar menjadi efektif, selain teori perubahan ini juga akan memberikan panduan tentang bagaimana beragam intervensi tersusun dan dapat terlaksana secara runtut sehingga sasaran (objective) dapat terurai dan memberikan hasil (outcome) dan dampak (impact) yang diinginkan. Teori perubahan ini dalam proses mendisain sebuah program, akan memberikan keunggulan kompetitif dan peluang lebih besar bagi suatu program dalam mencapai tujuannya, yaitu dengan membangkitkan dan memberikan manfaat bagi para penerima manfaat.



4.2.2. Logika Program untuk Intervensi Kemiskinan



Sumber: Analisis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan analisis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa upaya penurunan persentase penduduk miskin (P0) dan pengurangan jumlah penduduk miskin, diikuti dengan upaya penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2), minimal memiliki beberapa determinan kunci, yaitu:

1. Dukungan politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan syarat wajib untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dengan keberpihakan anggaran yang tepat fokus, lokus, modus intervensi dan tepat penerima manfaat.
2. Jika upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting dipimpin langsung oleh



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka peluang keberhasilan mencapai target akan lebih besar.

3. Pada tataran makro, situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di suatu daerah akan memberikan nilai penting dalam pencapaian target kinerja pembangunan termasuk pembangunan kesejahteraan.
4. Pada tataran makro, pentingnya pengendalian inflasi dan memastikan harga komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin harus murah, terjangkau dan tersedia di pasar-pasar masyarakat, bila inflasi meningkat, harga kebutuhan bahan makanan pokok akan meningkat dan berkontribusi pada meningkatnya garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan
5. Ketepatan pelaksanaan program-program perlindungan sosial dan jaminan sosial, program pemberdayaan dan penguatan ekonomi, UMKM, usaha mikro, supermikro, padat karya, pemberdayaan ekonomi kepala keluarga perempuan dan seterusnya akan membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan penduduk miskin, kedua ini merupakan strategi dasar penanggulangan kemiskinan
6. Meningkatnya mutu dan akses pendidikan PAUD dan pendidikan dasar akan memberikan kontribusi signifikan bagi mencapai target indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama daerah isu kemiskinan dalam bidang pendidikan
7. Meningkatnya mutu, akses dan pelayanan kesehatan pada isu derajat kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan penanganan penyakit akan memberikan kontribusi signifikan bagi mencapai target indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama daerah isu kemiskinan dalam bidang kesehatan
8. Meningkatnya mutu, akses dan pelayanan dalam bidang prasarana dasar seperti; rumah layak huni, sanitasi layak, air minum layak, akses listrik akan memberikan kontribusi signifikan bagi mencapai target indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama daerah isu kemiskinan dalam bidang infrastruktur dasar.



9. Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat seperti rendahnya tingkat pengangguran, meningkatnya kesempatan bekerja, partisipasi angkatan kerja yang tinggi akan memberikan kontribusi signifikan bagi mencapai target indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama daerah isu kemiskinan dalam ekonomi, yang perlu ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan yang bisa melibatkan sekaligus dirasakan manfaatnya oleh penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin kelompok disabilitas, kelompok anak dan perempuan maupun kelompok marginal lainnya
10. Dibutuhkan intervensi dengan sumber anggaran non-APBD/APBN pada bulan-bulan awal setiap tahun yang bersasaran pada pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin dengan mengintervensi GKM (garis kemiskinan makanan), memperbanyak pasar-pasar murah, pasar rakyat, intervensi stabilitas harga beras dan komoditi-komoditi utama dalam komponen GK oleh Bulog. Intervensi tersebut dapat dilaksanakan pada Bulan Januari sampai minggu pertama Maret). Maret setiap tahun, BPS akan melakukan survey yang bertumpu pada koor kemiskinan (untuk mendapatkan gambaran persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan termasuk gambaran GK).

Analisis akar masalah pada setiap prioritas bidang intervensi adalah sebagai berikut :

4.2.1.1 Bidang Pendidikan

Permasalahan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, sebagai berikut:

- a. Penuntasan wajib belajar 9 tahun masih belum terwujud;
- b. Belum merata dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik;
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. Rendahnya minat literasi masyarakat.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, yaitu “Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat” dengan indikator Rata-rata



Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022-2026.

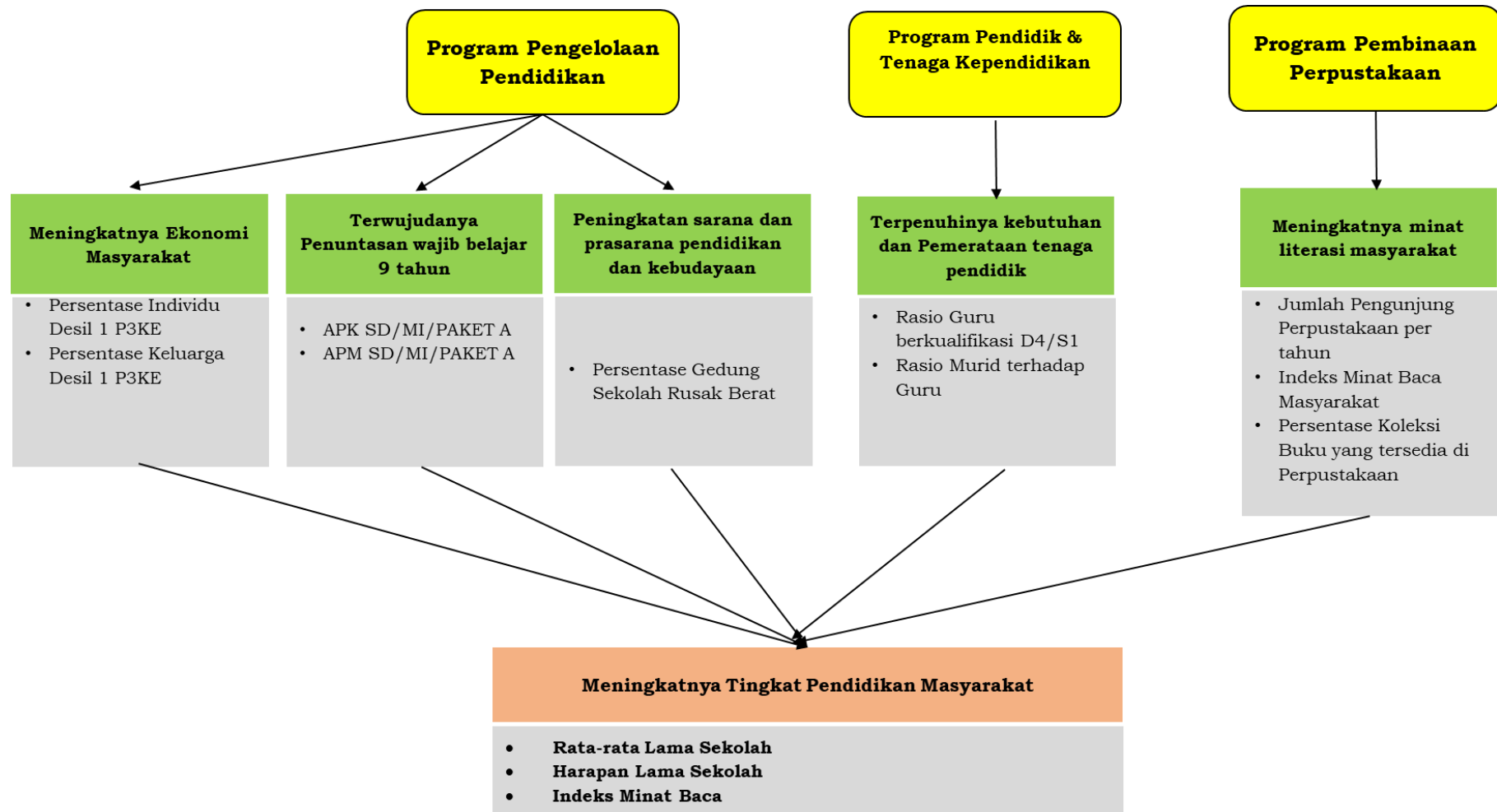
Tabel 4.1 Sasaran Akhir Bidang Pendidikan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2026

No	Sasaran Akhir (Outcome/Impact/Goals)	Capaian	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat						
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,63	8,72	8,79	8,87	8,95	9,03
2	Harapan Lama Sekolah	13,61	13,63	14,13	14,63	15,13	15,63
3	Indeks Minat Baca	0,003	0,1	0,3	0,5	0,6	0,7

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kedua perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 3 Program Prioritas. Berikut Theory of Change (ToC) Bidang Pendidikan:



Gambar 4.1
Theory of Change Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan
Kabupaten Mandailing Natal





Dari beberapa isu strategis dan permasalahan pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, Logika program (theory of change) yang disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tersebut menempatkan sasaran jangka panjang pembangunan pendidikan mengambil fokus pada *meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat* (final outcome/goal) dengan indikator (1) Rata-rata lama sekolah, (2) Harapan lama sekolah dan (3) Indeks minat baca.

Sedangkan intermediate outcomes/sasaran antara atau akar masalah kunci dari meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat memiliki 5 determinan, yaitu:

1. Meningkatnya kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin, dengan indikator antara lain: persentase penduduk desil 1 dari 40% P3KE dan persentase keluarga desil 1 dari 40% P3KE.
2. Terwujudnya penuntasan wajib belajar 9 tahun, dengan indikator: APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, dengan indikator: persentase gedung sekolah rusak berat.
4. Terpenuhi kebutuhan dan pemerataan tenaga kependidikan, dengan indikator: rasio guru berkualifikasi D4/S1 dan rasio murid terhadap guru.
5. Meningkatnya minat literasi masyarakat, dengan indikator: jumlah pengunjung perpustakaan pertahun, indeks minat baca masyarakat dan persentase koleksi buku di perpustakaan.

Terdapat 3 (tiga) program prioritas penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals), yaitu:

a. Dinas Pendidikan

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar (SD/MI/Paket A serta SMP/MTS/Paket B) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.



2. Program Pendidik & Tenaga Kependidikan

Melalui program ini kedepan terkait permasalahan Rasio Guru terhadap murid semakin berkurang, sehingga kedepan rasio guru dan siswa telah sesuai dengan ketentuan. Pemenuhan pemerataan kuantitas serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dapat terpenuhi.

b. Dinas Perpustakaan

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Pembinaan terhadap perpustakaan guna mendorong terciptanya budaya baca dan memotivasi siswa untuk membaca dan memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik-baiknya.

c. Dibutuhkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk dukungan program mengembalikan anak putus sekolah untuk kembali bersekolah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

d. Dibutuhkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata.

Program, kegiatan, sub kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Mandailing Natal dan dukungan perangkat daerah terkait lainnya dengan pendidikan perlu mempertimbangkan akar permasalahan pendidikan penduduk miskin ekstrem, miskin kondisi umumnya masyarakat diantaranya:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat sulit
2. Tidak semua keluarga memiliki alat transportasi dan bisa dengan mudah mengakses alat transportasi
3. Akses ke fasilitas pendidikan yang jauh dan sangat jauh
4. Tidak semua desa memiliki fasilitas sekolah
5. Tingkat pengetahuan orang tua tentang arti pentingnya pendidikan
6. Biaya operasional sekolah siswa tinggi walaupun sekolahnya gratis.

Dengan mempertimbangkan determinan-determinan permasalahan pendidikan tersebut, sehingga peluang keberhasilan dalam pelaksanaan



program, kegiatan, sub kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan dukungan dinas-dinas yang terkait dengan pendidikan akan lebih besar.

4.2.1.2 Bidang Kesehatan

Permasalahan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya layanan kesehatan dasar bagi bayi dan balita;
- b. Belum optimalnya layanan kesehatan dasar bagi ibu;
- c. Belum optimalnya pengendalian dan penanganan penyakit menular dan tidak menular;
- d. Terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat;
- e. Belum optimalnya layanan Keluarga Berencana dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan, yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dengan indikator Usia Harapan Hidup. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022-2026.

Tabel 4.2 Sasaran Akhir Bidang Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2026

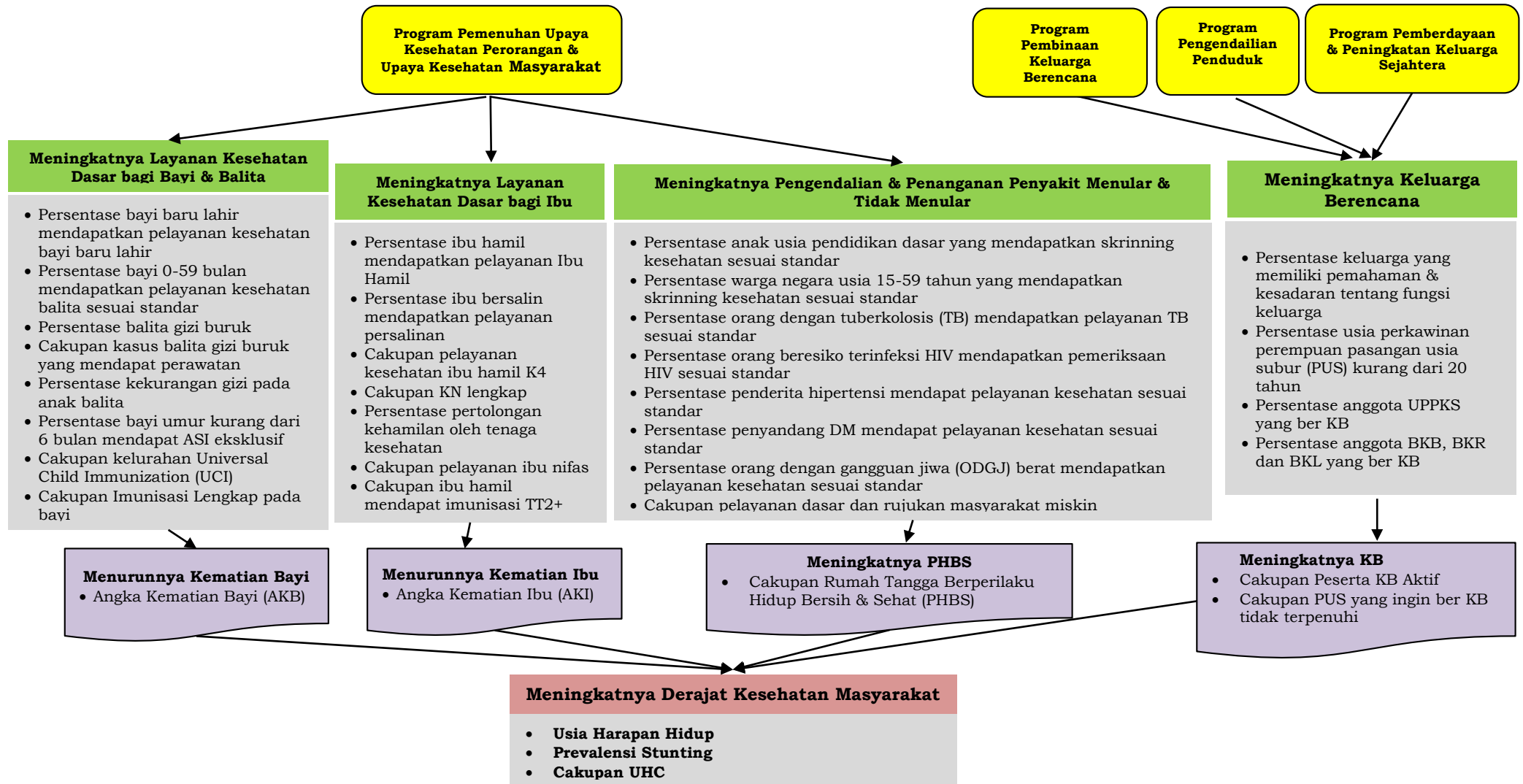
No	Sasaran Akhir (Outcome/Impact/Goals)	Capaian	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
1	Usia Harapan Hidup	62,65	63,77	64,91	66,07	67,25	68,48
2	Prevalensi stunting	47,70	40,00	30,00	20,00	15,00	11,00
3	UHC (Universal Health Coverage)	67,20	70,00	73,00	76,00	80,00	85,00

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan didukung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kedua perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 4 Program Prioritas. Berikut Theory of Change (ToC) Bidang Kesehatan:



Gambar 4.2

Theory of Change Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal





Logika program (theory of change) yang disusun oleh TKPK Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal mengambil fokus pada pokok-pokok prioritas tersebut sangat beralasan, berdasarkan RKPD 2024 dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Mandailing Natal, rencana strategis dan profil kesehatan Kabupaten Mandailing Natal memberikan fokus pada derajat kesehatan ibu dan anak, dengan masih ditemukan jumlah kasus kematian ibu, bayi dan balita, maka menjadi keharusan bagi daerah ini untuk melakukan intervensi khusus dalam penanganannya secara khususnya penanganan yang lebih riil bagi penduduk miskin ekstrem dan miskin pada isu kesehatan ibu dan anak serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umum.

Logika program (theory of change) yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mandailing Natal memperlihatkan bahwa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator *Usia Harapan Hidup, Prevalensi Stunting dan Cakupan UHC (final outcome/goal)* memiliki empat determinan kunci, yaitu (1) Menurunnya kematian ibu, (2) Memenurunnya kematian bayi dan balita, (3) Meneningkatnya PHBS serta (4) Meningkatkan Keluarga Berencana.

Sedangkan intermediate outcomes atau sasaran antara dari keempat determinan kunci tersebut adalah:

1. Meningkatkan layanan dasar bagi bayi dan balita, dengan indikator: persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, persentase bayi 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, persentase balita gizi buruk, cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan, persentase kekurangan gizi pada anak balita, persentase bayi umur kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif, cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan imunisasi lengkap pada bayi
2. Meningkatkan layanan dasar bagi ibu, dengan indikator: persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Ibu hamil, persentase ibu bersalin



- mendapatkan pelayanan persalinan, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4, cakupan KN lengkap, persentase pertolongan kehamilan oleh tenaga kesehatan, cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan ibu hamil mendapat imunisasi TT2+
3. Meningkatnya Pengendalian & Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular, dengan indikator: persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar, persentase warga negara usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar, persentase orang dengan tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar, persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar, persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase penyandang DM mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, cakupan pelayanan dasar dan rujukan masyarakat miskin.
 4. Meningkatnya Keluarga Berencana, dengan indikator: persentase keluarga yang memiliki pemahaman & kesadaran tentang fungsi keluarga, persentase usia perkawinan perempuan pasangan usia subur (PUS) kurang dari 20 tahun, persentase anggota UPPKS yang ber KB, persentase anggota BKB, BKR dan BKL yang ber KB.

Terdapat 4 (empat) program prioritas penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals), yaitu:

a. Dinas Kesehatan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diharapkan dapat menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) dan meningkatnya cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana



2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Dari ketiga program ini diharapkan meningkatnya cakupan peserta aktif KB serta cakupan PUS yang ingin ber KB.

- c. Dibutuhkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait distribusi tenaga kesehatan yang merata sampai pelosok desa dan kecamatan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal dan dukungan perangkat daerah terkait bidang kesehatan perlu mempertimbangkan akar permasalahan kesehatan dari penduduk miskin ekstrem, miskin dan masyarakat umum lainnya, di antara karakteristik tersebut adalah:

1. Keterbatasan akses kelompok miskin ekstrem dan miskin terhadap informasi kesehatan yang memadai
2. Belum semua penduduk memiliki jaminan kesehatan, termasuk keluarga miskin ekstrem dan miskin
3. Banyaknya penduduk miskin ekstrem dan miskin yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK)
4. Penyakit menular dengan kejangkitannya tinggi
5. Belum terbangunnya komitmen dalam mengikuti standar operasional prosedur
6. Pemanfaatan layanan dan fasilitas kesehatan belum maksimal
7. Lingkungan tempat tinggal masyarakat miskin ekstrem dan miskin belum sehat.

4.2.1.3 Bidang Infrastruktur Dasar

Permasalahan penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, sebagai berikut:

- a. Rendahnya akses rumah tangga terhadap sanitasi;



- b. Belum optimalnya layanan air minum bagi rumah tangga;
- c. Belum optimalnya pemenuhan rumah layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang Infrastruktur Dasar, yaitu “Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar” dengan indikator Persentase akses air minum layak, Persentase akses sanitasi layak, dan Persentase akses rumah layak huni. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022-2026.

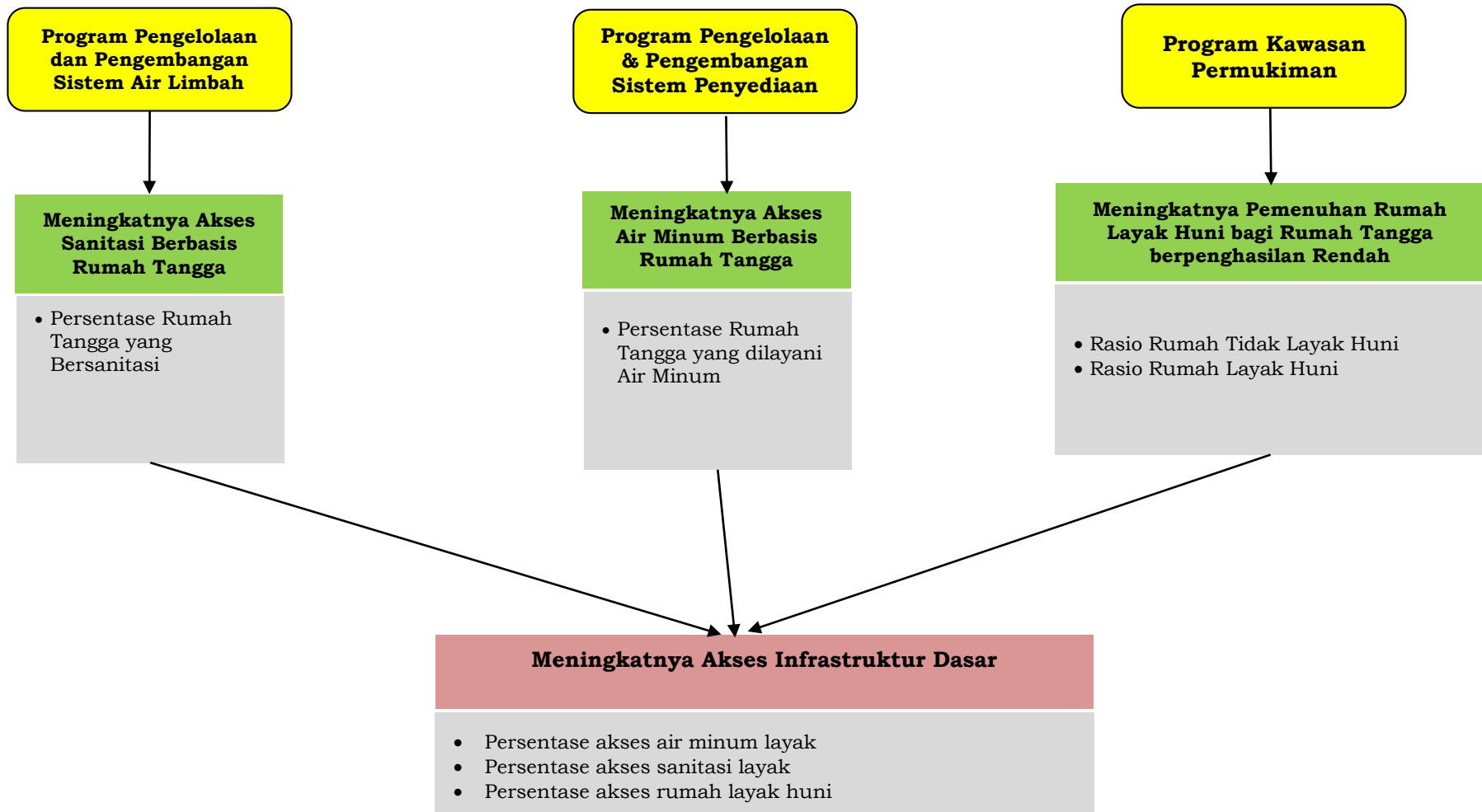
Tabel 4.3 Sasaran Akhir Bidang Infrastruktur Dasar Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2026

No	Sasaran Akhir (Outcome/Impact/Goals)	Capaian	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar						
1	Persentase akses air minum layak	75,04	76,80	77,50	80,00	83,36	86,35
2	Persentase akses sanitasi layak	39,44	48,99	58,53	68,10	77,66	87,23
3	Persentase akses rumah layak huni	49,11	50,34	51,60	52,89	55,56	56,95

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar didukung oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 3 Program Prioritas. Berikut Theory of Change (ToC) Bidang Infrastruktur Dasar:



Gambar 4.3
Theory of Change Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar
Kabupaten Mandailing Natal





Dari beberapa isu strategis dan permasalahan infrastruktur dasar Kabupaten Mandailing Natal, Logika program (theory of change) yang disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tersebut menempatkan sasaran jangka panjang pembangunan sarana dasar mengambil fokus pada meningkatnya *akses infrastruktur dasar (final outcome/goal)* dengan indikator (1) persentase akses air minum layak, (2) persentase akses sanitasi layak serta (3) persentase akses rumah layak huni.

Sedangkan *intermediate outcomes/sasaran antara* atau akar masalah kunci dari meningkatnya akses infrastruktur dasar memiliki 3 determinan, yaitu:

1. Meningkatnya akses sanitasi berbasis rumah tangga, dengan indikator: persentase rumah tangga yang bersanitasi
2. Meningkatnya akses air minum berbasis rumah tangga, dengan indikator: persentase rumah tangga yang dilayani air minum
3. Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, dengan indikator: rasio rumah tidak layak huni dan rasio rumah layak huni.

Terdapat 3 (tiga) program prioritas penanggulangan kemiskinan bidang Infrastruktur dasar dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals), yaitu:

- a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
 3. Program kawasan permukiman

Program ini diharapkan dapat meningkatkan persentase akses air minum layak, persentase akses sanitasi layak, dan persentase akses rumah layak huni.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal dan dukungan perangkat daerah terkait lainnya perlu



mempertimbangkan karakteristik dan akar masalah terkait infrastruktur dasar penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin diantaranya:

1. Ketercukupan rumah layak huni masih terbatas
2. Rendahnya sarana air bersih di pedesaan
3. Masih ada desa yang belum memiliki sarana air bersih
4. Terbatasnya sanitasi di lingkungan perumahan
5. Desa dan rumah tangga yang tidak memiliki sumber air bersih (wilayah rawan air)
6. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sanitasi layak dan air minum layak.



4.2.1.4 Bidang Ketahanan Pangan

Permasalahan penanggulangan kemiskinan bidang Ketahanan Pangan didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, sebagai berikut:

- a. Konsumsi pangan yang belum berimbang serta sumber daya pangan yang belum memadai.
- b. Belum optimalnya penanganan ketahanan dan kerentanan pangan.
- c. Cadangan Pangan yang belum memadai.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang Ketahanan Pangan, yaitu “Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat” dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022-2026.

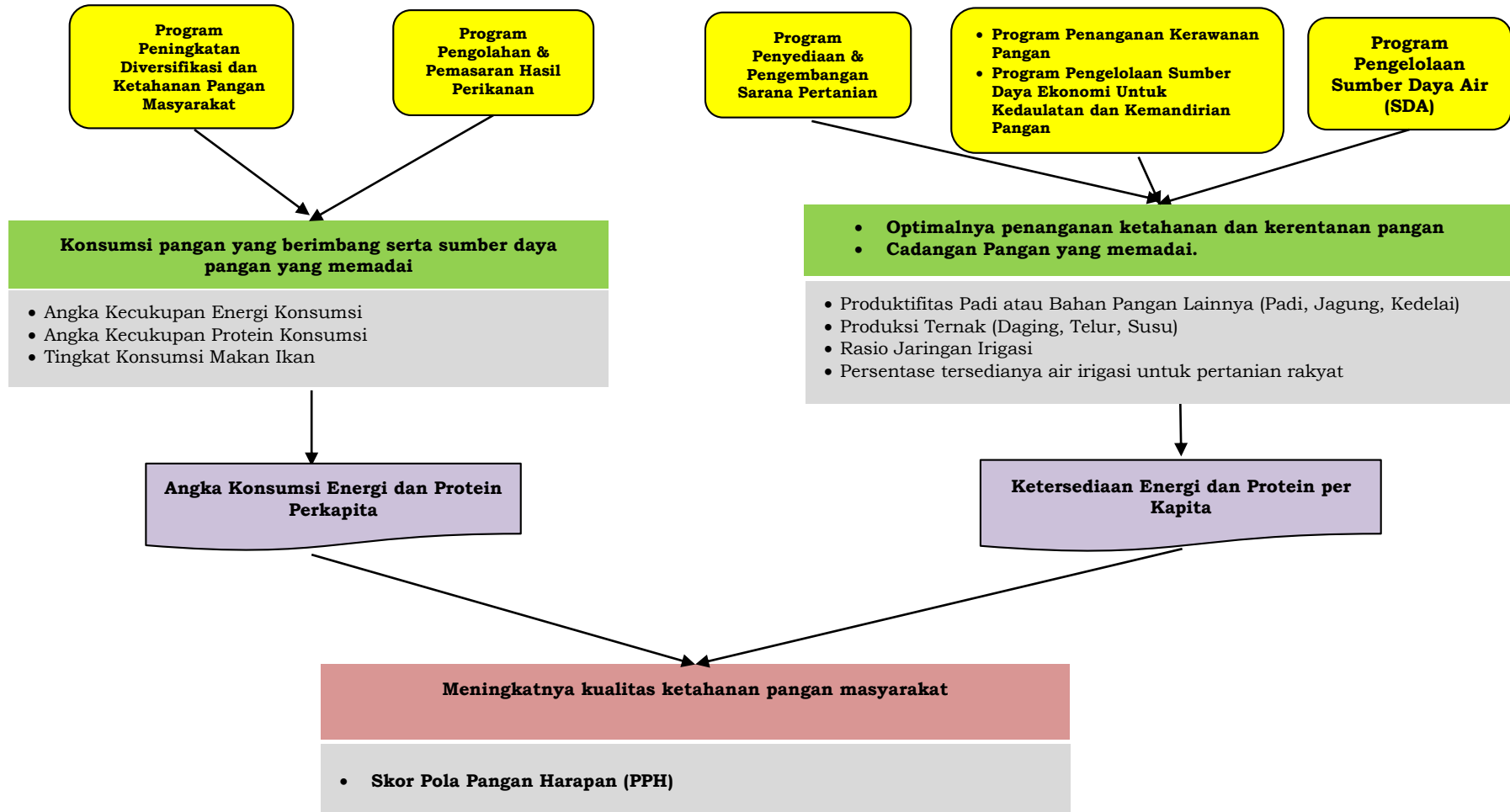
Tabel 4.4 Sasaran Akhir Bidang Ketahanan Pangan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2026

No	Sasaran Akhir (Outcome/Impact/Goals)	Capaian	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat						
1	Skor Pola Pangan Harapan	83,60	85,30	86,70	87,50	88,20	89,60

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang Ketahanan Pangan didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Keempat perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 6 Program Prioritas. Berikut Theory of Change (ToC) Bidang Ketahanan Pangan:



Gambar 4.4
Theory of Change Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan
Kabupaten Mandailing Natal





Terdapat 6 (enam) program prioritas penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals), yaitu:

a. Dinas Ketahanan Pangan

1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

Diversifikasi pangan adalah program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk juga mengkonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi.

2. Program penanganan kerawanan pangan

3. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan

b. Dinas Perikanan

1. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kecukupan energi konsumsi, kecukupan protein konsumsi dan tingkat konsumsi makan ikan.

c. Dinas Pertanian

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya serta meningkatkan produksi ternak (daging, telur, susu).

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)

Program ini diharapkan dapat meningkatkan rasio jaringan irigasi dan persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat.

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan perangkat daerah yang



memiliki kaitan dengan isu ketahanan Pangan di Kabupaten Mandailing Natal perlu mempertimbangkan karakteristik ketenagakerjaan penduduk miskin ekstrem dan miskin, diantara karakteristik tersebut adalah:

1. Rata rata lama sekolah KRT miskin ekstrem hanya sebesar 5, 67 tahun. Jauh dibawah target pemerintah dengan program wajib belajar 9 tahun
2. Separuh KRT miskin ekstrem bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar statusnya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu, buruh tidak tetap/ tidak dibayar
3. Kepala rumah tangga berpendidikan rendah sebagai buruh tani
4. Kepala rumah tangga perempuan berpendidikan rendah usia namun usia produktif

4.2.1.5 Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan penanggulangan kemiskinan bidang Ketenagakerjaan didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, sebagai berikut:

- a. Kebutuhan pasar kerja tidak sesuai dengan pencari kerja yang ada;
- b. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi angkatan kerja muda yang memasuki dunia kerja serta masih terbatasnya lembaga sertifikasi profesi;
- c. Kurang optimalnya pembinaan hubungan industrial;
- d. Kurangnya pengetahuan tentang majemen usaha dan kewirausahaan;
- e. Kurangnya inovasi produk UMKM;
- f. Sulitnya memasarkan produk UMKM;
- g. Perlunya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang Ketenagakerjaan, yaitu “Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat” dengan indikator Tingkat Penganggura Terbuka (TPT). Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022-2026.



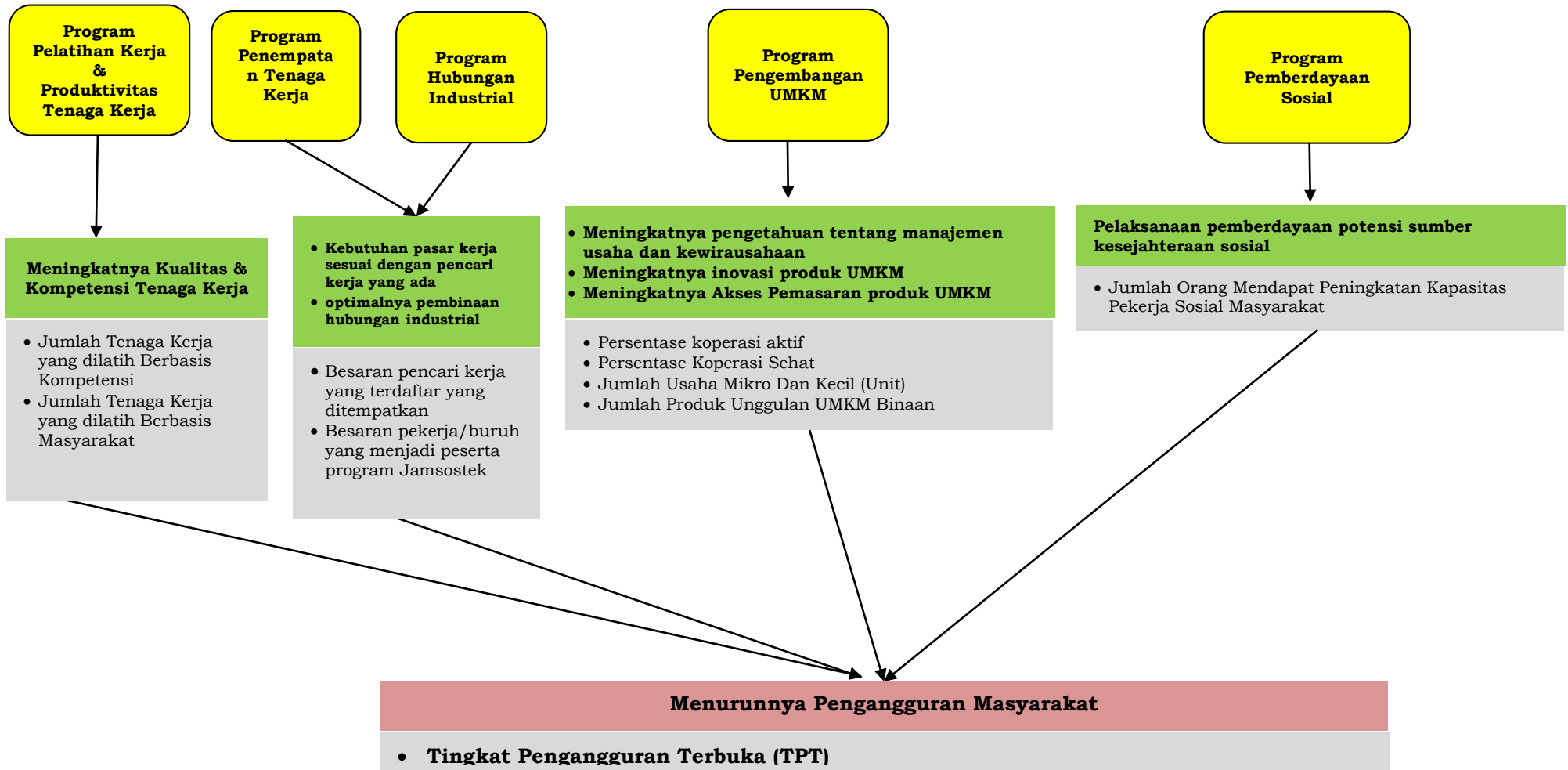
**Tabel 4.5 Sasaran Akhir Bidang Ketenagakerjaan Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2026**

No	Sasaran Akhir (Outcome/Impact/Goals)	Capaian	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat						
1	Tingkat Penganggura Terbuka (TPT)	6,25	5,70	5,20	4,70	4,20	3,90

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang Ketenagakerjaan didukung oleh Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Dinas Sosial. Kelima perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 5 Program Prioritas. Berikut Theory of Change (ToC) Bidang Ketenagakerjaan:



Gambar 4.5
Theory of Change Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan
Kabupaten Mandailing Natal





Dari beberapa isu strategis dan permasalahan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal, Logika program (theory of change) yang disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tersebut menempatkan sasaran jangka panjang pembangunan ketenagakerjaan mengambil fokus pada *menurunnya pengangguran masyarakat (final outcome/goal)* dengan indikator tingkat pengangguran terbuka.

Sedangkan intermediate outcomes/sasaran antara atau akar masalah kunci dari menurunnya pengangguran masyarakat memiliki 4 determinan kunci, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja, dengan indikator: jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi, jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis masyarakat
2. Kebutuhan pasar kerja dengan pencari kerja serta optimalnya pembinaan hubungan industrial, dengan indikator: besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek
3. Meningkatnya UMKM dan kewirausahaan, dengan indikator: persentase koperasi aktif, persentase koperasi sehat, jumlah usaha mikro dan kecil (unit), jumlah produk unggulan UMKM binaan
4. Pelaksanaan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, dengan indikator: jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat

Terdapat 5 (tiga belas) program prioritas penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals), yaitu:

a. Dinas Tenaga Kerja

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bagi pencari kerja agar dapat bersaing dengan pencari kerja yang lain

2. Program Penempatan Tenaga Kerja



Program penempatan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga yang ditempatkan.

3. Program Hubungan Industrial

Hubungan Industrial, memiliki kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk menghindari terjadinya kasus hubungan industrial adalah dengan melaksanakan program Hubungan Industrial.

b. Dinas Koperasi

1. Program Program Pengembangan UMKM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam berbagai bidang, termasuk didalamnya adalah Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Permodalan serta Desain dan Teknologi.

c. Dinas Sosial

1. Program Pemberdayaan Sosial

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Dinas Sosial dan perangkat daerah yang memiliki kaitan dengan isu ketenagakerjaan di Kabupaten Mandailing Natal perlu mempertimbangkan karakteristik ketenagakerjaan penduduk miskin ekstrem dan miskin, diantara karakteristik tersebut adalah:

1. Belum optimalnya penanganan angka pengangguran bagi miskin ekstrem dan miskin
2. Masih rendahnya SDM pencari kerja, secara khusus penduduk miskin ekstrem dan miskin
3. Masih ada kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dengan rendahnya lowongan kerja
4. Belum optimalnya penanganan keselamatan kerja
5. Belum tersedianya balai latihan kerja



6. Belum optimalnya sistem pendataan ketenagakerjaan dan informasi lapangan kerja.
7. Jumlah kelompok binaan masih kecil
8. Masih terbatasnya pendampingan kewirausahaan, usaha mikro dan supermikro, ekonomi kelompok perempuan kepala rumah tangga dan UMKM

4.2.1.6 Bidang Sosial

Permasalahan penanggulangan kemiskinan bidang Sosial didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, sebagai berikut:

- a. Rendahnya bantuan sosial bagi PMKS;
- b. Rendahnya fakir miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi;
- c. Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang Sosial, yaitu “Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat” dengan indikator Persentase Penduduk Miskin. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022-2026.

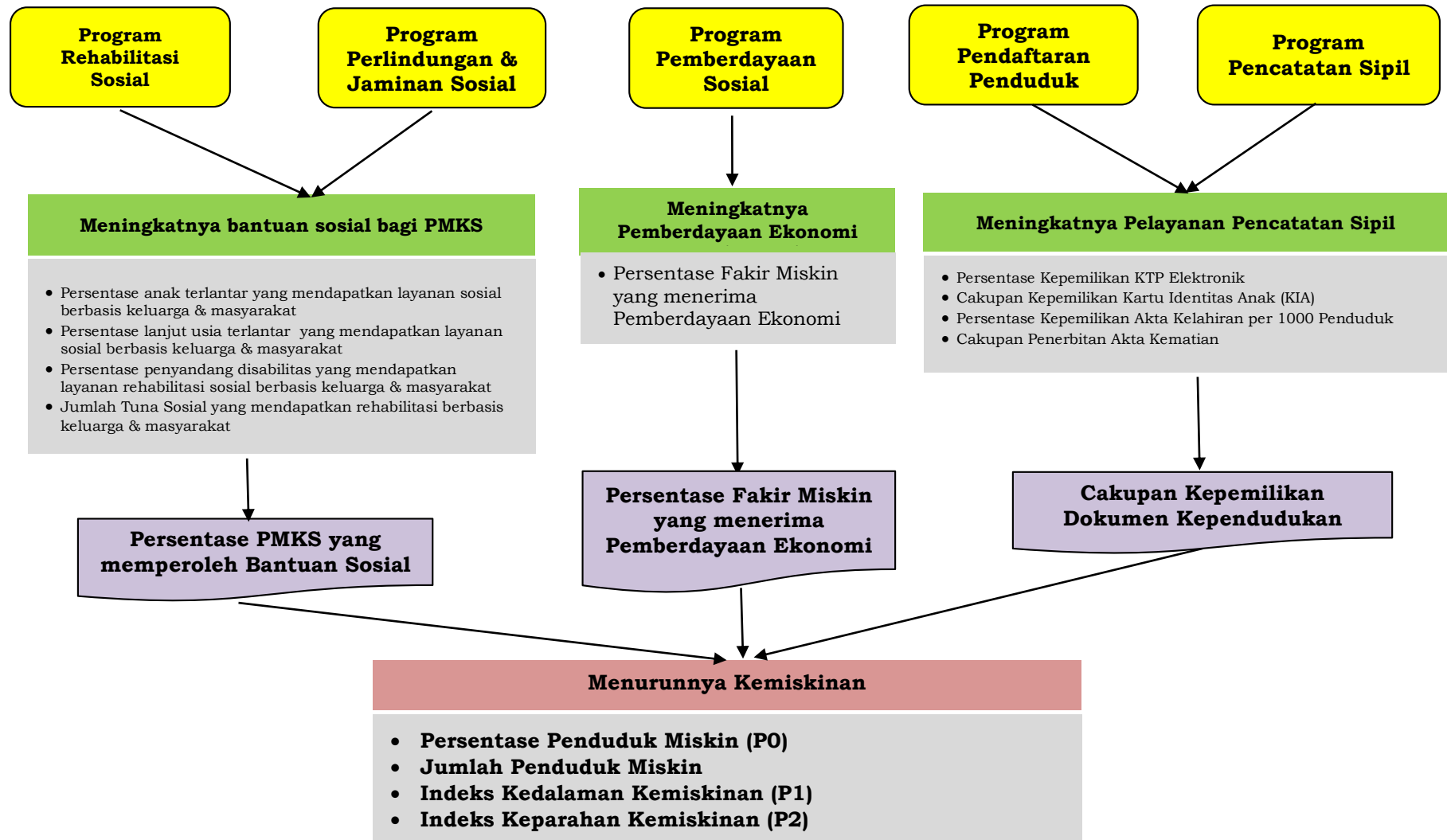
Tabel 4.6 Sasaran Akhir Bidang Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2026

No	Sasaran Akhir (Outcome/Impact/Goals)	Capaian	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat						
1	Persentase Penduduk Miskin	8,86	8,55	8,00	7,75	7,50	7,21

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang Sosial didukung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedua perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 5 Program Prioritas. Berikut Theory of Change (ToC) Bidang Sosial:



Gambar 4.6
Theory of Change Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sosial
Kabupaten Mandailing Natal





Terdapat 5 (lima) program prioritas penanggulangan kemiskinan bidang Sosial dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals), yaitu:

a. Dinas Sosial

1. Program Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu tindakan pemulihan atau pemberian pelayanan baik secara mental, fisik, maupun sosial terhadap pengguna narkoba, penyandang cacat, lanjut usia terlantar. Tindakan pemulihan diberikan kepada orang yang dilayani sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk membantunya pulih.

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan guna menjamin masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.

3. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Program Pendaftaran Penduduk

2. Program Pencatatan Sipil

Kedua program ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.



4.2.2 Analisis Keterkaitan (*Causal Of Attribution*)

4.2.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 4.7
Analisis Keterkaitan Bidang Pendidikan (*Causal Of Attribution*)

SASARAN	PRIORITAS INTERVENSI	PROGRAM
Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Terwujudnya Penuntasan wajib belajar 9 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan
	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Terpenuhinya kebutuhan dan Pemerataan tenaga pendidik	Program Pendidik & Tenaga Kependidikan
	Meningkatnya minat literasi masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan

4.2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 4.8
Analisis Keterkaitan Bidang Kesehatan (*Causal Of Attribution*)

SASARAN	PRIORITAS INTERVENSI	PROGRAM
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Layanan Kesehatan Dasar bagi Bayi & Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat
	Meningkatnya Layanan Kesehatan Dasar bagi Ibu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat
	Meningkatnya Pengendalian & Penanganan Penyakit Menular & Tidak Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat
	Meningkatnya Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan Keluarga Berencana • Program Pengendailian Penduduk • Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera



4.2.2.3 Bidang Infrastruktur Dasar

Tabel 4.9
Analisis Keterkaitan Bidang Infrastruktur Dasar (*Causal Of Attribution*)

SASARAN	PRIORITAS INTERVENSI	PROGRAM
Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Akses Sanitasi Berbasis Rumah Tangga	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Meningkatnya Akses Air Minum Berbasis Rumah Tangga	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga berpenghasilan Rendah	Program Kawasan Permukiman

4.2.2.4 Bidang Ketahanan Pangan

Tabel 4.10
Analisis Keterkaitan Bidang Ketahanan Pangan (*Causal Of Attribution*)

SASARAN	PRIORITAS INTERVENSI	PROGRAM
Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat	Konsumsi pangan yang berimbang serta sumber daya pangan yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan
	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalnya penanganan ketahanan dan kerentanan pangan • Cadangan Pangan yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



4.2.2.5 Bidang Ketenagakerjaan

Tabel 4.11
Analisis Keterkaitan Bidang Ketenagakerjaan (*Causal Of Attribution*)

SASARAN	PRIORITAS INTERVENSI	PROGRAM
Menurunnya Pengangguran Masyarakat	Meningkatnya Kualitas & Kompetensi Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pasar kerja sesuai dengan pencari kerja yang ada • optimalnya pembinaan hubungan industrial 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengetahuan tentang majemen usaha dan kewirausahaan • Meningkatnya inovasi produk UMKM • Meningkatnya Akses Pemasaran produk UMKM 	Program Pengembangan UMKM
	Pelaksanaan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	Program Pengembangan UMKM

4.2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 4.12
Analisis Keterkaitan Bidang Sosial (*Causal Of Attribution*)

SASARAN	PRIORITAS INTERVENSI	PROGRAM
Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya bantuan sosial bagi PMKS	<ul style="list-style-type: none"> • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan & Jaminan Sosial
	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Bagi Fakir Miskin	Program Pemberdayaan Sosial
	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil



4.3 Analisis Kondisi Fiskal

4.3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah. Sedangkan neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktifitas.

4.3.2 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam suatu APBD maka dengan demikian analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini:

4.3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 target pendapatan daerah



sebesar Rp1.541.735.851.349,- dan terealisasi sebesar Rp1.425.089.851.138,- atau 92,43% dan tahun 2020 target Pendapatan Daerah sebesar Rp1.540.470.383.134,- dan terealisasi sebesar Rp1.506.860.932.936,- atau 97,08%. Dengan rata-rata pertumbuhan pertahun target Pendapatan Daerah dari tahun 2016-2020 sebesar 1,12%. Dengan rincian Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. PAD Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 target sebesar Rp92.508.994.820,- dan terealisasi sebesar Rp70.405.901.828,- atau 76,11% dan target tahun 2020 sebesar Rp93.323.348.491,- dan terealisasi sebesar Rp90.454.777.183,- atau 96,9%. Dengan rata-rata pertumbuhan pertahun target PAD sebesar 5,14%.

Pendapatan Transfer (PT)

Bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Kabupaten Mandailing Natal selama kurun tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 target sebesar Rp1.449.226.856.529,- dan terealisasi sebesar Rp1.354.683.949.310,- atau 93,48% dan target tahun 2020 sebesar Rp1.345.722.967.577,- dan terealisasi sebesar Rp1.315.496.992.623,- atau 97,8%. Dengan rata-rata pertumbuhan pertahun target PT sebesar 0,59%.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan per Undang-Undangan

Bersumber dari hibah, dana darurat, dan Lain-lain Pendapatan. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan per Undang-undangan Kabupaten Mandailing Natal baru tahun 2017 mendapatkan dengan nilai target Rp 66.085.450.00,- dan realisasi sebesar Rp 66.085.450.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp101.424.067.066,- dengan realisasi sebesar Rp100.909.163.130,-.



Tabel 4.13 Realisasi Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016–2020

NO	PENDAPATAN DAERAH	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Asli Daerah	70.405.901.828	80.581.688.937	84.809.923.496	99.171.821.075	90.454.777.183
1.1	Pajak daerah	8.395.202.573	21.490.229.885	11.714.026.561	33.285.896.523	10.639.153.218
1.2	Retribusi daerah	23.176.142.350	28.361.009.960	3.730.570.725	33.878.588.279	33.297.952.387
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.934.560.383	9.527.118.956	23.072.563.023	-	10.094.912.514
1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	26.899.996.522	21.203.330.136	46.292.763.188	32.007.336.273	36.422.759.064
2.	Pendapatan Transfer	1.354.683.949.310	1.381.486.174.139	1.373.146.617.914	1.511.967.123.541	1.315.496.992.623
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.278.893.723.941	1.329.408.033.425	1.316.300.968.977	1.423.659.216.291	1.274.158.356.817
2.1.1	Dana Perimbangan	1.055.984.803.941	1.045.563.864.478	1.064.375.456.777	1.139.343.819.991	987.393.736.191
2.1.2	Dana Transfer Umum	819.399.653.295	798.808.513.468	815.575.943.181	837.564.690.349	775.361.904.813
2.1.3	Dana Transfer Khusus	236.585.150.646	246.755.351.010	248.799.513.596	301.779.129.642	212.031.831.378
2.1.4	Dana Desa	222.908.920.000	283.844.168.947	251.925.512.200	284.315.396.300	286.764.620.626
2.2	Transfer Antar Daerah	75.790.225.369	52.078.140.714	56.845.648.937	88.307.907.250	41.338.635.806
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	70.986.719.269	52.078.140.714	42.994.819.736	88.307.907.250	41.338.635.806
2.2.2	Bantuan Keuangan	4.803.506.100	-	13.850.829.201	-	-
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	66.085.450.000	65.162.543.450	74.103.561.900	100.909.163.130
3.1	Hibah	-	66.085.450.000	65.162.543.450	74.103.561.900	100.909.163.130
3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.425.089.851.138	1.528.153.313.076	1.523.119.084.860	1.685.242.506.516	1.506.860.932.936



4.3.2.2 Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari: 1) Belanja Operasional yang terdiri dari belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial, 2) Belanja Modal yang terdiri dari belanja Tanah, peralatan dan Mesin, bangunan dan gedung, jalan, belanja irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya, dan belanja modal sumber dana BOS, 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan bantuan Keuangan.

Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 target Belanja Daerah sebesar Rp1.655.448.653.820,- dan terealisasi sebesar Rp1.459.576.624.438,- atau 88,17% dan Tahun 2020 terget belanja daerah sebesar Rp1.658.217.619.253,- dan terealisasi sebesar Rp1.559.758.322.076,- atau 94,1%. Dengan rata-rata pertumbuhan pertahun target Belanja Daerah dari tahun 2016-2020 sebesar 1,34%. Dengan komponen Belanja Daerah sebagai berikut:

Belanja Operasional

Belanja Operasional Kabupaten Mandailing Natal tahun ketahun mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar Rp1.125.457.890.856,- yang terealisasi sebesar Rp959.250.783.751,- atau 85,23% dan tahun 2020 sebesar Rp1.114.932.669.010,- dan yang terealisasi sebesar Rp1.032.862.119.726,-. Dengan rata-rata pertumbuhan pertahun target BO sebesar 1,49%.

Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Mandailing Natal tahun ketahun mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar Rp277.781.842.964,- yang terealisasi sebesar Rp248.898.511.516,- atau 89,60% dan tahun 2020 sebesar



Rp151.737.178.754,- dan yang terealisasi sebesar Rp138.152.200.872,-. Dengan rata-rata pertumbuhan pertahun target BM sebesar 11,11%.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Kabupaten Mandailing Natal tahun ketahun mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar Rp2.5000.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp2.080.902.000,- atau 83,24% dan tahun 2020 sebesar Rp26.186.910.689,- dan yang terealisasi sebesar Rp23.585.560.597,-. Dengan rata-rata pertumbuhan pertahun target BTT sebesar 62,61%.

Belanja Transfer

Belanja Transfer Kabupaten Mandailing Natal tahun ketahun mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar Rp249.708.920,- yang terealisasi sebesar Rp249.346.427.171,- atau 99,85% dan tahun 2020 sebesar Rp365.360.860.800,- dan yang terealisasi sebesar Rp365.158.440.881,-. Dengan rata-rata pertumbuhan pertahun target BT sebesar 7,93%.

Tabel 4.14 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016–2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Belanja Daerah	1.459.576.624.438	1.561.204.713.766	1.506.945.739.449	1.617.834.318.157	1.559.758.322.076
1	Belanja Operasional	959.250.783.751	925.979.247.867	970.614.192.087	1.038.494.917.164	1.032.862.119.726
2	Belanja Modal	248.898.511.516	268.243.397.538	199.849.014.898	206.407.314.422	138.152.200.872
3	Belanja Tidak Terduga	2.080.902.000	56.148.000	1.929.755.000	128.500.000	23.585.560.597
4	Belanja Transfer	249.346.427.171	366.925.920.361	334.552.777.464	372.803.586.571	365.158.440.881

4.3.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel berikut dibawah ini yang menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel 4.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016–2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Pembiayaan Daerah	113.740.530.431	81.060.870.262	34.220.434.387	50.256.771.290	116.116.603.126
1	Penerimaan Pembiayaan	115.740.530.431	81.060.870.262	47.574.805.628	50.256.771.290	116.116.603.126
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	-	13.354.371.241	-	-

4.3.3 Neraca Daerah

Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Di sisi neraca daerah, total aset pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang tercatat pada tahun 2019 sebesar Rp2.068.153.339,-. Aset yang paling besar peningkatannya adalah pada aset tetap yang mengalami peningkatan sebesar Rp1.689.6969.026.826,- atau mengalami peningkatan sebesar 105% dibanding tahun 2018.



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

Tabel 4.16 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	1.969.863.374.635	1.817.530.352.613	1.968.085.454.652	2.068.550.153.339	1.806.636.087.734	-1,72
1.1	ASET LANCAR	103.385.919.705	64.115.587.893	116.026.009.172	169.477.364.946	88.561.402.345	-3,05
1	Kas Di Kas Daerah	79.093.294.015	42.002.062.129	32.813.011.226	101.892.688.396	57.366.452.199	
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	26.251.196	87.186.930	-	-	-	
4	Kas Di BLUD	135.525.220	135.525.220	3.419.227.286	4.710.852.614	4.840.133.938	
5	Kas lainnya di bendahara pengeluaran dana BOS	1.541.354.718	5.784.695.293	14.161.541.288	11.061.418.441	1.012.628.296	
6	Kas lainnya di bendahara pengeluaran	192.843.289	90.354.218	56.608.237	143.477.441	-	
7	Piutang Pendapatan	16.440.087.030	17.515.344.752	70.332.425.654	66.766.079.572	22.213.244.448	
8	Piutang Lain-lain	167.944.800	167.944.800	167.944.800	167.944.800	167.944.800	
9	Penyisihan Piutang	-10.682.615.340	-12.244.239.898	-15.649.562.096	-25.619.559.763	-16.915.164.853	
10	Persediaan	16.469.734.777	10.574.881.116	10.724.812.777	10.354.463.444	19.876.163.517	
11	Beban dibayar Dimuka	1.500.000	1.833.332	-	-	-	
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	40.550.098.894	40.076.438.174	53.472.718.443	53.128.481.362	-	-100
2.1	Investasi jangka panjang non permanen	-	-	-	-	-	
1	Investasi non permanendana bergulir	2.697.114.787	2.659.978.787	2.633.552.787	2.633.552.787	2.618.836.787	
2	Penyisihan investasi non permanen- dana bergulir	-2.697.114.787	-2.659.978.787	-2.633.552.787	-2.633.552.787	-2.618.836.787	
2.2	Investasi jangka panjang permanen	40.550.098.894	40.076.438.174	53.472.718.443	53.128.481.362	-	
	Penyediaan modal pemerintah daerah	40.550.098.894	40.076.438.174	53.472.718.443	53.128.481.362	-	
1.3	ASET TETAP	1.629.575.994.423	1.539.447.137.871	1.609.569.813.649	1.689.696.026.826	1.672.399.652.524	0,52
1	Tanah	305.305.390.660	304.742.029.750	300.411.915.491	310.081.874.637	303.798.048.990	
2	Peralatan dan Mesin	263.853.637.398	292.797.694.752	318.793.387.509	365.786.670.932	426.943.924.955	
3	Gedung dan Bangunan	722.141.667.729	680.185.558.354	683.650.751.257	796.065.349.470	828.368.297.765	
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.262.077.813.609	1.454.771.202.287	1.544.825.582.153	1.638.914.858.577	1.672.617.132.765	
5	Aset Tetap Lainnya	84.667.628.281	88.081.847.873	101.113.660.091	113.717.909.586	123.246.743.746	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.062.456.535	4.002.000.452	30.634.858.230	32.445.334.683	24.840.358.988	
7	Akumulasi Penyusutan	-1.040.532.599.789	-1.285.133.195.597	-1.369.860.341.082	-1.567.315.971.059	-1.707.414.854.685	
1.4	ASET LAINNYA	196.351.361.613	173.891.188.675	189.016.913.388	156.248.280.206	45.675.032.865	-25,30
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	907.200.000	907.200.000	907.200.000	907.200.000	907.200.000	
2	Aset tidak berwujud	99.600.000	99.600.000	99.600.000	99.600.000	226.685.000	
3	Aset lain-lain	350.719.344.437	325.880.768.228	355.241.664.862	284.911.748.863	160.409.244.916	
4	Akumulasi penyusutan aset lain- lain	-159.434.962.824	-156.981.859.553	-171.212.031.474	-133.650.748.657	-119.805.327.051	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
5	Tagihan angsuran sewa	4.060.180.000	3.985.480.000	3.980.480.000	3.980.480.000	3.937.230.000	
2	KEWAJIBAN	12.337.921.639	107.396.631	516.643.655	55.824.146	55.497.746	-66,07
2.1	Kewajiban jangka pendek	12.337.921.639	107.396.631	516.643.655	55.824.146	55.497.746	-66,07
1	Utang piutang pihak ketiga-BUD	1.313.300	-	-	-	-	
2	Utang piutang pihak ketiga-bendahara pengeluaran	190.327.982	-	56.608.237	55.824.146	-	
3	Utang beban	1.752.102.400	-	-	-	-	
4	Utang pihak ketiga	10.391.662.650	90.304.343	460.035.418	-	-	
5	Utang jangka pendek lainnya	2.515.307	17.092.288	-	-	55.497.746	
2.2	Kewajiban jangka panjang	-	-	-	-	-	
1	Utang dalam negeri	-	-	-	-	-	
2	Utang jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	
3	EKUITAS	1.970.863.374.639	1.817.422.955.982	1.967.568.810.997	2.068.550.153.339	1.859.567.097.455	-1,16
	Ekuitas	1.970.863.374.639	1.817.422.955.982	1.967.568.810.997	2.068.550.153.339	1.859.567.097.455	



4.3.4 Analisa Fiskal

Menggunakan beberapa indikator sederhana dalam melakukan analisis fiskal untuk memotret kondisi pengelolaan keuangan daerah ataupun kondisi kesehatan fiskal daerah yang dimulai dari kurun waktu tahun 2016-2020 sebagai berikut:

4.3.4.1 Pendapatan Daerah Per Kapita

Indikator ini rasio ini menggambarkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemda. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Perkapita Pemerintah Kabupaten Nandailing Natal dan rasionya menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan adanya peningkatan setiap tahunnya, hal ini tercermin pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.17 Pendapatan Daerah Per Kapita Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Daerah	1.541.735.851.349	1.580.192.019.922	1.584.105.660.840	1.711.907.897.878	1.667.753.177.436
Jumlah Penduduk	435.303	439.505	443.490	447.287	472.886
Ratio	3.541.753	3.595.390	3.571.908	3.827.314	3.526.755

4.3.4.2 Kemandirian Keuangan Daerah

Kondisi Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat dari ketergantungan kepada pemerintah pusat. Dimana kondisi ini yang didapatkan dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah dalam mendanai belanja daerah untuk pelayanan publik kepada masyarakat semakin apakah semakin menaik atau menurun, kemandirian keuangan pemerintah mandailing natal dalam kurun 5 tahun terakhir masih cukup rendah dan bersifat fluktuatif namun masih pada rata-rata 7,93 %, hal ini tergambar pada tabel dibawah ini.



**Tabel 4.18 Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2016-2020**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Daerah	1.541.735.851.349	1.580.192.019.922	1.584.105.660.840	1.711.907.897.878	1.667.753.177.436
PAD	92.508.994.820	174.499.369.563	132.584.140.804	120.128.557.818	120.128.557.818
Kemandirian Keuangan	6,00	11,04	8,37	7,02	7,20

4.3.4.3 Ruang Fiskal

Kondisi Ruang Fiskal (fiscal space) secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja semakin kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2016-2020 kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sangat fluktuatif yaitu pada tahun 2016 sebesar 14,92 %, dan melonjak pada tahun 2017 yang mencapai puncaknya sebesar 26,71% dan pada tahun tahun berikutnya cenderung menurun dan sedikit membaik pada tahun 2020 yang mencapai sebesar 21,61%.

**Tabel 4.19 Ruang Fiskal Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2016-2020**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pendapatan	1.541.735.851.349	1.580.192.019.922	1.584.105.660.840	1.711.907.897.878	1.667.753.177.436
Pendapatan Hibah	-	-	69.837.600.000	68.765.600.000	68.765.600.000
DAK	333.723.247.000	261.707.571.000	612.291.611.695	284.048.518.000	422.144.319.227
Belanja Pegawai	755.047.561.767	612.291.611.695	657.702.970.994	670.715.310.675	673.587.999.296
Dana Desa	222.908.920.000	284.048.518.000	253.119.996.000	285.841.420.000	290.920.103.000
Selisih	230.056.122.582	422.144.319.227	349.749.795.846	359.382.370.203	360.401.967.140
Ruang Fiskal	14,92	26,71	22,08	20,99	21,61

4.3.4.4 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

Analisis Sumber Penutup Defisit Riil, Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan



mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut. Pada tabel dibawah ini, menunjukkan bahwa Kabupaten Mandailing Natal memiliki defisit anggaran pada tahun 2016-2020.



Tabel 4.20 Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 Kabupaten Mandailing Natal

No	Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.541.735.851.349	1.580.192.019.922	1.584.105.660.840	1.711.907.897.878	1.667.753.177.436
	Dikurangi realisasi					
2.	Belanja Daerah	1.655.448.653.820	1.649.273.643.502	1.618.760.759.171	1.762.301.677.677	1.694.178.414.691
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000	-	13.354.371.241	-	-
	Defisit riil	-113.712.802.471	-69.081.623.580	-34.655.098.331	-50.393.779.799	-26.425.237.255

Tabel 4.21 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mandailing Natal

No	Tahun	Proporsi dari total defisit riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	115.712.802.471	79.253.757.130	48.009.469.572	50.393.779.799	26.425.237.255
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-



Kemampuan Kabupaten Mandailing Natal untuk menutup defisit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup defisit riil pada tabel 4.22 di atas: Dari tabel 4.22 diatas terlihat pada tahun 2016-2020 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mempunyai SiLPA yang tidak terlalu besar ini dilihat melalui akumulasi dari surplus/defisit ditambah penerimaan pembiayaan minim. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Perolehan SiLPA selama tahun 2016 hingga 2020 sebagian besar diperoleh dari Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kemudian juga dari pelampauan Pendapatan Daerah baik dari PAD, Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berikut adalah perolehan SiLPA selama tahun 2016 hingga 2020.



Tabel 4.22 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mandailing Natal

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	115.712.802.471,0		79.253.757.130,0		48.009.469.572,0		50.393.779.799,0		26.425.237.254,9	
2	Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-22.103.092.992,0	-5,2	-93.917.680.626,0	-0,8	-47.774.217.307,5	-1,0	-120.128.557.818,0	-0,4	-120.128.557.818,0	-0,2
3	Pelampauan penerimaan Pendapatan transfer	-94.542.907.219,0	-1,2	-24.206.476.220,0	-3,3	-8.537.302.122,0	-5,6	-1.523.013.740.060,0	-0,0	-1.478.859.019.618,0	-0,0
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan	0,0	0,0	66.085.450.000,0	-1,2	-4.675.056.550,0	-10,3	-68.765.600.000,0	-0,7	-68.765.600.000,0	-0,4
5	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	195.872.029.381,7	0,6	88.068.929.736,0	0,9	111.815.019.722, 2	0,4	1.762.301.677.677,0	0,0	1.694.178.414.690,9	0,0
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Kegiatan lanjutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



4.3.5 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

4.3.5.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021-2026 melihat dari tren realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir dengan memperhitungkan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan aspek-aspek lainnya, disajikan pada Tabel berikut ini.



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

Tabel 4.23 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mandailing Natal

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp.)	Proyeksi				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN DAERAH	1.643.763.327.503	1.898.294.064.243	1.849.515.849.823	1.967.390.277.960	2.082.196.046.688	2.213.516.017.298
1.1	Pendapatan Asli Daerah	100.203.036.445	109.024.010.503	122.648.516.609	126.327.972.107	131.381.090.991	137.950.145.541
	a. Pajak Daerah	18.790.500.000	20.669.550.000	22.999.572.000	23.689.559.160	24.637.141.526	25.868.998.603
	b. Retribusi Daerah	5.658.576.000	6.224.433.600	6.926.097.024	7.133.879.935	7.419.235.132	7.790.196.889
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.133.279.809	17.647.278.203	20.971.134.486	21.600.268.521	22.464.279.262	23.587.493.225
	d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58.620.680.636	64.482.748.700	71.751.713.098	73.904.264.491	76.860.435.071	80.703.456.825
1.2	Pendapatan Transfer	1.474.794.691.058	1.715.690.861.740	1.709.839.384.991	1.823.864.078.509	1.933.444.746.079	2.058.021.960.042
	a. Transfer Pemerintah Pusat	1.436.661.071.000	1.674.887.888.278	1.671.324.428.732	1.784.963.972.688	1.894.155.639.199	2.018.339.962.094
	1. Dana Perimbangan	1.149.815.207.000	1.388.042.024.277	1.372.889.991.826	1.480.560.847.044	1.583.664.451.043	1.701.638.950.174
	• Dana Transfer Umum	801.852.728.000	1.015.722.171.747	836.366.246.326	938.671.864.089	946.066.023.173	958.664.538.026
	DBH	34.944.051.000	37.390.134.570	46.140.489.530	50.754.538.483	51.262.083.868	52.287.325.545
	DAU	766.908.677.000	978.332.037.177	790.225.756.796	887.917.325.606	894.803.939.305	906.377.212.481
	• Dana Transfer Khusus	347.962.479.000	372.319.852.530	536.523.745.500	541.888.982.955	637.598.427.870	742.974.412.148
	DAK Fisik	151.588.809.000	162.200.025.630	145.207.950.000	146.660.029.500	147.393.329.648	148.867.262.944
	DAK Non Fisik	196.373.670.000	210.119.826.900	391.315.795.500	395.228.953.455	490.205.098.222	594.107.149.204
	2. Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-
	3. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
	4. Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-
	5. Dana Desa	286.845.864.000	286.845.864.001	298.434.436.906	304.403.125.644	310.491.188.157	316.701.011.920
	b. Transfer Antar Daerah	38.133.620.058	40.802.973.462	38.514.956.259	38.900.105.821	39.289.106.879	39.681.997.948
	Pendapatan Bagi Hasil	38.133.620.058	40.802.973.462	38.514.956.259	38.900.105.821	39.289.106.879	39.681.997.948
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	68.765.600.000	73.579.192.000	17.027.948.224	17.198.227.344	17.370.209.618	17.543.911.715
	Hibah	-	-	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	68.765.600.000	73.579.192.000	17.027.948.224	17.198.227.344	17.370.209.618	17.543.911.715
2	BELANJA DAERAH	1.673.136.120.492	1.929.325.979.971	1.864.428.911.645	1.976.294.645.963	2.084.990.851.492	2.210.090.302.581
2.1	Belanja Operasional	1.059.639.169.750	1.258.962.117.593	1.256.462.117.593	1.354.508.419.862	1.429.006.382.955	1.514.746.765.932
	Belanja Pegawai	688.874.689.709	851.888.374.548	849.388.374.548	857.500.959.137	904.663.511.889	958.943.322.603
	Belanja Barang dan Jasa	355.420.780.041	390.962.858.045	390.962.858.045	394.872.486.625	416.590.473.390	441.585.901.793
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	13.049.500.000	13.701.975.000	13.701.975.000	99.701.975.000	105.185.583.625	111.496.718.643
	Belanja Bantuan Sosial	2.294.200.000	2.408.910.000	2.408.910.000	2.432.999.100	2.566.814.051	2.720.822.894



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp.)	Proyeksi				
			2022	2023	2024	2025	2026
2.2	Belanja Modal	238.452.233.078	276.566.908.830	214.169.840.505	223.860.653.440	236.172.989.380	250.343.368.743
	Belanja Tanah	6.000.000.000	6.600.000.000	6.000.000.000	6.300.000.000	6.646.500.000	7.045.290.000
	Belanja Peralatan Mesin	41.599.743.231	43.679.730.393	35.599.743.231	37.379.730.393	39.435.615.564	41.801.752.498
	Belanja Bangunan dan Gedung	76.802.225.580	84.482.448.138	70.802.225.580	74.342.336.859	78.431.165.386	83.137.035.309
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.438.734.252	123.312.623.784	90.438.734.252	94.056.283.622	99.229.379.221	105.183.141.975
	Belanja Aset Tetap Lainnya	17.611.530.015	18.492.106.516	11.329.137.442	11.782.302.567	12.430.329.208	13.176.148.961
	Belanja Modal Sumber Dana BOS	-	-	-	-	-	-
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.250.000.000	5.250.000.000	5.302.500.000	5.594.137.500	5.929.785.750
2.4	Belanja Transfer	370.044.717.664	388.546.953.547	388.546.953.547	392.623.072.660	414.217.341.657	439.070.382.156
	Belanja Bagi Hasil	1.813.580.864	1.904.259.907	1.904.259.907	1.923.302.506	2.029.084.144	2.150.829.193
	Belanja Bantuan Keuangan	368.231.136.800	386.642.693.640	386.642.693.640	390.699.770.154	412.188.257.513	436.919.552.964
	Surplus/Defisit	-29.372.792.989	-31.031.915.727	-14.913.061.822	-8.904.368.003	-2.794.804.803	3.425.714.716
3	PEMBIAYAAN DAERAH	46.839.352.607	49.371.803.326	35.086.938.180	31.095.631.997	27.205.195.197	23.425.714.716
3.1	Penerimaan Pembiayaan	38.106.072.798	40.201.859.527	25.000.000.001	20.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000
	SiLPA	38.106.072.798	40.201.859.527	25.000.000.001	20.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000
	Penerimaan Dana Cadanga	-	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.733.279.809	9.169.943.799	10.086.938.179	11.095.631.997	12.205.195.197	13.425.714.716
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	8.733.279.809	9.169.943.799	10.086.938.179	11.095.631.997	12.205.195.197	13.425.714.716
	Pembentukan Dana Cadanga	-	-	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	29.372.792.989	31.031.915.728	14.913.061.822	8.904.368.003	2.794.804.803	3.425.714.716
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	0	0	0	0	0	0
	Total Belanja Daerah	1.681.869.400.301	1.938.495.923.770	1.874.515.849.824	1.987.390.277.960	2.097.196.046.688	2.223.516.017.298



4.3.5.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan kebutuhan sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai kebutuhan atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut pada tabel dibawa ini maka perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam dua kelompok prioritas, yakni:

- **Prioritas I:** dialokasikan untuk membiayai belanja urusan wajib dan mengikat pada tahun 2022-2026.
- **Prioritas II:** dialokasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah periode tahun 2022-2026 yang merupakan program dan kegiatan unggulan dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang lebih baik dan bermartabat. Dalam rangka pengalokasian prioritas ini maka pengalokasian diutamakan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya yang berdampak luas terhadap semua lapisan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu pada prioritas I ini juga diarahkan dalam upaya pencapaian target SDGs sebagaimana yang diamanahkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.4 Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi

4.4.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Berdasarkan Permendagri No 53 Tahun 2020 serta hasil analisis interpretasi dari data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dirumuskan permasalahan utama dalam rencana kebijakan penanggulangan kemiskinan. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama dimaksud akan menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan lima tahunan yang dijabarkan lebih rinci ke permasalahan utama/pokok penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

Gambar 4.7
Permasalahan Utama Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal





Berdasarkan rumusan permasalahan diatas terdapat beberapa Permasalahan-permasalahan yang dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.24
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	RUMUSAN MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pendidikan	Penuntasan wajib belajar 9 tahun masih belum terwujud	Masih rendahnya APK SD/MI/PAKET A
			Masih rendahnya APM SD/MI/PAKET A
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Masih Banyak Gedung Sekolah Rusak Berat
		Belum merata dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik	Belum terpenuhinya Rasio Guru berkualifikasi D4/S1
			Belum terpenuhinya Rasio Murid terhadap Guru
		Rendahnya minat literasi masyarakat	Masih rendahnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun
			Masih rendahnya Indeks Minat Baca Masyarakat
			Masih rendahnya Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan
2	Kesehatan	Belum optimalnya layanan kesehatan dasar bagi masyarakat	Belum maksimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita
			Belum maksimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi Ibu
			Belum maksimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia
			Belum maksimalnya sumber daya manusia tenaga kesehatan
		Belum terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat	Masih belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat
		Belum optimalnya layanan Keluarga Berencana dalam meningkatkan ketahanan	Masih rendahnya keluarga yang memiliki pemahaman & kesadaran tentang fungsi keluarga



NO	RUMUSAN MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		dan kesejahteraan keluarga	
3	Infrastruktur Dasar	Rendahnya akses rumah tangga terhadap sanitasi	Masih reendahnya Rumah Tangga yang Bersanitasi layak
		Belum optimalnya layanan air minum bagi rumah tangga	Masih rendahnya Rumah Tangga yang dilayani Air Minum layak
		Belum optimalnya pemenuhan rumah layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni
4	Ketahanan Pangan	Konsumsi pangan yang belum berimbang serta sumber daya pangan yang belum memadai	Masih belum maksimalnya capaian angka Kecukupan Energi dan protein Konsumsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penanganan ketahanan dan kerentanan pangan • Cadangan Pangan yang belum memadai 	Belum optimalnya Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Lainnya (Padi, Jagung, Kedelai), Produksi Ternak (Daging, Telur, Susu)
			Belum maksimalnya penanganan Jaringan Irigasi
5	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pasar kerja tidak sesuai dengan pencari kerja yang ada • Kurang optimalnya pembinaan hubungan industrial 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan • Masih rendahnya pekerja rentan/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
		Masih rendahnya kualitas dan kompetensi angkatan kerja muda yang memasuki dunia kerja serta masih terbatasnya lembaga sertifikasi profesi	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya pelatihan Tenaga Kerja yang Berbasis Kompetensi
6	Sosial	Rendahnya bantuan sosial bagi PMKS	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya bantuan sosial bagi PMKS
		Rendahnya fakir miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya persentase Fakir Miskin yang menerima Pemberdayaan Ekonomi
		Masih rendahnya cakupan layanan administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan



4.5 Strategi dan Arah Kebijakan Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator PMK nomor 30 tahun 2022 tentang penetapan sumber dan jenis data P3KE upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Desa, dan Pemangku kepentingan lainnya, serta dalam hal pensasaran penerima manfaat penanggulangan kemiskinan adalah mengacu pada by name by address data yang termasuk dalam DTKS dan Data P3KE yang telah di Verifikasi dan Validasi. Berdasarkan arahan dari Kementerian Koordinator PMK bahwasanya untuk Penanganan kemiskinan ekstrem prioritas sasaran adalah jumlah penduduk miskin yang diklasifikasikan pada Desil 1. Program/Kegiatan penanganan kemiskinan mempedomani Tagging Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam aplikasi SIPD (tabel tagging kegiatan pada lampiran). Adapun Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah yang melaksanakan penerapan pola pendampingan, pemasaran, permodalan serta pola kemitraan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan daerah.



Tabel 4.25
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan & Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Mandailing Natal 2024-2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah	Ruang	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Sarana dan Prasarana dan utilitas sekolah	sarana/prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	jumlah sarana/prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	Ruang	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah yang terehabilitasi sedang/berat	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pengadaan Perlengkapan Siswa (utk Siswa SD)	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	siswa	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima	Peserta Didik	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Atas Diterima oleh Peserta Didik	Biaya Personil Peserta Didik				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah	Ruang	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Sarana dan Prasarana dan utilitas sekolah	sarana/prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	jumlah sarana/prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Ruang Kelas Sekolah Yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah ruang kelas yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah yang terehabilitasi sedang/berat	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pengadaan Perlengkapan Siswa (utk siswa SMP)	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	siswa	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	TL	Meningkatkan Pendapatan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	P	Meningkatkan Pendapatan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Unit Air Baku	Terbangunnya Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	KM	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Titik	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi Unit Air Baku	Terehabilitasinya Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi	KM	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Beroperasi dan Terpeliharanya Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	KM	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	Titik	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	KM	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	Titik	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	KM	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terbangunannya SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Terbinanya dan Terawasinya Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Badan Usaha	TL	Meningkatkan Pendapatan	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Terbinanya dan Terawasinya Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Teroptimalisasinya SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Teroptimalisasinya SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tebangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air	Terlayannya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air	Rumah Tangga	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Limbah Terpusat Skala Permukiman	Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Limbah Terpusat Skala Permukiman				
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlayannya Rumah Tangga Melalui Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						
Pembangunan Jalan Strategis Desa	Terbangunnya Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun	KM	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Terlaksannya Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	KM	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						
Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Dokumen	P	Meningkatkan Pendapatan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Tersedianya Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Dokumen	P	Meningkatkan Pendapatan	
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen	P	Meningkatkan Pendapatan	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Orang	TL	Meningkatkan Pendapatan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	berdasarkan Jenis Layanan					
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	L	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Ha	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	L	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya penyusunan dan/atau Review serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersusunnya Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	L	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Unit	L	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						
Perbaikan RTLH untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah RTLH untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10Ha yang diperbaiki	unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT						
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Terinventarisasinya Tanah-Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data Tanah Milik Masyarakat Miskin	Laporan	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Tersusunnya Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	P	Meningkatkan Pendapatan	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
PROGRAM PENATAAN DESA						
Penyelenggaraan Penataan Desa						
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				
Fasilitasi Tim Penggerak Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaangerak PKK dalam Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	P	Meningkatkan Pendapatan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per	Orang	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilegalisasi	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)						
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	L	Meningkatkan Pendapatan	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	L	Meningkatkan Pendapatan	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota				
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Kewenangan Kabupaten/Kota					
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota				
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Meningkatkan Pendapatan	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						
Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian	Jumlah Tempat Pengungsian	Unit	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota				
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Lembaga	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Tersedianya kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan	Orang	L	Mengurangi Beban Pengeluaran	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Kewenangan Kabupaten/Kota	Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	P	Meningkatkan Pendapatan	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	Organisasi	P	Meningkatkan Pendapatan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	Orang	L	Meningkatkan Pendapatan	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	L	Meningkatkan Pendapatan	
Perluasan Kesempatan Kerja	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan kepada pencari kerja/pengangguran		Orang	L	Meningkatkan Pendapatan	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	/korban PHK guna menciptakan wiraushaa mandiri untuk memperluas kesempatan kerja					
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya fasilitasi pemberian informasi pasar kerja dan lowongan kerja bagi pencari kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	TL	Meningkatkan Pendapatan	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya bimtek manajemen keuangan kepada Purna PMI untuk memperluas lapangan kerja di dalam negeri	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	TL	Meningkatkan Pendapatan	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
Pelayanan Pendaftaran Penduduk						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporn peristiwa kependudukan	Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penataan Pendaftaran Penduduk						
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						
Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
Pelayanan Pencatatan Sipil						
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						
Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang	Terlaksananya Supervisi Bersama	Jumlah Supervisi Bersama dengan	Laporan	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						
Penyusunan Profil Kependudukan						
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
Perumusan Parameter Kependudukan	Dirumuskannya Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	Laporan	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas	Orang	P	Mengurangi Beban Pengeluaran	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang	TL	Mengurangi Beban Pengeluaran	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	L	Meningkatkan Pendapatan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Teroperasinya dan Terpeliharanya	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Pelabuhan Sungai dan Danau	yang Beroperasi dan Terpelihara				
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	P	Meningkatkan Pendapatan	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	L	Meningkatkan Pendapatan	
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	L	Meningkatkan Pendapatan	
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	TL	Meningkatkan Pendapatan	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	L	Meningkatkan Pendapatan	
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	L	Meningkatkan Pendapatan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	TL	Meningkatkan Pendapatan	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	TL	Meningkatkan Pendapatan	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	P	Meningkatkan Pendapatan	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	P	Meningkatkan Pendapatan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						
Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Jumlah Data dan Informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	dokumen	P	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						
Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atas standart pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Terlaksananya pembinaa terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pad usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaa terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pad	unit usaha	TL	Meningkatkan Pendapatan	



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	skala usaha dan resiko	usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko				
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	ton	TL	Meningkatkan Pendapatan	
Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu)daerah Kab/Kota	Tersedianya fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu)daerah Kab/Kota	Jumlah Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu)daerah Kab/Kota yang terfasilitasi	pelaku usaha	TL	Meningkatkan Pendapatan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan	Laporan	P	Meningkatkan Pendapatan	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	P	Meningkatkan Pendapatan	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Terjaminnya Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor	P	Meningkatkan Pendapatan	
Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton	P	Meningkatkan Pendapatan	
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Ton	TL	Meningkatkan Pendapatan	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya	Terlaksananya Pengadaan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang	Ekor	TL	Meningkatkan Pendapatan	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	P	Meningkatkan Pendapatan	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
Pembangunan Prasarana Pertanian						
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terbangun, Terehabilitasi dan	Jumlah DAM Parit yang Dibangun,	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
	Terpeliharanya DAM Parit	Direhabilitasi dan Dipelihara				
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	TL	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						



RPKD Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2026

NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	P	Meningkatkan Pendapatan	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	TL	Meningkatkan Pendapatan	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	TL	Meningkatkan Pendapatan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	L	Meningkatkan Pendapatan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						



NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELOMPOK	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INSTRUMEN PELENGKAP
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	TL	Meningkatkan Pendapatan	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil						
Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta design dan teknologi	Terfasilitasinya usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta design dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta design dan teknologi	Unit usaha	TL	Meningkatkan Pendapatan	



BAB V

LOKASI PRIORITAS

Analisis wilayah prioritas bertujuan untuk menentukan wilayah kecamatan secara tepat sebagai lokus intervensi program dan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh beda karakteristik daerah, beda akar masalah, akan berbeda wilayah prioritas dan harus berbeda intervensi yang disiapkan. Analisis wilayah prioritas ini menggunakan pendekatan analisis kuadran, dengan mempersandingkan antara dua indikator (indikator x dan indikator y) yang memiliki keterkaitan/hubungan melalui analisis kuadran ini dapat ditentukan 4 kategori prioritas wilayah sebagai berikut :

- Prioritas 1 adalah Kecamatan yang memiliki kinerja indikator x dan y keduanya negatif (warna merah)
- Prioritas 2 adalah Kecamatan yang memiliki kinerja indikator x negatif, namun indikator y positif (warna kuning)
- Prioritas 3 adalah Kecamatan yang memiliki kinerja indikator x positif, namun indikator y negatif (warna hijau)
- Prioritas 4 adalah Kecamatan yang memiliki kinerja indikator x dan y keduanya positif (warna biru). Prioritas ke 4 ini memiliki derajat prioritas yang paling rendah atau disebut dengan wilayah non prioritas atau prioritas keempat dari 1 2 3 dan 4.

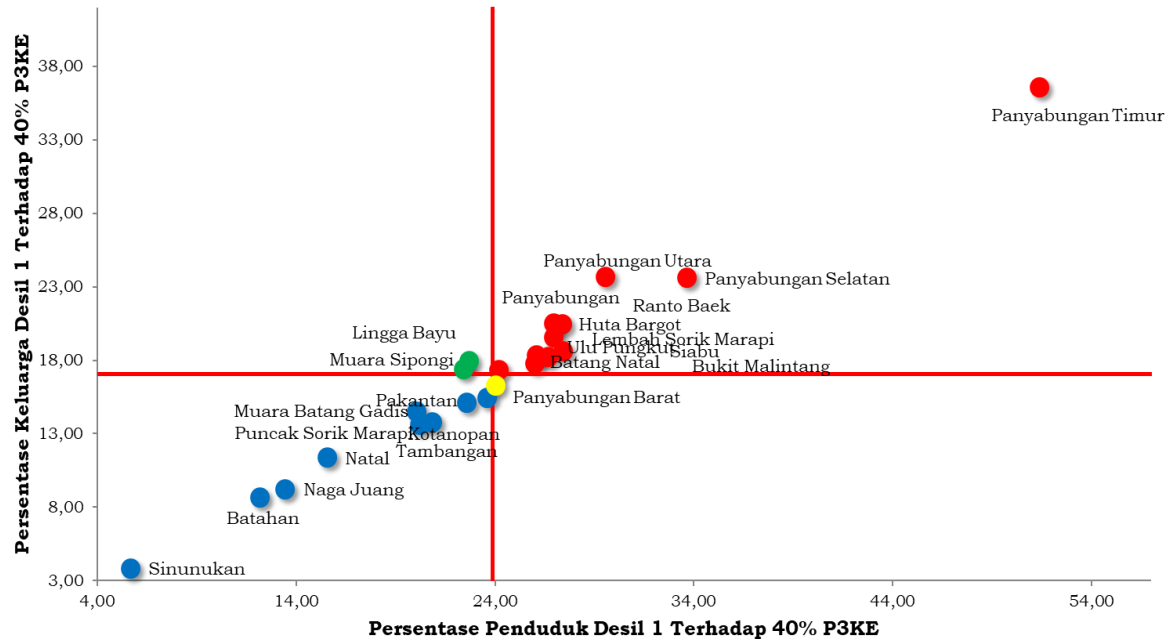
5.1 Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

5.1.1. Kuadran wilayah prioritas persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dan persentase keluarga desil terhadap 40% P3KE



**Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Persentase Penduduk Desil 1
Terhadap 40% P3KE dan Persentase Keluarga Desil 1 Terhadap 40% P3KE
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024**

Sumber: P3KE 2024



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

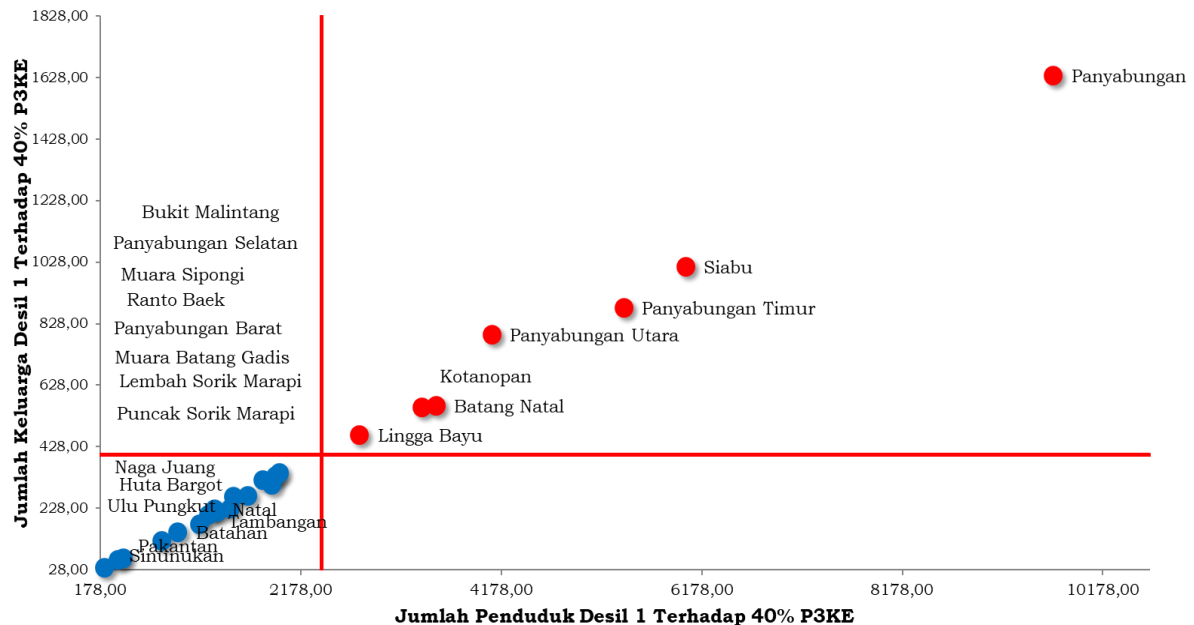
Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Siabu, Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Bukit Melintang
Prioritas 2	Kecamatan Panyabungan Barat
Prioritas 3	Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan Muara Sipongi
Prioritas 4	Kecamatan Pakantan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Natal, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Batahan dan Kecamatan Sinunukan



5.1.2. Kuadran wilayah prioritas jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Jumlah Keluarga Desil 1 Terhadap 40% P3KE
Kabupaten Mandailing Natal 2024

Sumber: P3KE 2024



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan jumlah keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

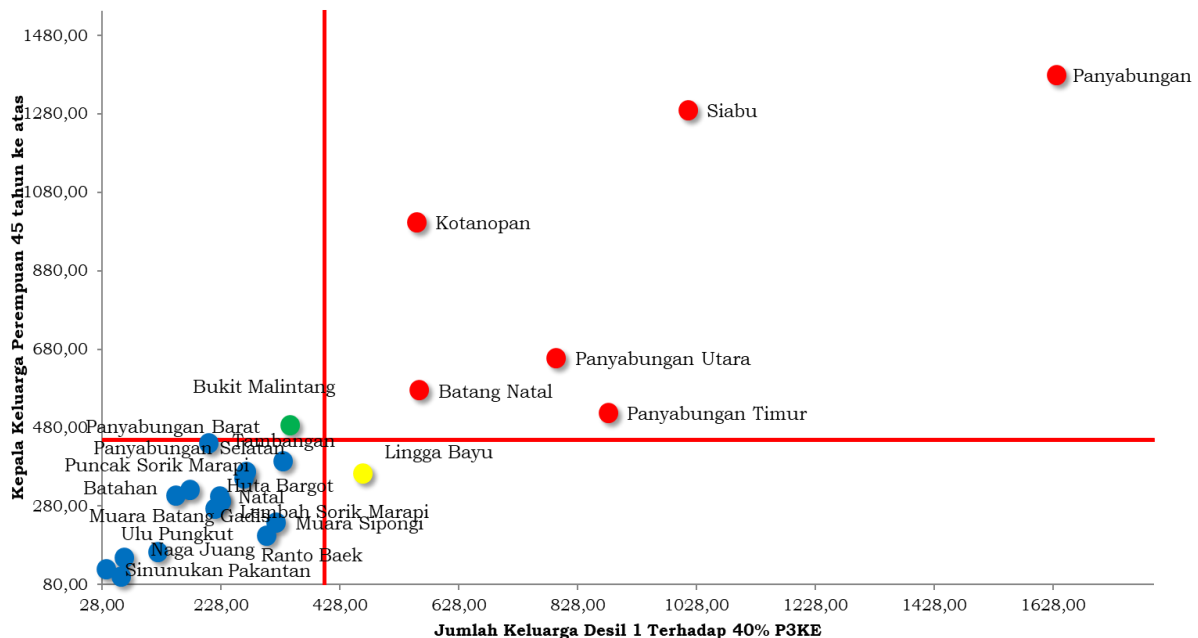
Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Siabu dan Kecamatan Batang Natal
Prioritas 2	Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargout, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Ulu Pungkut, dan Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Natal, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Batahan dan Kecamatan Sinunukan



5.1.3. Kuadran wilayah prioritas jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan jumlah kepala keluarga perempuan 45 tahun ke atas

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Jumlah Kepala Keluarga Perempuan 45 tahun ke atas Kabupaten Mandailing Natal 2024

Sumber: P3KE 2024



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan jumlah kepala keluarga perempuan 45 tahun ke atas didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

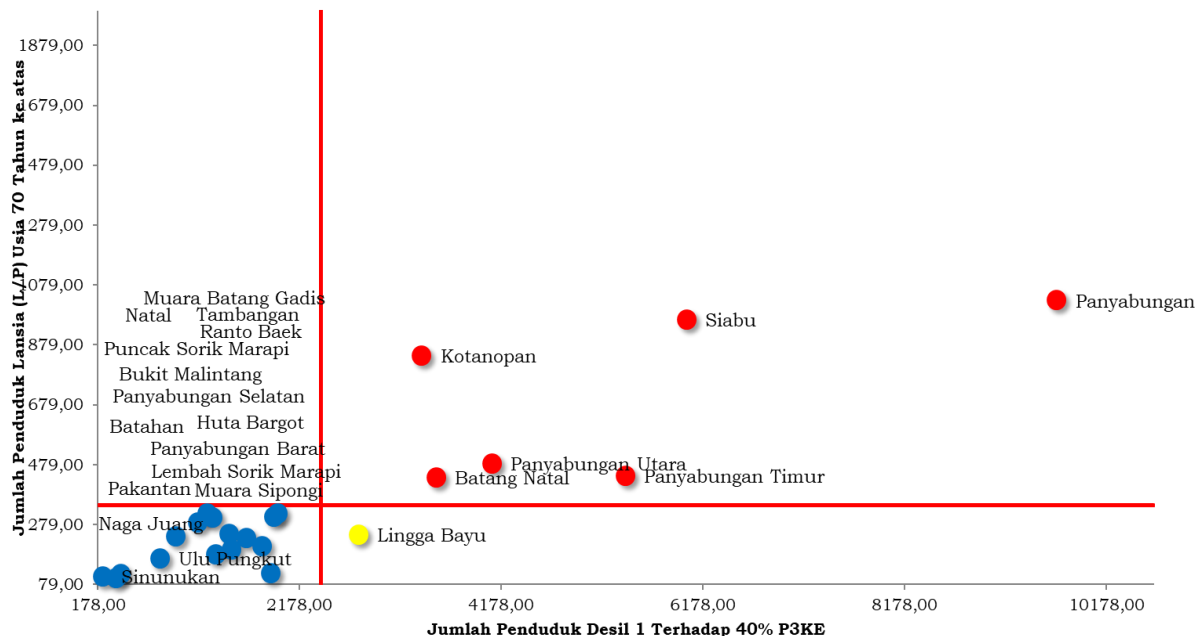
Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Batang Natal
Prioritas 2	Kecamatan Lingga Bayu
Prioritas 3	Kecamatan Bukit Melintang
Prioritas 4	Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Natal, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Lembah Sorik Marapi dan Kecamatan Ulu Pungkut



5.1.4. Kuadran wilayah prioritas jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah penduduk lansia usia 70 tahun ke atas

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Jumlah Penduduk Lansia (L/P) Usia 70 Tahun ke atas Kabupaten Mandailing Natal 2024

Sumber: P3KE 2024



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah penduduk lansia usia 70 tahun ke atas didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Siabu, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Batang Natal
Prioritas 2	Kecamatan Lingga Bayu
Prioritas 3	Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Natal, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Huta Bargout, Kecamatan Lembah Sorik Marapi dan Kecamatan Ulu Pungkut

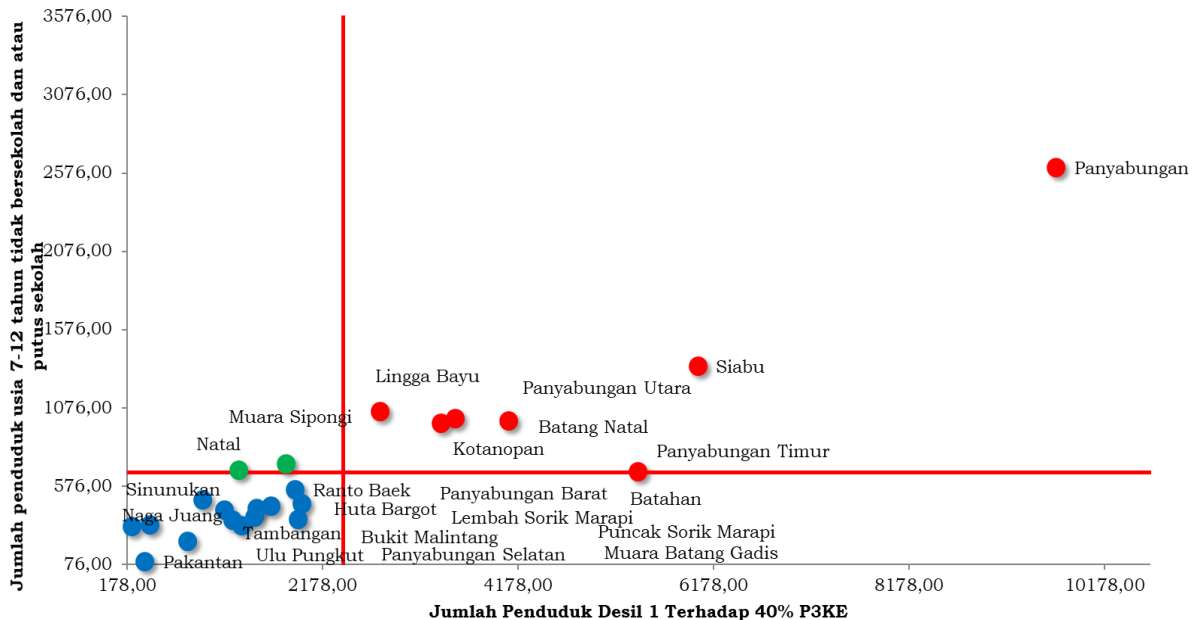


5.2. Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Pendidikan

5.2.1. Kuadran wilayah prioritas jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun tidak bersekolah dan atau putus sekolah Mandailing Natal 2024

Sumber: P3KE

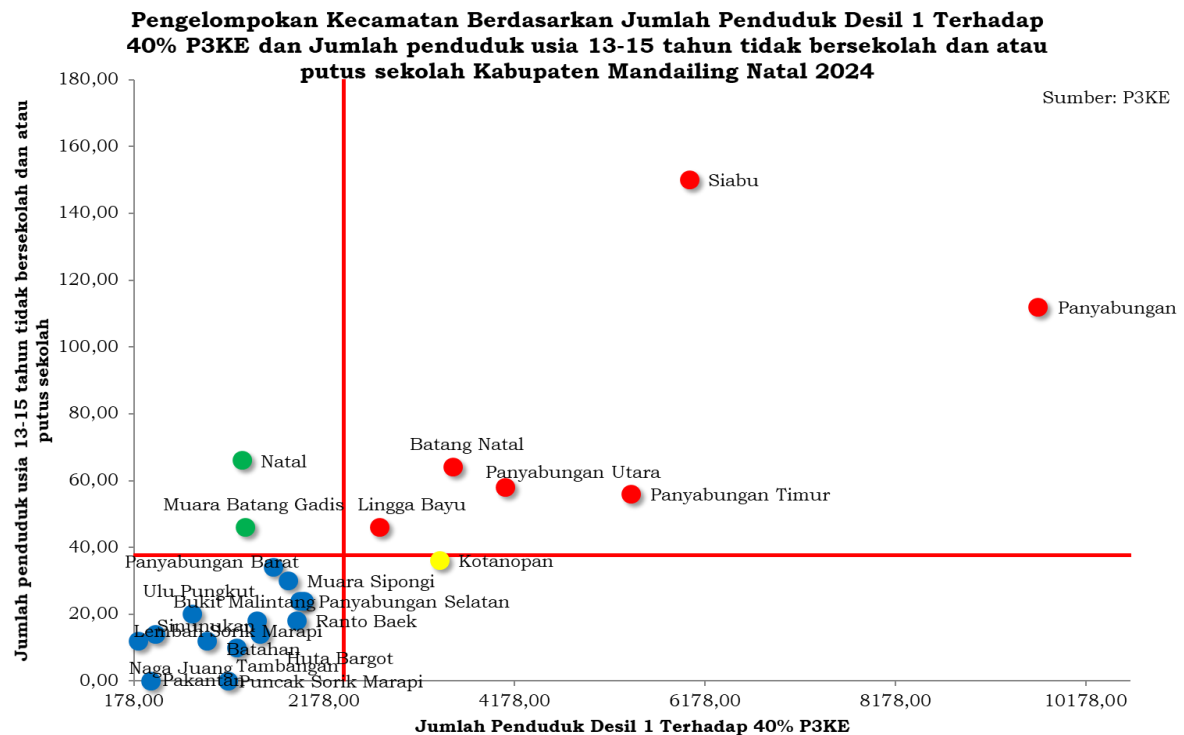


Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Siabu, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Lingga Bayu
Prioritas 2	Kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Natal
Prioritas 3	Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Lembah Sorik Marapi dan Kecamatan Ulu Pungut



5.2.2. Kuadran wilayah prioritas jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan Batang Natal
Prioritas 2	Kecamatan Kotanopan
Prioritas 3	Kecamatan Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis
Prioritas 4	Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Lembah Sorik Marapi dan Kecamatan Ulu Pungkut

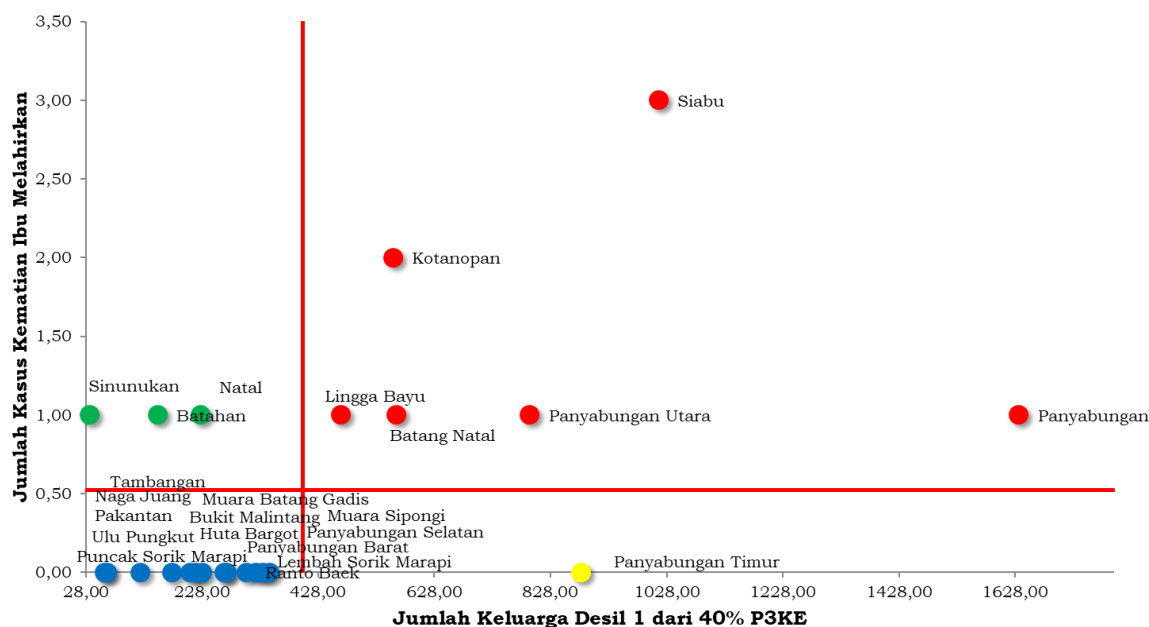


5.3 Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Kesehatan

5.3.1. Wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan intervensi jumlah kasus kematian ibu melahirkan

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 dari 40% P3KE dan Jumlah Kasus Ibu Melahirkan Kabupaten Mandailing Natal

Sumber: Data Dinkes 2023 dan Data P3KE, diolah



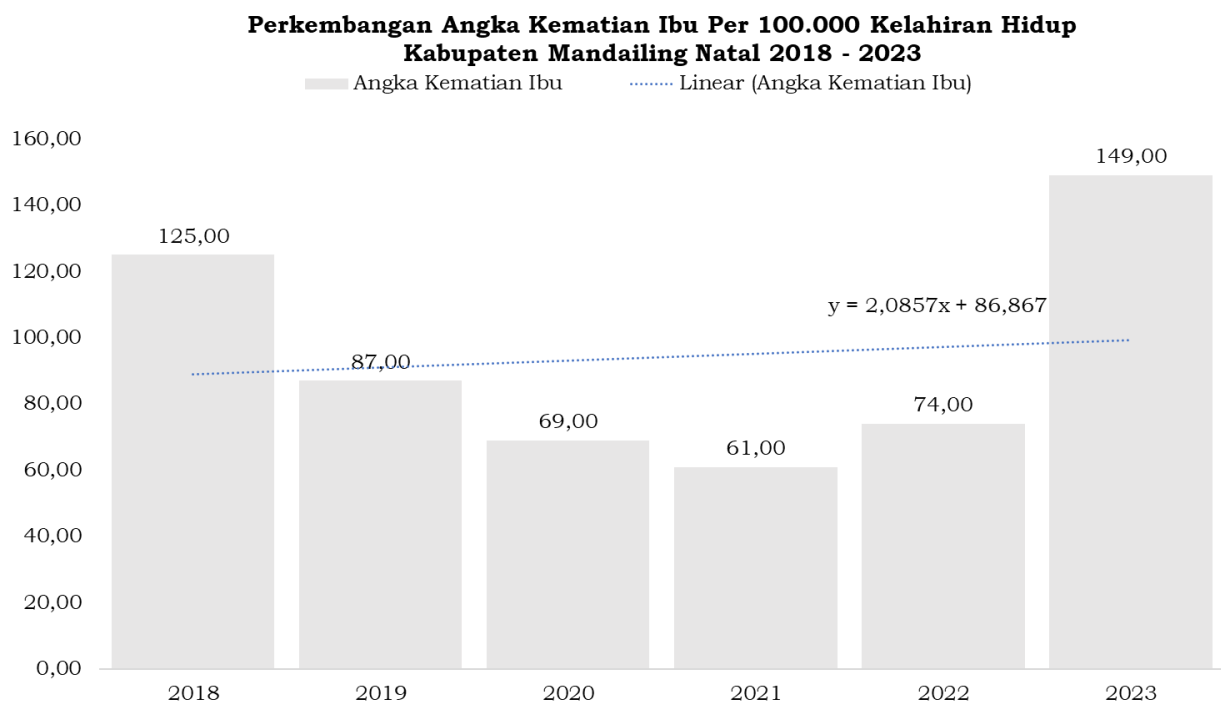
Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan intervensi jumlah kasus kematian ibu melahirkan didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Siabu, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Batang Natal
Prioritas 2	Kecamatan Panyabungan Timur
Prioritas 3	Kecamatan Natal, Kecamatan Batahan dan Kecamatan Sinunukan
Prioritas 4	Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Ulu Pungkut dan Kecamatan Muara Batang Gadis



Proses persalinan aman dan baik harus dibantu sepenuhnya oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter, bidan dan atau tenaga kesehatan lainnya), langkah ini perlu terus diupayakan untuk memastikan agar persalinan berjalan dengan proses yang aman dan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi

Capaian kinerja angka kematian ibu pada tahun 2023 adalah 149 per 100.000 kelahiran hidup, meningkatnya jika dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebesar 74 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini berarti capaian AKI di tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal yaitu sebesar 55,37 per 100.000 kelahiran hidup. Berikut disajikan perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Mandailing Natal dalam lima tahun terakhir.

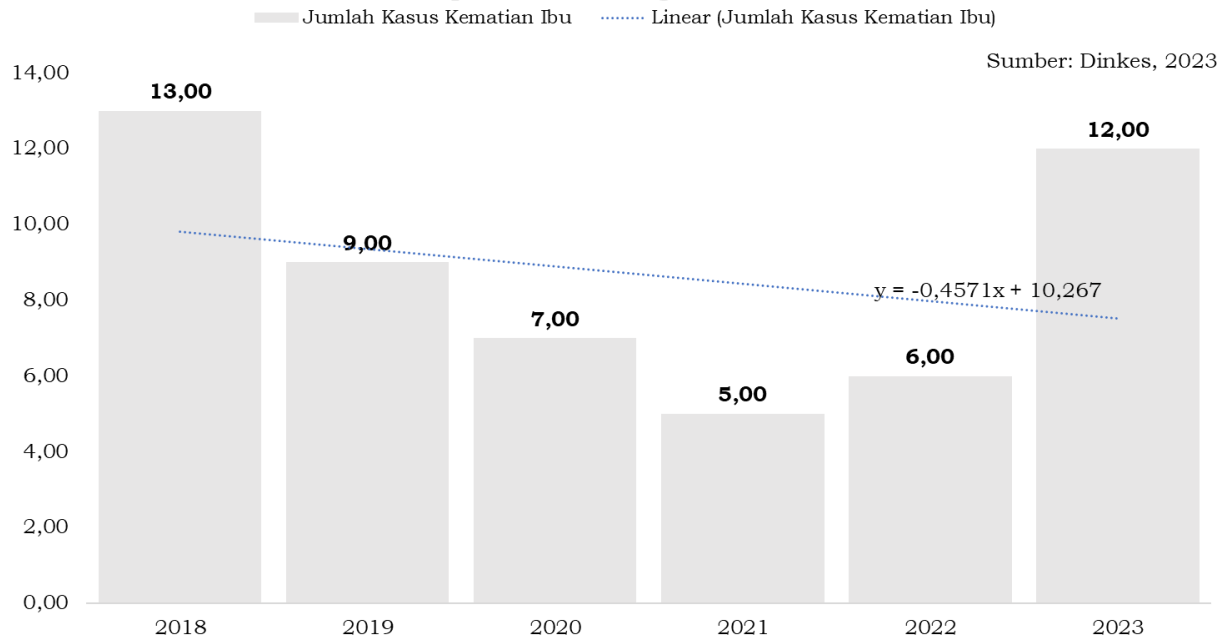


Sumber: Dinkes, 2023

Sedangkan jika dilihat berdasarkan jumlah kasus kejadian kematian ibu pada tahun 2023 adalah 12 kasus, meningkat jika dibandingkan 2022 (6 kasus), 2021 (5 kasus). Sepanjang tahun 2018 sampai 2023, kasus kematian ibu terus terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, 2018 terjadi (13 kasus), 2019 dengan 9 kasus dan tahun 2020 dengan 7 kasus kejadian kematian ibu di Kabupaten Mandailing Natal. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu sejak 2018-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

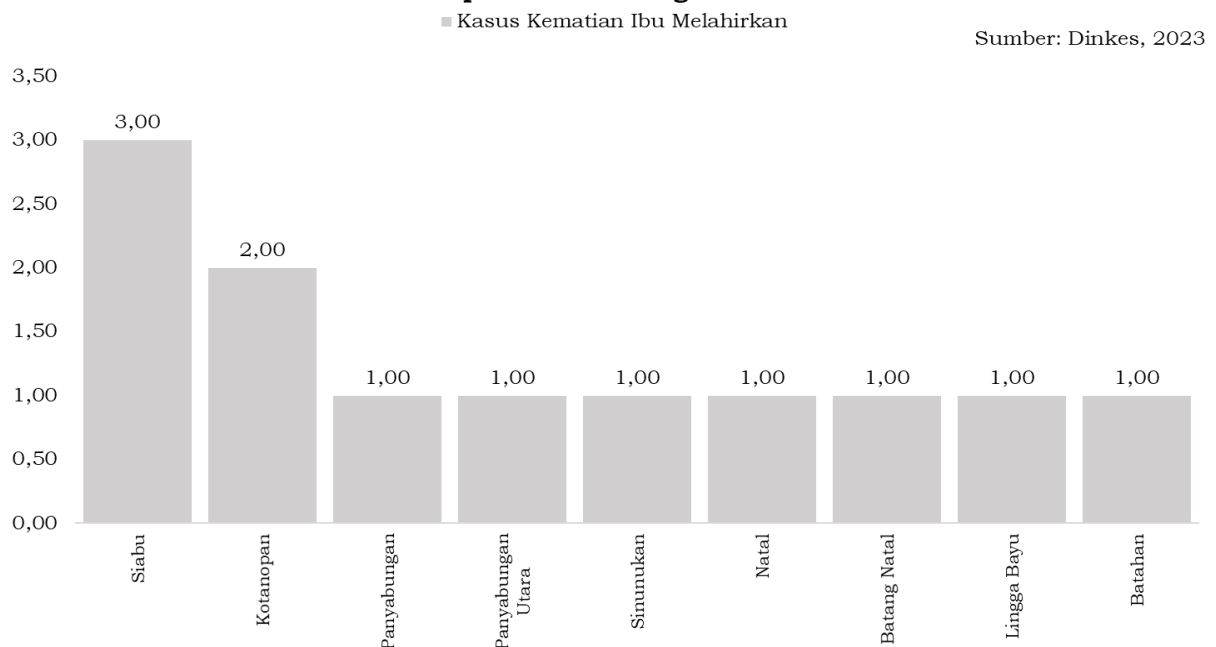


**Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu
Kabupaten Mandailing Natal 2018 - 2023**



Kasus kematian ibu tahun 2023 dengan 12 kasus kejadian, dengan rincian 3 kasus terjadi di Kecamatan Siabu, 2 kasus di Kecamatan Kotanopan, sedangkan 1 kasus terjadi Kecamatan Panyabungan, Panyabungan Utara, Sinunukan, Natal, Batang Natal, Lingga Bayu dan Kecamatan Batahan.

**Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan
Kabupaten Mandailing Natal 2023**





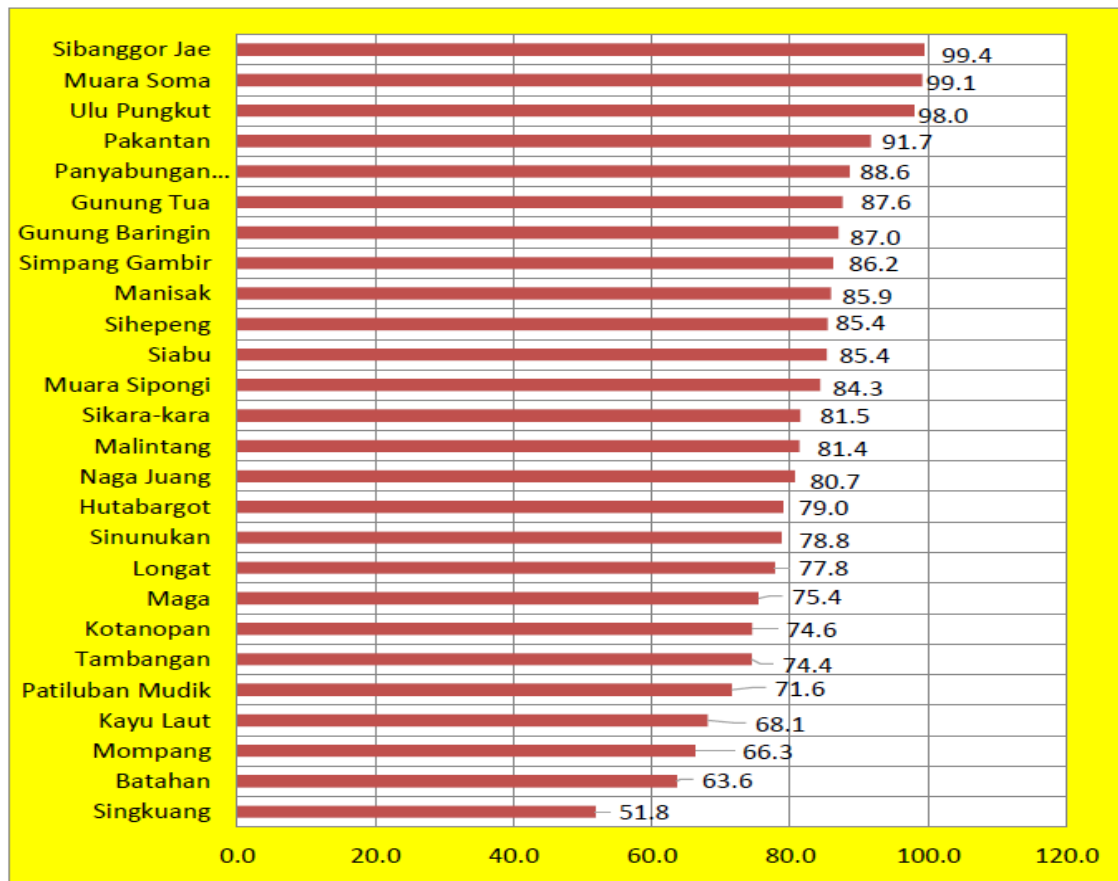
Jumlah kematian ibu di tahun 2023 adalah 12 kasus kematian, meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 6 kematian, lebih tinggi dari data yang tercatat pada tahun 2021 yaitu sebanyak 5 kematian. Dalam upaya pencapaian SDG's dan tujuan pembangunan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan ibu diprioritaskan dengan menurunkan angka kematian ibu dibawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan nifas. Berdasarkan kondisinya, jumlah kematian ibu terbanyak adalah pada ibu nifas sebanyak 4 kematian dan ibu bersalin sebanyak 2 kematian.

Dengan demikian, wilayah prioritas intervensi penanganan kasus kematian ibu adalah Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Natal. Kecamatan Panyabungan dan Panyabungan Utara juga merupakan kecamatan prioritas intervensi penduduk dan keluarga desil 1 P3KE.

Analisis kematian ibu yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan RI membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat/fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula dengan tempat/fasilitas, jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga akan semakin menekan risiko kematian ibu. Berdasarkan data tahun 2022, cakupan persalinan dilakukan fasilitas kesehatan dan di ditolong tenaga kesehatan terlatih Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan puskesmas dan kecamatan seperti terlihat dalam gambar berikut:



**CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
MENURUT PUSKESMAS DI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022**



Sumber: Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal, 2022

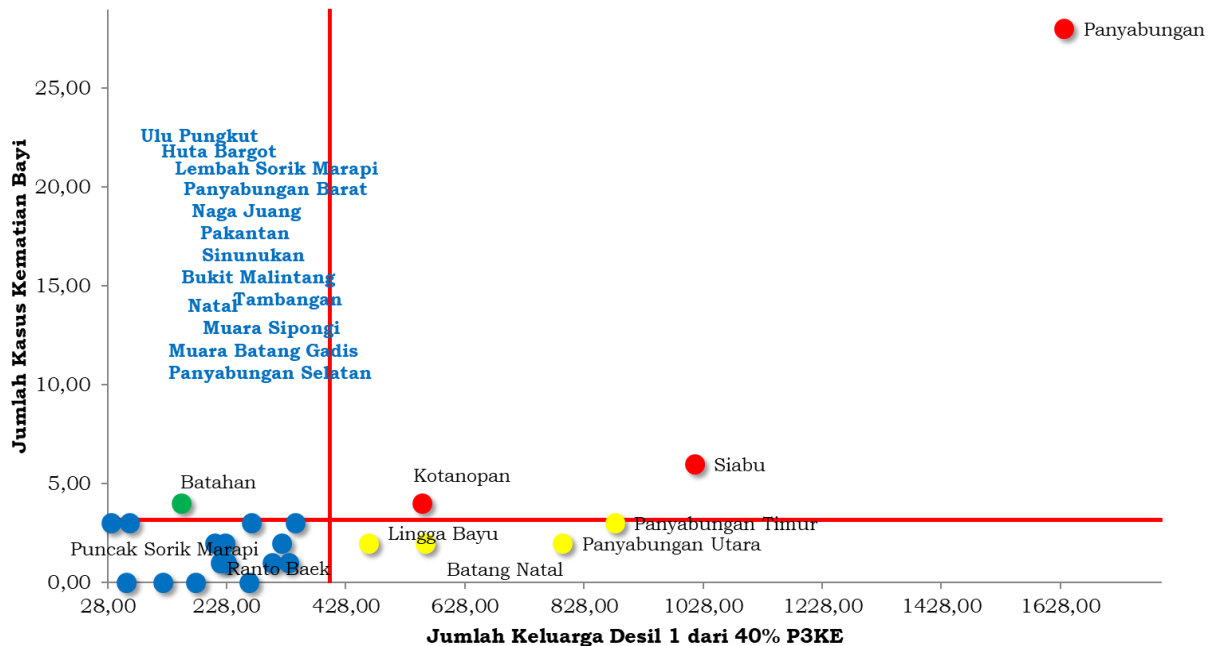
Puskesmas dalam kecamatan-kecamatan terkait dengan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan rendah perlu meningkatkan capaiannya kedepan.

5.3.2. Kuadran wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan intervensi jumlah kasus kematian bayi



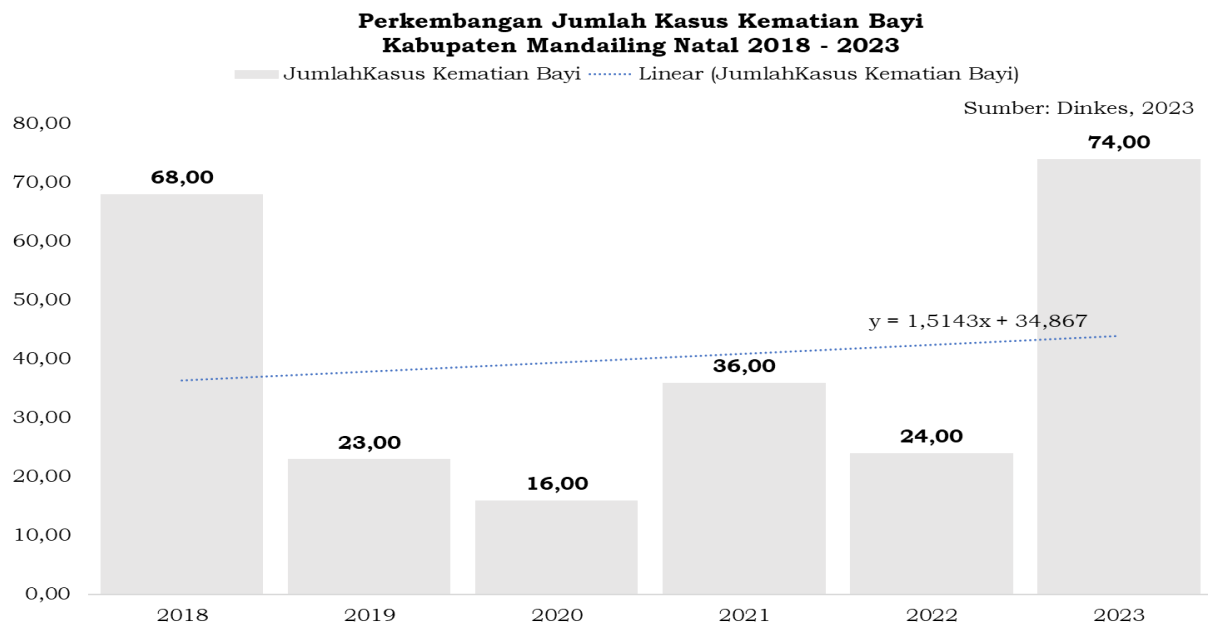
Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 dari 40% P3KE dan Jumlah Kasus Kematian Bayi Kabupaten Mandailing Natal

Sumber: Data Dinkes 2023 dan Data P3KE



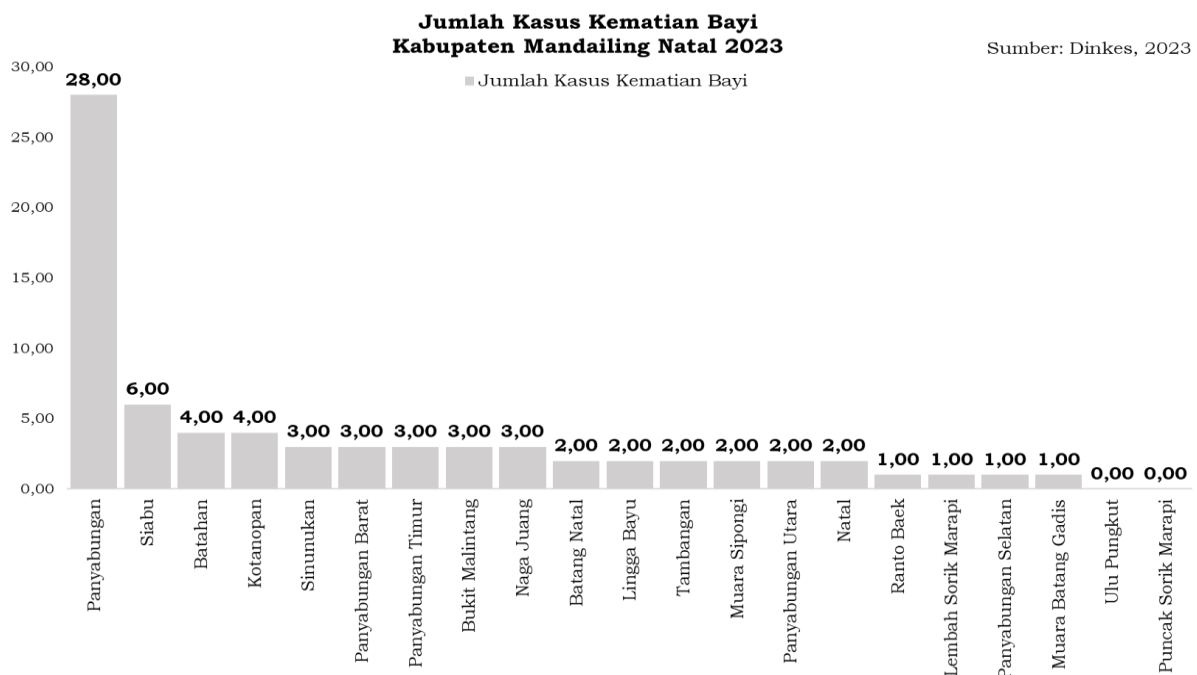
Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan jumlah kasus kematian bayi didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Siabu
Prioritas 2	Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan Batang Natal
Prioritas 3	Kecamatan Batahan
Prioritas 4	Kecamatan Natal, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Ulu Pungkut dan Kecamatan Muara Batang Gadis



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kematian bayi dalam 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2023 adalah 74 kasus, pada tahun 2022 dengan 24 kasus, tahun 2021 sebanyak 36 kasus, tahun 2020 terjadi 16 kasus, tahun 2019 yaitu 23 kasus, serta tahun 2018 sebanyak 68 kasus. AKB ini harus benar-benar menjadi perhatian khusus karena AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat.

Sepanjang tahun 2018-2023, tahun 2023 merupakan tahun tertinggi jumlah kasus kematian bayi sebanyak 74 kasus, dengan sebaran berdasarkan kecamatan tertinggi di Kecamatan Panyabungan 28 kasus, diikuti Kecamatan Siabu 6 kasus, Kecamatan Batahan 4 kasus, Kecamatan Kotanopan 4 kasus, selanjutnya Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Panyabungan Timur, Bukit Melintang dan Kecamatan Naga Juang masing-masing 3 kasus, selanjutnya Kecamatan Batang Natal, Lingga Bayu, Tambangan, Muara Sipongi, Panyabungan Utara dan Kecamatan Natal masing-masing 2 kasus, serta Kecamatan Ranto Baik, Lembah Sorik Marapi, Panyabungan Selatan, Muara Batang Gadis, Ulu Pungkut serta Puncak Sorik Marapi masing-masing 1 kasus kejadian kematian bayi.



5.3.3. Kuadran wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan intervensi jumlah kasus kematian balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun.

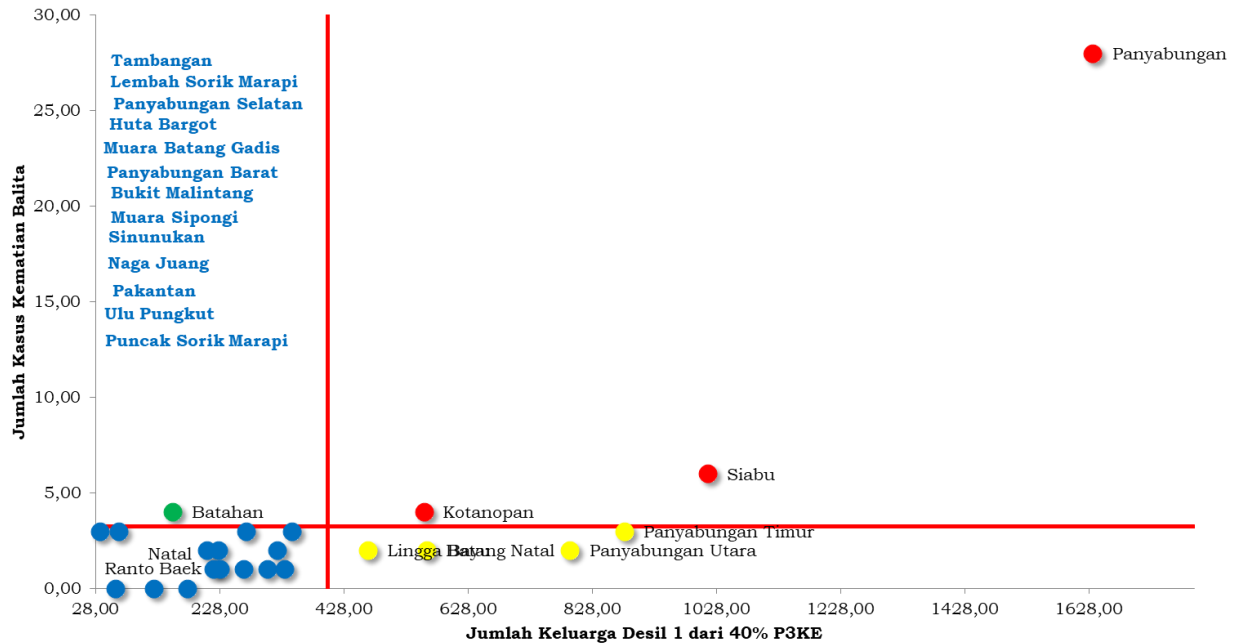
Berdasarkan data yang diperoleh, AKABA di tahun 2023 dilaporkan sebesar 9 per 1.000 kelahiran hidup, artinya ada 9 balita yang meninggal dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 3 per 1.000 kelahiran hidup.



RPKD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 - 2026

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 dari 40% P3KE dan Jumlah Kasus Kematian Balita Kabupaten Mandailing Natal

Sumber: Data Dinkes 2023 dan Data P3KE, Diolah

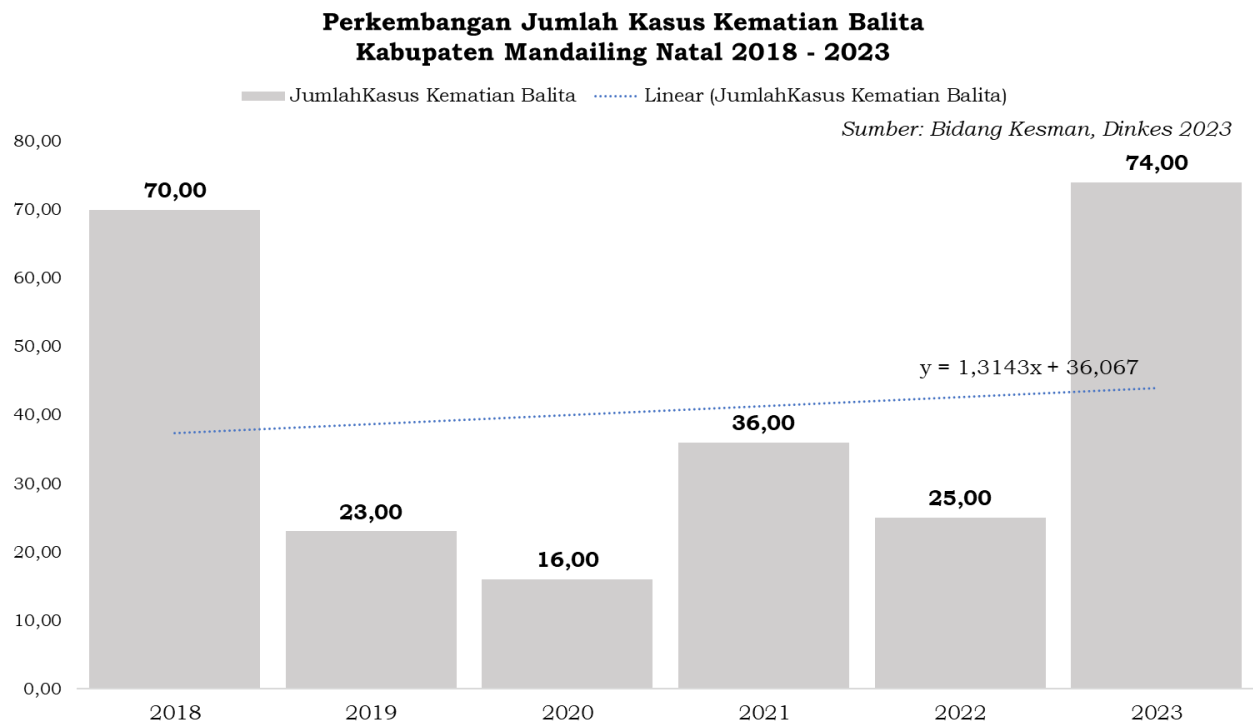


Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan kasus kematian balita didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Siabu
Prioritas 2	Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan Batang Natal
Prioritas 3	Kecamatan Batahan
Prioritas 4	Kecamatan Natal, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Huta Barget, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Ulu Pungkut dan Kecamatan Muara Batang Gadis



Perkembangan jumlah kematian balita di Kabupaten Mandailing Natal sepanjang 2018 -2023 (6 tahun) terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

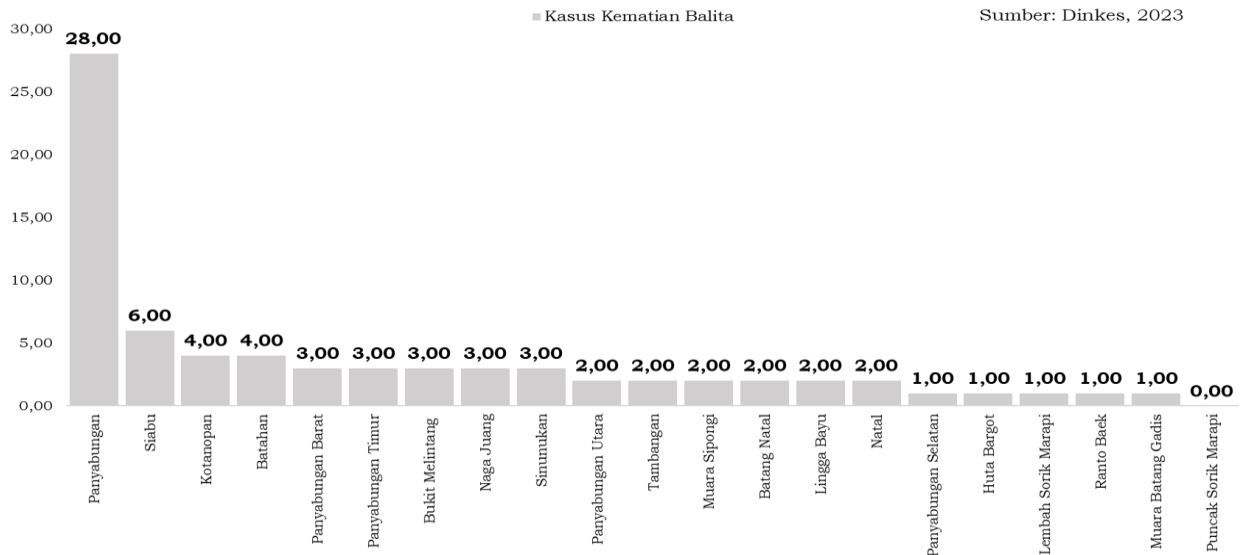


Sepanjang tahun 2018-2023, kasus kematian balita Kabupaten Mandailing Natal fluktuatif meningkat, sepanjang 6 tahun terakhir, capaian tahun 2023 merupakan kejadian tertinggi kasus kematian balita mencapai 74 kasus, dengan sebaran kecamatan tertinggi di Kecamatan Panyabungan 28 kasus, diikuti Kecamatan Siabu 6 kasus, Kecamatan Batahan 4 kasus, Kecamatan Kotanopan 4 kasus, selanjutnya Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Naga Juang dan Kecamatan Sinunukan masing-masing 3 kasus, selanjutnya Kecamatan Panyabungan Utara, Tambangan, Muara Sipongi, Batang Natal, Lingga Bayu dan Kecamatan Natal masing-masing 2 kasus, serta Kecamatan Panyabungan Selatan, Huta Barget, Lembah Sorik Marapi, Ranto Baek, Muara Batang Gadis masing-masing 1 kasus kejadian kematian balita, sedangkan 0 kasus kejadian kematian balita adalah Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Kecamatan Ulu Pungkut.



RPKD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 - 2026

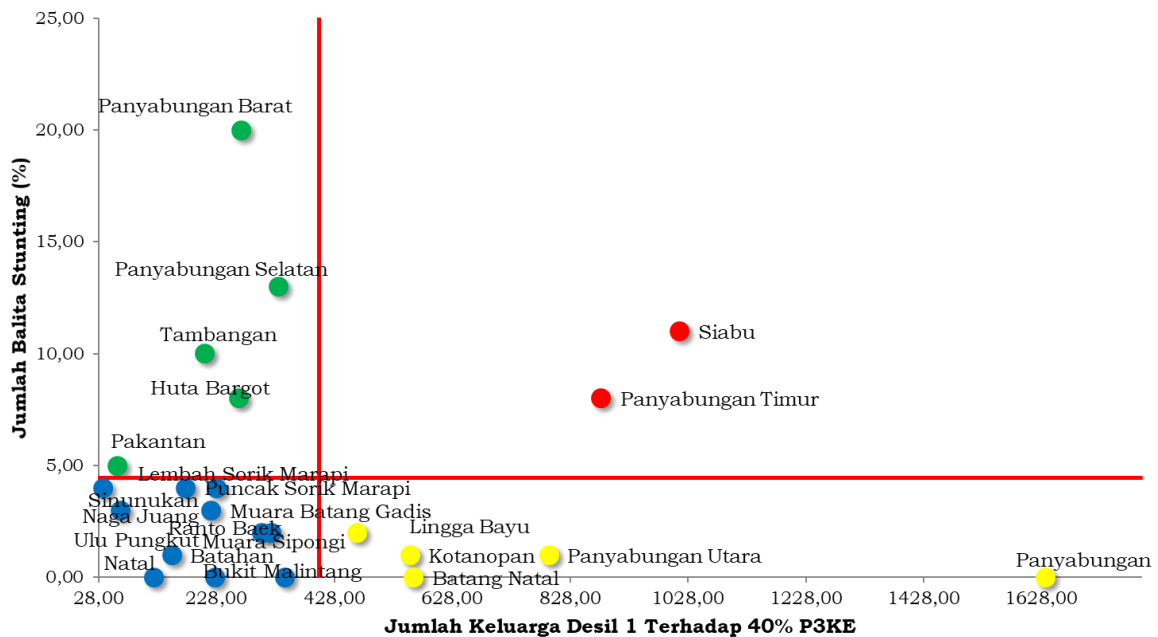
**Jumlah Kasus Kematian Balita
Menurut Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal 2023**



5.3.4. Kuadran wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan jumlah balita stunting

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Jumlah Balita Stunting (%) Kabupaten Mandailing Natal 2023

Sumber: Data P3KE dan Dinkes Madina, diolah



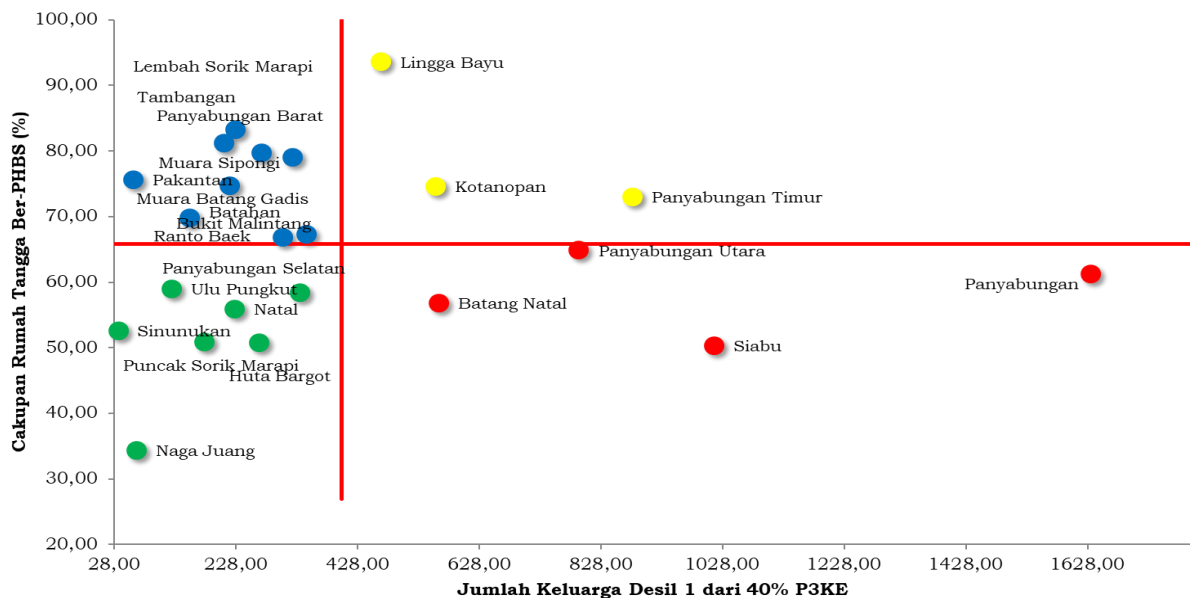
Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan jumlah balita stunting didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan Timur dan Kecamatan Siabu
Prioritas 2	Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan
Prioritas 3	Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan Barat dan Kecamatan Tambangan
Prioritas 4	Kecamatan Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Lembah Sorik Marapi dan Kecamatan Ulu Pungkut

5.3.5. Kuadran wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan cakupan rumah tangga ber-PBHS

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 dari 40% P3KE dan Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS (%) Kabupaten Mandailing Natal

Sumber: Data Dinkes 2023 dan Data P3KE, Diolah

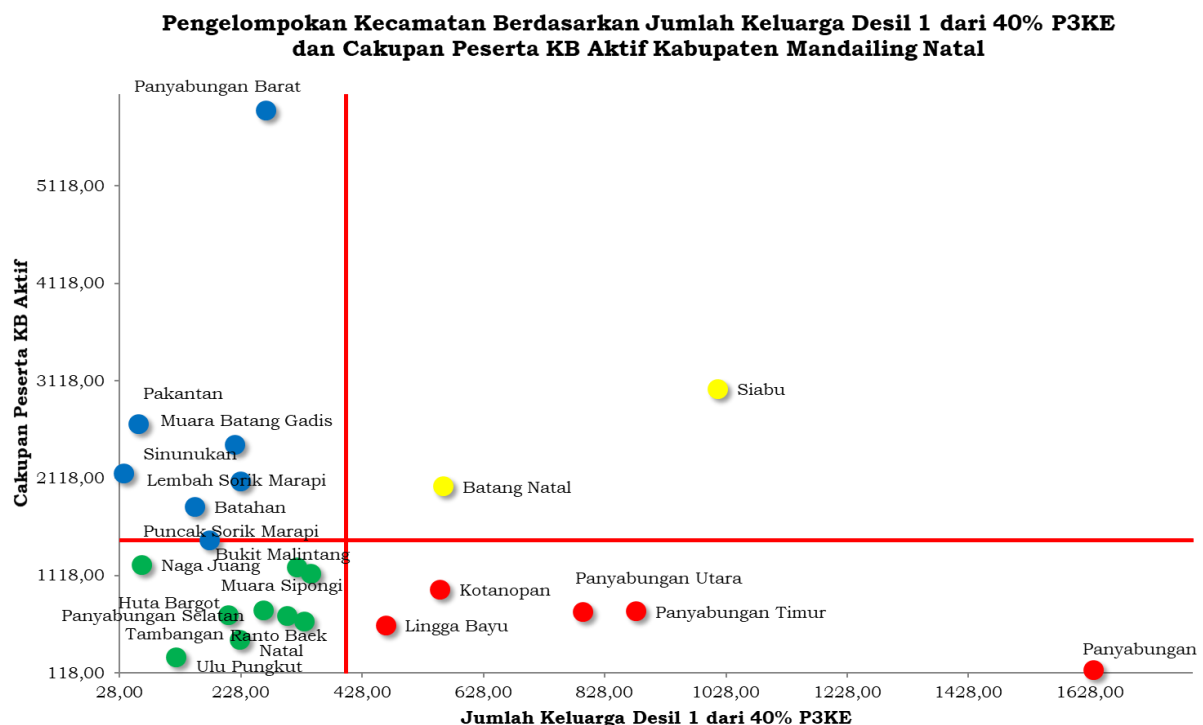


Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan cakupan rumah tangga ber-PBHS didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Prioritas 1	Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan dan Kecamatan Siabu
Prioritas 2	Kecamatan Panyabungan Timur Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Lingga Bayu
Prioritas 3	Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Natal dan Kecamatan Ulu Pungkut
Prioritas 4	Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Barat dan Kecamatan Tambangan

5.3.6. Kuadran wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan cakupan peserta KB aktif



Sumber: Data Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 2023 dan Data P3KE, diolah

Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan cakupan peserta KB aktif didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

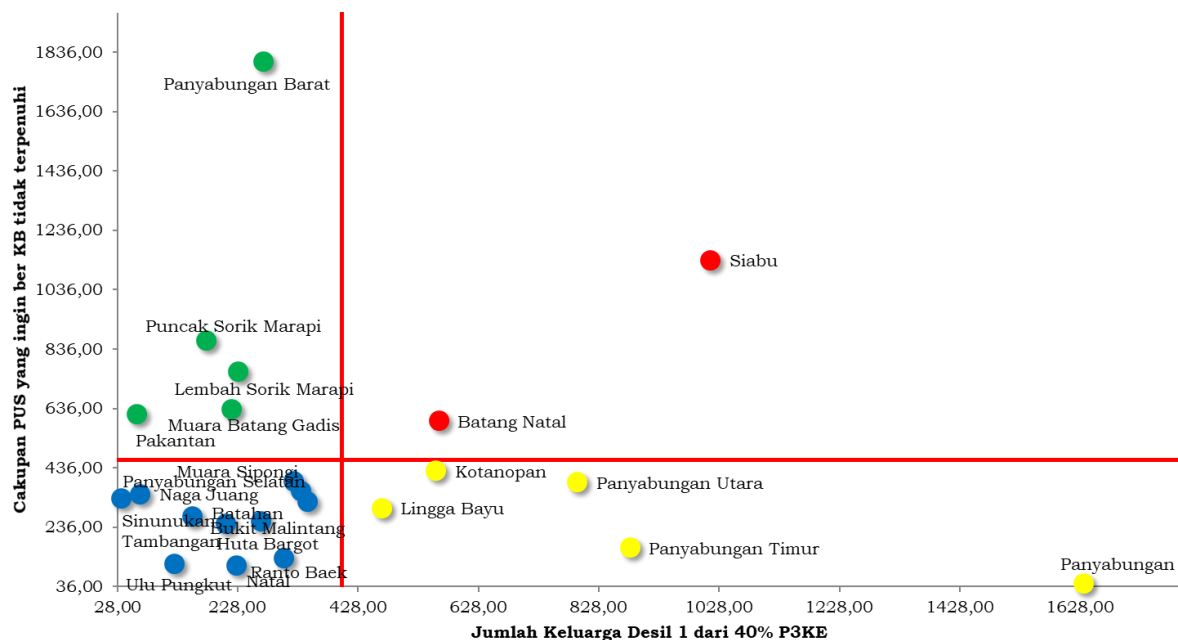


Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Timur Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Lingga Bayu
Prioritas 2	Kecamatan Siabu dan Kecamatan Batang Natal
Prioritas 3	Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Natal dan Kecamatan Ulu Pungkut
Prioritas 4	Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Barat dan Kecamatan Tambangan

5.3.7. Kuadran wilayah prioritas jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 dari 40% P3KE dan Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi Mandailing Natal

Sumber: Data Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dan Data P3KE, Diolah



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



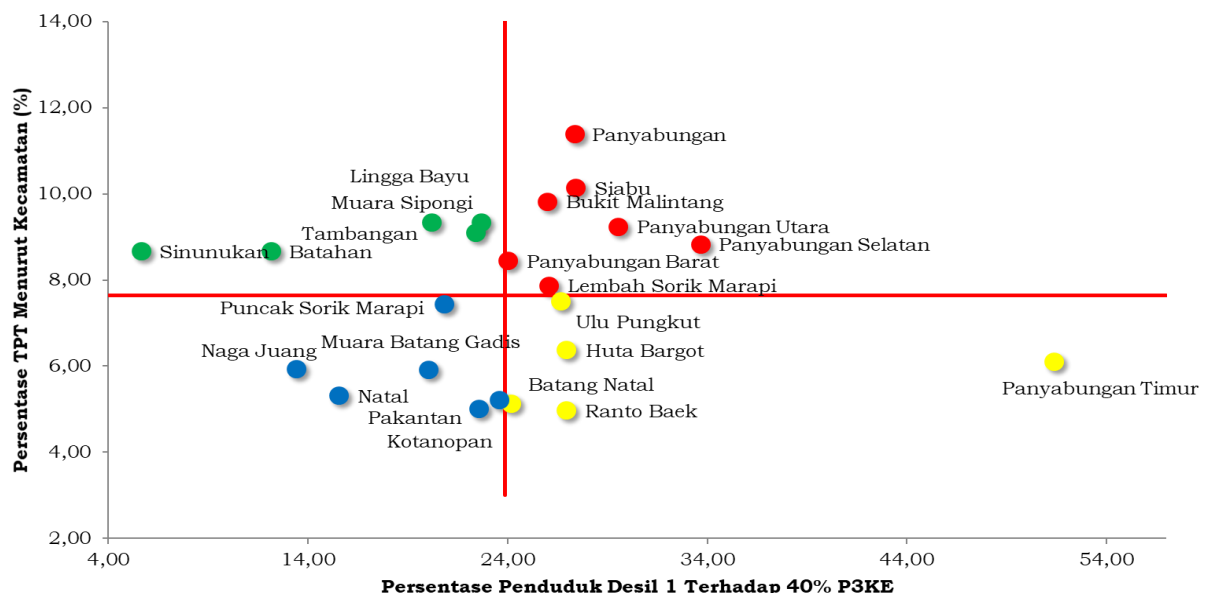
Prioritas 1	Kecamatan Siabu dan Kecamatan Batang Natal
Prioritas 2	Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Timur Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Lingga Bayu
Prioritas 3	Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kecamatan Pakantan
Prioritas 4	Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Natal dan Kecamatan Ulu Pungkut

5.4 Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

5.4.1. Kuadran wilayah prioritas persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan TPT menurut kecamatan

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Persentase Penduduk Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase TPT Menurut Kecamatan (%) Kabupaten Mandailing Natal

Sumber: Data BPS dan Data P3KE di olah



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan TPT menurut kecamatan didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

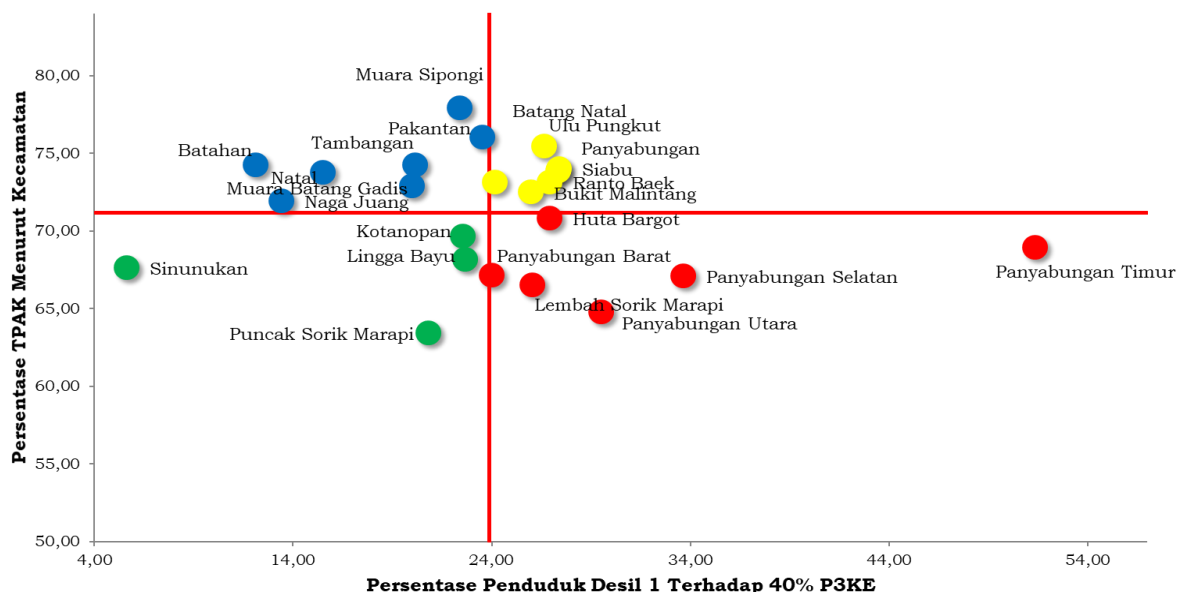


Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Panyabungan Barat dan Kecamatan Bukit Melintang
Prioritas 2	Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Ulu Pungkut dan Kecamatan Ranto Baik
Prioritas 3	Kecamatan Natal, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Tambangan
Prioritas 4	Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Kecamatan Naga Juang

5.4.2. Kuadran wilayah prioritas persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut kecamatan

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Persentase Penduduk Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase TPAK Menurut Kecamatan (%) Kabupaten Mandailing Natal

Sumber: Data BPS dan P3KE diolah



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut kecamatan didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

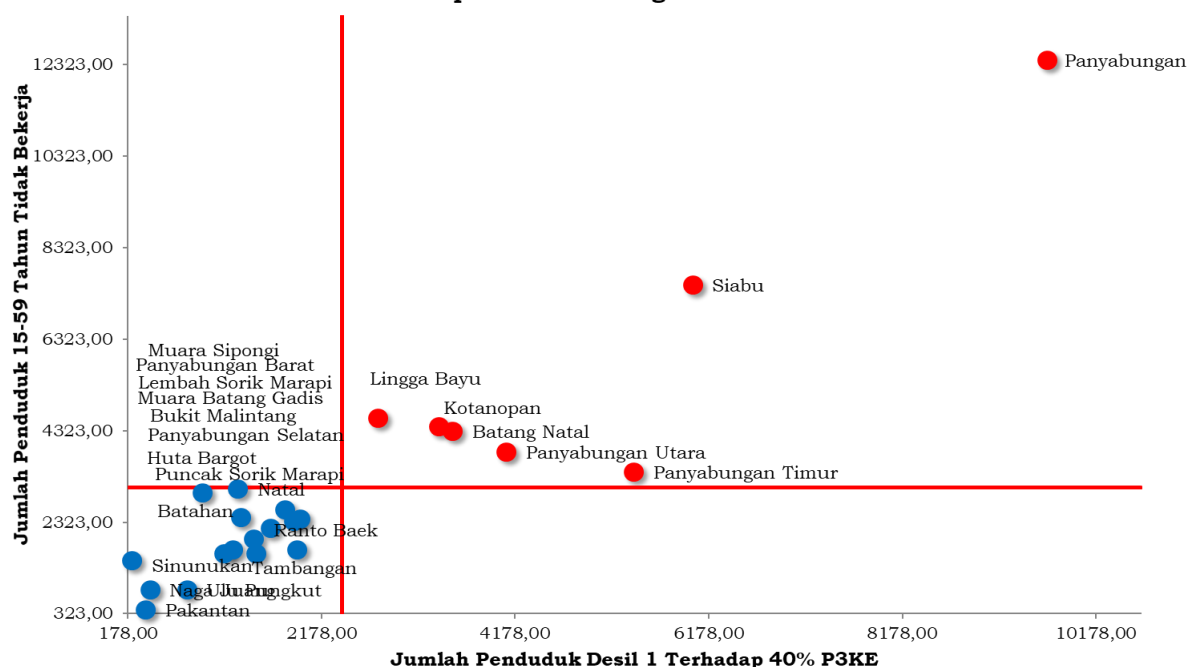


Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Panyabungan Barat dan Kecamatan Huta Bargot
Prioritas 2	Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Panyabungan dan Kecamatan Siabu
Prioritas 3	Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Muara Sipongi
Prioritas 4	Kecamatan Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Batahan, Kecamatan Tambangan dan Kecamatan Naga Juang

5.4.3. Kuadran wilayah prioritas persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan penduduk usia 15-59 tahun tidak bekerja

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Jumlah Penduduk Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja Kabupaten Mandailing Natal 2024

Sumber: P3KE



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan penduduk usia 15-59 tahun tidak bekerja didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

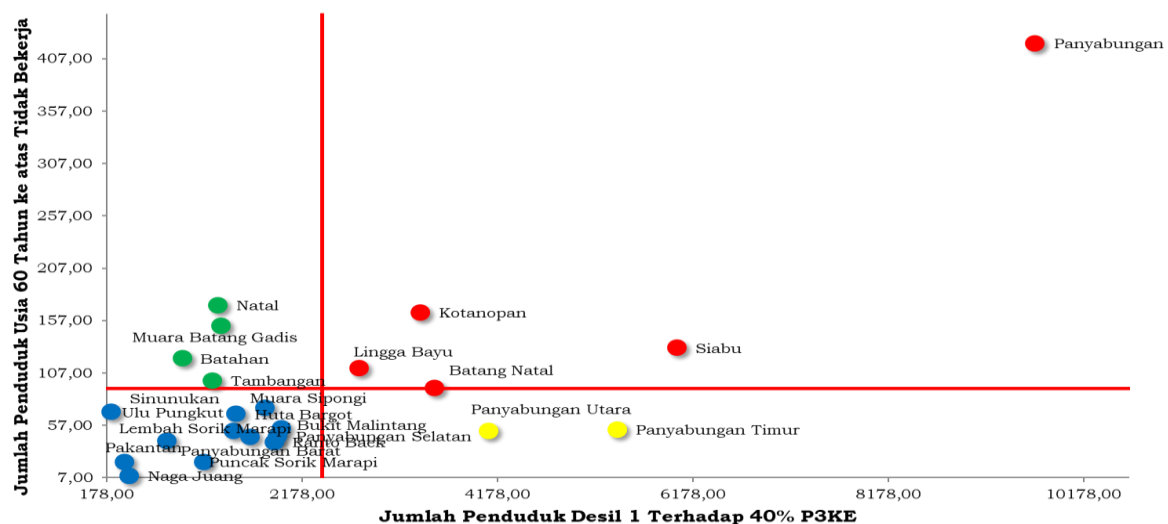


Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Panyabungan Timur dan Kecamatan Batang Natal
Prioritas 2	Kecamatan Huta Barget, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Natal, Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Kecamatan Naga Juang

5.4.4. Kuadran wilayah prioritas persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan penduduk usia 60 tahun ke atas tidak bekerja

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Jumlah Penduduk Usia 60 Tahun ke atas Tidak Bekerja Kabupaten Mandailing Natal 2024

Sumber: P3KE



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan penduduk usia 60 tahun ke atas tidak bekerja didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Batang Natal
Prioritas 2	Kecamatan Panyabungan Timur dan Kecamatan Panyabungan Utara



Prioritas 3	Kecamatan Natal, Kecamatan Batahan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Muara Batang Gadis
Prioritas 4	Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Kecamatan Naga Juang

5.5 Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Infrastruktur Dasar

5.5.1. Kuadran wilayah prioritas persentase keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE dan penduduk 40% P3KE berdasarkan kepemilikan rumah milik sendiri

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Penduduk 40% P3KE Berdasarkan Kepemilikan Rumah Milik Sendiri Kabupaten Mandailing Natal 2024



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara persentase keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE dan penduduk 40% P3KE berdasarkan kepemilikan rumah milik sendiri didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

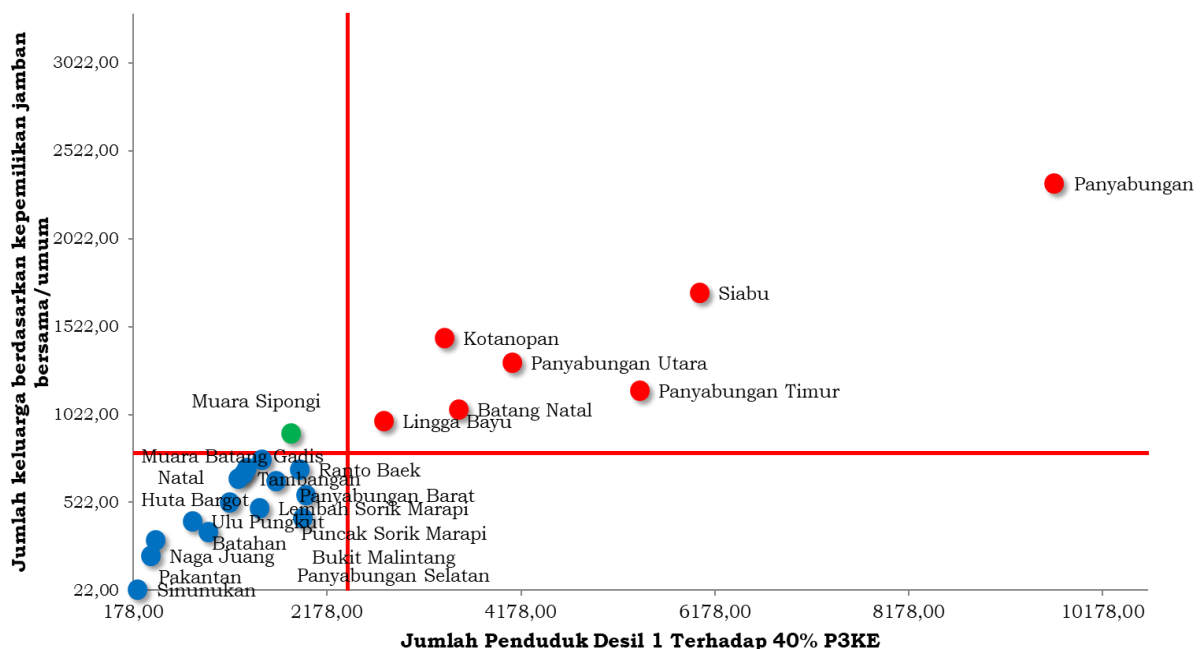


Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Panyabungan Timur dan Kecamatan Panyabungan Utara
Prioritas 2	Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Huta Barget, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Natal, Kecamatan Batahan, Kecamatan Tambangan dan Kecamatan Muara Batang Gadis

5.5.2. Kuadran wilayah prioritas persentase keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah keluarga berdasarkan jamban bersama/umum

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Jumlah Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Jamban Bersama/Umum Mandailing Natal 2024

Sumber: P3KE 2024



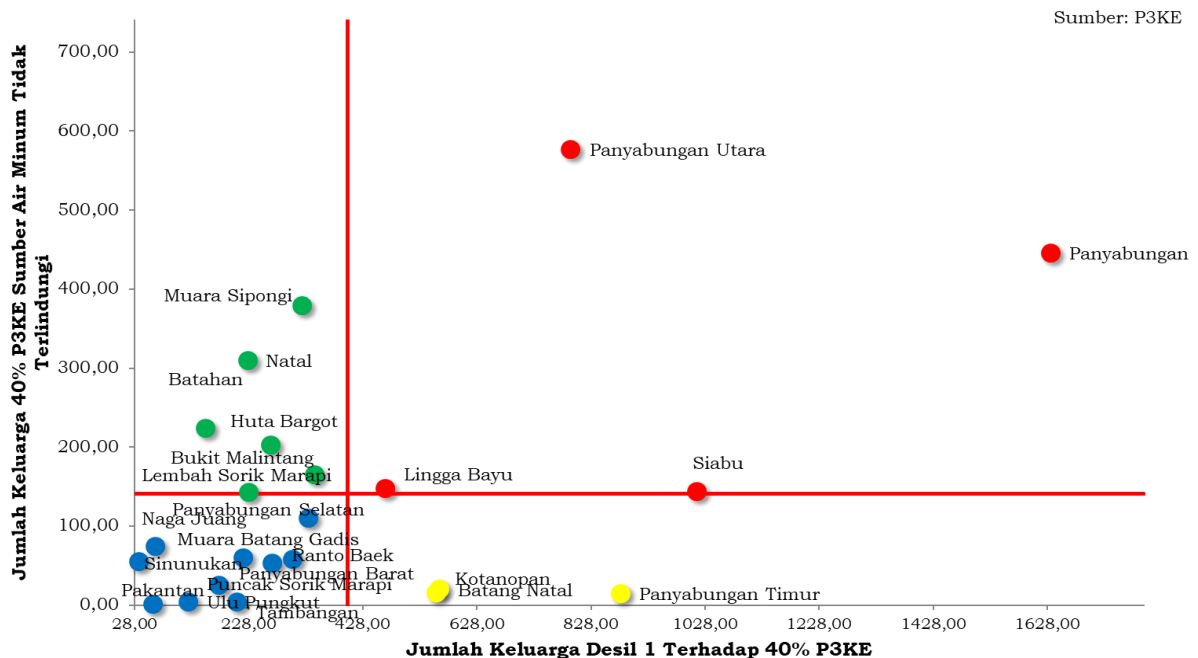
Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara persentase keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE dan jumlah keluarga berdasarkan jamban bersama/umum didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Panyabungan Timur dan Kecamatan Panyabungan Utara
Prioritas 2	Kecamatan Muara Sipongi
Prioritas 3	Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Natal, Kecamatan Batahan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Muara Batang Gadis

5.5.3. Kuadran wilayah prioritas persentase keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE dan 40% penduduk P3KE dengan sumber air minum tidak terlindungi

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Jumlah Keluarga 40% P3KE Sumber Air Minum Tidak Terlindungi Kabupaten Mandailing Natal 2024



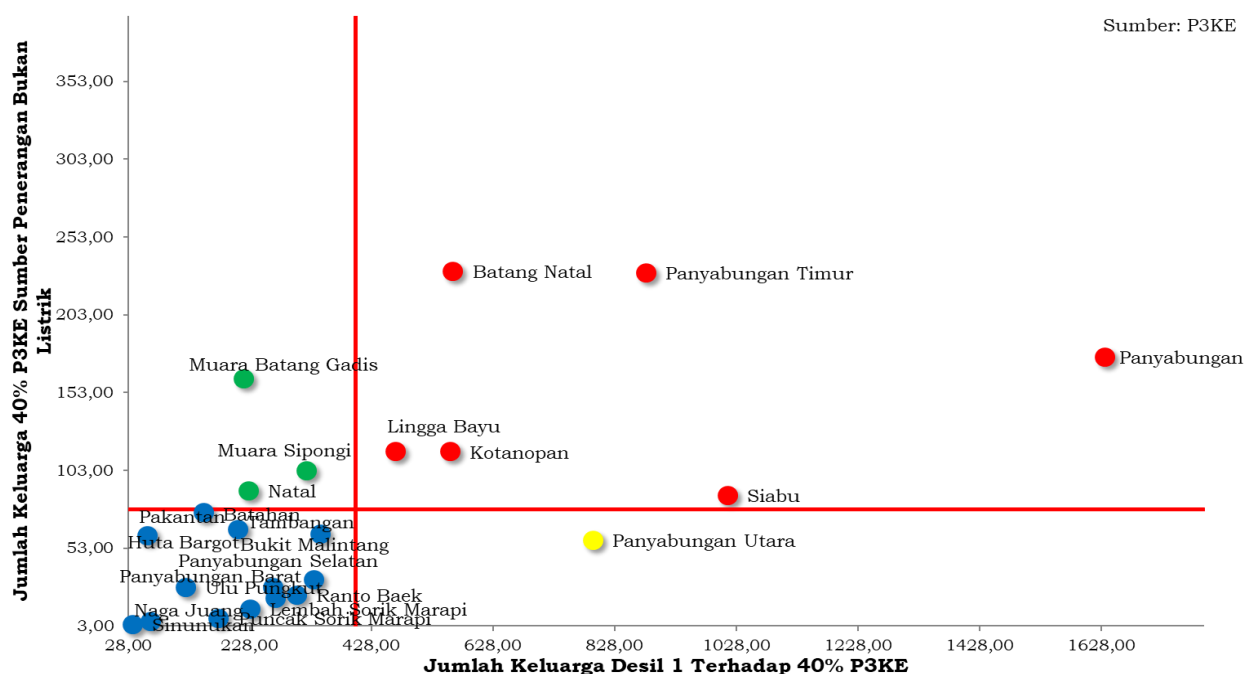
Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara persentase keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE dan 40% penduduk P3KE dengan sumber air minum tidak terlindungi didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Lingga Bayu
Prioritas 2	Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabungan Timur
Prioritas 3	Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Natal, Kecamatan Batahan, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Huta Bargot dan Kecamatan Lembah Sorik Marapi
Prioritas 4	Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Tambangan dan Kecamatan Muara Batang Gadis

5.5.4. Kuadran wilayah prioritas keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE dan 40% penduduk P3KE sumber penerangan bukan listrik

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Jumlah Keluarga 40% P3KE Sumber Penerangan Utama Bukan Listrik Kabupaten Mandailing Natal 2024



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE dan 40% penduduk P3KE sumber penerangan bukan listrik didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



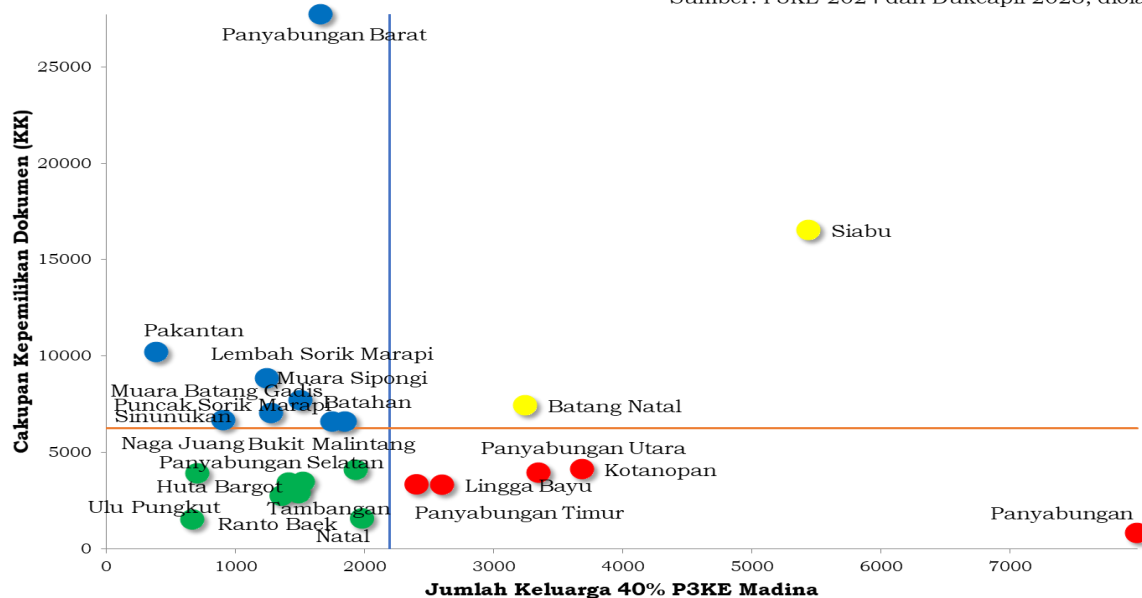
Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabungan Timur
Prioritas 2	Kecamatan Panyabungan Utara
Prioritas 3	Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Natal
Prioritas 4	Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Batahan, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Huta Bargot dan Kecamatan Lembah Sorik Marapi

5.6 Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Bidang Strategis Lainnya

5.6.1. Kuadran wilayah prioritas keluarga 40% P3KE dan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (KK)

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Keluarga 40% P3KE Terhadap Cakupan Kepemilikan Dokumen (KK) Kabupaten Mandailing Natal

Sumber: P3KE 2024 dan Dukcapil 2023, diolah



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara keluarga 40% P3KE dan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (KK) didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

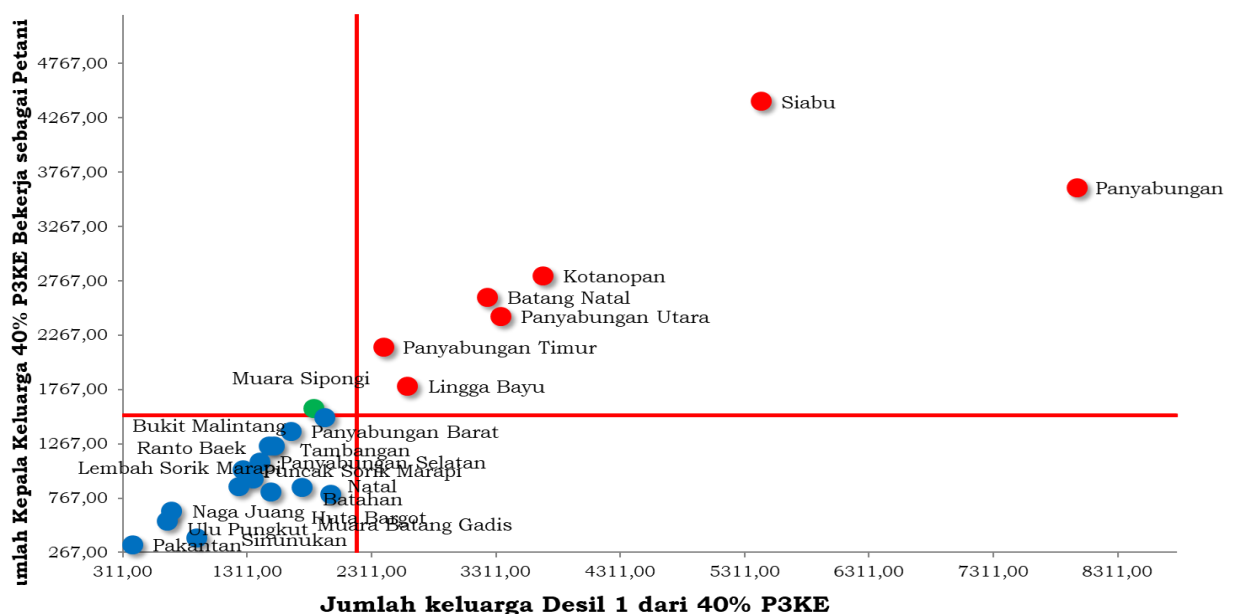


Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabungan Timur
Prioritas 2	Kecamatan Panyabungan Utara
Prioritas 3	Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Natal
Prioritas 4	Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Batahan, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Huta Bargot dan Kecamatan Lembah Sorik Marapi

5.6.2. Kuadran wilayah prioritas keluarga 40% P3KE dan jumlah kepala keluarga bekerja sebagai petani

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah 40% Keluarga P3KE dan Jumlah Kepala Keluarga 40% P3KE Bekerja sebagai Petani Kabupaten Mandailing Natal 2024

Sumber: P3KE 2024



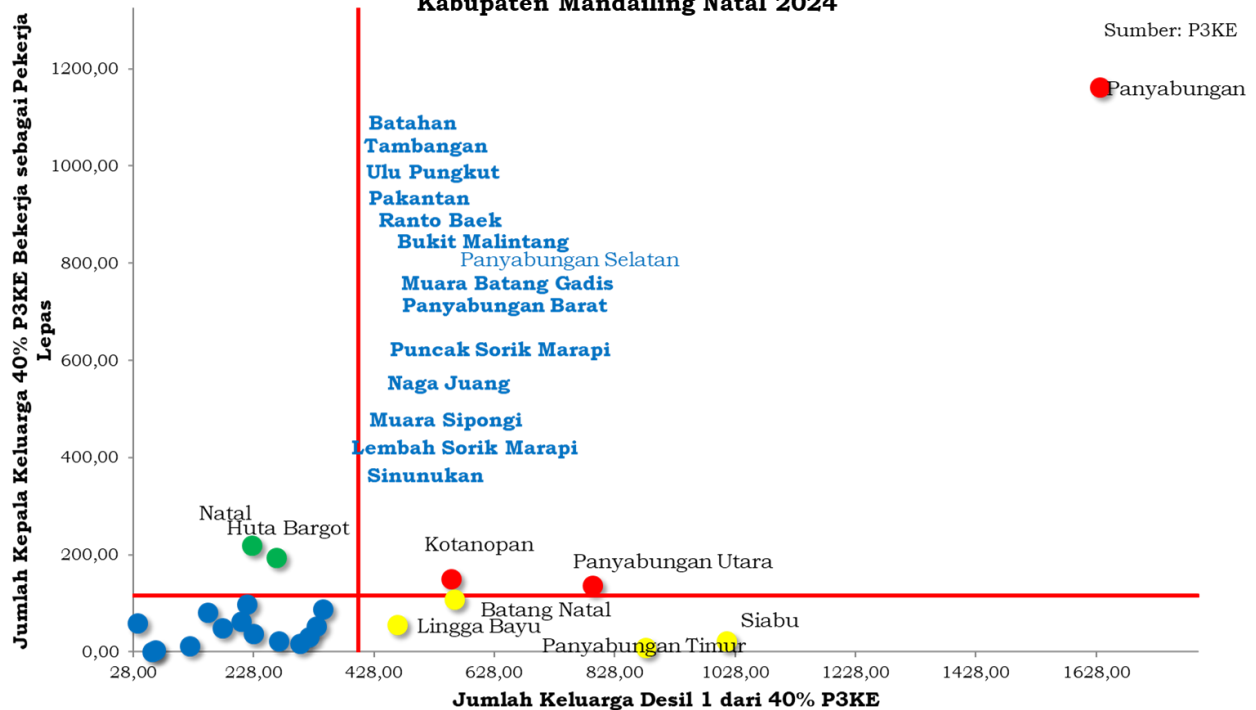
Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara keluarga 40% P3KE dan jumlah kepala keluarga (L/P) bekerja sebagai petani didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Utara
Prioritas 2	Kecamatan Muara Sipongi
Prioritas 3	Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Natal, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Batahan, Kecamatan Bukit Melintang, Kecamatan Huta Bargot dan Kecamatan Lembah Sorik Marapi

5.6.3. Kuadran wilayah prioritas keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan jumlah kepala keluarga bekerja pekerja lepas

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 dari 40% P3KE dan Jumlah Kepala keluarga (L/P) 40% P3KE Bekerja sebagai pekerja lepas Kabupaten Mandailing Natal 2024



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan jumlah kepala keluarga (L/P) bekerja sebagai pekerja lepas didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

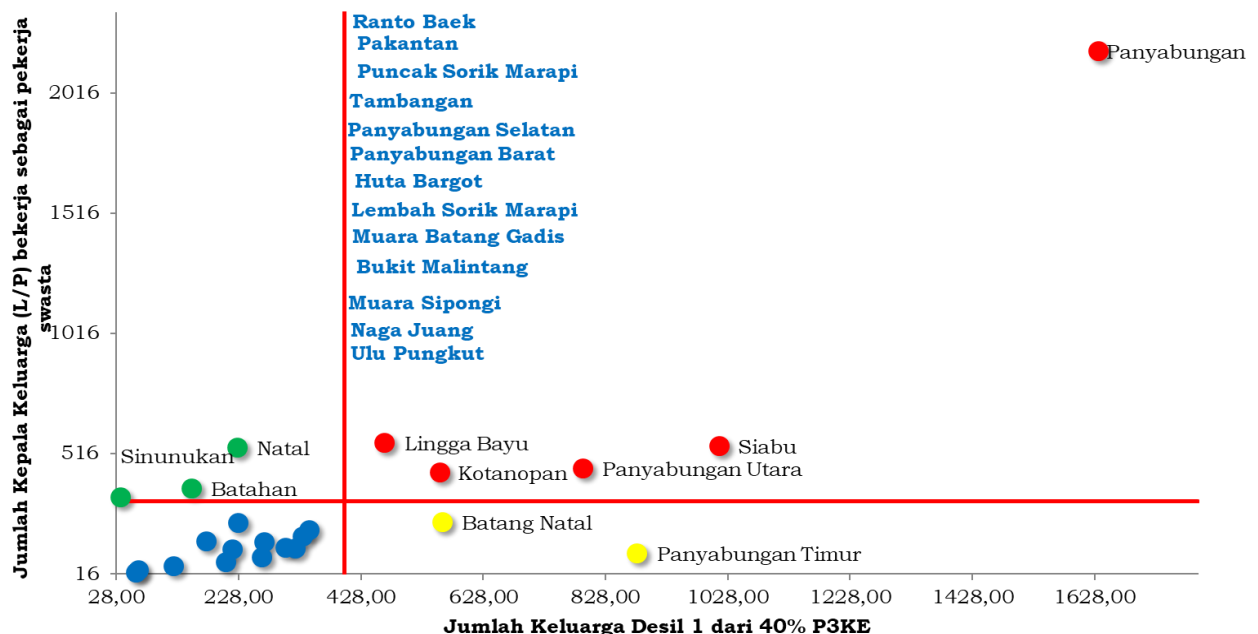


Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Kotanopan, dan Kecamatan Panyabungan Utara
Prioritas 2	Kecamatan Siabu, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabungan Timur
Prioritas 3	Kecamatan Natal dan Kecamatan Huta Bargout
Prioritas 4	Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Batahan, Kecamatan Bukit Melintang dan Kecamatan Lembah Sorik Marapi

5.6.4. Kuadran wilayah prioritas keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan jumlah kepala keluarga bekerja pekerja swasta

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 dari 40% P3KE dan Jumlah Kepala Keluarga (L/P) Bekerja sebagai pekerja swasta Kabupaten Mandailing Natal 2024

Sumber: P3KE



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan jumlah kepala keluarga (L/P) bekerja sebagai pekerja swasta didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

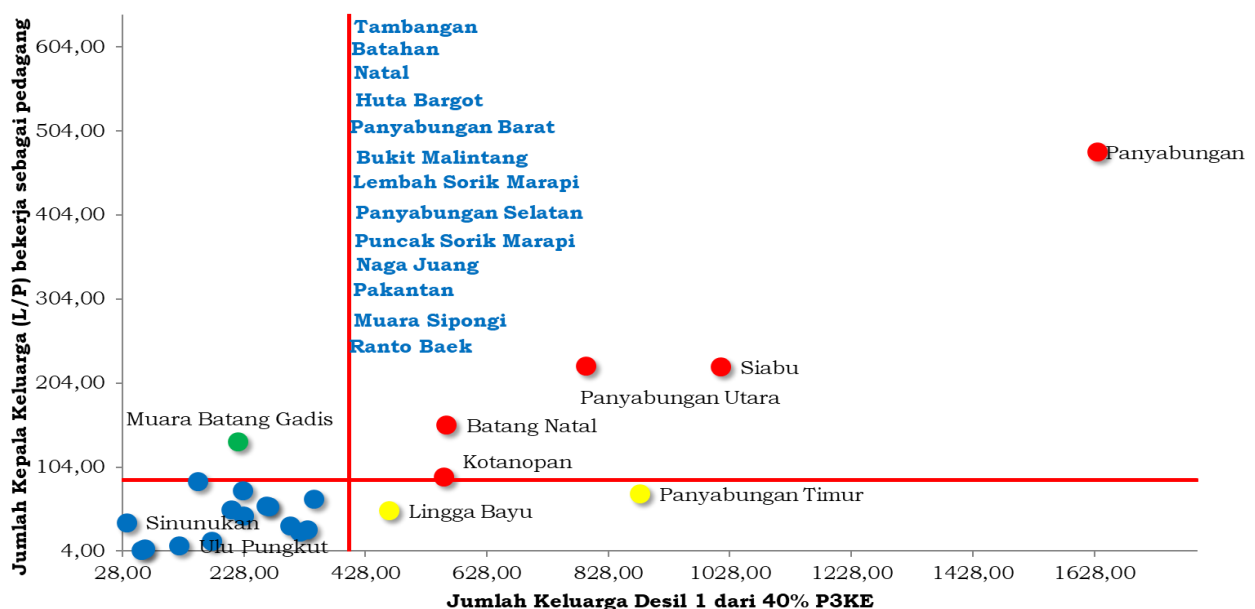


Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Siabu dan Kecamatan Lingga Bayu
Prioritas 2	Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabungan Timur
Prioritas 3	Kecamatan Natal, Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Batahan
Prioritas 4	Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Huta Bargout, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Bukit Melintang dan Kecamatan Lembah Sorik Marapi

5.6.5. Kuadran wilayah prioritas keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan jumlah kepala keluarga bekerja pedagang

Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 dari 40% P3KE dan Jumlah Kepala Keluarga (L/P) bekerja sebagai pedagang Kabupaten Mandailing Natal 2024

Sumber: P3KE



Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara keluarga desil 1 dari 40% P3KE dan jumlah kepala keluarga (L/P) bekerja sebagai pedagang didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Siabu dan Kecamatan Batang Natal
Prioritas 2	Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan Panyabungan Timur
Prioritas 3	Kecamatan Muara Batang Gadis
Prioritas 4	Kecamatan Natal, Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Batahan, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Bukit Melintang dan Kecamatan Lembah Sorik Marapi